



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3. Gambaran Umum Daerah	6
1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	11
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	13
2.1. Ekonomi Makro	13
2.2. Kebijakan Keuangan	16
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD	19
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	23
3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan	23
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah Ditetapkan	25
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	27
4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah	28
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.3. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	32
4.5. Kebijakan Akuntansi Pokok	33
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	49
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	49
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	100
5.3. Neraca	102
5.4. Laporan Operasional	194
5.5. Laporan Arus Kas	240
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	250
BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN	261
6.1. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	261
6.2. Hal-hal lainnya	264
BAB VI PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I.	Rekapitulasi Belanja Hibah Tahun 2025
Lampiran	II.	Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025
Lampiran	III.	Rekapitulasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025
Lampiran	IV. a	Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (ADD) Tahun 2025
Lampiran	IV.b	Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (DD) Tahun 2025
Lampiran	V.	Rekapitulasi Saldo Kas Dana BOSP Tahun 2025
Lampiran	VI.	Pemuktahiran Data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 Tahun 2025
Lampiran	VII.	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025
Lampiran	VIII.	Laporan Keuangan BUMD Tahun Buku 2025
Lampiran	IX.	Daftar Properti Investasi Tahun 2025
Lampiran	X.	Rekapitulasi Pembayaran Utang PFK BLUD Tahun 2025
Lampiran	XI.	Saldo Deposit Pajak (Coretax) Tahun 2025
Lampiran	XII.	Rincian Aset yang dihapus Tahun 2025





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bima menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025.

Pemerintah Kabupaten Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antar Generasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima secara umum menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bima Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (2) penyajian laporan keuangan terdiri atas: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan.
- 2) Belanja.
- 3) Transfer.
- 4) Surplus/defisit.
- 5) Pembiayaan.
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan secara komparatif dengan periode pos-pos sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal (saldo Tahun sebelumnya).





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun berjalan.
 - 4) Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya.
 - 5) Lain-lain.
 - 6) Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan.
3. Neraca
- Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:
- 1) Kas dan Setara Kas.
 - 2) Investasi Jangka Pendek.
 - 3) Piutang Pajak dan Bukan Pajak.
 - 4) Persediaan.
 - 5) Investasi Jangka Panjang.
 - 6) Aset Tetap.
 - 7) Kewajiban Jangka Pendek.
 - 8) Kewajiban Jangka Panjang.
 - 9) Ekuitas Dana.
4. Laporan Operasional (LO)
- Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dalam penyajian yang wajar secara komparatif.
- Laporan Operasional menjelaskan lebih lanjut Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu Tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci dan angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Operasional sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:
- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional.
 - 2) Beban dari kegiatan operasional.
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional.
 - 4) Kegiatan Non Operasional.
 - 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa.
 - 6) Pos luar biasa.
 - 7) Surplus/defisit-LO.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Ekuitas Awal.
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama Tahun pelaporan.
 - 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan, daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 103);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 Nomor 3);
 23. Peraturan Bupati Bima Nomor 52 Tahun 2024 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Nomor 52);
 24. Peraturan Bupati Bima Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 Nomor 51);
 25. Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 Nomor 24); dan
 26. Peraturan Bupati Bima Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima.

1.3. Gambaran Umum Daerah

1. Geografis dan Iklim

1) Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 4.389,40 Km² dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km² dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km². Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km² atau 29,26% dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km².

Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores



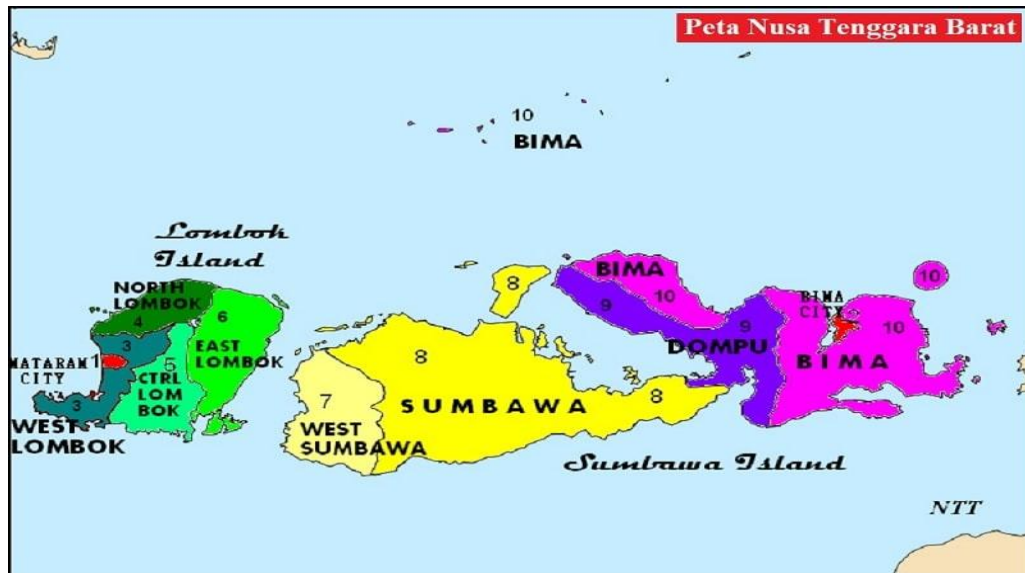


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Peta wilayah Kabupaten Bima sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Bima



2) Luas Wilayah

Berdasarkan letak geografis, wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari delapan Kabupaten dan dua Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Woha. Secara geografis terletak pada:

- Barat – Timur : $118^{\circ}44' - 119^{\circ}22'$ Bujur Timur
- Utara – Selatan : $08^{\circ}08' - 08^{\circ}57'$ Lintang Selatan

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah perairan laut berdasarkan data yang diukur oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram seluas 3.760,33 Km² dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km². Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km² atau 29,26% dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km².

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan dengan luas wilayah yang bervariasi, 191 desa, 794 Dusun, 1.057 Rukun Warga (RW) dan 2.492 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Tambora merupakan kecamatan paling luas wilayahnya yaitu 62.782 Ha atau sebesar 14,30%, sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya yaitu Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 Ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa.

Jumlah desa pada setiap kecamatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun
di Kabupaten Bima

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah			
	Ha	%	Desa	Dusun	RT	RW
Monta	22.752	5,18	14	51	169	68
Parado	26.129	5,95	5	18	63	23
Bolo	6.693	1,52	14	71	177	73
Madapangga	23.758	5,41	11	42	144	44
Woha	10.557	2,41	15	63	173	80
Belo	4.476	1,02	9	33	126	50
Palibelo	7.158	1,63	12	35	151	61
Wawo	13.229	3,01	9	30	121	48
Langgudu	32.294	7,36	15	59	176	76
Lambitu	6.540	1,49	6	18	47	17
Sape	23.212	5,29	18	70	252	117
Lambu	40.425	9,21	14	40	184	82
Wera	46.532	10,60	14	82	214	103
Ambalawi	18.065	4,12	6	38	119	54
Donggo	12.383	2,82	9	46	125	49
Soromandi	34.166	7,78	7	52	127	61
Sanggar	47.789	10,89	6	22	58	26
Tambora	62.782	14,30	7	24	56	25
Jumlah	438.940	100,00	191	794	2.492	1.057

Sumber: BPS Kabupaten Bima

Penggunaan lahan Kabupaten Bima dengan luas wilayah sebesar 438.940 ha berdasarkan penggunaan lahan terbagi atas kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penggunaan lahan sebagai lahan sawah hanya sebesar 7,85%, sedangkan sisa sebesar 92,15% merupakan lahan bukan sawah, namun demikian lahan bukan sawah juga potensial untuk dikembangkan menjadi lahan sawah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bima didominasi oleh hutan dan tambak, selain itu besarnya Penduduk Bima yang bermata pencaharian sebagai petani juga berdampak pada luasnya penggunaan lahan sawah, tegal/kebun dan ladang/huma. Luas hutan dan lahan lainnya sebesar 393,18 Km² atau mencapai 17,40 persen dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Bima. Adapun rincian penggunaan lahan di Kabupaten Bima sebagai berikut:

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kabupaten Bima Menurut Jenis Kegunaannya

Uraian	Luas/ Km ²
Sawah	469,13
Tegal/Kebun	646,78
Ladang/Huma	262,28
Padang Pengembalaan/Padang Rumput	120,32
Hutan	105,52
Perkebunan Negara/Swasta	99,29
Sementara Tidak Diusahakan	128,21
Lainnya	287,66
Lainnya Bukan Pertanian	139,32

Sumber: BPS Kabupaten Bima





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

3) Topografi Wilayah

Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggian antara 0-477,50 m di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kelompok kemiringan lahan, wilayahnya dapat dikelompokkan atas kelompok lereng 0-2%, 3-15%, 16-40% dan >40%. Pengelompokan kelas kemiringan pada setiap kecamatan sebagaimana disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tinggi Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut
di Kabupaten Bima

Kecamatan	Ibu Kota	Ketinggian di Atas Permukaan Laut (m)
Monta	Tangga	41
Parado	Paradorato	252
Madapangga	Dena	42
Woha	Tente	17
Belo	Cenggu	23
Langgudu	Karumbu	33
Wawo	Maria	391
Sape	Naru	24
Lambu	Sumi	18
Wera	Tawali	57
Ambalawi	Nipa	18
Donggo	O'o	714
Sanggar	Kore	19
Tambora	Labuan Kananga	10
Bolo	Rato	21
Soromandi	Kananta	6
Lambitu	Kuta	634
Palibelo	Teke	31

Sumber: BPS Kabupaten Bima

Tabel 1.4
Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Dirinci per Kecamatan
di Kabupaten Bima

Kecamatan	Luas Wilayah				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16 - 40%	> 40 %	
Monta	3.010	4.200	13.020	7.711	27.941
Parado	1.800	2.500	10.200	3.200	17.700
Bolo	980	2.350	9.000	3.800	16.130
Madapangga	4.593	784	2.364	2.715	10.456
Woha	4.409	4.108	7.698	2.569	18.784
Belo	960	600	5.000	4.200	10.760
Palibelo	68	8.080	14.480	22.851	45.479
Wawo	2.760	7.792	2.272	21.813	34.637
Langgudu	2.500	3.400	6.500	8.100	20.500
Lambitu	1.832	5.700	16.696	23.592	47.820
Sape	150	1.400	10.050	12.100	23.700
Lambu	1.024	12.100	10.172	13.268	36.564
Wera	3.500	16.448	13.405	13.023	46.376





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kecamatan	Luas Wilayah				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16 - 40%	> 40 %	
Ambalawi	1.800	7.100	8.000	1.400	18.300
Donggo	8.100	4.400	8.394	7.457	28.351
Soromandi	1.200	3.900	5.050	15.052	25.202
Sanggar	100	450	1.700	1.140	3.390
Tambora	2.300	400	3.250	900	6.850
Jumlah	41.086	85.712	147.251	164.891	438.940
%	9,36	19,53	33,55	37,57	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bima

Wilayah Kabupaten Bima berdasarkan keadaan topografi wilayah, menyebar pada wilayah datar hingga bergunung. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 71,11% dari luas Kabupaten Bima atau sekitar 312.142 Ha mempunyai bentuk wilayah berbukit hingga bergunung (kemiringan 16->40%). Bentuk wilayah datar (kemiringan 0-2%) hanya sekitar 9,36%, sedang daerah bergelombang (kemiringan 3-15%) sebesar 85.712 Ha (19,53%) dari luas Kabupaten Bima.

4) Kependudukan

Jumlah Penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan per tahun hingga pada Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Bima sebanyak 545.571 orang yang terdiri dari 273.256 orang laki-laki dan 272.315 orang perempuan, dengan rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Bima Tahun 2025

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	16.736	15.460	32.196
5-9	26.888	24.381	51.269
10-14	24.168	22.252	46.420
15-19	24.552	23.281	47.833
20-24	23.424	23.428	46.852
25-29	23.242	23.337	46.579
30-34	20.655	20.435	41.090
35-39	20.416	20.270	40.686
40-44	18.980	19.802	38.782
45-49	16.722	17.976	34.698
50-54	14.624	15.226	29.850
55-59	12.218	13.123	25.341
60-64	9.040	9.498	18.537
65-69	8.525	9.498	18.023
70-74	5.002	5.301	10.303
75+	8.064	8.728	16.792
Jumlah	273.256	272.315	545.571

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2026





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bima Tahun 2025

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
273.256	272.315	545.571

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2026

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2025, diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun,
Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk
dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bima Tahun 2025

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2024-2025 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²	Rasio Jenis Kelamin
Monta	41.889	1,14	7,68	216	99,7
Parado	11.368	1,42	2,08	51	101,8
Bolo	54.456	1,46	9,98	728	99,4
Madapangga	33.125	1,86	6,07	131	98,0
Woha	53.578	1,29	9,82	443	102,6
Belo	29.233	3,38	5,36	487	97,6
Palibelo	30.705	1,42	5,63	453	98,3
Wawo	20.083	1,49	3,68	126	97,8
Langgudu	33.062	0,25	6,06	105	99,0
Lambitu	6.847	-0,15	1,26	122	104,1
Sape	64.415	1,82	11,81	302	100,8
Lambu	43.723	1,42	8,01	109	101,9
Wera	34.934	1,52	6,40	75	101,5
Ambalawi	22.197	1,52	4,07	128	102,5
Donggo	21.146	0,44	3,88	169	96,7
Soromandi	20.867	1,41	3,82	63	102,2
Sanggar	15.037	2,26	2,76	41	102,1
Tambora	8.906	0,86	1,63	14	108,6
Jumlah	545.571	1,46	100,00	129	100,3

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2026

1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Gambaran Umum Daerah
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
 - 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
 - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporaan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Neraca
 - 5.4 Laporan Operasional
 - 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN**
 - 6.1 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
 - 6.2 Hal-hal lainnya
- BAB VII PENUTUP**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah suatu kajian khusus yang digunakan untuk mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Tujuannya untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, merumuskan dan memperbaiki suatu kebijakan ekonomi.

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025 mengacu pada indikator ekonomi makro Pemerintah Daerah tahun berjalan atau tahun sebelumnya, yaitu:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. LPE Kabupaten Bima Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
LPE Kabupaten Bima
Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen (%)	3,22	2,82

Sumber: Kabupaten Bima Dalam Angka 2026

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga di definisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran
Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2024
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Miliar Rupiah	15.612,85	14.756,77

Sumber: Kabupaten Bima Dalam Angka 2026





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

c. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bima dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Tingkat inflasi hanya dihitung pada daerah perkotaan, sehingga tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima.

Tingkat inflasi tahunan Provinsi NTB Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Tingkat Inflasi Tahunan Provinsi NTB
Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2024
Tingkat Inflasi Tahunan	Persen (%)	3,01	1,28

Sumber: BPS Provinsi NTB

d. Pengangguran

Salah satu permasalahan yang di hadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya.

Pada Tahun 2025 angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bima mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024. TPT Tahun 2025 mencapai 2,13%, sedangkan Tahun 2024 sebesar 2,19%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Kabupaten Bima
Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen (%)	2,13	2,19

Sumber: BPS Kabupaten Bima

e. Gini rasio

Indeks Rasio atau Gini Rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Kegunaan Gini rasio ini untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Interpretasinya nilai gini rasio berkisar antara 0 sampai 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

pendapatan antar penduduk. Gini Rasio Kabupaten Bima tahun 2025 dan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Gini Rasio Kabupaten Bima
Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2024
Gini Rasio	Angka	0,16	0,356

Sumber: BPS Kabupaten Bima

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Manfaat IPM antara lain:

- 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- 3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat
- 2) Pengetahuan
- 3) Standar hidup layak

Indikator IPM antara lain:

- 1) Harapan Lama Sekolah (HLS);
- 2) Pengeluaran per Kapita;
- 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan
- 4) Umur Harapan Hidup Saat Lahir.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bima Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bima
Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,97	70,99

Sumber: NTB Satu Data

g. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Data kemiskinan pada Kabupaten Bima Tahun 2025 di uraikan pada tabel berikut ini:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 2.7
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bima
Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2024
Penduduk Miskin	Persen (%)	12,59	13,88

Sumber: BPS Provinsi NTB

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD Kabupaten Bima bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer bersumber Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Selanjutnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada TA 2025, Pendapatan Daerah Kabupaten Bima mengalami peningkatan, baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer maupun yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya untuk mengembangkan strategis intensifikasi penagihan dan melakukan ekstensifikasi/menggali potensi PAD yang ada.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025, adalah sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya dengan menerapkan kebijakan sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) secara konsisten dan berkelanjutan.
 - 2) Melakukan pembenahan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
 - 3) Mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
 - 4) Melakukan revisi Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak relevan lagi.
- b. Kebijakan Pendapatan Transfer:
 - 1) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi terkait pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak, seperti: Bagi Hasil Pertambangan Umum (*royalty*), *landrent* dan bagi hasil perikanan.
 - 2) Melakukan langkah-langkah rekonsiliasi data dan pemetaan potensi terkait dengan dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
 - 3) Meningkatkan upaya-upaya proaktif untuk mendapatkan porsi alokasi dana seperti; dana stimulus fiskal, dana penyesuaian, dana insentif daerah serta dana-dana yang bersifat bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.
- c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
Meningkatkan langkah-langkah koordinatif dan proaktif dengan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan porsi alokasi Hibah.

Pagu anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Pagu Anggaran Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

Uraian	APBD-P TA 2025 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	220.092.202.270,00
Pendapatan Transfer	1.834.998.222.557,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.324.521.293,00

Sumber: Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja dalam APBD Kabupaten Bima TA 2025 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer. Kebijakan Belanja Daerah TA 2025 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan PAD (PBBP2, BPHTB, Retribusi Kesehatan, Kekayaan Daerah, Pendapatan lain-lain).
2. Belanja Pegawai ditetapkan menurun secara proporsional.
3. Belanja diarahkan untuk mencapai target RPJMD khususnya yang memiliki pelayanan minimum.
4. Kebijakan dana desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Kebijakan pembiayaan untuk penguatan PAD dan ekonomi melalui penyertaan modal dan dana bergulir.

Pagu anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bima TA 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Pagu Anggaran Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

Uraian	APBD-P TA 2025 (Rp)
Belanja Operasi	1.620.643.248.454,86
Belanja Modal	181.580.744.245,80
Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00
Belanja Transfer	313.617.446.956,30

Sumber : Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Apabila realisasi APBD mengalami surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal. Sebaliknya apabila realisasi APBD mengalami defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit tersebut.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pagu anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima TA 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

Uraian	APBD-P TA 2025 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	39.926.493.536,96
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00

Sumber : Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi APBD Kabupaten Bima TA 2025 cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya capaian PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja APBD TA 2025 diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA 2025 terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 bahwa pagu anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp2.081.414.946.120,00 dan terealisasi sebesar Rp2.060.940.144.640,12 atau 99,02% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Daerah tersebut dirincikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pagu anggaran PAD ditetapkan sebesar Rp220.092.202.270,00 dan terealisasi sebesar Rp209.559.079.716,12 atau 95,21% dari pagu anggaran yang ditetapkan. PAD tersebut bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pagu anggaran Pajak Daerah TA 2025 ditetapkan sebesar Rp42.085.649.257,00 dan terealisasi sebesar Rp35.786.367.464,91 atau 85,03% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2) Retribusi Daerah

Pagu anggaran Retribusi Daerah TA 2025 ditetapkan sebesar Rp155.006.553.013,00 dan terealisasi sebesar Rp156.436.905.965,9 atau 100,92% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pagu anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 ditetapkan sebesar Rp7.510.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.443.342.308,00 atau 112,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pagu anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 ditetapkan sebesar Rp15.490.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.892.463.977,31 atau 57,41% dari pagu anggaran yang ditetapkan.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 menetapkan pagu anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.834.998.222.557,00 dan terealisasi sebesar Rp1.825.056.543.631,00 atau 99,46% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pagu anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 ditetapkan sebesar Rp1.769.595.187.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.760.720.762.880,00 atau 99,50% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pagu anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 ditetapkan sebesar Rp180.596.441.000,00 dan terealisasi sebesar Rp154.098.266.180,00 atau 85,33% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pagu anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 ditetapkan sebesar Rp65.403.035.557,00 dan terealisasi sebesar Rp64.335.780.751,00 atau 98,37% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 menetapkan pagu anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp26.324.521.293,00 dan terealisasi sebesar Rp26.324.521.293,00 atau 100,00% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dimana pada APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 menetapkan pagu anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.120.341.439.656,96 dan terealisasi sebesar Rp2.032.254.013.530,94 atau 95,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Belanja Daerah tersebut dirincikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 menetapkan pagu anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.620.643.248.454,86 dan terealisasi sebesar Rp1.579.146.679.246,94 atau 97,44% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pagu anggaran Belanja Pegawai TA 2025 ditetapkan sebesar Rp1.083.594.408.101,86 dan terealisasi sebesar Rp1.059.733.779.975,00 atau 97,80% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2) Pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2025 ditetapkan sebesar Rp505.098.630.353,00 dan terealisasi sebesar Rp488.796.577.286,94 atau 96,77% dari pagu yang ditetapkan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- 3) Pagu anggaran Belanja Hibah TA 2025 ditetapkan sebesar Rp31.499.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.165.321.985,00 atau 95,77% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 4) Pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2025 ditetapkan sebesar Rp451.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp451.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 menetapkan pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp181.580.744.245,80 dan terealisasi sebesar Rp89,84 atau 89,84% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pagu anggaran Belanja Modal Tanah TA 2025 ditetapkan sebesar Rp276.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp273.738.000,00 atau 99,00% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
 - 2) Pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 ditetapkan sebesar Rp39.525.733.415,80 dan terealisasi sebesar Rp36.383.268.312,00 atau 92,05% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
 - 3) Pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 ditetapkan sebesar Rp80.385.336.167,00 dan terealisasi sebesar Rp70.165.358.002,00 atau 87,29% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
 - 4) Pagu anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 ditetapkan sebesar Rp53.730.804.468,00 dan terealisasi sebesar Rp48.711.569.675,00 atau 90,66% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
 - 5) Pagu anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 ditetapkan sebesar Rp7.662.370.195,00 dan terealisasi sebesar Rp7.592.776.741,00 atau 99,09% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 menetapkan pagu anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.938.150.000,00 atau 87,51% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2.3.4 Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 menetapkan pagu anggaran Belanja Transfer sebesar Rp313.617.446.956,30 dan terealisasi sebesar Rp286.042.473.554,00 atau 91,21% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Belanja Transfer tersebut dirincikan sebagai berikut:

- a. Pagu anggaran Belanja Bagi Hasil (Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa) TA 2025 ditetapkan sebesar Rp4.271.136.636,30 dan terealisasi sebesar Rp2.983.619.018,00 atau 69,86% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- b. Pagu anggaran Belanja Bagi Hasil (Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa) TA 2025 ditetapkan sebesar





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Rp1.479.691.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.268.581.272,00 atau 85,73% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

- c. Pagu anggaran Belanja Bantuan Keuangan (Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa) TA 2025 ditetapkan Sebesar Rp307.866.618.820,00 dan terealisasi sebesar Rp281.790.273.264,00 atau 91,53% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2.3.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2025 menetapkan pagu anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp39.926.493.536,96 dan terealisasi sebesar Rp39.929.751.363,52 atau 100,01% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ditetapkan sebesar Rp39.926.493.536,96 dan terealisasi sebesar Rp39.926.272.899,52 atau 100,00% dari yang ditetapkan.
 - 2) Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Bima tidak menetapkan pagu anggaran Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah, namun terealisasi sebesar Rp3.478.464,00.
- b. Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2024 menetapkan pagu anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 20,00% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. Secara ringkas, ikhtisar capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas akuntansi/Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-Masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

Perangkat Daerah	PENDAPATAN TA 2025			BELANJA TA 2025		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Sekretariat Daerah	7.570.000.000,00	8.471.342.308,00	111,91	55.998.511.806,00	54.317.415.062,00	97,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	48.659.043.680,00	47.064.218.457,00	96,72
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	16.988.280.571,80	16.691.526.283,00	98,25
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	40.000.000,00	8.500.000,00	21,25	762.914.178.400,14	747.746.722.570,33	98,01
Dinas Kesehatan	56.083.920.907,00	53.006.001.354,09	94,51	306.803.002.238,02	291.567.430.350,86	95,03
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	6.353.476.466,00	6.197.169.462,00	97,54
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000,00	19.962.000,00	399,24	9.017.708.560,00	8.660.822.197,00	96,04
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	6.206.656.222,00	5.804.366.049,00	93,52
Dinas Perhubungan	268.075.000,00	79.540.000,00	29,67	17.536.129.422,00	16.851.788.035,00	96,10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	6.322.781.940,00	6.118.223.477,00	96,76
Dinas Pariwisata	257.000.000,00	29.400.000,00	11,44	7.249.454.042,00	7.131.185.268,00	98,37
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	702.000.000,00	635.140.687,00	90,48	125.508.247.786,00	117.972.721.982,00	94,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	18.406.100.173,00	18.194.821.336,00	98,85
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	4.171.802.578,00	4.021.616.546,00	96,40
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.647.400.000,00	867.500.000,00	52,66	8.073.508.478,00	7.790.609.075,00	96,50
Dinas Pertanian dan Perkebunan	600.000.000,00	93.000.000,00	15,50	70.328.901.029,00	68.706.601.749,00	97,69
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.599.740.000,00	10.520.000,00	0,40	10.728.622.886,00	10.514.633.621,00	98,01
Dinas Lingkungan Hidup	250.000.000,00	191.100.000,00	76,44	11.620.545.717,00	10.746.610.767,00	92,48
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	6.384.321.812,00	6.172.209.157,00	96,68
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	21.677.576.246,00	21.135.518.463,00	97,50
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	4.819.979.672,00	4.678.002.543,00	97,05
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	4.234.799.086,00	3.979.620.939,00	93,97
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.000.000.000,00	1.170.860.000,00	117,09	19.342.010.202,00	18.892.448.740,00	97,68
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.161.720.014,00	3.909.301.041,00	93,93
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	17.854.879.832,00	16.785.355.275,00	94,01
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.238.142.426,00	9.834.320.672,00	96,06
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	6.657.310.550,00	6.057.324.652,00	90,99
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.884.306.160.956,00	1.869.930.855.601,31	99,24	342.942.541.686,00	311.439.724.402,00	90,81





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	PENDAPATAN TA 2025			BELANJA TA 2025		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	42.585.649.257,00	35.836.367.464,91	84,15	6.629.822.694,00	5.987.397.570,00	90,31
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	6.465.954.031,00	5.996.729.989,00	92,74
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	6.423.576.401,00	6.083.815.712,00	94,71
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	5.660.596.218,00	4.620.600.541,00	81,63
Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	1.371.921.900,00	369.847.600,00	26,96
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	83.500.000.000,00	90.590.055.224,81	108,49	127.576.999.456,00	127.153.233.639,00	99,67
Kecamatan Sape	0,00	0,00	0,00	1.916.434.277,00	1.697.510.136,00	88,58
Kecamatan Bolo	0,00	0,00	0,00	2.479.215.662,00	2.388.997.381,00	96,36
Kecamatan Woha	0,00	0,00	0,00	2.496.127.444,00	2.341.886.619,00	93,82
Kecamatan Lambu	0,00	0,00	0,00	2.129.996.356,00	2.022.643.245,00	94,96
Kecamatan Monta	0,00	0,00	0,00	1.919.239.184,00	1.834.806.190,00	95,60
Kecamatan Wera	0,00	0,00	0,00	1.788.707.262,00	1.709.700.353,00	95,58
Kecamatan Madapangga	0,00	0,00	0,00	2.636.886.283,00	2.503.629.013,00	94,95
Kecamatan Langgudu	0,00	0,00	0,00	1.941.724.434,00	1.841.540.310,00	94,84
Kecamatan Palibelo	0,00	0,00	0,00	1.754.626.228,00	1.657.692.511,00	94,48
Kecamatan Belo	0,00	0,00	0,00	1.534.761.803,00	1.430.659.782,00	93,22
Kecamatan Ambalawi	0,00	0,00	0,00	1.968.992.540,00	1.772.413.832,00	90,02
Kecamatan Donggo	0,00	0,00	0,00	1.676.767.851,00	1.586.488.564,00	94,62
Kecamatan Wawo	0,00	0,00	0,00	1.679.623.286,00	1.573.998.921,00	93,71
Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	1.762.231.934,00	1.645.436.857,00	93,37
Kecamatan Sanggar	0,00	0,00	0,00	2.326.294.834,00	2.203.882.111,00	94,74
Kecamatan Parado	0,00	0,00	0,00	1.637.343.014,00	1.525.889.009,00	93,19
Kecamatan Tambora	0,00	0,00	0,00	2.036.592.044,00	1.958.777.202,00	96,18
Kecamatan Lambitu	0,00	0,00	0,00	1.326.771.000,00	1.246.629.259,00	93,96
Jumlah	2.081.414.946.120,00	2.060.940.144.640,12	99,02	2.120.341.439.656,96	2.032.254.013.530,94	95,85

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025 bahwa pagu anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp2.081.414.946.120,00 dan terealisasi sebesar Rp2.060.940.144.640,12 atau sebesar 99,02% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	220.092.202.270,00	209.559.079.716,12	95,21
Pendapatan Transfer	1.834.998.222.557,00	1.825.056.543.631,00	99,46
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00
Jumlah	2.081.414.946.120,00	2.060.940.144.640,12	99,02

b. Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025 bahwa pagu anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.120.341.439.656,96 dan terealisasi sebesar Rp2.032.254.013.530,94 atau 95,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 3.3
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi	1.620.643.248.454,86	1.579.146.679.246,94	97,44
Belanja Modal	181.580.744.245,80	163.126.710.730,0	89,84
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	3.938.150.000,00	87,51
Belanja Transfer	313.617.446.956,30	286.042.473.554,00	91,81
Jumlah	2.120.341.439.656,96	2.032.254.013.530,94	95,85

c. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Persentase (%)
Penerimaan Pembiayaan	39.926.493.536,96	39.929.751.363,52	100,01
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20,00

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025 mencapai 99,01% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sumber-sumber Pendapatan Daerah yang belum mampu mencapai target sampai dengan akhir TA 2025. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bima, antara lain:

- Kemampuan realisasi Pajak Daerah yang masih sangat lamban terutama Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terwujud secara optimal karena sistem pelaporan yang belum terintegrasi.
- Aparatur pengelola administrasi PAD pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjalankan sistem dan prosedur yang ditetapkan, sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan.
- Sarana dan prasarana penunjang dalam pemungutan PAD, seperti sarana mobilitas, gedung dan bangunan serta sarana lainnya belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut berdampak pada intensitas operasional pemungutan PAD relatif masih rendah dan terbatasnya jangkauan pelayanan dalam pemungutan PAD.
- Belum diterapkannya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh dalam membayar pajak/retribusi daerah. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak/retribusi tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi.
- Tingkat kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam membayar pajak/retribusi daerah relatif masih rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan berbagai upaya dengan menerapkan beberapa solusi kebijakan, antara lain :





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- a. Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga diharapkan realisasi PAD dapat meningkat.
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atas pengelolaan PAD yang bersifat internal maupun eksternal. Upaya tersebut diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan PAD.
- c. Melakukan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis kepada Aparatur pengelola PAD pada Perangkat Daerah secara berkelanjutan serta mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan pengembangan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan dukungan sarana mobilitas untuk kelancaran operasional penagihan pajak/retribusi daerah dan meningkatkan dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana Pasar, Rumah Sakit Umum Daerah dan lainnya dalam upaya meningkatkan realisasi PAD.
- e. Memberikan penghargaan kepada perusahaan, lembaga maupun perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dan memberikan penghargaan kepada Institusi atau petugas yang berprestasi dalam memungut pajak/retribusi daerah. Upaya ini diharapkan agar wajib pajak termotivasi dalam memenuhi kewajibannya. Demikian halnya juga dengan petugas pemungut pajak/retribusi daerah diharapkan termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya.
- f. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi daerah untuk lebih patuh/taat dalam membayar kewajibannya.
- g. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek pajak baru, sehingga jumlah obyek dan subyek pajak diharapkan dapat meningkat/bertambah.
- h. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek pajak, sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- i. Mengembangkan teknologi informasi pelayanan pajak/retribusi daerah secara *online*, meliputi pendataan, pemantauan transaksi obyek pajak/retribusi dan pembayaran pajak/retribusi secara non tunai.





BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Sementara secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bima TA 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bima Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima. Periode Akuntansi yang digunakan dalam menyajikan informasi keuangan adalah berdasarkan Tahun Anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Bima secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima TA 2025 disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan data-data keuangan lainnya.

SKPKD merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pada TA 2025 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perangkat Daerah merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pariwisata
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Pertanian dan Perkebunan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
30. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33. Badan Riset dan Inovasi Daerah





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

34. Rumah Sakit Umum Daerah
35. Kecamatan Sape
36. Kecamatan Bolo
37. Kecamatan Woha
38. Kecamatan Lambu
39. Kecamatan Monta
40. Kecamatan Wera
41. Kecamatan Madapangga
42. Kecamatan Langgudu
43. Kecamatan Palibelo
44. Kecamatan Belo
45. Kecamatan Ambalawi
46. Kecamatan Donggo
47. Kecamatan Wawo
48. Kecamatan Soromandi
49. Kecamatan Sanggar
50. Kecamatan Parado
51. Kecamatan Tambora
52. Kecamatan Lambitu

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 yaitu *cash basis* dan *accrual basis*, dimana *cash basis* digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja-LRA, dan Pembiayaan-LRA. Sementara *accrual basis* digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Cash basis digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas yang memiliki arti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Sementara, *accrual basis* digunakan dalam penyusunan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memiliki arti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi/saat kejadian/saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pendapatan dalam Laporan Operasional diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah/entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu asumsi dasar dalam penyusunan LKPD adalah keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), disamping kemandirian dan kesinambungan





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

entitas. Hal ini berarti bahwa LKPD Kabupaten Bima harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran berhubungan dengan pengakuan suatu kejadian dan nilai dalam catatan akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan dalam LKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar kas yang diterima di Kas Daerah atas pendapatan atau penerimaan pembiayaan tersebut. Sementara pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

2. Pengukuran Pos-pos Laporan Operasional

Pengukuran Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment system* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi SKPDKB, SKPDKBT serta SKPDN.
- Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi SKP/SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Bima.
- Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Kabupaten Bima.
- Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengukuran beban yaitu sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila tidak ada harga perolehan, maka beban diukur berdasarkan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

3. Pengukuran Pos-pos Neraca

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar:
 - 1) Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - 2) Nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 3) Nilai nominal, apabila Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar:
 - 1) Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - 2) Biaya perolehan apabila investasi jangka panjang yang bersifat permanen.
 - 3) Nilai Perolehan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan.
 - 4) Nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
 - 5) Biaya pembangunan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah.
 - 6) Harga perolehan, apabila investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.
- f. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.
- g. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- h. Properti Investasi dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk di dalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- i. Aset lainnya dicatat sebesar:
 - 1) Nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan untuk piutang dari tagihan penjualan angsuran. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 2) Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi.
 - 3) Harga perolehan untuk aset tak berwujud.
 - 4) Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian untuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dan nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan untuk aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam pengakuan, pengukuran maupun penyajian laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bima maupun Perangkat Daerah dibawahnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian untuk Laporan Realisasi Anggaran terdapat sedikit perbedaan klasifikasi rekening yang digunakan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu diperlukan konversi/*mapping* dari rekening Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ke rekening SAP.

Sesuai dengan SAP bahwa dalam penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Laporan Arus Kas, Pemerintah Kabupaten Bima menggunakan *cash basis* yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah. Besarnya pendapatan dan belanja yang diakui adalah sebesar nilai pertanggungjawaban yang disahkan oleh SKPKD.



4.5 Kebijakan Akuntansi Pokok

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- c. Saldo Anggaran Lebih adalah kumpulan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan OPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
 - 2) Diterima di OPD.
 - 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
 - 4) Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
 - 5) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di OPD pemungut dan penyetor.
 - 6) Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga.
 - 7) Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga.
 - 8) Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kabupaten Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui sebagai Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
 - 9) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA.
 - 10) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama.
 - 11) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga.

12) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

13) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

d. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

e. Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna Anggaran dan klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

f. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

g. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

h. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

i. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).

j. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

k. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

l. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

- m. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - 3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - 4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.
- n. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3. Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- h. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- i. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir,





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

- j. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- k. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- l. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

4. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- d. Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- e. Pendapatan-LO pada OPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- f. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bima yang disahkan dengan penetapan.
- g. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- h. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

5. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- d. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- e. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- f. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya).

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi OPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK OPD.

2) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- 3) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat: diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri atas: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan persediaan bahan makanan pokok.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

b. Aset Non Lancar

- 1) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%; metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat nonpermanen.

Investasi jangka panjang terdiri dari:

- (a) Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

Persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan pada tingkat kolektibilitas. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- (b) Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari:

(a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

(b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.

(b) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.

(c) Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

(d) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

(e) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(f) Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara Pemerintah sebagai pemberi konsesi dan mitra, dimana:

- mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- disediakan oleh mitra, yang:
 - ✓ dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - ✓ merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - ✓ merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

✓ merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pemerintah mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- Pemerintah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- Pemerintah mengendalikan yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf a angka 1 terpenuhi. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pengukuran Aset Konsesi Jasa:

- Pemerintah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.
- Pemerintah melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipaskannya tersebut sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki Pemerintah memenuhi kondisi persyaratan.
- Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- Setelah pengukuran awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
- Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

3) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

(a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

(b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Termasuk dalam kategori Properti Investasi antara lain:

(a) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka Panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

(c) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

(d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

(e) Properti dalam proses Pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

(a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Properti Investasi:

(a) Pengukuran Saat Awal Perolehan

➤ Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk di dalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

➤ Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

➤ Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

✓ Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

✓ Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ✓ Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- (b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
 - Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
 - Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.
 - Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
 - Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
 - Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- (c) Penyajian Properti Investasi:
 - Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi merupakan bagian dari akun investasi.
 - Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) properti investasi;
- Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - ✓ penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - ✓ penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - ✓ pelepasan;
 - ✓ penyusutan;
 - ✓ alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - ✓ perubahan lain.
- Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - ✓ uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - ✓ dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - ✓ tanggal efektif penilaian kembali;
 - ✓ nilai tercatat sebelum revaluasi
 - ✓ jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - ✓ nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentu-an nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen.
- Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - ✓ Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - ✓ Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - ✓ Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

4) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

5) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

(a) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.

Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(b) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

(c) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

(d) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

(e) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tak berwujud adalah 20 tahun sejak perolehan ATB.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

- (f) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.

Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.

- (g) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek, antara lain terdiri dari : utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal laporan.

Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di OPD.

Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sementara itu, ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan OPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima Tahun 2025 adalah konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi. Penjelasan terhadap pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Bima yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

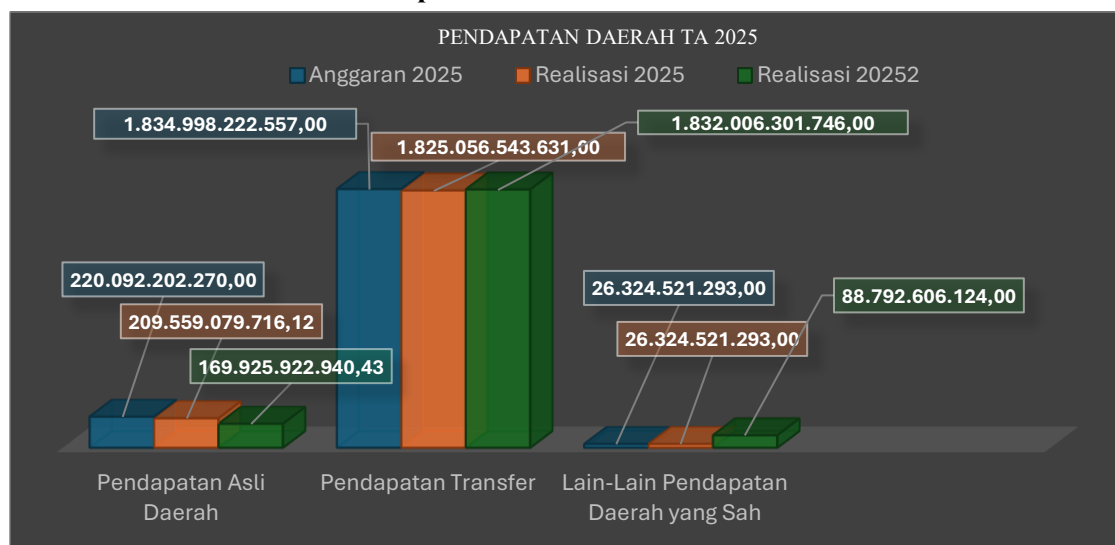
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	220.092.202.270,00	209.559.079.716,12	95,21	169.925.922.940,43
Pendapatan Transfer	1.834.998.222.557,00	1.825.056.543.631,00	99,46	1.832.006.301.746,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	88.792.606.124,00
Jumlah	2.081.414.946.120,00	2.060.940.144.640,12	99,02	2.090.724.830.810,43

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini

Diagram 5.1
Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	42.085.649.257,00	35.786.367.464,91	85,03	16.684.150.219,55
Pendapatan Retribusi Daerah	155.006.553.013,00	156.436.905.965,90	100,92	17.699.305.005,00
Pendapatan Hasil Pengl Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.510.000.000,00	8.443.342.308,00	112,43	8.152.466.371,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.490.000.000,00	8.892.463.977,31	57,41	127.390.001.344,88
Jumlah	220.092.202.270,00	209.559.079.716,12	95,21	169.925.922.940,43

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan	750.000.000,00	1.177.202.745,77	156,96	1.027.282.105,55
PBJT Perhotelan	750.000.000,00	1.177.202.745,77	156,96	1.027.282.105,55
PBJT Perhotelan	750.000.000,00	1.177.202.745,77	156,96	1.027.282.105,55
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau minuman	250.000.000,00	317.312.784,00	126,93	191.115.916,00
PBJT Restoran	200.000.000,00	278.692.284,00	139,35	130.241.581,00
PBJT Restoran	200.000.000,00	278.692.284,00	139,35	130.241.581,00
PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering	50.000.000,00	38.620.500,00	77,24	60.874.335,00
PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering	50.000.000,00	38.620.500,00	77,24	60.874.335,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik	13.000.000.000,00	12.909.014.222,00	99,30	11.578.186.895,00
PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain	13.000.000.000,00	12.909.014.222,00	99,30	11.578.186.895,00
PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain	13.000.000.000,00	12.909.014.222,00	99,30	11.578.186.895,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir	150.000.000,00	49.808.400,00	33,21	46.815.200,00
PBJT penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir	150.000.000,00	49.808.400,00	33,21	46.815.200,00
PBJT penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir	150.000.000,00	49.808.400,00	33,21	46.815.200,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa Kesenian dan Hiburan	7.000.000,00	4.450.000,00	63,75	3.350.000,00
PBJT Pagelaran Kesenian /Musik /Tari / Busana	7.000.000,00	4.450.000,00	63,75	3.350.000,00
PBJT Pagelaran Kesenian /Musik /Tari / Busana	7.000.000,00	4.450.000,00	63,75	3.350.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Reklame	151.000.000,00	169.468.000,00	112,23	213.384.600,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	90.000.000,00	78.547.000,00	87,27	100.986.600,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	90.000.000,00	78.547.000,00	87,27	100.986.600,00
Pajak Reklame Kain	60.000.000,00	90.921.000,00	151,54	112.398.000,00
Pajak Reklame Kain	60.000.000,00	90.921.000,00	151,54	112.398.000,00
Pajak Air Tanah	75.000.000,00	59.980.000,00	79,97	59.580.000,00
Pajak Air Tanah	75.000.000,00	59.980.000,00	79,97	59.580.000,00
Pajak Air Tanah	75.000.000,00	59.980.000,00	79,97	59.580.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	6.590.000,00	43,93	3.524.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	6.590.000,00	43,93	3.524.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	6.590.000,00	43,93	3.524.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	291.413.070,14	29,14	271.985.000,00
Pajak Pasir dan Kerikil	651.019.000,00	137.875.209,50	21,18	94.443.000,00
Pajak Pasir dan Kerikil	651.019.000,00	137.875.209,50	21,18	94.443.000,00
Pajak Tanah Liat	135.048.000,00	69.663.288,64	51,58	54.289.000,00
Pajak Tanah Liat	135.048.000,00	69.663.288,64	51,58	54.289.000,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	213.933.000,00	83.874.572,00	39,21	123.253.000,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	213.933.000,00	83.874.572,00	39,21	123.253.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.000.000.000,00	2.363.624.144,00	47,27	2.301.037.953,00
PBB-P2	5.000.000.000,00	2.363.624.144,00	47,27	2.301.037.953,00
PBB-P2	5.000.000.000,00	2.363.624.144,00	47,27	2.301.037.953,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00	1.666.548.400,00	111,10	987.888.550,00
BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00	1.666.548.400,00	111,10	987.888.550,00
BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00	1.666.548.400,00	111,10	987.888.550,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.416.884.391,00	10.528.738.682,00	92,22	0,00
Opsen PKB	11.416.884.391,00	10.528.738.682,00	92,22	0,00
Opsen PKB	11.416.884.391,00	10.528.738.682,00	92,22	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.770.764.866,00	6.242.217.017,00	71,17	0,00
Opsen BBNKB	8.770.764.866,00	6.242.217.017,00	71,17	0,00
Opsen BBNKB	8.770.764.866,00	6.242.217.017,00	71,17	0,00
Jumlah	42.085.649.257,00	35.786.367.464,91	85,03	16.684.150.219,55

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan terealisasi sebesar Rp1.177.202.745,77 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp149.920.640,22 (14,59%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengunjung pada 2 (dua) hotel di Kabupaten Bima yaitu hotel Kalimaya Resort dan Hotel Tenggara Point Resort. Sebagai wajib pajak, kedua hotel tersebut secara rutin melaporkan kewajibannya sebagai *self assessment*.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- b. PBJT Makanan dan atau Minuman terealisasi sebesar Rp317.312.784,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp126.196.868,00 (66,03%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh Hotel Kalimaya mencatat terpisah antara tempat penginapan dan restorannya serta potensi-potensi baru dari beberapa pelaku usaha sebagai wajib pajak.
- c. PBJT Tenaga Listrik terealisasi sebesar Rp12.909.014.222,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp1.330.827.327,00 (11,49%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh jumlah KWH terpakai mengalami peningkatan dan banyak objek pajak dari Perusahaan Tambak Udang di tahun 2025 yang menggunakan tenaga Listrik.
- d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir terealisasi sebesar Rp49.808.400,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp2.993.200,00 (6,39%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh cukup meningkatnya realisasi tempat parkir di Bandara Muhamad Salahudin Bima. Tempat parkir tersebut dikelola oleh Koperasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bima.
- e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa Kesenian dan Hiburan terealisasi sebesar Rp4.450.000,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp1.100.000,00 (32,84%) dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh relatif meningkatnya pertunjukan dan hiburan yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bima.
- f. Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp169.468.000,00 yang melampaui anggaran yang ditetapkan. Namun mengalami penurunan senilai Rp43.916.600,00 (20,58%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh berkurangnya jumlah papan reklame yang terpasang di berbagai jenis reklame, baik itu papan Billboard, Videotron, Megatron maupun pajak reklame Kain.
- g. Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp59.980.000,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp400.000,00 (0,67%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh jumlah potensi Pajak Air Tanah yang tidak bertambah dan masih kurang kooperatifnya wajib pajak memberikan laporan jumlah debit air yang terpakai, sedangkan untuk melakukan pendataan ulang terkait debit air terpakai, Pemerintah Kabupaten Bima belum memiliki alat yang memadai.
- h. Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp6.590.000,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp3.066.000,00 (87,00%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan jumlah omset yang diperoleh sebagai *Sef Assesment*.
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan lainnya terealisasi sebesar Rp291.413.070,14 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp19.428.070,14 (7,14%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh perusahaan yang beraktivitas dalam pengambilan kerikil, pasir, tanah liat, mineral bukan logam dan batuan lainnya sudah cukup banyak memiliki izin.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) terealisasi sebesar Rp2.194.349.205,00 dari anggaran yang mengalami penurunan senilai Rp106.688.748,00 (4,64%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh kurangnya kesadaran Wajib Pajak, Juru Pungut Desa yang ditunjuk kurang intensif melakukan penagihan, masih terdapat SPPT ganda, SPPT Tanpa Objek dan SPPT Tanah Jaminan Kaur Desa yang belum teridentifikasi dengan pelepasan aset tanah jaminan, sehingga menyebabkan sulit tertagih.
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp1.835.823.339,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp847.934.789,00 (85,83%) dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan pelayanan, pengajuan pemindahan hak dan pemberian hak baru yang langsung diproses secara terukur dan banyaknya jumlah wajib pajak yang melakukan pengalihan hak, baik dari Jual Beli, Hibah maupun Turun Waris.
- l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun 2025 menjadi target baru pada Pemerintah Kabupaten Bima karena adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Bima dan





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Pemerintahan Provinsi NTB. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar 92,22% dari target anggaran yang ditetapkan.
- m. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tahun 2025 juga menjadi target baru pada Pemerintah Kabupaten Bima karena adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Bima dan Pemerintahan Provinsi NTB. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar 71,17% dari target anggaran yang ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil temuan BPK terdapat Pendapatan PBB-P2 senilai Rp12.923.500,00 belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Pada bulan Mei 2026 (sebelum LK Audited terbit) telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah. Atas hal ini, akan dicatat sebagai Pendapatan di Tahun 2026 sesuai dengan dokumen STS.
 3. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4
Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	141.599.320.907,00	144.691.956.578,90	102,18	7.754.275.035,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	139.583.920.907,00	143.596.056.578,90	102,87	6.411.719.535,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	45.083.920.907,00	39.768.262.481,01	88,21	2.318.207.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	94.500.000.000,00	103.827.794.097,89	109,87	4.093.512.535,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	250.000.000,00	191.100.000,00	76,44	181.000.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.000.000,00	191.100.000,00	76,44	181.000.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	118.000.000,00	37.300.000,00	31,61	30.653.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	118.000.000,00	37.300.000,00	31,61	30.653.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	1.647.400.000,00	867.500.000,00	52,66	1.130.902.500,00
Retribusi Kios	1.647.400.000,00	867.500.000,00	63,16	1.130.902.500,00
Retribusi Jasa Usaha	12.902.232.106,00	11.182.696.700,00	86,67	9.377.639.915,00
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.404.917.106,00	10.890.396.700,00	95,49	9.327.939.915,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	7.934.799.915,00
Retribusi Penyewaan Tanah	9.993.417.106,00	9.658.326.700,00	96,65	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	768.000.000,00	693.500.000,00	90,30	634.680.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	402.000.000,00	507.200.000,00	126,17	491.825.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	89.500.000,00	9.520.000,00	10,64	9.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	152.000.000,00	21.850.000,00	14,38	34.800.000,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	240.000,00	0,00	0,00	0,00
• Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	5.570.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	5.570.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	130.075.000,00	35.030.000,00	26,93	24.420.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	130.075.000,00	35.030.000,00	26,93	24.420.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	84.660.000,00	76,96	105.460.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	84.660.000,00	76,96	105.460.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	137.000.000,00	22.400.000,00	16,35	19.355.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	137.000.000,00	22.400.000,00	16,35	19.355.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.000.000,00	93.000.000,00	15,50	114.500.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	600.000.000,00	93.000.000,00	15,50	114.500.000,00
• Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	20.000.000,00	7.210.000,00	36,05	2.730.000,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	20.000.000,00	7.210.000,00	36,05	2.730.000,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	500.000.000,00	50.000.000,00	10,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	500.000.000,00	50.000.000,00	10,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	505.000.000,00	562.252.687,00	111,34	567.390.055,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	542.290.687,00	108,46	564.690.055,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	542.290.687,00	108,46	564.690.055,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.000.000,00	19.962.000,00	399,24	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.000.000,00	19.962.000,00	399,24	0,00
Jumlah	155.006.553.013,00	156.436.905.965,90	100,92	17.699.305.005,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp143.596.056.578,90 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp137.184.337.043,90 (2139,59%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh meningkatnya pelayanan dan di dukung oleh fasilitas alat Kesehatan yang cukup memadai. Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 merupakan penerimaan kapitasi dari BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan dari pasien umum serta pasien dengan asuransi.
- 2) Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp191.100.000,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp10.100.000,00 (5,58%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh cukupnya armada angkutan sampah, meskipun belum menjangkau pada 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp37.300.000,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp6.647.000,00 (21,68%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh beberapa pelayanan parkir mulai diberlakukan pungutan seperti parkir di sepanjang jalan pantai kalaki.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp867.500.000,00 dari anggaran yang mengalami penurunan senilai Rp263.402.500,00 (23,29%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh pasar potensial penyumbang retribusi terbesar di wilayah Kecamatan Bolo secara aturan belum bisa dikenakan tarif retribusi karena belum adanya berita acara serah terima dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Daerah atas pembagunan pasar Sila Bolo oleh Pemerintah Pusat, sehingga pengenaan karcis pasar maupun sewa kios belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- 5) Berdasarkan hasil temuan BPK terdapat Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar senilai Rp172.976.000,00 yang per 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Kas Daerah dan telah didukung dengan SKTJM. Pada bulan Mei 2026 (sebelum LK Audited terbit) telah dilakukan penyetoran senilai Rp85.500.000,00, sehingga masih terdapat sisa senilai Rp87.476.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Atas hal ini, akan dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar di Tahun 2026 sesuai dengan tanggal penerimaan di Kas Daerah.
- b. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp10.890.396.700,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp1.562.456.785,00 (16,75%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh meningkatnya pemakaian Bangunan Gedung dan Laboratorium oleh masyarakat serta meningkatnya capaian realisasi sewa lelang tanah tahunan.
 - 2) Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi Rp0,00 dari anggaran yang disebabkan oleh wajib retribusi tidak menggunakan fasilitas tempat pelelangan yang telah disediakan oleh Pemerintah.
 - 3) Retribusi Terminal terealisasi Rp0,00 dari anggaran yang disebabkan oleh jumlah Bus yang beroperasi berkurang karena menurunnya jumlah penumpang.
 - 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp35.030.000,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp10.610.000,00 (43,45%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh beberapa tempat khusus parkir mulai dimaksimalkan pengelolaannya, antara lain parkir Taman Kalaki panda Kecamatan Palibelo, Oi Marai kecamatan Tambora, Oi Tampiro Kecamatan Sanggar dan Lariti Kecamatan Lambu.
 - 5) Retribusi Rumah Potong Hewan Daerah terealisasi sebesar Rp84.660.000,00 dari anggaran yang mengalami penurunan senilai Rp20.800.000,00 (19,72%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh kurang memadainya alat dan laboratorium untuk pemeriksaan virus hewan, insentif untuk dokter hewan dan petugas pelayanan pada pos pemeriksaan.
 - 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp22.400.000,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp3.045.000,00 (15,73%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh semakin meningkatnya pemanfaatan GOR Panda oleh masyarakat.
 - 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp93.000.000,00 dari anggaran yang mengalami penurunan senilai Rp21.500.000,00 (18,78%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh rendahnya capaian beberapa hasil penjualan benih padi, bibit tomat, kelapa dan cabai di beberapa Balai Benih Utama, BPP dan KBD pada Dinas Pertanian Kabupaten Bima.
 - 8) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp7.210.000,00 dari anggaran yang mengalami peningkatan senilai Rp4.480.000,00 (164,10%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh semakin meningkatnya minat masyarakat menggunakan jasa kepelabuhanan.
 - 9) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 dari anggaran yang disebabkan oleh populasi burung walet mulai meningkat dan rutin dilakukan pemeliharaan pada goa sebagai lokasi sarang walet.
 - 10) Berdasarkan hasil temuan BPK terdapat pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang per 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Kas Daerah. Atas hal tersebut, akan diakui sebagai Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Tahun 2026 sesuai dengan penyetoran yang dilakukan ke Kas Daerah. Rincian atas hasil temuan tersebut sebagai berikut.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- a) Terdapat penerimaan dari Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak senilai Rp25.120.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Namun pada bulan Mei 2026 (sebelum LK Audited terbit) seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah;
- b) Terdapat penerimaan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penyewaan Gedung Serbaguna Paruga Nae senilai Rp19.250.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Namun pada bulan Mei 2026 (sebelum LK Audited terbit) seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
 - 1) Retribusi Izin Usaha Perikanan pada tahun 2025 tidak ditargetkan dalam APBD karena:
 - Salah satu pabrik es yang berlokasi di Desa Waworada Kecamatan Langgudu sudah tidak beroperasi karena rusak berat;
 - Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Sape sudah tidak beroperasi; dan
 - Adanya kewenangan pengalihan perizinan usaha oleh Pemerintah Provinsi NTB yang 0 sampai dengan 12 mil laut sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perjanjian Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp542.290.687,00 dari anggaran yang mengalami penurunan senilai Rp22.399.368,00 (3,99%) dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh menurunnya kepengurusan penerbitan persetujuan Bangunan Gedung oleh masyarakat.
 - 3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terealisasi sebesar Rp19.962.000,00 dari anggaran yang disebabkan oleh mulai meningkatnya dana kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing di wilayah Kabupaten Bima.
2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun rincian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Tahun 2025 yang merupakan penerimaan kapitasi dari BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan dari pasien umum serta pasien dengan asuransi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas Tahun 2025

Uraian	Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025	Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
RSUD Bima	90.590.055.224,81	3.518.654.435,00
RSUD Sondosia	13.247.523.873,08	574.858.100,00
Puskesmas Belo	1.797.762.004,99	71.830.000,00
Puskesmas Bolo	3.869.644.241,00	241.745.000,00
Puskesmas Langgudu	2.093.416.997,65	109.065.000,00
Puskesmas Langgudu Timur	490.570.884,03	41.800.000,00
Puskesmas Madapangga	2.140.804.123,00	195.199.000,00
Puskesmas Monta	3.030.510.902,00	157.502.000,00
Puskesmas Ngali	890.004.498,26	81.916.000,00
Puskesmas Pai	437.025.231,81	15.460.000,00
Puskesmas Palibelo	2.415.309.571,00	78.749.000,00
Puskesmas Sanggar	1.283.819.205,00	46.019.000,00
Puskesmas Sape	5.195.685.902,00	457.204.000,00
Puskesmas Wawo	1.719.562.559,02	58.220.000,00
Puskesmas Wera	2.236.138.353,31	120.805.000,00
Puskesmas Woha	3.822.437.901,00	225.697.000,00
Puskesmas Tambora	461.848.803,16	10.400.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025	Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Puskesmas Ambalawi	1.328.195.892,43	38.677.500,00
Puskesmas Parado	805.697.180,17	36.456.000,00
Puskesmas Donggo	1.297.788.792,71	60.857.500,00
Puskesmas Lambu	2.547.613.894,00	150.585.000,00
Puskesmas Soromandi	1.396.662.579,48	106.865.000,00
Puskesmas Lambitu	497.977.964,99	13.155.000,00
Jumlah	143.596.056.578,09	6.411.719.535,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024. Dimana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 bersumber dari Pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp7.510.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.443.342.308,00 atau 112,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp8.152.466.371,00, maka realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp290.875.937,00 atau 3,45%.

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Adanya Peningkatan Laba yang diperoleh oleh BUMD pada tahun 2025; dan
 - Pembagian Dividen Tahun 2025 dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal keseluruhan, baik yang tercatat sebagai modal disetor maupun yang tercatat sebagai dana setoran modal.
- Rincian penerimaan atas pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR NTB)	700.000.000,00	765.567.969,00	109,37	640.968.843,00
PT Bank NTB Syariah	6.500.000.000,00	7.554.914.748,00	116,23	7.424.517.967,00
PT BPR Pesisir Akbar	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PT Jamkrida NTB Bersaing	60.000.000,00	107.232.991,00	178,72	86.979.561,00
PT Dana Sanggar Mandiri	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Perumda Bima Karya Sejahtera (BKS)	50.000.000,00	15.626.600,00	31,25	0,00
PT Dana Usaha Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
PDAM	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.510.000.000,00	8.443.342.308,00	112,43	8.152.466.371,00

- Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal dari Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR NTB), PT Bank NTB Syariah, PT Jamkrida NTB Bersaing dan Perumda Bima Karya Sejahtera (BKS) diakui berdasarkan:
 - Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR NTB) diakui berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 25 Juni Tahun 2025 Terhadap bagian laba (dividen) Pemerintah Kabupaten Bima telah disetor ke Kas Daerah tanggal 25 Agustus 2025;





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- b. PT Bank NTB Syariah diakui berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 30 Juni 2025 Terhadap bagian laba (dividen) Pemerintah Kabupaten Bima telah disetor ke Kas Daerah tanggal 11 Juli 2025;
- c. PT Jamkrida NTB Bersaing diakui berdasarkan RUPS Tanggal 25 Juni 2025 Terhadap bagian laba (dividen) Pemerintah Kabupaten Bima telah disetor ke Kas Daerah tanggal 9 Juli 2025; dan
- d. Bagian laba (deviden) Pemerintah Kabupaten Bima dari Perumda Bima Karya Sejahtera (BKS) telah disetor ke Kas Daerah tanggal 30 Januari 2025.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	495.000.000,00	1.104.999.500,00	223,23	16.400.000,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	512.507.500,00	128,13	0,00
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400.000.000,00	512.507.500,00	128,13	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	592.492.000,00	623,68	16.400.000,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	95.000.000,00	592.492.000,00	623,68	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.219.360.170,82	73,98	2.308.728.676,30
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	2.216.059.559,91	73,98	2.308.397.645,65
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	2.216.059.559,91	73,98	2.308.397.645,65
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	3.300.610,91	100,00	331.030,65
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	3.300.610,91	100,00	331.030,65
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga	0,00	40.558.908,00	0,00	358.358.851,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	40.558.908,00	0,00	358.358.851,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	40.558.908,00	0,00	358.358.851,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.600.000.000,00	1.763.386.831,18	38,33	1.018.570.851,10
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.600.000.000,00	1.763.386.831,18	38,33	1.018.570.851,10
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.600.000.000,00	1.763.386.831,18	38,33	1.018.570.851,10
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.650.000.000,00	2.500.851.914,53	94,37	1.462.910.751,20





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.650.000.000,00	2.500.851.914,53	94,37	1.462.910.751,20
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.650.000.000,00	2.500.851.914,53	95,90	1.462.910.751,20
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00	4.069.826.337,00
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00	4.069.826.337,00
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00	4.069.826.337,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.625.000.000,00	1.263.306.652,78	27,31	56.374.292,71
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.625.000.000,00	1.263.306.652,78	27,31	56.374.292,71
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.625.000.000,00	1.263.306.652,78	27,31	56.374.292,71
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	92.242.904.575,57
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	91.903.373.407,01
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	91.903.373.407,01
Pendapatan BLUD dari Hibah	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	51.768.000,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	51.768.000,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	0,00	0,00	287.633.168,56
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	281.341.991,51
Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	0,00	0,00	0,00	6.291.177,05
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	25.655.927.010,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	25.655.927.010,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	25.655.927.010,00
Jumlah	15.490.000.000,00	8.892.463.977,31	57,41	127.390.001.344,88

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil lelang atas kendaraan dinas dan angsuran dari penjualan/lelang atas Rumah Dinas;
2. Pada tahun 2024 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan bersumber dari hasil kerja sama atas pemanfaatan pengelolaan sarang burung walet milik Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pihak ke-III, namun di tahun 2025 penganggaranya telah direklasifikasi ke Retribusi pemanfaatan aset daerah.
3. Jasa Giro bersumber dari penerimaan Jasa Giro Kas dan bunga deposito yang disesuaikan dengan jumlah dana yang mengendap dan tingkat suku bunga Bank;
4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan bunga/jasa angsuran atas pengelolaan Dana Bergulir, namun pada tahun 2025 tidak ada realisasi;
5. Pendapatan Bunga bersumber bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pengembalian atas temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bima, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;
7. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain bersumber dari potongan Taspen (titipan SBI nasabah), kompensasi pajak (kelebihan pajak penghasilan), komisi dari pendapatan non-transfer dan sumbangan pihak ke-III; dan
8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan bersumber dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikenakan kepada pihak ke-III.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.769.595.187.000,00	1.760.720.762.880,00	99,50	1.753.884.676.899,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.403.035.557,00	64.335.780.751,00	98,37	78.121.624.847,00
Jumlah	1.834.998.222.557,00	1.825.056.543.631,00	99,46	1.832.006.301.746,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	103.870.024.000,00	102.288.736.300,00	98,48	71.419.690.000,00
Dana Alokasi Umum	1.130.073.280.000,00	1.160.437.521.669,00	102,69	1.069.469.209.836,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.830.524.000,00	38.820.786.519,00	95,08	160.918.308.551,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	314.224.918.000,00	305.075.452.212,00	97,09	258.100.609.512,00
Jumlah	1.588.998.746.000,00	1.606.622.496.700,00	101,11	1.559.907.817.899,00

Penjelasan:

- a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya penambahan DAU *Earmark* untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- b. Pada Tahun 2024, pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercatat didalam akun Dana Perimbangan. Namun pada Tahun 2025, terdapat perubahan nomenklatur sehingga penyajian pendapatan Dana





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perimbangan pada Tahun 2024 diatribusikan ke nomenklatur yang baru yaitu pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Dana Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.832.811.000,00	5.375.989.500,00	92,17	1.066.427.000,00
DBH PPh Pasal 21	5.672.911.000,00	5.139.475.700,00	90,60	4.141.456.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	172.307.000,00	155.076.300,00	90,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	23.849.538.000,00	23.369.234.000,00	97,99	18.793.243.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – <i>Royalty</i>	65.388.226.000,00	65.388.226.000,00	100,00	43.707.039.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	133.567.000,00	40.070.800,00	30,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.820.664.000,00	2.820.664.000,00	100,00	3.711.525.000,00
Jumlah	103.870.024.000,00	102.288.736.300,00	98,48	71.419.690.000,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp102.288.736.300,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 Nomor 3);

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025, bahwa pagu anggaran Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar Rp1.130.073.280.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.160.437.521.669,00 atau 102,69% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp908.869.279.000,00, maka realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp90.968.311.833,00 atau 7,84%. Dana Alokasi Umum yang diterima pada Tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 Nomor 3). Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Saldo Dana Alokasi Umum Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi Penerimaan	Realisasi Penggunaan
DAU	940.742.930.000,00	975.293.150.669,00	975.293.150.669,00
DAU <i>Earmarked</i>	189.330.350.000,00	185.144.371.000,00	185.144.371.000,00
Penggajian PPPK	54.988.667.000,00	50.802.688.000,00	50.802.688.000,00
Bidang Pendidikan	91.191.141.000,00	91.191.141.000,00	91.191.141.000,00
Bidang Kesehatan	43.150.542.000,00	43.150.542.000,00	43.150.542.000,00
Jumlah	1.130.073.280.000,00	1.160.437.521.669,00	1.069.469.209.836,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.12
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	3.149.728.000,00	3.148.176.626,00	99,95	2.347.347.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	1.308.905.000,00	1.302.654.637,00	99,52	28.114.129.400,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	603.240.000,00	601.319.213,00	99,68	16.991.369.507,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	21.384.957.000,00	20.553.589.226,00	96,11	0,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	1.876.178.000,00	1.755.423.017,00	93,56	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	142.062.000,00	0,00	0,00	118.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	2.342.400.000,00	0,00	0,00	2.302.533.000,00
DAK Fisik - Bidang Pertanian - Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	26.507.336.000,00	0,00	0,00	24.877.729.000,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan -Penugasan	10.102.630.000,00	0,00	0,00	10.045.864.500,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.438.171.000,00	0,00	0,00	4.026.071.844,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan - Jalan	24.741.615.000,00	0,00	0,00	24.687.308.000,00
DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	11.281.971.000,00	10.246.210.800,00	90,82	13.369.758.000,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	8.947.708.000,00	0,00	0,00	8.944.708.000,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	11.869.146.000,00	0,00	0,00	11.831.210.000,00
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.782.454.000,00	0,00	0,00	1.738.418.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	10.734.177.000,00	0,00	0,00	9.628.451.300,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Keluarga Berencana	1.225.545.000,00	1.213.413.000,00	99,01	1.895.411.000,00
Jumlah	40.830.524.000,00	38.820.786.519,00	95,08	160.918.308.551,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp 38.820.786.519,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 Nomor 3);

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.13
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	64.846.420.000,00	64.560.515.296,00	99,56	67.248.099.927,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	174.168.724.000,00	169.105.638.900,00	97,09	115.201.405.000,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	2.661.806.000,00	631.500.000,00	23,72	2.095.750.000,00
DAK Non Fisik - TKG PNSD	7.386.198.000,00	7.165.154.700,00	97,01	6.012.065.000,00
DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya – Museum	0,00	0,00	0,00	677.230.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	32.881.695.000,00	31.492.926.766,00	95,78	14.949.959.470,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	422.194.000,00	422.194.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOKB	8.629.196.000,00	8.588.206.000,00	99,52	6.611.193.000,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	0,00	0,00	0,00	529.255.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	934.970.000,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	325.366.500,00
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	379.118.430,00	94,62	482.486.170,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.290.024.000,00	1.290.024.000,00	100,00	4.303.767.000,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.457.415.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.528.750.000,00	2.528.750.000,00	100,00	2.825.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	15.715.611.000,00	15.691.684.770,00	99,85	16.874.108.093,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	90.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.068.640.000,00	2.994.739.350,00	97,59	2.738.457.800,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	135.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	21.220.274.552,00
Jumlah	314.224.918.000,00	305.075.452.212,00	97,09	258.100.609.512,00

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp305.075.452.212,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 Nomor 3).

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	180.596.441.000,00	154.098.266.180,00	85,33	187.145.184.000,00
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.831.675.000,00
Jumlah	180.596.441.000,00	154.098.266.180,00	85,33	193.976.859.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.1.1.2.2.1 Dana Desa

Dana Desa yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp154.098.266.180,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 Nomor 3).

Tabel 5.15
Dana Desa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	180.596.441.000,00	154.098.266.180,00	85,33	187.145.184.000,00
Dana Desa	180.596.441.000,00	154.098.266.180,00	85,33	187.145.184.000,00
Jumlah	180.596.441.000,00	154.098.266.180,00	85,33	187.145.184.000,00

5.1.1.2.2.2 Insentif Fiskal

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Bima tidak mendapatkan alokasi anggaran Insentif Fiskal.

Tabel 5.16
Insentif Fiskal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.831.675.000,00
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.831.675.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	6.831.675.000,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.17
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	65.403.035.557,00	64.144.780.751,00	98,08	78.121.624.847,00
Bantuan Keuangan	0,00	191.000.000,00		0,00
Jumlah	65.403.035.557,00	64.335.780.751,00	98,37	78.121.624.847,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 merupakan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi NTB. persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18
Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.195.994.778,00	0,00	14.808.410.518,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	888.429.518,00	0,00	9.257.687.654,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.933.550.632,00	31.512.123.140,00	105,27	24.265.723.027,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	39.964.925,00	38.690.056,00	96,81	38.407.195,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.429.520.000,00	30.509.543.259,00	86,11	29.751.396.453,00
Jumlah	65.403.035.557,00	64.144.780.751,00	98,08	78.121.624.847,00

Rendahnya capaian realisasi Pendapatan Bagi Hasil di Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah dialihkan sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara BAPPENDA Provinsi NTB dengan BAPPENDA Kabupaten Bima Nomor: 973/699/02/BAPPENDA/2024 dan Nomor: 204/049/07.6/2024 tentang Sinergisitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsi Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	191.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	191.000.000,00	0,00	0,00

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Bima tidak mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan, namun mendapatkan alokasi/realisasi bantuan keuangan umum dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan dana dipergunakan untuk biaya Notaris Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi NTB) tahun 2025.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	18.572.830.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	70.219.776.124,00
Jumlah	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	88.792.606.124,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.21
Pendapatan Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	18.572.830.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	18.572.830.000,00

Penjelasan:

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Bima tidak mendapatkan alokasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.22
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pemerintah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	70.219.776.124,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	70.219.776.124,00
Jumlah	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	70.219.776.124,00

Penjelasan:

Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK merupakan Bagi Hasil atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi berupa royalti dari PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara untuk Tahun Buku 2024.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.620.643.248.454,86	1.579.146.679.246,94	97,44	1.567.972.000.927,92
Belanja Modal	181.580.744.245,80	163.126.710.730,00	89,84	212.987.711.149,00
Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	3.938.150.000,00	87,51	1.621.640.000,00
Belanja Transfer	313.617.446.956,30	286.042.473.554,00	91,21	297.295.188.555,00
Jumlah	2.120.341.439.656,96	2.032.254.013.530,94	95,85	2.079.876.540.631,92





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.1.2.1 Belanja Operasi

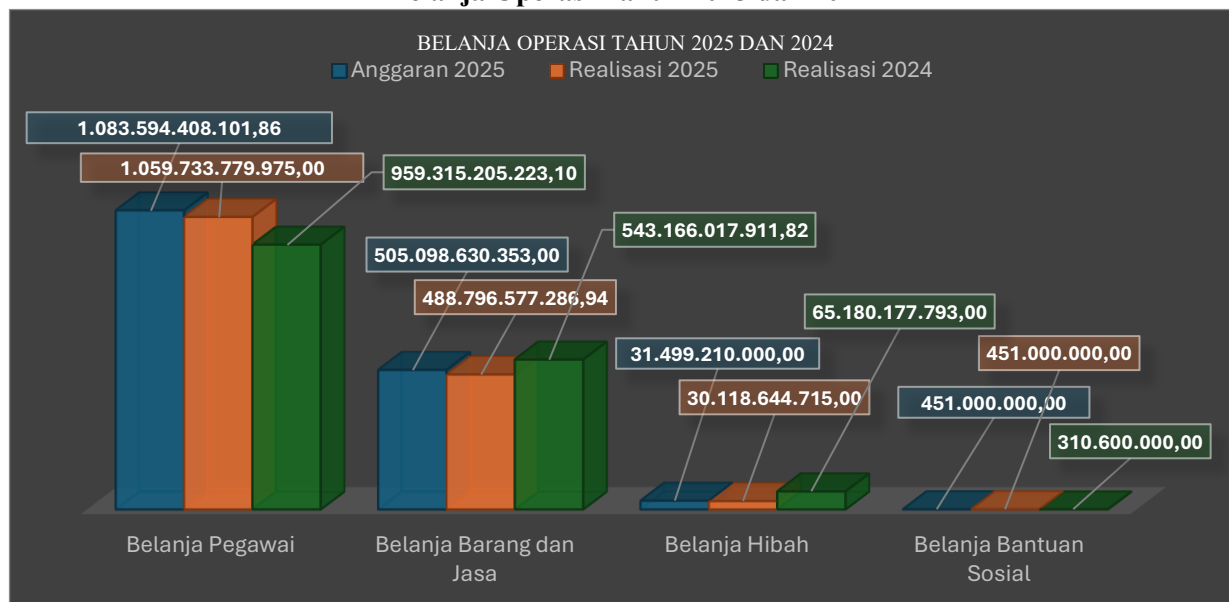
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24
Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	1.083.594.408.101,86	1.059.733.779.975,00	97,80	959.315.205.223,10
Belanja Barang dan Jasa	505.098.630.353,00	488.796.577.286,94	96,77	543.166.017.911,82
Belanja Hibah	31.499.210.000,00	30.165.321.985,00	95,62	65.180.177.793,00
Belanja Bantuan Sosial	451.000.000,00	451.000.000,00	100,00	310.600.000,00
Jumlah	1.620.643.248.454,86	1.579.146.679.246,94	97,44	1.567.972.000.927,92

Komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Diagram 5.2
Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024



Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.25
Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	736.390.572.231,30	726.695.534.210,60	98,68	644.656.673.166,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	564.857.090.251,62	562.200.283.572,60	99,53	502.734.547.341,00
Belanja Gaji Pokok PNS	352.885.752.165,62	351.204.181.800,60	99,52	366.900.247.516,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	211.971.338.086,00	210.996.101.772,00	99,54	135.834.299.825,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.774.576.822,20	49.169.590.191,00	96,84	43.581.803.599,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.541.827.676,00	32.951.920.085,00	98,24	34.577.533.133,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.232.749.146,20	16.217.670.106,00	94,11	9.004.270.466,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.885.779.180,00	6.442.525.000,00	93,56	7.259.131.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.885.779.180,00	6.442.525.000,00	93,56	7.259.131.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.405.559.727,00	27.155.268.988,00	99,09	27.717.432.427,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.405.559.727,00	27.155.268.988,00	99,09	27.717.432.427,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.346.666.986,00	15.725.257.915,00	96,20	11.649.951.568,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.701.881.400,00	3.346.960.000,00	90,42	3.721.161.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.644.785.586,00	12.378.297.915,00	97,89	7.928.790.568,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	30.884.079.422,50	29.973.302.775,00	97,05	26.070.030.944,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	18.395.915.258,00	17.793.482.680,00	96,73	18.871.630.784,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.488.164.164,50	12.179.820.095,00	97,53	7.198.400.160,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.398.641.580,00	1.266.214.333,00	90,53	933.223.356,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.398.641.580,00	1.266.214.333,00	90,53	933.223.356,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.648.636,86	8.574.720,00	54,80	7.760.722,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.746.353,00	4.259.830,00	54,99	4.756.619,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.902.283,86	4.314.890,00	54,60	3.004.103,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.524.673.880,02	30.082.835.756,00	92,49	20.702.477.310,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.674.843.160,02	19.031.133.407,00	92,05	15.102.442.532,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.849.830.720,00	11.051.702.349,00	93,26	5.600.034.778,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.285.277.816,00	1.165.528.407,00	90,68	1.032.767.474,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	783.594.604,00	717.756.283,00	91,60	765.753.722,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	501.683.212,00	447.772.124,00	89,25	267.013.752,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.740.509.639,40	3.506.152.553,00	93,73	2.967.547.425,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.244.046.100,00	2.162.885.906,00	96,38	2.254.610.079,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.496.463.539,40	1.343.266.647,00	89,76	712.937.346,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	272.068.289,70	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	172.068.289,70	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	254.281.899.959,56	245.913.076.031,60	96,71	55.183.987.177,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.610.580.000,00	24.711.592.049,00	96,49	24.870.277.500,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.610.580.000,00	24.711.592.049,00	96,49	24.870.277.500,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.870.400,00	21.470.000,00	89,94	35.855.848,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.870.400,00	21.470.000,00	89,94	35.855.848,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	245.006.625,00	215.032.925,00	87,77	45.087.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	245.006.625,00	215.032.925,00	87,77	45.087.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	30.809.142.975,00	29.808.242.143,00	96,75	30.232.766.829,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	30.809.142.975,00	29.808.242.143,00	96,75	30.232.766.829,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	197.593.299.959,56	191.156.738.914,60	96,74	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	174.644.956.931,00	169.336.265.900,00	96,96	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.386.198.000,00	8.687.932.700,00	117,62	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.915.673.069,56	1.002.000.000,00	34,37	0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.646.471.959,00	12.130.540.314,60	95,92	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	176.256.163.486,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	106.709.400,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	106.709.400,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	141.329.556.600,00
Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	141.329.556.600,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	4.497.526.800,00
Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	4.497.526.800,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.049.000.000,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.049.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	11.915.110.286,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	11.915.110.286,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	5.950.312.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	5.710.100.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	217.112.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	17.820.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	17.820.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	10.068.878.400,00
Belanja TPG PPPK	0,00	0,00	0,00	10.068.878.400,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	321.250.000,00
Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	321.250.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.590.498.386,00	21.546.930.724,00	95,38	20.764.023.279,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.002.330.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.002.330.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	96.579.000,00	68,71	102.220.020,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	96.579.000,00	68,71	102.220.020,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.297.200,00	79.626.960,00	81,84	76.882.680,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.297.200,00	79.626.960,00	81,84	76.882.680,00
Belanja Uang Paket DPRD	100.401.000,00	100.401.000,00	100,00	100.264.500,00
Belanja Uang Paket DPRD	100.401.000,00	100.401.000,00	100,00	100.264.500,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.453.378.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.453.378.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	179.594.100,00	136.294.200,00	75,89	113.989.575,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	179.594.100,00	136.294.200,00	75,89	113.989.575,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.433.750.000,00	5.433.750.000,00	100,00	5.103.000.000,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.433.750.000,00	5.433.750.000,00	100,00	5.103.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.275.750.000,00	1.275.750.000,00	100,00	1.275.750.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.275.750.000,00	1.275.750.000,00	100,00	1.275.750.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	266.361.690,00	135.131.976,00	50,73	174.685.978,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	266.361.690,00	135.131.976,00	50,73	174.685.978,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.079.638.496,00	5.941.573.088,00	97,73	6.048.557.026,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	100.000.000,00	78.311.520,00	78,31	75.319.650,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00	2.065.392,00	85,71	2.059.344,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00	6.196.176,00	85,71	6.178.032,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.970.000.000,00	5.855.000.000,00	98,07	5.965.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.092.500.000,00	5.888.000.000,00	96,64	4.900.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.092.500.000,00	5.888.000.000,00	96,64	4.900.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	464.820.000,00	0,00	0,00	412.965.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	464.820.000,00	0,00	0,00	412.965.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	208.731.402,00	173.575.038,00	83,16	163.186.170,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	6.780.000,00	88,70	3.612.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	6.780.000,00	88,70	3.612.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	41.355.002,00	7.459.260,00	18,04	5.069.400,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	41.355.002,00	7.459.260,00	18,04	5.069.400,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	840.000,00	524.678,00	62,46	654.010,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	840.000,00	524.678,00	62,46	654.010,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00	1.180,00	42,14	1.640,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00	1.180,00	42,14	1.640,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.485.440,00	5.480.640,00	99,91	894.240,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.485.440,00	5.480.640,00	99,91	894.240,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	112.320,00	85,71	18.720,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	112.320,00	85,71	18.720,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	336.960,00	85,71	56.160,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	336.960,00	85,71	56.160,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.200.000,00	752.000.000,00	88,24	710.000.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.200.000,00	252.000.000,00	99,92	210.000.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.200.000,00	252.000.000,00	99,92	210.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	500.000.000,00	83,33	500.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	500.000.000,00	83,33	500.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	69.270.506.123,00	64.652.663.970,80	7,14	61.581.171.945,10
Belanja Pegawai BLUD	69.270.506.123,00	64.652.663.970,80	7,14	61.581.171.945,10
Belanja Pegawai BLUD	69.270.506.123,00	64.652.663.970,80	7,14	61.581.171.945,10
Jumlah	1.083.594.408.101,86	1.059.733.779.975,0	97,80	959.315.205.223,10

0

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26
Belanja Pegawai di Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	19.238.260.524,00	18.879.949.553,00	98,14	17.297.238.812,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.601.978.430,00	26.352.192.064,00	95,47	25.621.246.531,00
Inspektorat	9.191.504.258,00	9.086.970.313,00	98,86	8.394.358.830,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	598.211.174.076,14	591.022.241.169,00	98,80	520.833.950.734,00
Dinas Kesehatan	142.737.964.270,02	138.110.511.899,00	97,83	112.809.789.666,10
Dinas Sosial	4.266.239.752,00	4.173.006.341,00	97,81	3.864.872.461,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.467.705.860,00	5.347.682.625,00	97,80	5.385.831.790,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.029.152.022,00	3.880.893.450,00	96,32	3.584.773.691,00
Dinas Perhubungan	6.644.450.044,00	6.504.157.036,00	97,89	6.231.862.970,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.180.905.240,00	4.001.078.438,00	95,70	3.757.609.298,00
Dinas Pariwisata	4.753.317.942,00	4.652.409.868,00	97,88	4.375.451.089,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.857.923.890,00	13.798.981.586,00	99,57	13.572.411.454,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.483.671.748,00	4.356.455.269,00	97,16	3.971.235.231,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.090.582.678,00	2.991.007.222,00	96,78	2.774.532.496,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.154.933.178,00	5.065.942.408,00	98,27	4.758.625.007,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	30.779.000.490,00	30.502.179.661,00	99,10	29.266.956.990,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	7.852.425.686,00	7.689.931.697,00	97,93	7.568.513.527,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.833.426.472,00	4.719.610.695,00	97,65	4.672.427.251,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.279.321.537,00	4.153.806.897,00	97,07	3.781.761.306,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.279.774.046,00	7.173.070.061,00	98,53	7.182.368.435,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.405.260.672,00	3.321.966.298,00	97,55	2.895.400.017,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.021.705.786,00	2.834.832.655,00	93,82	3.048.029.345,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.830.205.992,00	13.484.170.940,00	97,50	12.955.306.610,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.998.518.814,00	2.876.231.941,00	95,92	2.974.890.439,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.598.238.632,00	9.347.469.277,00	97,39	5.168.941.311,00
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.302.609.526,00	6.187.693.566,00	98,18	5.785.411.806,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	4.368.306.350,00	4.060.929.260,00	92,96	3.807.654.190,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.455.348.427,70	12.723.930.371,00	82,33	26.208.985.103,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.614.529.776,00	3.496.347.637,00	96,73	3.104.629.277,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.084.124.718,00	1.987.111.541,00	95,35	1.977.845.610,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	74.593.520.830,00	73.416.594.279,00	98,42	69.706.500.225,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.816.384.894,00	3.746.594.164,00	98,17	3.407.918.226,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.664.735.231,00	3.485.664.747,00	95,11	2.837.376.856,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	988.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sape	1.474.413.277,00	1.321.568.886,00	89,63	1.248.765.637,00
Kecamatan Bolo	1.956.611.662,00	1.866.393.381,00	95,39	1.763.729.615,00
Kecamatan Woha	1.963.997.444,00	1.904.726.619,00	96,98	1.818.908.447,00
Kecamatan Lambu	1.745.488.356,00	1.660.584.624,00	95,14	1.746.408.040,00
Kecamatan Monta	1.525.293.784,00	1.450.761.286,00	95,11	1.410.769.304,00
Kecamatan Wera	1.364.798.262,00	1.288.962.353,00	94,44	1.563.599.886,00
Kecamatan Madapangga	2.261.001.507,00	2.166.690.013,00	95,83	2.088.568.929,00
Kecamatan Langgudu	1.511.478.434,00	1.440.820.310,00	95,33	1.353.195.844,00
Kecamatan Palibelo	1.385.569.228,00	1.303.751.261,00	94,09	1.355.764.977,00
Kecamatan Belo	1.140.743.803,00	1.060.931.782,00	93,00	1.106.195.583,00
Kecamatan Ambalawi	1.582.953.540,00	1.459.193.853,00	92,18	1.383.354.725,00
Kecamatan Donggo	1.348.312.851,00	1.258.133.170,00	93,31	1.190.385.420,00
Kecamatan Wawo	1.287.328.286,00	1.202.413.921,00	93,40	1.280.842.362,00
Kecamatan Soromandi	1.370.731.984,00	1.266.258.857,00	92,38	1.108.647.523,00
Kecamatan Sanggar	1.981.266.834,00	1.878.847.161,00	94,83	1.657.825.523,00
Kecamatan Parado	1.311.643.014,00	1.215.871.109,00	92,70	1.154.415.915,00
Kecamatan Tambora	1.634.318.044,00	1.563.742.202,00	95,68	1.455.150.202,00
Kecamatan Lambitu	1.072.656.000,00	992.514.259,00	92,53	1.043.970.707,00
Jumlah	1.083.594.408.101,86	1.059.733.779.975,00	97,80	959.315.205.223,10

3. Dari realisasi Belanja Pegawai senilai Rp1.059.733.779.975,00 terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp113.255.396,00 yang telah dipulihkan senilai Rp4.790.768,00 pada 8 s.d 21 Mei 2026 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK Nomor: 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	176.582.013.504,00	171.920.873.375,00	97,36	198.139.586.710,00
Belanja Barang Pakai Habis	176.525.733.504,00	171.878.280.375,00	97,37	196.690.014.451,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	170.284.000,00	164.682.040,00	96,71	295.087.184,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	286.405.000,00	286.173.996,00	99,92	396.055.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.137.195.967,00	4.722.696.780,00	91,93	5.019.448.287,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	74.520.000,00	74.356.000,00	99,78	7.810.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.180.095.400,00	1.178.162.500,00	99,84	1.128.090.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	24.600.000,00	24.302.000,00	98,79	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	199.700.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	191.172.000,00	183.479.000,00	95,98	183.348.300,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.422.003.300,00	2.278.594.660,00	94,08	2.559.854.655,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.456.000,00	2.450.000,00	99,76	10.055.060,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	36.900.000,00	36.344.700,00	98,50	28.856.350,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.679.001.098,00	2.488.815.506,00	92,90	2.156.509.656,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.924.769.953,00	2.837.680.528,00	97,02	3.342.230.352,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.762.527.635,00	7.541.384.102,00	97,15	7.856.119.165,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	513.162.400,00	481.323.400,00	93,80	474.387.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	38.976.000,00	38.969.450,00	99,98	167.945.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.386.269.740,00	1.334.018.832,00	96,23	1.509.740.087,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	385.269.700,00	380.000.494,00	98,63	516.235.171,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	512.940.000,00	456.624.070,00	89,02	686.730.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	215.151.000,00	214.694.800,00	99,79	576.417.560,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	62.887.000,00	61.500.000,00	97,79	80.971.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	283.800.000,00	269.045.500,00	94,80	238.158.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	283.956.500,00	273.211.350,00	96,22	317.937.269,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	6.174.418.000,00	6.147.647.582,00	99,57	8.195.989.276,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.408.725.981,00	4.391.286.776,00	99,60	2.532.499.831,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	108.003.276.030,00	105.510.122.204,00	97,69	124.773.307.010,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	265.440.000,00	247.670.000,00	93,31	1.221.618.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.721.437.300,00	6.695.958.406,00	99,62	4.443.271.499,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	94.216.000,00	94.002.000,00	99,77	7.700.000,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.223.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.764.145.500,00	13.023.336.445,00	94,62	17.083.349.564,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.888.315.000,00	3.885.530.250,00	99,93	6.551.827.520,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.608.210.000,00	4.546.546.760,00	98,66	1.674.578.180,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	645.000.000,00	641.679.900,00	99,49	328.550.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	153.000.000,00	152.547.000,00	99,70	152.147.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	156.942.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	23.979.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	207.500.000,00	203.504.000,00	98,07	195.667.310,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.500.000,00	112.187.000,00	99,72	89.335.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.500.000,00	4.379.000,00	97,31	19.485.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	3.125.000,00	3.108.000,00	99,46	79.360.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	288.112.000,00	287.115.500,00	99,65	374.476.250,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	338.470.000,00	337.568.694,00	99,73	444.372.315,00
Belanja Pakaian Olahraga	222.500.000,00	222.093.150,00	99,82	510.495.800,00
Belanja Pakaian Paskibraka	30.000.000,00	24.988.000,00	83,29	23.754.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	385.000,00	378.000,00	98,18	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	385.000,00	378.000,00	98,18	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	55.895.000,00	42.215.000,00	75,53	1.449.572.259,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	4.417.000,00	88,34	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	12.500.000,00	50,00	12.694.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	39.280.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.600.000,00	9.546.000,00	99,44	19.999.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.095.000,00	1.060.000,00	96,80	16.750.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	2.700.000,00	2.692.000,00	99,70	9.396.820,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.500.000,00	9.000.000,00	94,74	7.875.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	899.500.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	432.197.639,00
Belanja Jasa	165.313.828.914,00	153.647.517.860,80	92,94	154.644.296.182,00
Belanja Jasa Kantor	87.574.772.991,00	78.334.056.922,80	89,45	84.756.757.853,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	153.250.000,00	144.758.500,00	94,46	103.630.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.230.463.000,00	1.511.193.650,00	67,75	2.223.256.400,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.887.160.000,00	1.783.919.000,00	61,79	5.029.216.500,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	219.600.000,00	219.600.000,00	100,00	210.600.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	244.500.000,00	242.500.000,00	99,18	405.750.000,00
Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	12.370.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	283.125.000,00	267.150.000,00	94,36	237.950.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	391.200.000,00	336.200.000,00	85,94	303.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	11.005.900.000,00	10.323.900.000,00	93,80	10.720.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.393.126.231,00	17.103.603.526,80	88,19	18.357.005.295,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	138.280.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	301.400.000,00	293.806.000,00	97,48	536.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.358.500.000,00	6.138.700.000,00	96,54	7.443.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.518.000.000,00	1.316.200.000,00	86,71	1.355.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	774.300.000,00	771.300.000,00	99,61	1.005.850.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	14.999.900,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	34.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.694.850.000,00	1.565.350.000,00	92,36	595.880.000,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	239.100.000,00	239.100.000,00	100,00	390.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.761.620.000,00	7.074.220.000,00	91,14	10.782.090.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	2.413.384.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	546.800.000,00	544.000.000,00	99,49	824.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.950.000,00	859.800.000,00	95,43	1.464.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.745.350.000,00	2.674.150.000,00	97,41	1.897.350.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.203.900.000,00	1.073.200.000,00	89,14	741.275.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	715.300.000,00	630.200.000,00	88,10	448.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	159.600.000,00	147.600.000,00	92,48	110.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	500.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	554.500.000,00	540.750.000,00	97,52	491.000.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000,00	7.492.500,00	74,93	7.492.500,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	193.000.000,00	170.841.000,00	88,52	10.000.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	266.545.000,00	215.087.908,00	80,69	51.338.416,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	135.000.000,00	105.000.000,00	77,78	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	688.666.000,00	173.995.490,00	25,27	224.000.214,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	668.600.000,00	630.700.000,00	94,33	698.135.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	147.960.000,00	43.300.000,00	29,26	131.040.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	110.225.000,00	100.623.000,00	91,29	90.792.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	11.040.000,00	11.040.000,00	100,00	8.640.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	768.500.000,00	760.400.000,00	98,95	701.850.000,00
Belanja Tagihan Telepon	294.300.000,00	283.744.781,00	96,41	293.446.138,00
Belanja Tagihan Air	17.100.000,00	10.080.000,00	58,95	10.797.000,00
Belanja Tagihan Listrik	6.205.772.000,00	5.426.979.357,00	87,45	5.054.507.989,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	343.357.600,00	319.573.000,00	93,07	385.345.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.512.731.000,00	2.347.627.288,00	93,43	2.291.886.255,00
Belanja Paket/Pengiriman	516.455.000,00	497.398.500,00	96,31	573.851.970,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	508.543.000,00	349.419.322,00	68,71	273.276.476,00
Belanja Lembur	5.703.854.160,00	5.484.920.600,00	96,16	5.298.871.800,00
Belanja Medical Check Up	426.350.000,00	301.350.000,00	70,68	330.000.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.313.680.000,00	4.936.233.500,00	92,90	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	319.400.000,00	225.850.000,00	70,71	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.078.932.902,00	53.468.314.028,00	98,87	44.897.490.102,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	198.418.477,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	49.111.839.000,00	48.932.867.700,00	99,64	44.342.153.308,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	4.343.701.200,00	4.005.486.800,00	92,21	140.540.500,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	206.734.462,00	170.369.118,00	82,41	102.753.957,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	233.706.240,00	192.598.410,00	82,41	113.623.860,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	108.900.000,00	99.400.000,00	91,28	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	74.052.000,00	67.592.000,00	91,28	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.123.985.200,00	2.958.855.900,00	94,71	3.227.410.100,00
Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00	493.700.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	686.100.000,00	627.960.800,00	91,53	565.123.500,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	98.900.200,00	95.974.000,00	97,04	36.300.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	44.720.000,00	44.000.000,00	98,39	2.500.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00
Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.081.000.000,00	1.039.394.400,00	96,15	1.166.366.600,00
Belanja Sewa Mebel	489.215.000,00	474.072.700,00	96,90	420.280.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	5.600.000,00	4.800.000,00	85,71	8.400.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	78.990.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	648.950.000,00	604.056.000,00	93,08	419.375.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM	2.000.000,00	1.198.000,00	59,90	1.175.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	21.000.000,00	20.900.000,00	99,52	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	914.160.000,00	668.266.000,00	73,10	922.945.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	20.750.000,00
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	75.000.000,00	61.000.000,00	81,33	76.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	170.510.000,00	78.090.000,00	45,80	213.140.000,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Sewa Taman	45.800.000,00	41.400.000,00	90,39	9.075.000,00
Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	232.000.000,00	232.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	152.500.000,00	151.546.000,00	99,37	0,00
Belanja Sewa Asrama	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Sewa Hotel	188.350.000,00	104.230.000,00	55,34	418.980.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.576.742.310,00	5.870.371.397,00	89,26	5.601.864.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	50.000.000,00	49.900.050,00	99,80	164.812.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.292.413.015,00	2.157.310.200,00	94,11	1.424.074.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	761.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	272.000.000,00	271.672.000,00	99,88	201.260.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	74.800.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	908.900.000,00	751.883.000,00	82,72	209.420.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	249.500.000,00	192.240.000,00	77,05	329.600.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	250.000.000,00	248.643.000,00	99,46	199.589.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.049.998.415,00	1.710.669.267,00	83,45	1.343.986.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	15.000.000,00	14.972.000,00	99,81	660.983.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	212.482.000,00	212.212.000,00	99,87	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	267.570.000,00	251.991.000,00	94,18	88.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	8.878.880,00	8.878.880,00	100,00	13.740.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	420.000.000,00	374.600.000,00	89,19	334.600.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	420.000.000,00	374.600.000,00	89,19	324.650.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	55.000.000,00	52.500.000,00	95,45	0,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	10.000.000,00	7.500.000,00	75,00	0,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.418.584.511,00	11.808.241.350,00	95,09	14.434.757.927,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.945.127.011,00	6.842.994.320,00	98,53	6.471.180.707,00
Belanja Sosialisasi	2.916.747.000,00	2.577.283.080,00	88,36	4.364.255.220,00
Belanja Bimbingan Teknis	2.556.710.500,00	2.387.963.950,00	93,40	3.599.322.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	150.151.000,00	112.312.263,00	74,80	185.471.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	150.151.000,00	112.312.263,00	74,80	185.471.000,00
Belanja Pemeliharaan	4.961.546.800,00	4.559.855.537,00	91,90	3.021.807.774,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	154.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	154.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.479.523.000,00	1.261.558.125,00	85,27	1.269.010.764,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	153.950.000,00	111.573.977,00	72,47	231.961.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	246.564.000,00	241.584.090,00	97,98	156.277.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.130.000,00	410.000,00	7,99	3.785.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	200.000.000,00	199.337.000,00	99,67	165.927.270,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	14.000.000,00	8.975.000,00	64,11	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	145.000.000,00	57.761.999,00	39,84	29.981.100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	26.728.000,00	89,09	27.742.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	93.420.000,00	80.657.000,00	86,34	73.458.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	10.000.000,00	9.650.000,00	96,50	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	172.730.000,00	159.347.054,00	92,25	142.446.196,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	220.569.000,00	189.374.500,00	85,86	164.334.750,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	21.550.000,00	16.905.000,00	78,45	4.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.110.000,00	16.507.000,00	82,08	45.236.250,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	71.500.000,00	67.886.505,00	94,95	136.386.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	50.000.000,00	49.861.000,00	99,72	19.976.448,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.281.853.800,00	3.101.883.412,00	94,52	1.236.179.010,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.611.691.800,00	2.483.097.067,00	95,08	910.019.010,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	80.000.000,00	79.574.000,00	99,47	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	350.035.000,00	347.790.000,00	99,36	148.030.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	100.127.000,00	54.800.000,00	54,73	79.630.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	11.000.000,00	10.993.345,00	99,94	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	129.000.000,00	125.629.000,00	97,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.170.000,00	196.414.000,00	98,12	198.368.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	200.170.000,00	196.414.000,00	98,12	198.368.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	159.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	159.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	27.492.525.292,00	27.068.004.776,00	98,46	44.078.602.535,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.492.525.292,00	27.068.004.776,00	98,46	44.078.602.535,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.389.346.917,00	10.179.943.600,00	97,98	15.875.345.348,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	659.185.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.103.178.375,00	16.888.061.176,00	98,74	27.544.072.187,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.282.164.900,00	8.048.041.325,00	86,70	27.036.668.332,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.325.900.000,00	2.289.795.860,00	98,45	22.080.677.500,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.995.150.000,00	1.965.248.860,00	98,50	714.314.500,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	118.500.000,00	118.447.000,00	99,96	935.913.000,00
Belanja Beasiswa	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	133.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	12.250.000,00	6.100.000,00	49,80	157.450.000,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	20.140.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.956.264.900,00	5.758.245.465,00	82,78	4.955.990.832,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.519.054.900,00	5.353.488.965,00	82,12	4.684.108.332,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	437.210.000,00	404.756.500,00	92,58	271.882.500,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	58.605.817.322,42
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	58.605.817.322,42
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	58.605.817.322,42
Belanja Barang dan Jasa BOSP	52.656.906.181,00	52.643.065.969,08	99,97	823.837.738,85
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	51.971.136.281,00	51.892.082.615,09	99,85	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	50.321.633.281,00	50.242.579.615,09	99,84	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.649.503.000,00	1.649.503.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	601.339.900,00	630.930.553,99	104,92	710.507.738,85
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	601.339.900,00	630.930.553,99	104,92	710.507.738,85
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	84.430.000,00	120.052.800,00	142,19	113.330.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	84.430.000,00	120.052.800,00	142,19	113.330.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.809.644.762,00	70.909.218.444,06	103,05	56.815.401.317,55
Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.809.644.762,00	70.909.218.444,06	103,05	56.815.401.317,55
Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.809.644.762,00	70.909.218.444,06	103,05	56.815.401.317,55
Jumlah	505.098.630.353,00	488.796.577.286,94	96,77	543.166.017.911,82

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat mempengaruhi terhadap berkurangnya alokasi belanja suku cadang, belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, belanja perjalanan dinas dan belanja jasa kantor serta belanja barang dan jasa BLUD.
2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28
Belanja Barang dan Jasa di Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	29.736.617.642,00	28.718.452.309,00	96,58	38.337.292.027,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.993.137.034,00	19.659.465.563,00	98,33	23.460.542.195,00
Inspektorat	6.995.640.610,00	6.857.343.930,00	98,02	6.553.038.914,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	75.061.554.731,00	73.230.310.702,08	97,56	83.452.007.757,27
Dinas Kesehatan	128.828.525.697,00	125.215.142.470,86	97,20	108.079.785.885,55
Dinas Sosial	2.022.236.714,00	1.959.163.121,00	96,88	1.816.208.418,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.883.002.700,00	2.651.359.572,00	91,97	2.755.553.285,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.682.504.200,00	1.428.510.949,00	84,90	1.487.349.717,00
Dinas Perhubungan	4.802.860.128,00	4.414.444.024,00	91,91	1.255.800.784,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.663.766.700,00	1.640.250.590,00	98,59	2.045.756.969,00
Dinas Pariwisata	1.657.506.150,00	1.640.356.400,00	98,97	2.980.617.539,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.928.308.119,00	52.429.453.842,00	94,92	64.591.361.392,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.640.528.425,00	13.559.298.067,00	99,40	9.139.055.216,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	831.219.900,00	781.409.324,00	94,01	1.833.743.439,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.319.855.300,00	2.227.260.667,00	96,01	4.462.062.524,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.337.405.539,00	37.993.807.588,00	96,58	62.117.689.548,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.626.197.200,00	2.575.471.924,00	98,07	12.195.061.931,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.322.828.600,00	4.567.817.581,00	85,82	3.555.614.819,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.480.500.275,00	1.393.978.260,00	94,16	1.886.198.183,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.134.702.200,00	11.811.880.402,00	97,34	9.440.537.940,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.414.719.000,00	1.356.036.245,00	95,85	1.771.599.731,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.177.093.300,00	1.108.808.284,00	94,20	1.336.140.463,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.876.486.210,00	4.774.407.800,00	97,91	11.672.890.414,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	978.201.200,00	848.382.100,00	86,73	1.071.358.403,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.196.641.200,00	7.377.945.998,00	90,01	9.629.225.763,00
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.765.797.900,00	3.476.892.106,00	92,33	5.621.103.372,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	2.279.004.200,00	1.986.617.402,00	87,17	2.829.718.010,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.793.057.102,00	8.195.741.777,00	93,21	8.208.773.853,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.512.946.625,00	2.292.012.075,00	91,21	2.675.270.020,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.362.722.500,00	1.480.852.000,00	62,68	2.306.400.350,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	48.174.278.626,00	49.850.248.418,00	103,48	41.791.103.814,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.798.937.800,00	2.226.379.406,00	79,54	3.320.689.870,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.579.445.800,00	2.289.617.242,00	88,76	2.198.352.227,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	342.071.900,00	329.157.600,00	96,22	0,00
Kecamatan Sape	433.171.000,00	367.093.000,00	84,75	475.085.000,00
Kecamatan Bolo	522.604.000,00	522.604.000,00	100,00	612.408.000,00
Kecamatan Woha	519.830.000,00	424.860.000,00	81,73	544.884.000,00
Kecamatan Lambu	369.508.000,00	347.240.121,00	93,97	351.878.000,00
Kecamatan Monta	374.545.400,00	364.644.904,00	97,36	402.596.000,00
Kecamatan Wera	393.909.000,00	390.738.000,00	99,19	461.040.000,00
Kecamatan Madapangga	357.884.776,00	318.939.000,00	89,12	397.934.000,00
Kecamatan Langgudu	420.246.000,00	390.720.000,00	92,97	450.666.000,00
Kecamatan Palibelo	354.057.000,00	340.200.000,00	96,09	361.460.000,00
Kecamatan Belo	394.018.000,00	369.728.000,00	93,84	394.794.000,00
Kecamatan Ambalawi	371.039.000,00	299.919.979,00	80,83	361.994.824,00
Kecamatan Donggo	318.455.000,00	318.398.694,00	99,98	338.090.000,00
Kecamatan Wawo	380.445.000,00	359.735.000,00	94,56	381.110.000,00
Kecamatan Soromandi	391.499.950,00	379.178.000,00	96,85	390.830.000,00
Kecamatan Sanggar	345.028.000,00	325.034.950,00	94,21	374.988.315,00
Kecamatan Parado	315.700.000,00	300.017.900,00	95,03	311.680.000,00
Kecamatan Tambora	382.274.000,00	375.135.000,00	98,13	348.825.000,00
Kecamatan Lambitu	254.115.000,00	254.115.000,00	100,00	327.850.000,00
Jumlah	505.098.630.353,00	488.796.577.286,94	96,77	543.166.017.911,82





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

3. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp488.796.577.286,94 terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp3.182.975.909,04 yang telah dipulihkan senilai Rp593.469.272,94 pada 8 s.d 21 Mei 2026 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK Nomor: 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29
Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	25.240.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	25.240.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.523.000.000,00	790.000.000,00	51,87	11.552.500.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.523.000.000,00	790.000.000,00	51,87	11.552.500.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.374.000.000,00	7.117.639.565,00	96,52	5.112.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.695.000.000,00	4.440.000.000,00	94,57	5.112.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.679.000.000,00	2.677.639.565,00	99,95	0,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	820.000.000,00	720.000.000,00	87,80	550.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	820.000.000,00	720.000.000,00	87,80	550.000.000,00
• Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	898.749.000,00	877.637.000,00	97,65	794.052.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	898.749.000,00	877.637.000,00	97,65	794.052.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP				
• Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	2.644.760.000,00	2.374.751.300,00	89,79	2.902.666.650,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	2.644.760.000,00	2.374.751.300,00	89,79	2.902.666.650,00
• Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	15.060.891.000,00	15.046.384.770,00	99,90	16.180.211.343,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	15.060.891.000,00	15.046.384.770,00	99,90	16.180.211.343,00
• Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.977.810.000,00	3.038.909.350,00	102,05	2.748.747.800,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.977.810.000,00	3.038.909.350,00	102,05	2.748.747.800,00
Jumlah	31.499.210.000,00	30.165.321.985,00	95,77	65.180.177.793,00

Penjelasan:

1. Tinggi rendahnya realisasi Belanja Hibah di Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena:
 - a. Alokasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat hanya pada KODIM 1608/Bima dalam rangka dukungan kegiatan TMD. Belanja hibah tersebut didasari dengan Keputusan Bupati Bima





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: 188.45/307/06.16 Tahun 2025 tentang Penetapan Kodim 1608/Bima Sebagai Penerima Hibah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025.

- b. Tahun 2025 realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat pemberian hibah kepada KPUD dan Bawaslu terkait kegiatan pilkada dan pilpres.
2. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025, dapat dilihat pada *lampiran I*.
3. Adapun rincian pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2025 dan 2024

Partai Politik	Tahun 2024 (Rp)			Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Golongan Karya (Golkar)	123.063.000,00	123.063.000,00	100,00	123.063.000,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	99.969.000,00	99.969.000,00	100,00	99.969.000,00
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	86.841.000,00	86.841.000,00	100,00	86.841.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	85.527.000,00	85.527.000,00	100,00	85.527.000,00
Partai Demokrat	70.176.000,00	70.176.000,00	100,00	70.176.000,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	69.789.000,00	69.789.000,00	100,00	69.789.000,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	64.782.000,00	64.782.000,00	100,00	64.782.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	62.655.000,00	62.655.000,00	100,00	62.655.000,00
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	53.469.000,00	53.469.000,00	100,00	53.469.000,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	49.839.000,00	49.839.000,00	100,00	49.839.000,00
Partai Bulan Bintang (PBB)	27.942.000,00	27.942.000,00	100,00	27.942.000,00
Jumlah	794.052.000,00	794.052.000,00	100,00	794.052.000,00

4. Rincian belanja hibah pada masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31
Belanja Hibah Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	2.172.000.000,00	2.152.000.000,00	99,08	3.627.000.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	25.164.461.000,00	24.121.684.985,00	95,86	24.414.125.793,00
Dinas Kesehatan	265.000.000,00	265.000.000,00	100,00	285.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	415.000.000,00	415.000.000,00	100,00	431.000.000,00
Dinas Pariwisata	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	150.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	800.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	749.000.000,00	639.000.000,00	85,31	759.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.213.749.000,00	1.152.637.000,00	94,97	34.564.052.000,00
Jumlah	31.499.210.000,00	30.165.321.985,00	95,77	65.180.177.793,00

5. Dari realisasi Belanja Hibah senilai Rp30.165.321.985,00 terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp46.932.000,00 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK Nomor: 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026. Atas kelebihan ini, s.d. LK Audited terbit belum ada pengembalian yang dilakukan.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32
Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	100.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	100.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	396.000.000,00	396.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	210.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	210.000.000,00
Jumlah	451.000.000,00	451.000.000,00	100,00	310.600.000,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena meningkatnya belanja bantuan Pendidikan bagi pelajar/mahasiswa.
2. Pemberian bantuan sosial Tahun 2025, dapat dilihat pada *lampiran II*.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.33
Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	276.500.000,00	273.738.000,00	99,00	241.362.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.525.733.415,80	36.383.268.312,00	92,05	45.626.675.608,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.385.336.167,00	70.165.358.002,00	87,29	111.617.512.105,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.730.804.468,00	48.711.569.675,00	90,66	52.778.791.401,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.662.370.195,00	7.592.776.741,00	99,09	2.667.420.035,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	55.950.000,00
Jumlah	181.580.744.245,80	163.126.710.730,00	89,84	212.987.711.149,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Penjelasan:

1. Tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal TA 2025 dibandingkan tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) khususnya DAU *earmark* Bidang PU, DAK Fisik Jalan dan DAK Fisik Irigasi sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan KMK Nomor 29 tahun 2025 yang menyebabkan komponen Belanja Modal dirasionalisasi/dikurangi.
2. Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.34
Belanja Modal di Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	4.455.633.640,00	4.171.013.200,00	93,61	7.500.591.000,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.063.928.216,00	1.052.560.830,00	98,93	791.008.100,00
Inspektorat	801.135.703,80	747.212.040,00	93,27	244.123.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	64.476.988.593,00	59.489.984.728,00	92,27	93.916.113.586,00
Dinas Kesehatan	34.971.512.271,00	27.976.775.981,00	80,00	22.491.826.108,00
Dinas Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100.445.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	667.000.000,00	661.780.000,00	99,22	271.273.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	80.000.000,00	79.961.650,00	99,95	209.522.500,00
Dinas Perhubungan	6.088.819.250,00	5.933.186.975,00	97,44	938.255.672,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	478.110.000,00	476.894.449,00	99,75	26.108.200,00
Dinas Pariwisata	238.629.950,00	238.419.000,00	99,91	3.985.066.505,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.722.015.777,00	51.744.286.554,00	91,22	57.705.689.961,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	281.900.000,00	279.068.000,00	99,00	1.436.428.882,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.000.000,00	149.200.000,00	99,47	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	398.720.000,00	397.406.000,00	99,67	1.574.019.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	192.495.000,00	190.614.500,00	99,02	625.380.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	250.000.000,00	249.230.000,00	99,69	147.324.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.464.290.645,00	1.459.182.491,00	99,65	3.376.418.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.500.000,00	24.424.000,00	99,69	50.937.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.514.100.000,00	1.511.568.000,00	99,83	2.166.147.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.000.000,00	35.980.000,00	99,94	0,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	635.318.000,00	633.870.000,00	99,77	356.242.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	185.000.000,00	184.687.000,00	99,83	215.100.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,00	59.940.000,00	99,90	5.476.000,00
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	169.735.000,00	169.735.000,00	100,00	165.450.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	10.000.000,00	9.777.990,00	97,78	619.913.900,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	576.689.200,00	539.428.700,00	93,54	611.000.783,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	296.100.000,00	295.456.000,00	99,78	109.759.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	18.648.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	4.809.200.000,00	3.886.390.942,00	80,81	10.959.251.776,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.500.000,00	14.424.000,00	99,48	278.154.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	221.773.000,00	221.448.000,00	99,85	1.893.265.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	41.250.000,00	40.690.000,00	98,64	0,00
Kecamatan Sape	8.850.000,00	8.848.250,00	99,98	9.407.000,00
Kecamatan Bolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Woha	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	17.096.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Kecamatan Lambu	15.000.000,00	14.818.500,00	98,79	15.900.000,00
Kecamatan Monta	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	20.201.000,00
Kecamatan Wera	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	10.554.000,00
Kecamatan Madapangga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	21.600.000,00
Kecamatan Langgudu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.554.000,00
Kecamatan Palibelo	15.000.000,00	13.741.250,00	91,61	18.204.000,00
Kecamatan Belo	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Kecamatan Ambalawi	15.000.000,00	13.300.000,00	88,67	0,00
Kecamatan Donggo	10.000.000,00	9.956.700,00	99,57	10.821.416,00
Kecamatan Wawo	11.850.000,00	11.850.000,00	100,00	11.591.000,00
Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sanggar	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Parado	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	17.759.000,00
Kecamatan Tambora	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50	9.286.260,00
Kecamatan Lambitu	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Jumlah	181.580.744.245,80	163.126.710.730,00	89,84	212.987.711.149,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.35
Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	276.500.000,00	273.738.000,00	99,00	241.362.000,00
Belanja Modal Tanah Persil	245.000.000,00	243.738.000,00	99,48	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	135.000.000,00	133.738.000,00	99,07	0,00
Belanja Modal Tanah Non Persil	31.500.000,00	30.000.000,00	95,24	108.915.000,00
Belanja Modal Tanah Basah	31.500.000,00	30.000.000,00	95,24	108.915.000,00
Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	132.447.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	132.447.000,00
Jumlah	276.500.000,00	273.738.000,00	99,00	241.362.000,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Tanah di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya pengalokasian anggarannya untuk Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah dan Belanja Modal Tanah Basah.
- Belanja Modal Tanah tersebut pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima dengan uraian sebagai berikut:
 - Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (pembangunan PUSTU) berlokasi di Desa Mandala Kecamatan Wera.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah (pembangunan Masjid Nurul Amal) di Desa Rabakodo Kecamatan Woha. Belanja Modal Tanah tersebut merupakan belanja ganti kerugian pengadaan yang digunakan untuk perluasan pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Sarae Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima atas Bidang Tanah SHM Nomor 270 seluas 187 M2 atas nama Siti Asiah.
- Belanja Modal Tanah Basah (normalisasi sungai) Desa Cenggu Kecamatan Belo.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	6.145.750.000,00	6.111.809.580,00	99,45	1.869.977.660,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	3.900.000.000,00	3.892.500.000,00	99,81	1.280.600.000,00
Belanja Modal Excavator	3.900.000.000,00	3.892.500.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	1.270.800.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	2.245.750.000,00	2.219.309.580,00	98,82	589.377.660,00
Belanja Modal Compressor	0,00			3.996.000,00
Belanja Modal Pompa	3.750.000,00	3.749.580,00	99,99	2500000,00
Belanja Modal Mesin Bor	0,00			1.998.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	2.242.000.000,00	2.215.560.000,00	98,82	563.850.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00			17.033.660,00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.952.200.000,00	5.942.552.001,00	99,84	11.138.380.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.945.600.000,00	5.935.952.001,00	99,84	11.138.380.000,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	34.750.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	3.405.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	705.680.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.945.600.000,00	5.935.952.001,00	99,84	6.992.950.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	263.275.000,00	252.831.000,00	96,03	9.897.430,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	675.000,00	675.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	675.000,00	675.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	262.600.000,00	252.156.000,00	96,02	9.897.430,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	142.600.000,00	132.600.000,00	89,48	3.497.430,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	120.000.000,00	119.556.000,00	99,63	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	158.000.000,00	157.597.260,00	99,75	124.800.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	158.000.000,00	157.597.260,00	99,75	124.800.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.000.000,00	2.959.260,00	98,64	0,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	155.000.000,00	154.638.000,00	99,77	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.881.355.759,80	5.704.375.158,00	96,99	8.858.217.200,00
Belanja Modal Alat Kantor	980.988.950,00	963.541.440,00	98,22	420.150.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	48.097.000,00	47.730.000,00	99,24	52.380.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	932.891.950,00	915.811.440,00	98,17	367.770.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.723.156.809,80	4.564.888.218,00	96,65	8.152.507.200,00
Belanja Modal Mebel	3.678.031.993,80	3.559.133.578,00	96,77	6.433.270.400,00
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	432.388.816,00	400.123.640,00	92,54	1.106.680.800,00
Belanja Modal Alat Dapur	15.000.000,00	14.763.000,00	98,42	2.500.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.660.000,00	493.837.000,00	98,64	519.112.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	97.076.000,00	97.031.000,00	99,95	67.944.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	177.210.000,00	175.945.500,00	99,29	285.560.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	129.037.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	133.210.000,00	132.489.000,00	99,46	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	44.000.000,00	43.456.500,00	98,76	36.963.000,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	117.660.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	723.750.400,00	562.513.340,00	77,72	558.945.038,00
Belanja Modal Alat Studio	686.350.400,00	525.163.340,00	76,52	430.649.400,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	570.350.000,00	409.383.350,00	71,78	400.949.400,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	87.920.400,00	87.752.990,00	99,81	29.700.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	28.080.000,00	28.027.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	37.400.000,00	37.350.000,00	99,87	128.295.638,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	27.400.000,00	27.350.000,00	99,82	118.295.638,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.131.478.940,00	1.028.263.000,00	90,88	6.012.252.964,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	105.000.000,00	102.090.000,00	97,23	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	105.000.000,00	102.090.000,00	97,23	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.026.478.940,00	926.173.000,00	90,23	6.012.252.964,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.026.478.940,00	926.173.000,00	90,23	6.012.252.964,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.826.720.000,00	1.819.305.687,00	99,59	3.455.698.500,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	285.000.000,00	284.499.999,00	99,82	538.200.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	285.000.000,00	284.499.999,00	99,82	511.200.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.541.720.000,00	1.534.805.688,00	99,55	2.917.498.500,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	189.720.000,00	189.630.597,00	99,95	429.100.500,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.352.000.000,00	1.345.175.091,00	99,50	2.488.398.000,00
Belanja Modal Komputer	3.510.031.824,00	3.397.467.508,00	96,79	4.311.154.698,00
Belanja Modal Komputer Unit	2.811.922.174,00	2.744.349.468,00	97,60	3.352.442.534,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	36.296.500,00
Belanja Modal Personal Computer	2.811.922.174,00	2.744.349.468,00	97,60	3.286.156.034,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.990.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	698.109.650,00	653.118.040,00	93,56	958.712.164,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	593.109.650,00	549.772.040,00	92,69	712.259.164,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	22.325.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	105.000.000,00	103.346.000,00	98,42	209.618.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.510.000,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	170.150.900,00	154.143.490,00	90,59	209.836.085,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	170.150.900,00	154.143.490,00	90,59	209.836.085,00
Belanja Modal Optik	170.150.900,00	154.143.490,00	90,59	209.836.085,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	124.000.000,00	123.940.000,00	99,95	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung	124.000.000,00	123.940.000,00	99,95	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	124.000.000,00	123.940.000,00	99,95	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	458.630.250,00	455.572.500,00	99,33	188.597.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	458.630.250,00	455.572.500,00	99,33	188.597.000,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	458.630.250,00	455.572.500,00	99,33	188.597.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	95.000.000,00	93.403.000,00	98,32	25.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	95.000.000,00	93.403.000,00	98,32	25.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	20.000.000,00	19.921.000,00	99,61	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	75.000.000,00	73.482.000,00	97,98	25.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.420.205.813,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.420.205.813,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.420.205.813,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.284.683.624,00	6.292.183.624,00	100,12	896.861.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	6.239.276.624,00	6.246.776.624,00	100,12	896.861.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.493.461.424,00	5.500.961.424,00	100,14	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	745.815.200,00	745.815.200,00	100,00	896.861.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	45.407.000,00	45.407.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	45.407.000,00	45.407.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.800.706.718,00	4.287.311.164,00	63,04	2.546.852.120,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.800.706.718,00	4.287.311.164,00	63,04	2.546.852.120,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.800.706.718,00	4.287.311.164,00	63,04	2.546.852.120,00
Jumlah	39.525.733.415,80	36.383.268.312,00	92,05	45.626.675.608,00

Rincian saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Masing-Masing Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	3.005.633.640,00	2.727.454.200,00	90,74	6.961.117.000,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.063.928.216,00	1.052.560.830,00	98,93	791.008.100,00
Inspektorat	801.135.703,80	747.212.040,00	93,27	244.123.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	9.766.103.624,00	9.760.462.287,00	99,94	14.697.881.413,00
Dinas Kesehatan	9.327.640.418,00	7.606.865.219,00	81,55	7.349.383.788,00
Dinas Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	087.000.000,00	86.980.000,00	99,98	82.773.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	80.000.000,00	79.961.650,00	99,95	209.522.500,00
Dinas Perhubungan	206.759.250,00	203.890.000,00	98,61	137.674.672,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	478.110.000,00	476.894.449,00	99,75	26.108.200,00
Dinas Pariwisata	238.629.950,00	238.419.000,00	99,91	192.511.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.347.932.414,00	8.252.247.314,00	98,85	913.613.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.400.000,00	5.330.000,00	98,70	275.285.200,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.000.000,00	149.200.000,00	99,47	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	191.350.000,00	191.036.000,00	99,84	1.288.409.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	42.495.000,00	42.429.500,00	99,85	223.480.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	147.324.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.283.750.000,00	1.279.192.491,00	99,64	2.840.425.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.500.000,00	24.424.000,00	99,69	50.937.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	468.600.000,00	468.068.000,00	99,89	862.378.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.000.000,00	35.980.000,00	99,94	0,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	160.318.000,00	159.456.000,00	99,46	37.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	21.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,00	59.940.000,00	99,90	5.476.000,00
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	169.735.000,00	169.735.000,00	100,00	165.450.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	10.000.000,00	9.777.990,00	97,78	619.913.900,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	576.689.200,00	539.428.700,00	93,54	561.050.783,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	296.100.000,00	295.456.000,00	99,78	109.759.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	18.648.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	2.150.000.000,00	1.227.190.942,00	57,08	4.373.230.876,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.500.000,00	14.424.000,00	99,48	278.154.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	221.773.000,00	221.448.000,00	99,85	1.893.265.000,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	41.250.000,00	40.690.000,00	98,64	0,00
Kecamatan Sape	8.850.000,00	8.848.250,00	99,98	9.407.000,00
Kecamatan Bolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Woha	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	17.096.000,00
Kecamatan Lambu	15.000.000,00	14.818.500,00	98,79	15.900.000,00
Kecamatan Monta	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	20.201.000,00
Kecamatan Wera	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	10.554.000,00
Kecamatan Madapangga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	21.600.000,00
Kecamatan Langgudu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.554.000,00
Kecamatan Palibelo	15.000.000,00	13.741.250,00	91,61	18.204.000,00
Kecamatan Belo	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Kecamatan Ambalawi	15.000.000,00	13.300.000,00	88,67	0,00
Kecamatan Donggo	10.000.000,00	9.956.700,00	99,57	10.821.416,00
Kecamatan Wawo	11.850.000,00	11.850.000,00	100,00	11.591.000,00
Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sanggar	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Kecamatan Parado	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	17.759.000,00
Kecamatan Tambora	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50	9.286.260,00
Kecamatan Lambitu	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Jumlah	39.525.733.415,80	36.383.268.312,00	92,05	45.626.675.608,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	70.052.043.392,00	60.229.507.002,00	85,98	98.667.139.805,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.852.043.392,00	58.164.014.702,00	85,72	97.945.239.805,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.424.789.540,00	2.417.792.540,00	99,71	4.395.536.142,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	23.016.179.078,00	18.258.010.462,00	79,33	9.783.759.520,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	252.500.000,00	252.350.000,00	99,94	1.369.031.226,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	38.941.666.574,00	34.024.127.500,00	87,37	70.039.136.338,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	152.980.800,00	152.980.800,00	100,00	1.885.219.200,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	207.370.000,00	206.370.000,00	99,52	251.400.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.000.000,00	49.867.000,00	99,73	30.950.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.175.050.000,00	1.173.850.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	82.060.000,00	81.838.000,00	99,73	0,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	645.917.400,00	644.947.400,00	99,85	4.855.286.486,00
Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000,00	99.600.000,00	99,60	0,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	125.000.000,00	124.797.000,00	99,84	99.642.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.700.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00	99.754.000,00	99,75	69.774.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	300.000.000,00	299.200.000,00	99,73	34.210.000,00
Belanja Modal Taman	278.530.000,00	278.530.000,00	100,00	5.031.594.893,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.200.000.000,00	2.065.492.300,00	93,87	721.900.000,00
Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.500.000.000,00	1.432.970.000,00	95,53	0,00
Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	700.000.000,00	632.522.300,00	90,32	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	721.900.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.072.400.000,00	7.055.357.000,00	99,76	6.553.578.650,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.072.400.000,00	7.055.357.000,00	99,76	6.553.578.650,00
Belanja Modal Pagar	7.072.400.000,00	7.055.357.000,00	99,76	6.553.578.650,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.260.892.775,00	2.880.494.000,00	88,33	6.396.793.650,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.260.892.775,00	2.880.494.000,00	88,33	6.396.793.650,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.260.892.775,00	2.880.494.000,00	88,33	6.396.793.650,00
Jumlah	80.385.336.167,00	70.165.358.002,00	87,29	111.617.512.105,00

Rincian saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Masing-Masing Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	950.000.000,00	944.909.000,00	99,46	522.158.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	47.580.514.774,00	42.645.195.700,00	89,63	76.552.488.138,00
Dinas Kesehatan	24.367.871.853,00	19.161.670.762,00	78,63	13.424.442.320,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
Dinas Perhubungan	182.060.000,00	181.592.000,00	99,74	300.581.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.307.819.540,00	2.239.689.540,00	78,46	7.900.639.460,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	919.781.682,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	207.370.000,00	206.370.000,00	99,52	285.610.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	401.900.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	250.000.000,00	249.230.000,00	99,69	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.045.500.000,00	1.043.500.000,00	99,81	1.303.769.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	475.000.000,00	474.414.000,00	99,88	318.742.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	160.000.000,00	159.887.000,00	99,93	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	49.945.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	2.659.200.000,00	2.659.200.000,00	100,00	5.650.800.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	194.100.000,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.792.555.005,00
Jumlah	80.385.336.167,00	70.165.358.002,00	87,29	111.617.512.105,00

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp70.165.358.002,00 terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp326.073.000,00 yang telah dipulihkan senilai Rp16.252.000,00 pada tanggal 6 s.d. 21 Mei 2026 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK Nomor: 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.40
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	39.653.033.823,00	35.640.907.100,00	89,88	35.974.403.150,00
Belanja Modal Jalan	24.424.716.823,00	21.304.315.300,00	87,22	33.796.003.150,00
Belanja Modal Jalan Kabupaten	23.412.704.173,00	20.292.812.650,00	86,67	33.796.003.150,00
Belanja Modal Jalan Desa	1.012.012.650,00	1.011.502.650,00	99,95	0,00
Belanja Modal Jembatan	15.228.317.000,00	14.336.591.800,00	94,14	2.178.400.000,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	716.250.000,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	15.228.317.000,00	14.336.591.800,00	94,14	1.462.150.000,00
Belanja Modal Bangunan Air	7.779.230.000,00	6.962.867.600,00	89,51	13.667.034.351,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.563.230.000,00	5.759.627.600,00	93,85	12.917.034.351,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.306.930.000,00	4.681.773.900,00	95,75	12.917.034.351,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1.106.300.000,00	929.668.700,00	84,03	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	150.000.000,00	148.185.000,00	98,79	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.216.000.000,00	1.203.240.000,00	98,95	750.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.216.000.000,00	1.203.240.000,00	98,95	750.000.000,00
Belanja Modal Instalasi	560.540.645,00	555.090.000,00	99,03	543.817.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	380.000.000,00	375.100.000,00	98,71	7.824.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	380.000.000,00	375.100.000,00	98,71	7.824.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	180.540.645,00	179.990.000,00	99,70	535.993.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	180.540.645,00	179.990.000,00	99,70	0,00
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	535.993.000,00
Belanja Modal Jaringan	5.700.000.000,00	5.547.704.975,00	97,33	1.637.316.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	5.700.000.000,00	5.547.704.975,00	97,33	1.448.816.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.700.000.000,00	5.547.704.975,00	97,33	1.448.816.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	38.000.000,00	5.000.000,00	13,16	956.220.900,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	38.000.000,00	5.000.000,00	13,16	956.220.900,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	38.000.000,00	5.000.000,00	13,16	956.220.900,00
Jumlah	53.730.804.468,00	48.711.569.675,00	90,66	52.778.791.401,00

Rincian saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.41
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Masing-Masing Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	17.316.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	7.824.000,00
Dinas Kesehatan	1.254.000.000,00	1.208.240.000,00	96,35	1.702.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	380.000.000,00	375.100.000,00	98,71	188.500.000,00
Dinas Perhubungan	5.700.000.000,00	5.547.704.975,00	97,33	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.066.263.823,00	41.252.349.700,00	89,55	48.891.437.501,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	150.000.000,00	148.185.000,00	98,79	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	180.540.645,00	179.990.000,00	99,70	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	0,00	0,00	0,00	935.220.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	535.993.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Jumlah	53.730.804.468,00	48.711.569.675,00	90,66	52.778.791.401,00

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp48.711.569.675,00 terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp197.697.000,00 yang telah dipulihkan senilai Rp25.820.000,00 pada tanggal 6 s.d. 21 Mei 2026 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK Nomor: 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	606.000.000,00	601.069.346,00	99,19	343.927.600,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	606.000.000,00	601.069.346,00	99,19	343.927.600,00
Belanja Modal Buku Umum	606.000.000,00	601.069.346,00	99,19	343.927.600,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	79.438.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	79.438.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	24.938.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	500.000.000,00	498.650.000,00	99,73	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	500.000.000,00	498.650.000,00	99,73	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	500.000.000,00	498.650.000,00	99,73	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.218.154.435,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.218.154.435,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.218.154.435,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.534.370.195,00	6.493.057.395,00	99,37	16.400.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.526.397.095,00	6.485.137.195,00	99,37	16.400.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.415.465.295,00	6.374.205.395,00	99,36	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	110.931.800,00	110.931.800,00	100,00	16.400.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	7.973.100,00	7.920.200,00	99,34	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	7.973.100,00	7.920.200,00	99,34	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	22.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	22.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	22.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Jumlah	7.662.370.195,00	7.592.776.741,00	99,09	2.667.420.035,00

Rincian saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di Masing-Masing Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	500.000.000,00	498.650.000,00	99,73	0,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.130.370.195,00	7.084.326.741,00	99,35	2.657.920.035,00
Dinas Kesehatan	22.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.000.000,00	9.800.000,00	98,00	0,00
Jumlah	7.662.370.195,00	7.592.776.741,00	99,09	2.667.420.035,00

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp7.592.776.741,00 terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp50.532.000,00 yang telah dipulihkan seluruhnya pada tanggal 6 s.d. 21 Mei 2026 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK Nomor: 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44
Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	55.950.000,00

Rincian saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.45
Belanja Modal Aset Lainnya di Masing-Masing Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	55.950.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.46
Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	3.938.150.000,00	87,51	1.621.640.000,00
• Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	3.938.150.000,00	87,51	1.621.640.000,00
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	3.938.150.000,00	87,51	1.621.640.000,00
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	3.938.150.000,00	87,51	1.621.640.000,00
Jumlah	4.500.000.000,00	3.938.150.000,00	87,51	1.621.640.000,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti, penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan, sehingga capaian realisasinya disesuaikan dengan kondisi yang dimaksud.

Adapun rincian belanja tidak terduga diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Tidak Terduga untuk Penanganan tanggap darurat bencana Hidrometeorologi di 7 (tujuh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bima (BPBD Kab. Bima) sebesar Rp500.000.000,00.
- Belanja Tidak Terduga untuk penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Tahun 2025 (BPBD Kab. Bima) sebesar Rp680.000.000,00
- Belanja Tidak terduga untuk pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana vital dalam masa transisi darurat ke pemulihan bencana alam hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Bima (Dinas PUPR Kab. Bima) sebesar Rp460.000.000,00.
- Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Korban Bencana Alam dan Non Alam di 15 (lima belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bima (Setda Kab. Bima) sebesar Rp448.000.000,00.
- Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Korban Bencana Alam dan Non Alam di 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bima (Setda Kab. Bima) sebesar Rp544.000.000,00.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- f. Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat bencana alam Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Bima (BPBD Kab. Bima) sebesar Rp272.950.000,00.
- g. Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat bencana alam Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Bima Dinas PUPR Kab. Bima) sebesar Rp727.050.000,00.
- h. Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Alam dan Non Alam Kebakaran dan angin kencang di 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bima (Setda Kab. Bima) sebesar Rp241.000.000,00.
- i. Belanja bantuan tidak terduga untuk operasi pencarian korban hilang di Gunung Sangiang Api Kecamatan Wera (BPBD Kab. Bima) sebesar Rp65.150.000,00.

Belanja Tidak Terduga tahun 2025 dilandasi dengan:

1. Peraturan Bupati Bima Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
2. SK Bupati Bima Nomor: 188.45/370/07.04 Tahun 2025 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Bima.
3. SK Bupati Bima Nomor: 188.45/56/07.04 Tahun 2025 Tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Bima.
4. SK Bupati Bima Nomor: 188.45/70/07.04 Tahun 2025 Tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Bima.
5. Surat Penyataan Bupati Bima Nomor: 360/012/07.4/2025 Tahun 2025.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.47
Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	5.750.828.136,30	4.252.200.290,00	77,94	3.318.345.692,00
Belanja Bantuan Keuangan	307.866.618.820,00	281.790.273.264,00	91,53	293.976.842.863,00
Jumlah	313.617.446.956,30	286.042.473.554,00	91,21	297.295.188.555,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.48
Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.271.136.636,30	2.983.619.018,00	69,86	0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.271.136.636,30	2.983.619.018,00	69,86	0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.271.136.636,30	2.983.619.018,00	69,86	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.479.691.500,00	1.268.581.272,00	85,73	3.318.345.692,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.479.691.500,00	1.268.581.272,00	85,73	3.318.345.692,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.479.691.500,00	1.268.581.272,00	85,73	3.318.345.692,00
Jumlah	5.750.828.136,30	4.252.200.290,00	73,94	3.318.345.692,00

Penjelasan:

1. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah tahun 2024 tidak terbagi pada masing-masing kode Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah maupun Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah, namun disatukan penganggarnya pada kode Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah.
2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan persentase (%) setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh masing-masing Pemerintah Desa dan realisasi Retribusi Daerah.
3. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa didasarkan pada Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa Dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023;
4. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada *lampiran III*.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan – LRA Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.49
Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	307.866.618.820,00	281.790.273.264,00	91,46	293.976.842.863,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	307.866.618.820,00	281.790.273.264,00	91,46	293.976.842.863,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	307.866.618.820,00	281.790.273.264,00	91,46	293.976.842.863,00
Jumlah	307.866.618.820,00	281.790.273.264,00	91,53	293.976.842.863,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh menurunnya alokasi Dana Desa (DD) dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD.
2. Belanja Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada Pemerintah Desa yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun 2025 Nomor 3). Rincian desa penerima Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada *lampiran IV*.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.50
Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	39.926.493.536,96	39.929.751.363,52	100,01	30.078.203.358,45
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20,00	1.000.000.000,00
Jumlah	38.926.493.536,96	39.729.751.363,52	102,06	29.078.203.358,45

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.51
Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.926.493.536,96	39.926.272.899,52	100,00	30.071.323.358,45
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.478.464,00	0,00	6.880.000,00
Jumlah	39.926.493.536,96	39.929.751.363,52	100,01	30.078.203.358,45

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rendahnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya disebabkan karena tingginya realisasi Belanja yang mengakibatkan cukup tingginya nilai Defisit anggaran; dan
- 2) Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bima tidak menetapkan anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, namun ada penerimaan atas Pinjaman Daerah yang diperoleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima. Selain hal tersebut, rendahnya capaian realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah disebabkan oleh kurang lancarnya pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir oleh Koperasi, UMKM maupun kelompok usaha lainnya selaku penerima manfaat Dana Bergulir.

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.52
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	39.926.493.536,96	39.926.272.899,52	100,00	29.581.461.463,92
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	39.926.493.536,96	39.926.272.899,52	100,00	29.581.461.463,92
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	39.926.493.536,96	39.926.272.899,52	100,00	29.581.461.463,92
Sisa Belanja Lainnya	0,00	(220.637,44)	0,00	489.861.894,53
Sisa Dana BOS	0,00	(220.637,44)	0,00	22.953.446,53
Sisa Dana BOS	0,00	(220.637,44)	0,00	22.953.446,53
Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	466.908.448,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	466.908.448,00
Jumlah	39.926.493.536,96	39.926.272.899,52	100,00	30.071.323.358,45

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.53
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	3.478.464,00	0,00	6.880.000,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	3.478.464,00	0,00	6.880.000,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	3.478.464,00	0,00	6.880.000,00
Jumlah	0,00	3.478.464,00	0,00	6.880.000,00

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2025 tidak menetapkan pagu anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, namun pada Tahun 2025 ada penerimaan pembayaran atas Pinjaman Daerah yang diperoleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima selaku salah satu pengelola Dana Bergulir yang bersumber dari penjaminan Dana PER pada PT BRI Cabang Bima sebesar Rp3.478.464,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada *poin 5.3.1.2.1*.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.54
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20,00	1.000.000.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20,00	1.000.000.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Penjelasan:

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di Tahun 2025 merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Bima Karya Sejahtera (BKS).

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.55
Penyertaan Modal Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20,00	1.000.000.000,00
• PDAM Bima	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
• Perumda Bima Karya Sejahtera	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
• PT BPR Pesisir Akbar	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
• PD BPR NTB	0,00	0,00	0,00	0,00
• PT Bank NTB Syariah	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
• PT Jamkrida NTB Bersaing	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20,00	1.000.000.000,00

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2025 telah melakukan penyertaan modal pada Perumda Bima Karya Sejahtera (BKS) sebesar Rp200.000.000,00. Porsi kepemilikan saham sebesar 100% dan total penyertaan modal yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp5.619.889.215,63. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima.

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.56
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)			Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah				
✓ Pendapatan Asli Daerah	220.092.202.270,00	209.559.079.716,12	95,21	169.925.922.940,43
✓ Pendapatan Transfer	1.834.998.222.557,00	1.825.056.543.631,00	99,46	1.832.006.301.746,00
✓ Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	88.792.606.124,00
➤ Belanja Daerah				
✓ Belanja Operasi	1.620.643.248.454,86	1.579.146.679.246,94	97,44	1.567.972.000.927,92
✓ Belanja Modal	181.580.744.245,80	163.126.710.730,00	89,84	212.987.711.149,00
✓ Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	3.938.150.000,00	87,51	1.621.640.000,00
➤ Belanja Transfer				
✓ Belanja Bagi Hasil	5.750.828.136,30	4.252.200.290,00	73,94	3.318.345.692,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan	307.866.618.820,00	281.790.273.264,00	91,53	293.976.842.863,00
➤ Pembiayaan Daerah				
✓ Penerimaan Pembiayaan	39.926.493.536,96	39.929.751.363,52	100,01	30.078.203.358,45
✓ Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20,00	1.000.000.000,00
Jumlah	0,00	68.415.882.472,70	0,00	39.926.493.536,96





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp68.438.922.185,39 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.57
SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
➤ Dana SiLPA Terikat	
✓ Dana pada Kas di BLUD	9.479.198.469,58
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	214.489.449,70
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Sisa DAU <i>Earmark</i> PPPK	2.174.766.063,00
• Sisa DAU <i>Earmark</i> Kesehatan	3.093.300.218,00
• Sisa DAU <i>Earmark</i> Pendidikan	5.481.927.056,42
• Sisa DAU untuk paket pekerjaan Luncuran (Dikpora)	1.763.600.000,00
• Sisa DAU untuk paket pekerjaan Luncuran (PUPR)	4.119.061.250,00
• Sisa DAK untuk paket pekerjaan Luncuran (Dinas Kesehatan)	3.986.272.018,00
• Sisa DBHCHT untuk paket pekerjaan Luncuran (Dinas Kesehatan)	299.575.000,00
• Sisa DAK Non Fisik- Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	35.959.161.000,00
• Sisa DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskesmas	948.116.632,00
• Sisa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah (Pendapatan Hibah Pusat/Hibah RR)	891.207.400,00
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	
• Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
• Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran	5.207.916,00
Jumlah	68.415.882.472,70

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian SiLPA Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah	57.768.870.005,42
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.207.916,00
Kas di BLUD	9.479.198.469,58
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
Kas Dana BOSP	214.489.449,70
Kas Dana BOK	948.116.632,00
Jumlah	68.415.882.472,70

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LPSAL pada *Poin 5.2.3* dan *Poin 5.2.5*.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan peningkatan dan penurunan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Bima (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.59
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	29.939.689.016,70	16.951.914.630,60
Kas di Bendahara Penerimaan	81.100.000,00	29.250,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	10.152.558,34
Kas di BLUD	8.617.829.469,54	12.619.288.070,81
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	146.743,00
Kas Dana BOSP	55.980.140,72	46.986.856,75
Kas Dana BOK	1.231.894.910,00	0,00
Jumlah	39.926.493.536,96	29.628.518.109,85

Pemerintah Kabupaten Bima menyajikan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 senilai Rp39.926.493.536,96 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir *audited* Tahun 2024 dan saldo Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 senilai Rp29.628.518.109,85 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir *audited* tahun 2023. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.60
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	39.926.493.536,96	30.071.323.358,45

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bima selama Tahun 2025 dan 2024.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.61
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	68.416.103.110,14	39.926.493.536,96





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2025 dan 2024 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun 2026 dan 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA dalam LRA sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 5.1.4*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.2.5* di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.62
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	0,00
Koreksi Silpa atas lebih catat Dana BOS tahun 2023	0,00	(24.033.410,21)
Koreksi Silpa atas kurang catat kas pada PKM Pai tahun 2023	0,00	17.046,82
Koreksi Silpa atas lebih catat kas pada BLUD PKM Sape tahun 2023	0,00	(483.136,00)
Koreksi Silpa atas kurang catat kas pada RSUD Bima tahun 2023	0,00	396.300,00
Koreksi Silpa atas saldo BOK Puskesmas tahun 2023	0,00	466.908.448,00
Koreksi atas Kurang Catat Pendapatan Jasa Giro pada PAUD Negeri Tahun 2024 (TKN Pembina Kec. Ambalawi dan TKN Kuta)	89.362,56	0,00
Koreksi Kas di Bendahara BOSP Tahun 2024 pada TK Insan Kamil yang merupakan sekolah swasta	(310.000,00)	0,00
Jumlah	(220.637,44)	442.805.248,60

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.63
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	57.768.870.005,42	29.939.689.016,70
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	81.100.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.207.916,00	0,00
Kas di BLUD	9.479.198.469,58	8.617.829.469,54
Kas Dana BOSP	214.489.449,70	55.980.140,72
Kas Dana BOK	948.116.632,00	1.231.894.910,00
Jumlah	68.415.882.472,70	39.926.493.536,96

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada LRA sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 5.1.4*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.2.3* di atas.

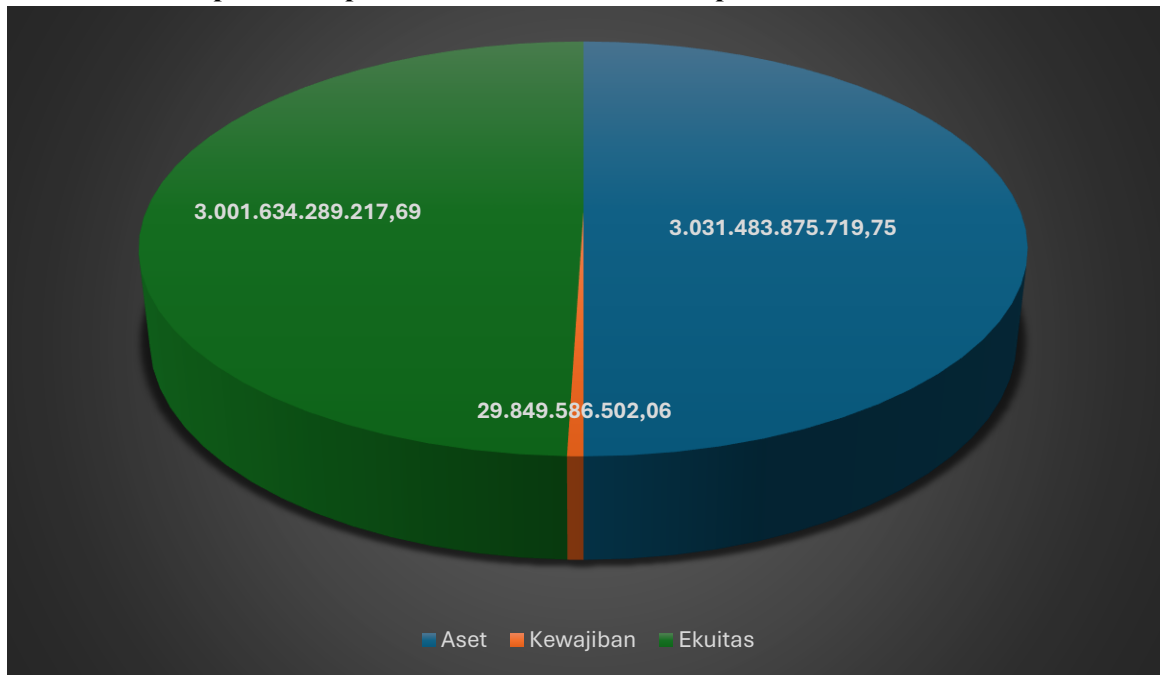




5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Bima terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Komposisi Pos-Pos Neraca Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Diagram 5.3
Komposisi Pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025



Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Bima untuk per tanggal 31 Desember 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Tabel 5.64
Aset Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Aset Lancar	180.757.327.126,31	97.266.298.953,74	83.412.027.265,77	85,76
Investasi Jangka Panjang	78.515.352.256,44	84.628.796.886,02	(6.113.444.629,58)	(7,22)
Aset Tetap	2.649.641.375.145,13	2.678.998.403.647,70	(29.877.533.235,91)	(1,12)
Properti Investasi	80.165.567.282,27	81.303.020.076,27	(1.137.452.794,00)	(1,40)
Aset Lainnya	42.404.253.909,60	45.010.919.617,55	(2.606.665.707,95)	(5,79)
Jumlah	3.030.884.370.079,61	2.987.207.439.181,28	43.676.930.898,33	1,46

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 5.65
Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas dan Setara Kas	68.604.191.786,09	40.009.174.630,37	28.595.017.155,72	71,47
Piutang Pajak Daerah	24.523.290.625,32	22.489.883.236,32	2.033.407.389,00	9,04
Piutang Retribusi Daerah	14.529.257.167,00	9.466.432.167,00	5.062.825.000,00	53,48
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.622.365,10	15.626.600,00	(2.004.234,90)	(12,83)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.941.468.780,00	8.495.053.937,00	(3.553.585.157,00)	(41,83)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	76.837.538.000,00	9.452.884.000,00	67.384.654.000,00	712,85)
Piutang Transfer Antar Daerah	1.024.848.964,00	7.938.405.512,00	(6.913.556.548,00)	(87,09)
Piutang Lainnya	47.131.730,00	517.529.460,00	(470.397.730,00)	(90,89)
Penyisihan Piutang	(31.275.951.077,43)	(26.845.727.935,22)	(4.509.224.049,01)	16,80
Beban Dibayar Dimuka	38.666.666,67	1.906.594.316,00	(1.867.927.649,33)	(97,97)
Persediaan	21.473.262.119,56	23.820.443.030,27	(2.347.180.910,71)	(9,85)
Jumlah	180.757.327.126,31	97.266.298.953,74	83.412.027.265,77	85,76

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.66
Kas dan Setara Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Kas dan Setara Kas				
Kas di Kas Daerah	57.768.870.005,42	29.939.689.016,70	27.829.180.988,72	92,95
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	81.100.000,00	(81.100.000,00)	(100,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.207.916,00	0,00	5.207.916,00	100,00
Kas di Bendahara BLUD	9.517.506.186,97	8.696.807.068,95	820.699.118,02	9,44
Kas Dana BOSP	364.491.045,70	59.683.634,72	304.807.410,98	510,71
Kas Dana BOK Puskesmas	948.116.632,00	1.231.894.910,00	(283.778.278,00)	(23,04)
Jumlah	68.604.191.786,09	40.009.174.630,37	28.595.017.155,72	71,47

Penjelasan:

Rincian Nilai Kas dan Setara Kas Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas di Kas Daerah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas di Kas Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.67
Kas di Kas Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah				
Kas di Kas Daerah	57.768.870.005,42	29.939.689.016,70	27.829.180.988,72	92,95
Kas di Kas Daerah	57.768.870.005,42	29.939.689.016,70	27.829.180.988,72	92,95
Jumlah	57.768.870.005,42	29.939.689.016,70	27.829.180.988,72	92,95





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp57.768.870.005,42 merupakan hasil rekonsiliasi bank, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rekening Bank NTB Nomor : 005.21.00001.00.0 ditetapkan dengan SK Bupati Bima Nomor : 188.45/2/07.3 tanggal 2 Januari Tahun 2025. Adapun sisa Kas pada Rekening tersebut sebesar Rp2.984.788.392,89;
2. Rekening Bank NTB Nomor : 005.21.00070.00.0 ditetapkan dengan SK Bupati Bima Nomor : 188.45/1/07.3 tanggal 2 Januari Tahun 2025. Adapun sisa Kas pada Rekening tersebut sebesar Rp48.756.761.410,53; dan
3. Rekening Bank BNI : 0053761815 ditetapkan dengan SK Bupati Bima Nomor : 188.45/3/07.3 tanggal 2 Januari Tahun 2025. Adapun sisa Kas pada Rekening tersebut sebesar Rp6.027.320.202,00.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas di Bendahara Penerimaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.68
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	81.100.000,00	(80.225.000,00)	(98,92)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	81.100.000,00	(80.225.000,00)	(98,92)
Jumlah	0,00	81.100.000,00	(80.225.000,00)	(98,92)

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas di Bendahara Pengeluaran serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.69
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.207.916,00	0,00	5.207.916,00	100
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.207.916,00	0,00	5.207.916,00	100
Jumlah	5.207.916,00	0,00	5.207.916,00	100

Penjelasan:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.207.916,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kabupaten Bima. Dimana pada bulan Desember 2025 terjadi *double* transaksi (SP2D) atas pembayaran gaji dan tunjangan susulan Pegawai Negeri Sipil pada BAPPEDA sebagai akibat dari *system error* (SIPD), dengan rincian SP2D:
 - a. SP2D Nomor: 52.06/04.0/000588/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/PPR1/12/2025, tanggal 22 Desember 2025.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

b. SP2D Nomor: 52.06/04.0/000619/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/PPR1/12/2025, tanggal 31 Desember 2025.

Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 *cash in bank* dan telah di setor ke Rekening Kas Daerah dengan STD Nomor: 580/02/1/07.1/2026, tanggal 6 Januari 2026.

2. Terdapat 18 (delapan belas) rekening milik Koordinator Wilayah Dikbudpora yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada Tahun 2025 dengan saldo senilai Rp53.765.033,52. Saldo tersebut terdiri dari gaji yang masuk di akhir bulan Desember 2025 dan belum diteruskan ke penerima, jasa giro dan saldo minimum rekening. 18 (delapan belas) rekening tersebut digunakan sebagai rekening penampungan gaji sebelum disalurkan kepada masing-masing penerima. Perincian atas saldo tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas di Bendahara BLUD per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas di Bendahara BLUD serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.70
Kas di Bendahara BLUD Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Bendahara BLUD				
Kas di Bendahara BLUD	9.517.506.186,97	8.696.807.068,95	820.699.118,02	9,44
Kas di Bendahara BLUD	9.517.506.186,97	8.696.807.068,95	820.699.118,02	9,44
Jumlah	9.517.506.186,97	8.696.807.068,95	820.699.118,02	9,44

Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.517.506.186,97. Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024

BLUD	Tahun 2025				Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	Murni		PFK	Jumlah			
	Bank	Tunai					
RSUD Bima	7.011.230.792,59	1.921.562,00	0,00	7.013.152.354,59	5.573.716.824,78	1.439.435.529,81	25,83
RSUD Sondosia	106.395.705,08	11.479.494,00	7.048.444,00	124.923.643,08	700.662.299,00	(575.738.655,92)	(82,17)
Puskesmas Belo	440.316,67	0,00	0,00	440.316,67	495.245,68	(54.929,01)	(11,09)
Puskesmas Bolo	34.514.436,00	7.495.000,00	0,00	42.009.436,00	221.268.939,00	(179.259.503,00)	(81,01)
Puskesmas Langgudu	332.618.269,12	580.000,00	0,00	333.198.269,12	290.696.039,47	42.502.229,65	14,62
Puskesmas Langgudu Timur	6.760.098,45	0,00	0,00	6.760.098,45	16.460.102,42	(9.700.003,97)	(58,93)
Puskesmas Madapangga	562.595.432,77	11.355.000,00	0,00	573.950.432,77	766.719.120,77	(192.768.688,00)	(25,14)
Puskesmas Monta	185.976.952,00	0,00	0,00	185.976.952,00	143.041.263,00	42.935.689,00	30,02
Puskesmas Ngali	19.868.499,99	405.000,00	7.421.403,00	27.694.902,99	25.592.082,53	2.102.820,46	8,22
Puskesmas Pai	20.304.624,08	0,00	0,00	20.304.624,08	15.013.673,27	5.290.950,81	35,24
Puskesmas Palibelo	1.330.710,49	4.035.000,00	6.070.672,00	11.436.382,49	62.546.432,49	(51.110.050,00)	(81,72)
Puskesmas Sanggar	124.471.548,01	10.002.000,00	675.675,00	135.149.223,01	5.753.573,01	129.395.650,00	2.248,96
Puskesmas Sape	399.807.509,00	0,00	0,00	399.807.509,00	11.390.774,86	388.416.734,14	3.409,92
Puskesmas Wawo	138.955.629,71	0,00	0,00	138.955.629,71	89.542.924,68	49.412.705,03	55,18





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BLUD	Tahun 2025				Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	Murni		PFK	Jumlah			
	Bank	Tunai					
Puskesmas Wera	119.997.959,31	0,00	0,00	119.997.959,31	365.570.737,00	(245.572.777,69)	(67,18)
Puskesmas Woha	8.832.650,00	10.020.000,00	13.683.641,39	32.536.291,39	6.901.934,00	25.634.357,39	371,41
Puskesmas Tambora	1.814.473,36	1.670.000,00	0,00	3.484.473,36	408.648,20	3.075.825,16	752,68
Puskesmas Ambalawi	1.343.144,55	0,00	2.096.950,00	3.440.094,55	21.434.082,81	(17.993.988,26)	(83,95)
Puskesmas Parado	52.752.239,76	0,00	0,00	52.752.239,76	72.876.146,59	(20.123.906,83)	(27,61)
Puskesmas Donggo	158.625.589,43	0,00	0,00	158.625.589,43	159.190.531,72	(564.942,29)	(0,35)
Puskesmas Lambu	106.016.781,00	0,00	0,00	106.016.781,00	70.380.468,00	35.636.313,00	50,63
Puskesmas Soromandi	21.532.646,22	0,00	1.310.932,00	22.843.578,22	72.581.580,74	(49.738.002,52)	(68,53)
Puskesmas Lambitu	4.049.405,99	0,00	0,00	4.049.405,99	4.563.644,93	(514.238,94)	(11,27)
Total	9.420.235.413,58	58.963.056,00	38.307.717,39	9.517.506.186,97	8.696.807.068,95	820.699.118,02	9,44

Penjelasan:

Selisih SiLPA dengan Kas dan Setara Kas (Kas di Bendahara BLUD) sebesar Rp37.951.969,39 merupakan Utang PFK pada Puskesmas dan RSUD Sondosia, dengan rincian:

- Puskesmas Ambalawi sebesar Rp2.096.950,00.
- Puskesmas Ngali sebesar Rp7.421.403,00.
- Puskesmas Palibelo sebesar Rp6.070.672,00.
- Puskesmas Sanggar sebesar Rp675.675,00.
- Puskesmas Soromandi sebesar Rp1.310.932,00.
- Puskesmas Woha sebesar Rp13.683.641,39.
- RSUD Sondosia sebesar Rp7.048.444,00.

Seluruh Utang PFK tahun 2025 telah dilunasi sebelum Laporan Keuangan Audited terbit.

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOSP

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas Dana BOS per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas Dana BOSP serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.72
Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas Dana BOSP				
Kas Dana BOSP	364.491.045,70	59.683.634,72	304.807.410,98	510,71
Kas Dana BOSP	364.491.045,70	59.683.634,72	304.807.410,98	510,71
Jumlah	364.491.045,70	59.683.634,72	304.807.410,98	510,71

Adapun rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.73
Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Nilai (Rp)	Posisi Kas				
		Bank	Tunai			
Kas di Bendahara Dana BOS SDN	252.228.152,06			12.191.889,62	240.036.262,44	1968,82
Kas Murni		88.936.503,48	26.004.497,34	12.170.287,61		
Jasa Giro		344.537,33	1.425.329,48	21.602,01		
Utang Pajak		0,00	99.380.475,00	0,00		
Lain-lain		18.916.409,43	17.220.400,00			
Kas di Bendahara Dana BOS SMPN	80.552.630,87			8.535.965,15	72.016.665,72	843,69
Kas Murni		889.285,42	4.537.713,27	4.702.949,99		
Jasa Giro		715.618,42	678.638,14	129.521,16		
Utang Pajak		0,00	47.993.115,00	3.703.494,00		
Lain-lain		7.291.260,62	18.447.000,00			
Kas di Bendahara TK Negeri	5.360.262,77			1.675.779,95	3.684.482,82	219,87
Kas Murni		327.699,85	1.123.767,31	899.858,59		
Jasa Giro		511.816,53	490.160,52	775.921,36		
Utang Pajak		0,00	2.628.006,00			
Lain-lain		0,00	278.812,56			T
TK Tidak Beroperasi	26.350.000,00			21.080.000,00	5.270.000,00	25,00
Kas Murni		0,00	26.350.000,00	21.080.000,00		
Jumlah	364.491.045,70	117.708.781,55	246.782.264,15	59.683.634,72	304.807.410,98	510,71

Penjelasan:

1. Saldo kas BOS disimpan pada Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank NTB.
2. Rincian Kas Murni, Jasa Giro, Utang PFK, dan Lain-Lain pada TK Negeri, SDN dan SMPN disajikan pada *lampiran V*.
3. Selisih SiLPA dengan Kas dan Setara Kas (Kas Dana BOSP) sebesar Rp150.001.596,00 (Rp364.491.045,70 - Rp214.489.449,70) merupakan Utang PFK.
4. Dari Jumlah Kas Dana BOSP senilai Rp364.491.045,70 terdapat Kas di Bendahara TK yang Tidak Beroperasi dan telah dipulihkan senilai Rp26.350.000,00 pada tanggal 6 s.d. 21 Mei 2026.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas Dana BOK Puskesmas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas Dana BOK Puskesmas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.74
Jumlah Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Kas Dana BOK Puskesmas				
Kas Dana BOK Puskesmas	948.116.632,00	1.231.894.910,00	(283.778.278,00)	(23,04)
Kas Dana BOK Puskesmas	948.116.632,00	1.231.894.910,00	(283.778.278,00)	(23,04)





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Jumlah	948.116.632,00	1.231.894.910,00	(238.778.278,00)	(23,04)

Penjelasan:

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo Virtual Account pada Bank BNI

Kas dana BOK pada masing-masing Puskesmas per 31 Desember 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.75
Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Puskesmas Belo	63.573.417,00	51.584.975,00	11.988.442,00	23,24
Puskesmas Bolo	45.470.276,00	38.001.671,00	7.468.605,00	19,65
Puskesmas Langgudu	103.275.126,00	49.273.294,00	54.001.832,00	109,60
Puskesmas Langgudu Timur	37.969.657,00	16.824.165,00	21.145.492,00	125,69
Puskesmas Madapangga	58.279.939,00	54.140.780,00	4.139.159,00	7,65
Puskesmas Monta	20.273.478,00	46.479.651,00	(26.206.173,00)	(56,38)
Puskesmas Ngali	64.279.420,00	61.457.039,00	2.822.381,00	4,59
Puskesmas Pai	1.621.062,00	0,00	1.621.062,00	0,00
Puskesmas Palibelo	13.349.415,00	53.623.149,00	(40.273.734,00)	(75,11)
Puskesmas Sanggar	98.060.582,00	55.695.514,00	42.365.068,00	76,07
Puskesmas Sape	49.317.667,00	169.870.206,00	(120.552.539,00)	(70,97)
Puskesmas Wawo	65.860.758,00	65.220.307,00	640.451,00	0,98
Puskesmas Wera	12.627.929,00	56.975.270,00	(44.347.341,00)	(77,84)
Puskesmas Woha	114.593.750,00	61.897.851,00	52.695.899,00	85,13
Puskesmas Tambora	51.637.199,00	58.703.987,00	(7.066.788,00)	(12,04)
Puskesmas Ambalawi	8.689.200,00	64.979.544,00	(56.290.344,00)	(86,63)
Puskesmas Parado	69.758.927,00	56.529.361,00	13.229.566,00	23,40
Puskesmas Donggo	5.128.500,00	56.522.853,00	(51.394.353,00)	(90,93)
Puskesmas Lambu	15.909.950,00	74.217.345,00	(58.307.395,00)	(78,56)
Puskesmas Soromandi	30.761.589,00	55.371.397,00	(24.609.808,00)	(44,44)
Puskesmas Lambitu	17.678.791,00	84.526.551,00	(66.847.760,00)	(79,08)
Jumlah	948.116.632,00	1.231.894.910,00	(283.778.278,00)	(23,04)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.76
Rincian Saldo Piutang Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Pajak Daerah	24.523.290.625,32	22.473.154.646,32	2.050.135.979,00	9,12
Piutang Retribusi Daerah	14.529.257.167,00	9.466.432.167,00	5.062.825.000,00	53,48
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.622.365,10	15.626.600,00	(2.004.234,90)	(12,83)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	4.941.468.780,00	8.495.053.937,00	(3.553.585.157,00)	(41,83)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	76.837.538.000,00	9.452.884.000,00	67.384.654.000,00	712,85
Piutang Transfer Antar Daerah	1.024.848.964,00	7.938.405.512,00	(6.913.556.548,00)	(87,09)
Piutang Lainnya	47.131.730,00	517.529.460,00	(470.397.730,00)	(90,89)
Jumlah	121.917.157.631,42	58.359.086.322,32	63.558.071.309,10	108,91





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Berikut diuraikan akun-akun Piutang Daerah yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.77
Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Piutang Pajak Daerah:				
Piutang Pajak Hotel	0,00	7.505.563,00	(7.505.563,00)	(100,00)
Piutang Pajak Restoran	0,00	9.223.027,00	(9.223.027,00)	(100,00)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	8.000,20	(8.000,00)	(100,00)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.523.290.625,32	22.473.146.646,12	2.050.143.979,20	9,12
Jumlah	24.523.290.625,32	22.489.883.236,32	2.050.135.979,20	9,12

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Piutang Pajak Hotel	0,00	7.505.563,00	(7.505.563,00)	(100,00)
Piutang Pajak Hotel	0,00	7.505.563,00	(7.505.563,00)	(100,00)
Piutang Pajak Hotel	0,00	7.505.563,00	(7.505.563,00)	(100,00)
Piutang Pajak Restoran	0,00	9.223.027,00	(9.223.027,00)	(100,00)
Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	0,00	9.223.027,00	(9.223.027,00)	(100,00)
Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	0,00	9.223.027,00	(9.223.027,00)	(100,00)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	8.000,20	(8.000,00)	(100,00)
Piutang Pajak Tanah Liat	0,00	8.000,20	(8.000,00)	(100,00)
Piutang Pajak Tanah Liat	0,00	8.000,20	(8.000,00)	(100,00)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.523.290.625,32	22.473.146.646,12	2.050.143.979,20	9,12
Piutang PBBP2	24.523.290.625,32	22.473.146.646,12	2.050.143.979,20	9,12
Piutang PBBP2	24.523.290.625,32	22.473.146.646,12	2.050.143.979,20	9,12
Jumlah	24.523.290.625,32	22.489.883.236,32	2.050.135.979,20	9,12

Tabel 5.79
Mutasi Awal, Mutasi Tambah, Mutasi Kurang dan Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah 2025

Piutang Pajak Daerah	Nilai Piutang Per 31 Des 2024	Penambahan (Ketetapan s.d. Des 2025)	Pengurangan 2025	Nilai Piutang Per 31 Des 2025
Piutang Pajak Hotel	7.505.563,00	0,00	7.505.563,00	0,00
Piutang Pajak Hotel	7.505.563,00	0,00	7.505.563,00	0,00
Piutang Pajak Hotel	7.505.563,00	0,00	7.505.563,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	9.223.027,00	0,00	9.223.027,00	0,00
Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	9.223.027,00	0,00	9.223.027,00	0,00
Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	9.223.027,00	0,00	9.223.027,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000,20	291.405.070,14	291.413.070,34	0,00
Piutang Pajak Tanah Liat	8.000,20	291.405.070,14	291.413.070,34	0,00
Piutang Pajak Tanah Liat	8.000,20	291.405.070,14	291.413.070,34	0,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.473.146.646,52	4.413.768.123,00	2.363.624.144,00	24.523.290.625,32
Piutang PBBP2	22.473.146.646,52	4.413.768.123,00	2.363.624.144,00	24.523.290.625,32
Piutang PBBP2	22.473.146.646,52	4.413.768.123,00	2.363.624.144,00	24.523.290.625,32
JUMLAH	22.489.883.236,32	4.705.173.193,14	2.671.765.804,34	24.523.290.625,32

Penjelasan:

1. Umur Piutang PBB-P2 di rincikan sebagai berikut:

- Umur Piutang PBB-P2 kurang dari 1 tahun dengan kriteria lancar senilai Rp2.100.869.302,40.
- Umur Piutang PBB-P2 1 s.d 2 tahun dengan kriteria kurang lancar senilai Rp4.304.005.858,00.
- Umur Piutang PBB-P2 2 s.d 3 tahun dengan kriteria diragukan senilai Rp1.938.578.256,00.
- Umur Piutang PBB-P2 lebih dari 3 tahun dengan kriteria macet senilai Rp16.179.837.209,12.

Pemuktahiran Data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 Kabupaten Bima Tahun 2025 disajikan pada *Lampiran VI*.

2. Terdapat penerimaan dari Piutang senilai Rp12.923.500,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Namun sampai dengan LK Audited terbit, telah dilakukan penyetoran KE Kas Daerah. Atas hal tersebut, akan diakui sebagai pengurang piutang pada Tahun 2026 sesuai tanggal diterima di Kas Daerah.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.80
Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Piutang Retribusi Daerah:				
Piutang Retribusi Jasa Umum	3.186.361.970,00	2.722.328.070,00	464.033.900,00	17,05
Piutang Retribusi Jasa Usaha	11.342.895.197,00	6.744.104.097,00	4.598.791.100,00	68,19
Jumlah	14.529.257.167,00	9.466.432.167,00	5.062.825.000,00	53,48

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.81
Rincian Kenaikan/Penurunan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Piutang Retribusi Jasa Umum	3.186.361.970,00	2.722.328.070,00	464.033.900,00	17,05
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.450.452.050,00	1.986.418.150,00	464.033.900,00	23,36
Piutang Retribusi Kios	2.450.452.050,00	1.986.418.150,00	464.033.900,00	23,36





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	735.909.920,00	735.909.920,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	735.909.920,00	735.909.920,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	11.342.895.197,00	6.744.104.097,00	4.598.791.100,00	68,19
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.741.041.197,00	6.741.041.197,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	332.172.000,00	332.172.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	6.408.869.197,00	6.408.869.197,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	3.062.900,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	3.062.900,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.601.854.000,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.601.854.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.529.257.167,00	9.466.432.167,00	5.062.825.000,00	53,48

Penjelasan:

- Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan hasil reklasifikasi dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan nilai Rp4.151.854.000,00.
- Nilai Piutang Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp5.062.825.000,00 atau 53,48% dari tahun 2024 karena:
 - Adanya penambahan nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (kios) sebesar Rp464.033.900,00 atau 23,36%.
 - Adanya penambahan nilai Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp450.000.000,00 atau 10,84%.
- Umur Piutang Retribusi diuraikan sebagai berikut:
 - Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.450.452.050,00, dirincikan sebagai berikut:
 - Umur Piutang 0 s.d 1 bulan (5%) dengan kualitas lancar sebesar Rp479.500,00.
 - Umur Piutang 1 s.d 3 bulan (10%) dengan kualitas kurang lancar sebesar Rp17.490.000,00.
 - Umur Piutang 3 s.d 12 bulan (50%) dengan kualitas diragukan sebesar Rp290.049.500,00.
 - Umur Piutang lebih dari 12 bulan (100%) dengan kualitas macet sebesar Rp1.662.859.700,00.
 - Penyisihan Piutang sebesar Rp551.410.350,00.
 - Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi senilai Rp735.909.920,00 memiliki umur piutang lebih dari 12 bulan dengan kriteria macet.
 - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp332.172.000,00 memiliki umur piutang lebih dari 12 bulan dengan kriteria macet.
 - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah senilai Rp6.408.869.197,00 memiliki umur piutang lebih dari 12 bulan dengan kriteria macet, dengan rincian sebagai berikut:
 - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah (musim tanam tahun 2016-2017) senilai Rp6.385.087.097,00.
 - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah (musim tanam tahun 2017-2018) senilai Rp23.782.100,00.
 - Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah senilai Rp4.601.854.000,00 merupakan piutang sarang burung walet, dengan rincian sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Umur Piutang 0 s.d 1 bulan (5%) dengan kualitas lancar sebesar Rp22.500.000,00. Umur Piutang lebih dari 12 bulan (100%) dengan kualitas macet sebesar Rp4.151.854.000,00.
2. Penyisihan Piutang sebesar Rp427.500.000,00.

Berikut disajikan Mutasi Awal, Mutasi Tambah, Mutasi Kurang dan Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah 2025.

Tabel 5.82
Rincian Kenaikan/Penurunan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

Piutang Retribusi Daerah	Nilai Piutang Per 31 Des 2024	Penambahan (Petetapan s.d. Des 2025)	Pengurangan 2025	Nilai Piutang Per 31 Des 2025
Piutang Retribusi Jasa Umum	2.722.328.070,00	1.403.370.900,00	939.337.000,00	3.186.361.970,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.986.418.150,00	1.403.370.900,00	939.337.000,00	2.450.452.050,00
Piutang Retribusi Kios	1.986.418.150,00	1.403.370.900,00	939.337.000,00	2.450.452.050,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	735.909.920,00	0,00	0,00	735.909.920,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	735.909.920,00	0,00	0,00	735.909.920,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	10.892.895.197,00	500.000.000,00	53.062.900,00	11.342.895.197,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.741.041.197,00	0,00	0,00	6.741.041.197,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	332.172.000,00	0,00	0,00	332.172.000,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	6.408.869.197,00	0,00	0,00	6.408.869.197,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.062.900,00	0,00	3.062.900,00	0,00
Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	3.062.900,00	0,00	3.062.900,00	0,00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang direklasifikasi dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.151.854.000,00	0,00	0,00	4.151.854.000,00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	500.000.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
Jumlah	13.615.223.267,00	1.903.370.900,00	992.399.900,00	14.529.257.167,00

5.3.1.1.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.83
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:				
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.622.365,10	15.626.600,00	(2.004.234,90)	(12,83)





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Jumlah	13.622.365,10	15.626.600,00	(2.004.234,90)	(12,83)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 senilai Rp13.622.365,10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		
Piutang Pendapatan Dividen pada Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR NTB)	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dividen pada PT Bank NTB Syariah	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dividen pada PT Jamkrida NTB Bersaing	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dividen pada PT. DSM	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dividen pada PT. DUM	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dividen pada PT. Bank Pesisir	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dividen pada PDAM	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dividen pada Perumda BKS	13.622.365,10	15.626.600,00
Jumlah	13.622.365,10	15.626.600,00

Penjelasan:

Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp13.622.365,10 merupakan Piutang Pendapatan Dividen untuk tahun buku 2025 yang diumumkan tahun 2026 pada Perumda BKS yang disetor dengan STS Nomor: 0540(t184300109/NTB.01), tanggal 11 Februari 2026.

5.3.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain-lain PAD yang Sah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.85

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah:				
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	4.151.854.000,00	(4.151.854.000,00)	(100,00)
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	132.364.105,00	132.364.105,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	4.809.104.675,00	4.210.835.832,00	598.268.843,00	14,21
Jumlah	4.941.468.780,00	8.495.053.937,00	(3.553.585.157,00)	(41,83)

Penjelasan:

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan senilai Rp4.151.854.000,00 telah direklasifikasi ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 senilai Rp4.941.468.780,00, terdiri dari:

Tabel 5.86
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	4.151.854.000,00
Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	4.151.854.000,00
Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	4.151.854.000,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	132.364.105,00	132.364.105,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	132.364.105,00	132.364.105,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	132.364.105,00	132.364.105,00
Piutang Pendapatan BLUD	4.809.104.675,00	4.210.835.832,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.809.104.675,00	4.210.835.832,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.809.104.675,00	4.210.835.832,00
Jumlah	4.941.468.780,00	8.495.053.937,00

Penjelasan:

1. Pada TA 2025 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (kerja sama pengelolaan Sarang Burung Walet) telah direklasifikasi ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Sementara Piutang Pelayanan pada BLUD (piutang atas pelayanan pada BPJS) telah direklasifikasi ke Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yaitu atas pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2004-2009 yang belum dapat dilakukan penagihan/belum disetor oleh yang bersangkutan ke Kas Daerah.
3. Piutang Pendapatan BLUD merupakan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (BPJS), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87
**Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
BLUD RSUD Bima	641.769.275,00	1.070.908.982,00	(429.139.707,00)	(40,07)
BLUD RSUD Spondosia	2.111.446.500,00	1.004.830.800,00	1.106.615.700,00	110,13
Puskesmas Belo	61.835.100,00	131.880.200,00	(70.045.100,00)	(53,11)
Puskesmas Bolo	272.001.300,00	174.642.800,00	97.358.500,00	55,75
Puskesmas Langgudu	134.168.100,00	118.281.200,00	15.886.900,00	13,43
Puskesmas Langgudu Timur	49.332.400,00	23.382.100,00	25.950.300,00	110,98
Puskesmas Madapangga	102.093.200,00	168.309.550,00	(66.216.350,00)	(39,34)
Puskesmas Monta	197.064.200,00	166.163.200,00	30.901.000,00	18,60
Puskesmas Ngali	33.406.100,00	58.246.100,00	(24.840.000,00)	(42,65)
Puskesmas Pai	0,00	43.311.300,00	(43.311.300,00)	(100,00)
Puskesmas Palibelo	63.047.100,00	92.823.100,00	(29.776.000,00)	(32,08)
Puskesmas Sanggar	61.971.100,00	47.782.250,00	14.188.850,00	29,69
Puskesmas Sape	200.567.100,00	335.216.200,00	(134.649.100,00)	(40,17)





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Puskesmas Wawo	143.220.000,00	101.429.000,00	41.791.000,00	41,20
Puskesmas Wera	175.234.200,00	131.772.200,00	43.462.000,00	32,98
Puskesmas Woha	144.273.400,00	174.710.350,00	(30.436.950,00)	(17,42)
Puskesmas Tambora	0,00	11.059.100,00	(11.059.100,00)	(100,00)
Puskesmas Ambalawi	77.016.000,00	57.973.000,00	19.043.000,00	32,85
Puskesmas Parado	47.117.100,00	32.503.550,00	14.613.550,00	44,96
Puskesmas Donggo	24.747.100,00	20.578.900,00	4.168.200,00	20,25
Puskesmas Lambu	159.134.200,00	144.786.300,00	14.347.900,00	9,91
Puskesmas Soromandi	109.661.200,00	72.476.450,00	37.184.750,00	51,31
Puskesmas Lambitu	0,00	27.769.200,00	(27.769.200,00)	(100,00)
Jumlah	4.809.104.675,00	4.210.835.832,00	598.268.843,00	14,21

5.3.1.1.6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Pemerintah Pusat per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Tabel 5.88
Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat:				
Dana Bagi Hasil (DBH)	76.837.538.000,00	9.452.884.000,00	67.384.654.000,00	712,85
Jumlah	76.837.538.000,00	9.452.884.000,00	67.384.654.000,00	712,85

Penjelasan:

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Kurang Bayar Piutang Dana Transfer berdasarkan KMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2025 sebagaimana dalam *Lampiran VII*.

Tabel 5.89
Mutasi Awal, Mutasi Tambah, Mutasi Kurang dan Saldo Akhir
Piutang Transfer Antar Daerah 2025

Jenis Piutang	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Nilai Piutang Per 31 Desember 2025
Piutang Transfer Pemerintah Pusat:	9.452.884.000,00	73.666.765.000,00	6.282.111.000,00	76.837.538.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	9.452.884.000,00	73.666.765.000,00	6.282.111.000,00	76.837.538.000,00
Total Piutang Bagi Hasil Pajak	9.452.884.000,00	73.666.765.000,00	6.282.111.000,00	76.837.538.000,00

5.3.1.1.7 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah.

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 merupakan Piutang Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bima sebesar





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Rp1.024.848.964,00, sesuai dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-60 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan IV dan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Januari 2026. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.90
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Transfer Antar Daerah:				
Piutang Bagi Hasil	1.024.848.964,00	7.938.405.512,00	(6.913.556.548,00)	(87,09)
Jumlah	1.024.848.964,00	7.938.405.512,00	(6.913.556.548,00)	(87,09)

Tabel 5.91
Rincian Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Bagi Hasil	1.024.848.964,00	7.938.405.512,00
Piutang Bagi Hasil Pajak	1.024.848.964,00	7.938.405.512,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	1.078.571.050,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	765.990.662,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.014.581.916,00	6.090.183.678,00
Piutang Pajak Air Permukaan	10.267.048,00	3.660.122,00
Jumlah	1.024.848.964,00	7.938.405.512,00

Berikut disajikan mutasi awal, mutasi tambah, mutasi kurang dan saldo akhir Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.92
**Mutasi Awal, Mutasi Tambah, Mutasi Kurang dan Saldo Akhir
Piutang Transfer Antar Daerah 2025**

Jenis Piutang	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	Penetapan Tahun 2025	Penerimaan 2025	Nilai Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang Tahun 2025	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.078.571.050,00	117.423.728,00	1.195.994.778,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	765.990.662,00	122.438.856,00	888.429.518,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.090.183.678,00	26.436.521.378,00	31.512.123.140,00	1.014.581.916,00	0,00	1.014.581.916,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.660.122,00	45.296.982,00	38.690.056,00	10.267.048,00	0,00	10.267.048,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	30.509.543.259,00	30.509.543.259,00	0,00	0,00	0,00
Total Piutang Bagi Hasil Pajak	7.938.405.512,00	57.231.224.203,00	64.144.780.751,00	1.024.848.964,00	0,00	1.024.848.964,00

5.3.1.1.8 Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya.

Tabel 5.93





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Piutang Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Lainnya:				
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	47.131.730,00	77.938.460,00	(30.806.730,00)	(39,53)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	439.591.000,00	(439.591.000,00)	(100)
Jumlah	47.131.730,00	517.529.460,00	(470.397.730,00)	(90,89)

Penjelasan:

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp439.591.000,00 per 31 Desember 2024 merupakan temuan BPK atas kekurangan volume dan/atau mutu pekerjaan Belanja Modal tahun 2023 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Setoran atas Peket Pekerjaan Penanganan Long Segmen Jalan SP. Belo – Nata dengan STS Nomor: 800/299/06.9/2024 tanggal 17 Mei 2024 senilai Rp41.801.000,00.
2. Setoran atas Peket Paket III Pemeliharaan Berkala Jalan Tente – Godo, Bolo – Dena, Pucuke – Keli, dan Timu – Kananga dengan STS Nomor: 800/300/06.9/2024 tanggal 17 Mei 2024 senilai Rp39.347.000,00.
3. Setoran atas Peket Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Ruas SP3 Sondo – Pantai Rontu dengan STS Nomor: 800/334/06.9/2024 tanggal 21 Mei 2024 senilai Rp48.933.000,00.
4. Setoran atas Peket Pekerjaan Penanganan Long Segmen Jalan SP. JP. Papa – Baku dengan STS Nomor: 800/335/06.9/2024 tanggal 21 Mei 2024 senilai Rp198.283.000,00.
5. Setoran atas Peket Pekerjaan Pembangunan D.I Kompon Desa Kore dengan STS Nomor: 800/569/06.9/2024 tanggal 18 Juli 2024 senilai Rp111.227.000,00.

Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp47.131.730,00. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Saldo Piutang Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	47.131.730,00	77.938.460,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	47.131.730,00	77.938.460,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	47.131.730,00	77.938.460,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	439.591.000,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	439.591.000,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	439.591.000,00
Jumlah	47.131.730,00	517.529.460,00

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp47.131.730,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Saldo Audited TA 2024	77.938.460,00	
Koreksi atas kurang catat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2024	61.403.240,00	
Realisasi Piutang Lainnya-Bagian Lancar Penjualan Angsuran	(137.906.200,00)	Realisasi Piutang Lainnya-Bagian Lancar Penjualan Angsuran
Reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo tahun 2026	45.696.230,00	
Jumlah	47.131.730,00	





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.3.1.1.9 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian penyisihan Piutang.

Tabel 5.96
Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang:				
Penyisihan Piutang Pajak	(17.590.031.309,43)	(13.743.924.880,72)	(3.846.106.428,71)	27,98
Penyisihan Piutang Retribusi	(13.553.555.663,00)	(9.082.230.404,50)	(4.471.325.258,50)	49,23
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(132.364.105,00)	(4.019.572.650,00)	3.887.208.545,00	(96,71)
Jumlah	(31.275.951.077,43)	(26.845.727.935,22)	(4.430.223.142,21)	16,50

Penjelasan:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dihitung Sendiri oleh wajib Pajak (*self assessment*) dan piutang pajak yang penghitungan/penetapan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun dihitung sebesar 0,5%;
- Kualitas Kurang lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun dihitung sebesar 10%;
- Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun dihitung sebesar 50%;
- Kualitas Macet dihitung sebesar 100%, dengan kriteria:
 - Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib Pajak meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.354.951.984,23 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Pajak	17.590.031.309,43	13.743.924.880,72	3.846.106.428,71	27,98
Penyisihan Piutang PBJT - Jasa Perhotelan	0,00	37.527,96	382.171,47	1018,36
Penyisihan Piutang PBJT - Makanan dan/atau Minuman	0,00	46.115,14	45.388,66	98,42
Penyisihan Piutang PBJT - Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	0,00	6.652.743,55	0,00
Penyisihan Piutang Piutang Pajak Air Tanah	0,00	39,88	(39,88)	(100,00)
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang PBB-P2	17.590.031.309,43	13.743.841.197,74	3.846.190.111,69	27,98
Penyisihan Piutang Retribusi	13.553.555.663,00	9.082.230.404,50	3.823.162.258,50	39,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Kios	1.899.041.700,00	1.605.279.287,50	365.599.412,50	22,77
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	735.909.920,00	735.909.920,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	332.172.000,00	332.172.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	6.408.869.197,00	6.408.869.197,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.208.846,00	0,00	3.208.846,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.174.354.000,00	0,00	4.174.354.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	132.364.105,00	4.019.572.650,00	(3.887.208.545,00)	(96,71)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	0,00	3.881.854.000,00	(3.881.854.000,00)	(100,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	132.364.105,00	132.364.105,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	5.354.545,00	(5.354.545,00)	(100,00)
Jumlah	31.275.951.077,43	26.845.727.935,22	4.430.223.142,21	16,50

Tabel dibawah ini adalah menyajikan Nilai bersih Piutang Pendapatan yaitu Nilai Piutang Pendapatan setelah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan.

Tabel 5.98
Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Neto (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak			
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	24.523.290.625,32	17.590.031.309,43	6.933.259.315,89
Penyisihan Piutang PBJT - Jasa Perhotelan	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang PBJT - Makanan dan/atau Minuman	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang PBJT - Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,20	0,00	
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.523.290.625,32	17.590.031.269,43	6.933.259.315,89
Jumlah	24.523.290.625,32	17.597.195.216,23	6.933.259.315,89

2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

(a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan dihitung 0,05%;





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- (b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutana lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dihitung sebesar 10%;
- (c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dihitung sebesar 50%;
- (d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan dihitung sebesar 100%.

Tabel dibawah ini adalah menyajikan Nilai bersih Piutang Retribusi yaitu nilai Piutang Retribusi setelah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Retribusi.

Tabel 5.99
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025

Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Neto (Rp)
Penyisihan Piutang Retribusi	14.529.257.167,00	13.553.555.663,00	975.701.504,00
Piutang Retribusi Kios	2.450.452.050,00	1.899.041.700,00	551.410.350,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	735.909.920,00	735.909.920,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	332.172.000,00	332.172.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	6.408.869.197,00	6.408.869.197,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.809.104.675,00	3.208.846,00	4.805.895.829,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.601.854.000,00	4.174.354.000,00	427.500.000,00
Jumlah	14.529.257.167,00	13.553.555.663,00	975.701.504,00

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel dibawah ini adalah menyajikan Nilai bersih Piutang Lain-lain PAD yang Sah yaitu nilai Piutang Nilai bersih Piutang Lain-lain PAD yang Sah setelah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Nilai bersih Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 5.100
Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Neto (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan			
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	132.364.105,00	132.364.105,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD- Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	132.364.105,00	132.364.105,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	132.364.105,00	132.364.105,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.3.1.1.10 Beban Dibayar di Muka

Tabel 5.101
Beban Dibayar di Muka Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Beban Dibayar di Muka:				
Beban Dibayar di Muka	38.666.666,67	1.906.594.316,00	(1.867.927.649,33)	(97,97)
Beban Dibayar di Muka	38.666.666,67	1.906.594.316,00	(1.867.927.649,33)	(97,97)
Jumlah	38.666.666,67	1.906.594.316,00	(1.867.927.649,33)	(97,97)

Penjelasan:

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 merupakan Sewa Rumah Negara Golongan I Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

Mutasi masuk dan mutasi keluar Beban Dibayar di Muka diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.102
Mutasi Masuk Dan Mutasi Keluar Beban Dibayar Di Muka

SKPD	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan Tahun 2025	Pembebanan 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
Dinas PUPR	Belanja dibayar dimuka atas belanja JJI yang realisasi keuangannya lebih besar dari kemajuan fisik pekerjaan	13.343.080,00	0,00	13.343.080,00	0,00
Kesbangpol	Sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan di KPU senilai Rp888.569.833,00 yang telah disetor ke Kasda pada tanggal 9 April 2025 no STS 160/KU.03.2-SD/520611/2025	888.569.833,00	0,00	888.569.833,00	0,00
	Sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan di KPU senilai Rp888.569.833,00 pada tanggal 9 April 2025 no STS 160/KU.03.2-SD/520611/2025	1.004.681.403,00	0,00	1.004.681.403,00	0,00
Setda	Koreksi BPK - Beban Dibayar Dimuka atas Beban Sewa Rumah Negara Golongan I Tahun 2025 (sewa rumah dinas bupati dan wakil bupati)		38.666.666,67	0,00	38.666.666,67
T o t a l		1.906.594.316,00	38.666.666,67	1.906.594.316,00	38.666.666,67

5.3.1.1.11 Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp21.473.262.119,56 mengalami penurunan senilai Rp2.347.180.910,71 atau 0,10% dibandingkan dengan nilai Persediaan Tahun 2024.

Rincian Persediaan Pemerintah kabupaten Bima Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.103
Persediaan Tahun 2025 dan 2024





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Persediaan:				
Barang Pakai Habis	21.473.262.119,56	23.820.443.030,27	(2.347.180.910,71)	(0,10)
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	21.473.262.119,56	23.820.443.030,27	(2.347.180.910,71)	(0,10)

Tabel 5.104
Rincian Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Barang Pakai Habis				
Bahan	551.927.211,00	5.039.688.915,00	(4.487.761.704,00)	(0,89)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.598.000,00	0,00	19.598.000,00	100
Isi Tabung Gas	86.361.150,00	52.545.000,00	33.816.150,00	0,64
Alat Tulis Kantor	27.797.200,00	190.905.208,00	(163.108.008,00)	(0,85)
Kertas dan Cover	202.734.007,00	99.975.660,00	102.758.347,00	1,03
Bahan Cetak	970.000,00	21.938.500,00	(20.968.500,00)	(0,96)
Benda Pos	100.000,00	20.000,00	80.000,00	4,00
Bahan Komputer	3.160.000,00	180.686.900,00	(177.526.900,00)	(0,98)
Perabot Kantor (barang ekstrakom)	126.652.722,00	4.229.177.103,00	(4.102.524.381,00)	(0,97)
Alat Listrik	10.434.132,00	9.719.984,00	714.148,00	0,07
Perlengkapan Dinas	72.620.000,00	152.295.360,00	(79.675.360,00)	(0,52)
Perlengkapan Pendukung Olah Raga		102.425.200,00	(102.425.200,00)	(1,00)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100
Obat-Obatan	18.265.203.598,56	17.567.698.615,27	697.504.983,29	0,04
Obat	10.649.210.261,33	13.906.457.024,04	(3.257.246.762,71)	(0,23)
Obat-Obatan Lainnya	7.615.993.337,23	3.661.241.591,23	3.954.751.746,00	1,08
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	2.654.246.810,00	1.212.655.000,00	1.441.591.810,00	1,19
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.654.246.810,00	1.212.655.000,00	1.441.591.810,00	1,19
Natura dan Pakan	1.884.500,00	400.500,00	1.484.000,00	3,71
Natura	1.884.500,00	400.500,00	1.484.000,00	3,71
Jumlah	21.473.262.119,56	23.820.443.030,27	(2.347.180.910,71)	(0,10)

Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 dan 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.105
Nilai Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai Persediaan
Sekretariat DPRD	900.000,00
Sekretariat Daerah	58.316.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
Kecamatan Ambalawi	195.000,00
Kecamatan Belo	1.695.000,00
Kecamatan Bolo	0,00
Kecamatan Donggo	100.000,00
Kecamatan Lambitu	0,00
Kecamatan Lambu	0,00
Kecamatan Langgudu	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai Persediaan
Kecamatan Madapangga	0,00
Kecamatan Monta	195.000,00
Kecamatan Palibelo	0
Kecamatan Parado	0,00
Kecamatan Sanggar	195.000,00
Kecamatan Sape	250.000,00
Kecamatan Soromandi	160.000,00
Kecamatan Tambora	0
Kecamatan Wawo	120.000,00
Kecamatan Wera	0,00
Kecamatan Woha	215.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.237.093.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	696.000,00
Dinas Perhubungan	66.625.000,00
Dinas Kesehatan	7.145.771.703,12
Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	8.061.204.222,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	634.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	288.193.810,00
Dinas Sosial	195.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.960.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.820.312,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	126.460.007,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	700.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.650.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	827.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	294.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1513000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.407.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0
Inspektorat	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	288.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	64.220.000,00
Dinas Pariwisata	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0
Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	0
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	1.500.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	313.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	140.000,00
Puskesmas Ambalawi	96.454.742,24
Puskesmas Belo	94.984.961,34
Puskesmas Bolo	209.681.288,65
Puskesmas Donggo	59.062.120,86
Puskesmas Lambitu	56.613.613,56
Puskesmas Lambu	114.137.519,80
Puskesmas Langgudu	145.271.133,75
Puskesmas Madapangga	170.393.583,43
Puskesmas Monta	197.610.266,00
Puskesmas Ngali	93.653.133,70
Puskesmas Pai	65.961.405,55
Puskesmas Palibelo	68.363.208,51
Puskesmas Parado	95.239.302,46
Puskesmas Sanggar	50.237.249,70
Puskesmas Sape	266.772.964,03
Puskesmas Soromandi	83.127.496,71





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai Persediaan
Puskesmas Tambora	132.886.383,58
Puskesmas Wawo	159.253.699,00
Puskesmas Wera	97.596.581,84
Puskesmas Woha	253.827.827,55
Puskesmas Langgudu Timur	88.875.328,69
Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia	665.261.854,49
Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00
Jumlah	21.473.262.119,56

Tabel 5.106
Mutasi Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
Saldo 31 Desember 2024	23.820.443.030,27	
Penambahan	220.193.645.335,81	
Pengadaan APBD	163.154.465.706,00	
Perolehan Lainnya/JKN/BOS /BLUD	47.225.931.376,53	
Hibah Provinsi	9.659.429.443,28	
Reklas dari Aset tetap	64.000.000,00	
Hutang Fisik	89.818.810,00	
Pengurangan		222.540.826.246,52
Reklas ke Aset Tetap		2.607.736.883,00
Obat Kadarluasa		936.955.974,00
Pemakaian persediaan		218.996.133.389,52
Jumlah Mutasi		
Saldo 31 Desember 2025		21.473.262.119,56

Mutasi tambah persediaan dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp220.193.645.335,81 terdiri dari:

- Penambahan dari belanja barang senilai Rp 163.154.465.706,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.107
Rincian Belanja Barang Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Sekretariat DPRD	8.017.056.213,00
Sekretariat Daerah	13.858.488.356,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	311.484.900,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	145.392.000,00
Kecamatan Ambalawi	100.738.000,00
Kecamatan Belo	194.946.000,00
Kecamatan Bolo	160.064.000,00
Kecamatan Donggo	153.058.694,00
Kecamatan Lambitu	123.855.000,00
Kecamatan Lambu	181.993.000,00
Kecamatan Langgudu	197.130.000,00
Kecamatan Madapangga	102.514.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Kecamatan Monta	148.306.948,00
Kecamatan Palibelo	145.310.000,00
Kecamatan Parado	154.607.900,00
Kecamatan Sanggar	173.821.950,00
Kecamatan Sape	208.928.000,00
Kecamatan soromandi	207.611.000,00
Kecamatan Tambora	250.890.000,00
Kecamatan Wawo	168.675.000,00
Kecamatan Wera	95.577.000,00
Kecamatan Woha	157.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.507.267.547,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.404.072.406,00
Dinas Perhubungan	173.753.947,00
Dinas Kesehatan	14.814.739.293,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.061.887.625,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	6.232.488.100,00
Dinas Sosial	1.097.632.486,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.120.804.256,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	486.470.640,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	660.164.907,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	33.892.764.720,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.670.764.050,00
Dinas Ketahanan Pangan	870.458.186,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.650.772.400,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.010.547,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	985.247.850,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.533.246.040,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.785.690.385,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	719.804.534,00
Inspektorat	693.633.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	965.359.949,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.114.207.832,00
Dinas Pariwisata	183.643.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja	423.180.500,00
Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	439.823.000,00
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	601.979.600,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	193.978.837,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.493.108,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	53.378.400,00
Jumlah	163.154.465.706,00

- b. Penambahan dari belanja Perolehan Lainnya/JKN/BOS /BLUD senilai Rp47.225.931.376,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian Penambahan dari Lainnya/JKN/BOS /BLUD Tahun 2025

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	34.511.753.787,95
Puskesmas Ambalawi	223.590.000,00
Puskesmas Belo	316.626.847,00
Puskesmas Bolo	665.691.302,00
Puskesmas Donggo	187.998.658,00
Puskesmas Lambitu	78.380.805,00
Puskesmas Lambu	547.039.944,00
Puskesmas Langgudu	511.960.000,00
Puskesmas Madapangga	492.337.412,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Puskesmas Monta	442.425.433,00
Puskesmas Ngali	151.325.452,00
Puskesmas Pai	95.251.611,00
Puskesmas Palibelo	448.463.609,00
Puskesmas Parado	157.398.270,00
Puskesmas Sanggar	181.288.326,00
Puskesmas Sape	1.569.014.625,00
Puskesmas Soromandi	309.862.676,00
Puskesmas Tambora	107.371.872,00
Puskesmas Wawo	373.345.841,00
Puskesmas Wera	499.454.006,00
Puskesmas Woha	536.010.555,00
Puskesmas Langgudu Timur	73.406.587,00
Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia	4.745.933.757,58
Jumlah	47.225.931.376,53

- Penambahan dari hibah Pemerintah Provinsi NTB atas obat senilai Rp9.659.429.443,28 pada Dinas Kesehatan.
- Penambahan Reklasifikasi dari belanja modal senilai Rp64.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup atas pengadaan Pakaian Perlengkapan Dinas.
- Penambahan senilai Rp89.818.810,00 merupakan utang fisik pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109
Utang Fisik Tahun 2025

Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	% Keu	LRA	% Fisik	Fisik	Nilai (Rp)
Rehabilitasi Pagar Ponpes AL Muzaddit	199.850.000,00	50,00	99.925.000,00	69,12	138.136.320,00	38.211.320,00
Pembangunan Gedung Seni Budaya Desa Runggu	196.900.000,00	50,00	98.450.000,00	76,21	150.057.490,00	51.607.490,00
Jumlah						89.818.810,00

Pengurangan persediaan senilai Rp222.540.826.246,52 tahun 2025 terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Aset Tetap senilai Rp 2.607.736.883,00 merupakan barang yang memenuhi kriteria aset tetap dan nilai kapitalisasi aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun 2025

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.692.000,00
Alat Pemadam Kebakaran	2.692.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.506.744.883,00
Penataan akses jalan penghubung Kantor dan Masjid Agung	239.450.000,00
Pemeliharaan Masjid Agung	149.800.000,00
Pematangan Lahan Kantor OPD Komplek Kantor Bupati	399.400.000,00
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pasar Oi Maci Sape	349.000.000,00
Penataan Lingkungan Masjid Agung Kabupaten Bima	399.400.000,00
Peningkatan Jalan Kompleks Kantor Bupati (Jalan Depan Kantor DPMPTSP)	969.694.883,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	98.300.000,00
Paving Blok SDN 1 Dena	98.300.000,00
Jumlah	2.607.736.883,00

- Pengurangan senilai Rp936.955.974,00 atas obat yang sudah kadaluarsa (*expired date*) yang terdapat pada 22 (dua puluh dua) BLUD, Instalasi farmasi kesehatan dan Rumah sakit Umum Bima dengan rincian sebagai berikut :





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 5.111
Daftar Obat yang Kadaluarsa (expired)ate) 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
Dinas Kesehatan	324.145.446,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Ambalawi	11.088.045,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Belo	8.691.389,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Bolo	7.644.751,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Donggo	4.819.146,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Lambitu	22.900.492,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Lambu	4.135.542,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Langgudu	8.763.846,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Langgudu Timur	12.172.038,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Madapangga	13.571.864,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Monta	10.278.900,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Ngali	56.299.834,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Pai	19.369.531,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Palibelo	29.419.908,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Parado	1.431.759,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Sanggar	23.807.720,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Sape	21.359.753,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Soromandi	8.187.733,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Tambora	51.565.431,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Wawo	9.224.859,00	Belum dimusnahkan
Puskesmas Wera	8.484.029,00	Sudah dimusnahkan
Puskesmas Woha	248.719.306,00	Belum dimusnahkan
RSUD Sondosia	20.298.531,00	Belum dimusnahkan
RSUD Bima	10.576.121,00	Belum dimusnahkan
Jumlah	936.955.974,00	

Dari Rp936.955.974,00 sudah dilakukan pemusnahan senilai Rp107.896.204,00 yang terdapat pada 10 (sepuluh) BLUD dan senilai Rp829.059.770,00 belum dimusnahkan, data terlampir

3. Pengurangan atas pemakaian persediaan selama tahun 2025 senilai Rp218.996.133.389,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Pemakaian Persediaan Masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Sekretariat DPRD	8.017.600.213,00
Sekretariat Daerah	14.094.645.416,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	309.248.900,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	145.639.000,00
Kecamatan Ambalawi	100.763.000,00
Kecamatan Belo	193.851.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Kecamatan Bolo	160.820.000,00
Kecamatan Donggo	153.153.694,00
Kecamatan Lambitu	124.070.000,00
Kecamatan Lambu	182.293.000,00
Kecamatan Langgudu	197.580.000,00
Kecamatan Madapangga	102.763.000,00
Kecamatan Monta	149.316.948,00
Kecamatan Palibelo	145.310.000,00
Kecamatan Parado	154.824.900,00
Kecamatan Sanggar	173.902.950,00
Kecamatan Sape	208.945.000,00
Kecamatan Soromandi	207.671.000,00
Kecamatan Tambora	250.890.000,00
Kecamatan Wawo	168.855.000,00
Kecamatan Wera	95.827.000,00
Kecamatan Woha	157.290.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.945.980.664,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.403.776.406,00
Dinas Perhubungan	220.381.307,00
Dinas Kesehatan	7.195.171.523,85
Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	32.787.753.816,95
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.063.390.405,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	9.409.302.181,00
Dinas Sosial	1.102.304.986,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.384.901.256,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	487.070.640,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	848.637.400,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	33.951.414.720,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.671.382.050,00
Dinas Ketahanan Pangan	869.703.186,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.650.682.400,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.235.547,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	985.228.850,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.531.733.040,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.787.782.785,00
Badan Pendapatan Daerah	719.804.534,00
Inspektorat	694.020.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	965.296.949,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.114.641.832,00
Dinas Pariwisata	186.045.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja	423.180.500,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	439.823.000,00
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	601.517.600,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	194.185.837,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.703.108,00
Puskesmas Ambalawi	999.320.277,39
Puskesmas Belo	824.509.230,26
Puskesmas Bolo	2.165.813.014,88
Puskesmas Donggo	786.608.417,59
Puskesmas Lambitu	258.974.294,74
Puskesmas Lambu	1.763.002.403,45
Puskesmas Langgudu	1.628.356.154,83
Puskesmas Madapangga	1.871.115.662,58
Puskesmas Monta	1.515.122.205,15
Puskesmas Ngali	578.969.599,64
Puskesmas Pai	331.105.034,45
Puskesmas Palibelo	1.515.677.159,22
Puskesmas Parado	595.783.995,01
Puskesmas Sanggar	1.034.870.042,62
Puskesmas Sape	3.833.507.808,33
Puskesmas Soromandi	864.038.589,56
Puskesmas Tambora	366.360.477,25
Puskesmas Wawo	1.287.915.237,37
Puskesmas Wera	1.604.275.624,78
Puskesmas Woha	1.893.750.581,09
Puskesmas Langgudu Timur	175.440.006,33
Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia	4.357.927.028,20
Badan Riset dan Inovasi Daerah	53.378.400,00
Jumlah	218.996.133.389,52

Dapat dijelaskan bahwa pengurangan yang signifikan pada perabot kantor disebabkan pada akun belanja barang ekstrakom merupakan bagian dari belanja barang sedangkan untuk akun pada penatausahaan asset barang Ekstrakom belum mempunyai akun tersendiri.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113
Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Investasi Non Permanen	13.375.000,50	13.375.000,50
Investasi Permanen	78.501.977.255,94	84.615.421.885,52
Jumlah	78.515.352.256,44	84.628.796.886,02





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Investasi Jangka Panjang Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 senilai Rp78.515.352.256,44 mengalami penurunan senilai Rp6.113.444.629,58 atau 7,22% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp84.628.796.886,02.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Tabel 5.114
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Dana Bergulir	13.375.000,50	13.375.00,50
Dana Bergulir Kepada Masyarakat	13.375.000,50	13.375.00,50
Dana Bergulir Kepada Masyarakat	13.375.000,50	13.375.00,50
Jumlah	13.375.000,50	13.375.00,50

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bergulir Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Saldo Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dengan pola PAD per 31 Desember 2025 disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*/NRV) dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Saldo Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2025 dan 2024

Nama Perangkat Daerah	Pokok 2024 (Rp)	Angsuran 2025 (Rp)	Sisa Pokok Per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 (Rp)	NRV (Rp)
Dinas Koperasi dan UKM	2.638.862.892,00	3.478.464,00	2.635.384.428,00	2.622.009.427,50	13.375.000,50
Program pengembangan Koperasi Tahun 2017	106.500.007,00	0,00	106.500.007,00	106.500.007,00	0,00
Penjaminan Dana PER pada BRI Cabang Bima 2002	365.069.099,00	3.478.464,00	361.590.635,00	361.590.635,00	0,00
Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2000	830.000.000,00	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00
Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2008	69.484.189,00	0,00	69.484.189,00	69.484.189,00	0,00
Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2009	210.933.606,00	0,00	210.933.606,00	210.933.606,00	0,00
Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2012	20.250.006,00	0,00	20.250.006,00	20.250.006,00	0,00
Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2013	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00
Program Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 2010	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Program Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 2011	107.919.502,00	0,00	107.919.502,00	107.919.502,00	0,00
Program Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 2012	361.520.667,00	0,00	361.520.667,00	361.520.667,00	0,00
Program Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 2013	385.852.480,00	0,00	385.852.480,00	385.852.480,00	0,00
Program Pengembangan Usaha Koperasi 2018	5.833.335,00	0,00	5.833.335,00	5.833.335,00	0,00
Program Pengembangan Usaha Koperasi 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Usaha Koperasi 2020	26.750.001,00	0,00	26.750.001,00	13.375.000,50	13.375.000,50
Dinas Peternakan	6.408.906.338,00	0,00	6.408.906.338,00	6.408.906.338,00	0,00
Ternak sapi Tahun 2003	331.897.000,00	0,00	331.897.000,00	331.897.000,00	0,00
Ternak sapi Tahun 2004	423.139.386,00	0,00	423.139.386,00	423.139.386,00	0,00
Ternak sapi Tahun 2006	622.627.310,00	0,00	622.627.310,00	622.627.310,00	0,00
Ternak sapi Tahun 2007	645.335.000,00	0,00	645.335.000,00	645.335.000,00	0,00
Ternak sapi Tahun 2008	748.302.500,00	0,00	748.302.500,00	748.302.500,00	0,00
Ternak sapi Tahun 2009	115.376.250,00	0,00	115.376.250,00	115.376.250,00	0,00
Ternak sapi Tahun 2010	271.660.000,00	0,00	271.660.000,00	271.660.000,00	0,00
Ternak sapi Tahun 2011	179.336.000,00	0,00	179.336.000,00	179.336.000,00	0,00
Ternak kambing Tahun 2003	122.146.795,00	0,00	122.146.795,00	122.146.795,00	0,00
Ternak kambing Tahun 2004	68.570.530,00	0,00	68.570.530,00	68.570.530,00	0,00
Ternak kambing Tahun 2006	476.830.875,00	0,00	476.830.875,00	476.830.875,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Pokok 2024 (Rp)	Angsuran 2025 (Rp)	Sisa Pokok Per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 (Rp)	NRV (Rp)
Ternak kambing Tahun 2007	632.550.000,00	0,00	632.550.000,00	632.550.000,00	0,00
Ternak kambing Tahun 2008	625.700.000,00	0,00	625.700.000,00	625.700.000,00	0,00
Ternak kambing Tahun 2010	52.211.250,00	0,00	52.211.250,00	52.211.250,00	0,00
Ternak kambing Tahun 2011	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Ternak kerbau Tahun 2004	308.583.920,00	0,00	308.583.920,00	308.583.920,00	0,00
Ternak kerbau Tahun 2006	239.902.512,00	0,00	239.902.512,00	239.902.512,00	0,00
Ternak kerbau Tahun 2007	83.377.000,00	0,00	83.377.000,00	83.377.000,00	0,00
Ternak kambing pe tahun 2006	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
Ternak kambing pe tahun 2007	56.375.000,00	0,00	56.375.000,00	56.375.000,00	0,00
Ternak kambing pe tahun 2008	90.650.010,00	0,00	90.650.010,00	90.650.010,00	0,00
Ternak kuda sumba tahun 2006	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
Ternak kuda sumba tahun 2007	65.115.000,00	0,00	65.115.000,00	65.115.000,00	0,00
Ternak kuda sumba tahun 2008	80.900.000,00	0,00	80.900.000,00	80.900.000,00	0,00
Ternak entok tahun 2007	21.520.000,00	0,00	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00
Ternak entok tahun 2009	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	479.875.000,00	0,00	479.875.000,00	479.875.000,00	0,00
Penguatan Modal Tahun 2008	157.875.000,00	0,00	157.875.000,00	157.875.000,00	0,00
Penguatan Modal Tahun 2009	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Penguatan Modal Tahun 2010	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Penguatan Modal Tahun 2011	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Penguatan Modal Tahun 2012	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Penguatan Modal Tahun 2013	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00
Jumlah	9.527.644.230,00	3.478.464,00	9.524.165.766,00	9.510.790.765,50	13.375.000,50

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang Permanen.

Tabel 5.116
Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	78.501.977.255,94	84.615.421.885,52
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	78.501.977.255,94	84.615.421.885,52
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	78.501.977.255,94	84.615.421.885,52
Jumlah	78.501.977.255,94	84.615.421.885,52

Tabel 5.117
Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen

BUMD	Saldo 2024	Kenaikan Nilai Investasi 2025	Penurunan Nilai Investasi 2025	Saldo 2025
PT. DSM	3.322.595.052,82	51.391.030,17	0,00	3.373.986.082,99
PT. DUM (Ambalawi dan Wawo)	920.740.842,27	0,00	0,00	920.740.842,27
PT. BPR NTB Perseroda	6.191.055.222,00	0,00	0,00	6.191.055.222,00
PT. BPR Pesisir Akbar	1.811.415.547,41	0,00	691.233.079,09	1.120.182.468,32
PT. Jamkrida NTB Syariah	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
PT. Bank NTB Syariah	40.018.260.000,00	0,00	0,00	40.018.260.000,00
Perumda BKS	5.405.889.217,78	213.999.997,85	0,00	5.619.889.215,63





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PDAM	25.145.466.003,24	0,00	5.687.602.578,51	19.457.863.424,73
Total	84.615.421.885,51	265.391.028,02	6.378.835.657,60	78.501.977.255,94

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan saldo Investasi Jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bima berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
PT. Bank NTB Syariah	3,97%	Biaya	40.018.260.000,00	40.018.260.000,00	0,00
PT. Jamkrida	5,49%	Biaya	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
PD. BPR NTB	4,01%	Biaya	6.191.055.222,00	6.191.055.222,00	0,00
PT. DSM	48,79%	Ekuitas	3.373.986.082,99	3.322.595.052,82	51.391.030,17
PT. DUM	88,36%	Ekuitas	920.740.842,27	920.740.842,27	0,00
PT. Bank Pesisir Akbar	95,30%	Ekuitas	1.120.182.468,32	1.811.415.547,41	(691.233.079,09)
Perumda BKS	100,00%	Ekuitas	5.619.889.215,63	5.405.889.217,78	213.999.997,85
PDAM	100,00%	Ekuitas	19.457.863.424,73	25.145.466.003,24	(5.687.602.578,51)
Jumlah			78.501.977.255,94	84.615.421.885,52	(6.113.444.629,58)

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima. Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%;
- Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%.

Penjelasan untuk masing-masing penyertaan sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB Syariah dinilai dengan metode biaya. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.018.260.000,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima pada PT. Bank NTB Syariah sampai dengan 31 Desember 2025.
- Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida dinilai dengan metode biaya. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.800.000.000,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima kepada PT. Jamkrida sampai dengan 31 Desember 2025.
- Penyertaan Modal pada PD. BPR NTB dinilai dengan metode biaya. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.191.055.222,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima kepada PD. BPR NTB sampai dengan 31 Desember 2025.
- Penyertaan Modal pada PT. DSM dinilai dengan metode ekuitas. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.373.986.082,99. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima pada PT. DSM sampai dengan 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima pada PT. DSM mengalami kenaikan karena adanya laba.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- e. Penyertaan Modal pada PT. DUM dinilai dengan metode ekuitas. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp920.740.842,27. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima pada PT. DUM sampai dengan 31 Desember 2025. Sejak tahun 2024 PT. DUM tidak melakukan kegiatan operasional, sehingga Pemerintah Kabupaten Bima mengambil langkah dengan meminta Inspektorat Kabupaten Bima untuk melakukan Audit Investigasi terhadap PT. DUM agar mendapatkan rekomendasi sebagai tindak lanjut.
- f. Penyertaan Modal pada PT. Bank Pesisir Akbar dinilai dengan metode ekuitas. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.120.182.468,32. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima pada PT. Bank Pesisir Akbar sampai dengan 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima mengalami penurunan karena PT. Bank Pesisir Akbar mengalami kerugian.
- g. Penyertaan Modal pada Perumda BKS dinilai dengan metode ekuitas. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.619.889.215,63. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima pada Perumda BKS sampai dengan 31 Desember 2025. Selain menambah penyertaan modal kepada Perumda BKS sebesar Rp200.000.000,00, pada Tahun 2025 nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima mengalami peningkatan karena Perumda BKS memperoleh laba.
- h. Penyertaan Modal pada PDAM dinilai dengan metode ekuitas. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.457.863.424,73. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2025. Pada tahun 2025 nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bima mengalami penurunan karena PDAM mengalami kerugian.

Laporan Keuangan BUMD yang kepemilikan sahamnya menggunakan metode ekuitas dapat dilihat pada **Lampiran VIII**. (dikecualikan PT. DUM karena sejak bulan Januari 2024 tidak sudah tidak beroperasi lagi).

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp4.813.717.730.547,34 dan Rp4.627.537.237.492,02 peningkatan sebesar 4,02% atau senilai Rp186.180.493.055,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119
Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Aset Tetap	
	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Tetap	4.814.256.528.547,34	4.627.537.237.492,02
Tanah	498.033.019.298,67	478.771.890.498,67
Peralatan dan mesin	760.440.812.936,51	735.190.183.804,68
Gedung dan bangunan	1.676.434.067.802,69	1.603.368.262.932,69
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.774.592.097.457,14	1.709.235.261.237,74
Aset Tetap Lainnya	84.527.852.591,33	76.854.866.530,24
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.228.678.461,00	24.116.772.488,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Akumulasi Penyusutan	(2.164.615.153.402,21)	(1.948.538.833.844,32)
Nilai Buku	2.649.641.375.145,13	2.678.998.403.647,70

Tabel 5.120
Rincian Mutasi Aset Tetap
per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Aset Tetap	4.627.537.237.492,02	252.358.198.795,00	65.638.907.739,68	4.814.256.528.547,34
Tanah	478.771.890.498,67	19.270.490.800,00	9.362.000,00	498.033.019.298,67
Peralatan dan Mesin	735.190.183.804,68	38.207.493.509,00	12.956.864.377,17	760.440.812.936,51
Gedung dan Bangunan	1.603.368.262.932,69	86.592.771.912,00	13.526.967.042,00	1.676.434.067.802,69
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.709.235.261.237,74	80.064.219.620,00	14.707.383.400,60	1.774.592.097.457,14
Aset Tetap Lainnya	76.854.866.530,24	7.724.347.041,00	51.360.979,91	84.527.852.591,33
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.116.772.488,00	20.498.875.913,00	24.386.969.940,00	20.228.678.461,00
Akumulasi Penyusutan	(1.948.538.833.844,32)	(226.485.309.312,57)	(10.408.989.754,68)	(2.164.615.153.402,21)
Nilai Buku	2.678.998.403.647,70	25.872.889.482,43	55.229.917.985,00	2.649.641.375.145,13

5.3.1.3.1 Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Tanah.

Nilai Aset Tetap tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp498.033.019.298,67 mengalami kenaikan senilai Rp19.261.128.800,00 atau 4,04% dibandingkan dengan nilai Aset tetap Tanah Tahun 2024.

Tabel 5.21
Rincian Saldo Aset Tetap Tanah
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Tanah Persil	310.505.305.520,00	307.490.642.020,00	3.014.663.500,00	1,01%
Tanah Bangunan				
Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	17.667.723.944,00	16.244.115.944,00	1.423.608.000,00	8,82%
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	10.395.868.896,00	10.046.868.896,00	349.000.000,00	3,47%
Tanah untuk Bangunan Industri	99.435.000,00	99.435.000,00	0,00	0,00%
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	277.674.285.038,00	276.965.367.538,00	708.917.500,00	0,28%
Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	2.583.993.860,00	2.583.993.860,00	0,00	0,00%
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	2.063.046.782,00	1.529.908.782,00	533.138.000,00	34,85%
Tanah Persil Lainnya	20.952.000,00	20.952.000,00	0,00	0,00%
Tanah Non Persil	44.844.356.730,00	28.597.891.430,00	16.246.465.300,00	56,81%
Tanah Basah	7.541.526.230,00	7.511.526.230,00	30.000.000,00	0,40%
Tanah Kering	7.895.586.000,00	7.895.586.000,00	0	0,00%
Tanah Perkebunan	10.143.169.200,00	10.143.169.200,00	0	0,00%





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	2.411.910.000,00	2.411.910.000,00	0	0,00%
Tanah Pertanian	16.852.165.300,00	635.700.000,00	16.216.465.300,00	2550,96%
Lapangan	142.683.357.048,67	142.683.357.048,67	0,00	0,00%
Tanah Lapangan Olahraga	23.643.323.635,00	23.643.323.635,00	0	0,00%
Tanah Lapangan Parkir	179.330.000,00	179.330.000,00	0	0,00%
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	106.732.000,00	106.732.000,00	0	0,00%
Tanah untuk Jalan	78.948.622.371,67	78.948.622.371,67	0	0,00%
Tanah untuk Bangunan Air	17.350.096.845,00	17.350.096.845,00	0	0,00%
Tanah untuk Bangunan Instalasi	401.553.747,00	401.553.747,00	0	0,00%
Tanah untuk Bangunan Jaringan	13.592.000,00	13.592.000,00	0	0,00%
Tanah untuk Bangunan Bersejarah	13.871.270.000,00	13.871.270.000,00	0	0,00%
Tanah untuk Makam	2.388.517.615,00	2.388.517.615,00	0	0,00%
Tanah untuk Taman	5.678.619.335,00	5.678.619.335,00	0	0,00%
Tanah Kampung	101.699.500,00	101.699.500,00	0	0,00%
Jumlah	498.033.019.298,67	478.771.890.498,67	19.261.128.800,00	4,04%

Tabel 5.22
Rincian Mutasi atas Aset Tetap Tanah

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
Saldo 31 Desember 2024	478.771.890.498,67	
Penambahan	19.270.490.800,00	
Pengadaan APBD	273.738.000,00	
Hasil Inventarisasi	16.366.802.800,00	
Reklas dari Aset tetap	2.629.950.000,00	
Pengurangan		9.362.000,00
Koreksi temuan Kurvol BPK TA 2025		9.362.000,00
Jumlah Mutasi		
Saldo 31 Desember 2025		498.033.019.298,67

Mutasi aset tetap tanah dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp498.033.019.298,67 yang terdiri dari:

1. Penambahan dari belanja modal tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp273.738.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.23
Rincian Penambahan Nilai Tanah Tahun 2025

Perangkat Daerah/ Nama Aset	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	781	110.000.000,00
Tanah Untuk Bangunan Masjid	900	133.738.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah/ Nama Aset	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
Tanah Aliran Sungai	371	30.000.000,00
Jumlah		273.738.000,00

- Hasil Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD melalui perbandingan data KIB dan SK Penetapan Sewa dengan nilai total Rp16.366.802.800,00 pada Sekretariat daerah atas Tanah Pertanian yang menjadi Obyek sewa tanah sebanyak 381 bidang senilai Rp16,216,465,300 dan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp150.337.500 atas 1 bidang Tanah SDN 2 Ntonggu sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 23.06.04.11.4.0003.
- Penambahan senilai Rp2.629.950.000,00 akibat penimbunan tanah sesuai Bultek Aset Tetap Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian penambahan Tanah akibat pekerjaan penimbunan Tahun 2025

Spesifikasi	Nilai (Rp)
Pematangan Lahan Kantor OPD Komplek Kantor Bupati	399.400.000,00
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pasar Oi Maci Sape	349.000.000,00
Penataan Lingkungan Masjid Agung Kabupaten Bima	399.400.000,00
Pematangan Lahan Rumah Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	1.432.970.000,00
Penimbunan Halaman Sekolah SDN Inpres Bugis Kec Sape	49.180.000,00
Jumlah	2.629.950.000,00

- Pengurangan senilai Rp9.362.000,00 merupakan temuan kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pekerjaan Pematangan Lahan Rumah Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Dari nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp498.033.019.298,67 dapat dijelaskan sejumlah 241 bidang telah bersertifikat dengan luas 865.314,98 m² senilai Rp87.257.626.092,00, bidang tanah belum bersertifikat sejumlah 2.153 bidang dengan luas 13.529.927 m² senilai Rp410.775.393.206,67. Selain itu masih terdapat 79 sertifikat dengan luas 203.562 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Bima yang belum tercatat hal di neraca, ini disebabkan sertifikat tersebut bersumber dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bima dan baru dilakukan penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima dengan Nomor Surat Tugas : ST-235/KNL.1404/2026 tanggal 11 s.d 13 Mei 2026.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp760.440.812.936,51 mengalami peningkatan Rp24.711.831.131,83 atau 3,36% dibandingkan dengan nilai Peralatan dan Mesin tahun 2024.

Tabel 5.125
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Alat Besar	20.622.768.133,08	9.819.235.639,00	10.803.532.494,08	110,02%
Traktor	712.663.000,00	174.135.000,00	538.528.000,00	309,26
Grader	2.954.529.955,00	2.954.529.955,00	-	0,00
Excavator	7.136.700.000,00	3.244.200.000,00	3.892.500.000,00	119,98
Asphalt Equipment	3.400.000,00	3.400.000,00	-	0,00
Compacting Equipment	842.805.500,00	842.864.930,00	(59.430,00)	(0,01)
Aggregate and Concrete Equipment	21.082.000,00	21.082.000,00	-	0,00
Alat Pengangkat	262.597.000,00	262.612.000,00	(15.000,00)	(0,01)
Mesin Proses	181.425.000,00	182.132.250,00	(707.250,00)	(0,39)
Alat Penarik	32.298.000,00	32.298.000,00	-	0,00
Feeder	1.167.000.000,00	1.167.000.000,00	-	0,00
Compressor	21.938.000,00	21.938.000,00	-	0,00
Electric Generating Set	64.945.000,00	64.945.000,00	-	0,00
Pompa	916.172.018,08	804.800.844,00	111.371.174,08	13,84
Mesin Bor	12.168.000,00	12.168.000,00	-	0,00
Unit Pemeliharaan Lapangan	3.997.400.000,00	2.800.000,00	3.994.600.000,00	142.664,29
Alat Pengolahan Air Kotor	2.215.560.000,00	-	2.215.560.000,00	100,00
Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	9.696.000,00	9.696.000,00	-	0,00
Perlengkapan Kebakaran Hutan	43.000.000,00	1.000.000,00	42.000.000,00	4.200,00
Peralatan SAR Mountenering	9.755.000,00	-	9.755.000,00	100,00
Alat Bantu Lainnya	17.633.660,00	17.633.660,00	-	0,00
Alat Angkutan	181.826.804.802,64	179.630.071.843,64	2.196.732.959,00	1,22
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.381.458.894,00	22.381.458.894,00	-	0,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	33.989.767.753,65	33.793.767.753,65	196.000.000,00	0,58
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.619.631.585,00	20.368.631.585,00	251.000.000,00	1,23
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.076.533.931,00	39.188.095.333,00	(111.561.402,00)	(0,28)
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	129.100.500,00	129.100.500,00	-	0,00
Kendaraan Bermotor Khusus	59.911.998.343,99	57.970.646.342,99	1.941.352.001,00	3,35
Alat Angkutan Kereta Rel	237.645.455,00	237.645.455,00	-	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.939.385.080,00	2.035.085.080,00	(95.700.000,00)	(4,70)
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	312.674.260,00	297.031.900,00	15.642.360,00	5,27
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	41.925.000,00	41.925.000,00	-	0,00
Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	49.500.000,00	49.500.000,00	-	0,00
Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.167.154.000,00	2.167.154.000,00	-	0,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	970.030.000,00	970.030.000,00	-	0,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.119.719.556,51	5.852.110.386,51	267.609.170,00	4,57
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	427.482.000,00	419.982.000,00	7.500.000,00	1,79
Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	41.594.000,00	41.594.000,00	-	0,00
Perkakas Bengkel Listrik	202.731.428,00	200.135.628,00	2.595.800,00	1,30
Perkakas Bengkel Service	76.022.600,00	76.022.600,00	-	0,00
Perkakas Bengkel Kayu	80.042.000,00	80.042.000,00	-	0,00
Perkakas Bengkel Khusus	15.400.000,00	44.900.000,00	(29.500.000,00)	(65,70)
Peralatan Las	100.320.000,00	100.320.000,00	-	0,00
Perkakas Pabrik Es	144.687.164,00	146.183.564,00	(1.496.400,00)	(1,02)
Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	745.270.000,00	745.270.000,00	-	0,00
Perkakas Pengangkat	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
Perkakas Standard (Standard Tools)	268.204.750,18	198.829.750,18	69.375.000,00	34,89
Perkakas Khusus (Special Tools)	4.977.000,00	4.977.000,00	-	0,00
Perkakas Bengkel Kerja	54.912.000,00	54.912.000,00	-	0,00
Peralatan Tukang Besi	25.103.000,00	25.103.000,00	-	0,00
Peralatan Tukang Kayu	4.070.000,00	4.070.000,00	-	0,00
Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	35.837.300,00	35.969.390,00	(132.090,00)	(0,37)
Peralatan Bengkel Khusus Peladam	214.144.946,00	204.519.946,00	9.625.000,00	4,71
Alat Ukur Universal	1.181.267.966,00	1.095.467.966,00	85.800.000,00	7,83
Alat Ukur/Tes Inteligensia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00
Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	115.200,00	115.200,00	-	0,00
Alat Ukur/Tes Klinis Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00
Alat Kalibrasi	12.925.000,00	12.925.000,00	-	0,00
Oscilloscope	6.662.000,00	6.662.000,00	-	0,00
Universal Tester	157.176.000,00	146.176.000,00	11.000.000,00	7,53
Alat Ukur/Pembanding	458.994.833,33	458.216.283,33	778.550,00	0,17
Alat Ukur Lain-Lain	1.054.960.560,00	1.062.407.350,00	(7.446.790,00)	(0,70)
Alat Timbangan/Biara	309.964.909,00	313.010.809,00	(3.045.900,00)	(0,97)
Anak Timbangan/Biara	338.541.900,00	338.541.900,00	-	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Specific Set	29.579.000,00	29.579.000,00	-	0,00
Alat Pengukur Keadaan Alam	119.556.000,00	-	119.556.000,00	100,00
Alat Pengukur Penglihatan	2.178.000,00	2.178.000,00	-	0,00
Alat Pertanian	10.703.721.304,18	10.849.894.692,47	(146.173.388,29)	(1,35)
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	163.675.000,00	340.375.000,00	(176.700.000,00)	(51,91)
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	46.216.900,00	46.216.900,00	-	0,00
Alat Panen	300.000,00	300.000,00	-	0,00
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2.513.352.275,07	2.499.601.856,37	13.750.418,70	0,55
Alat Laboratorium Pertanian	6.167.699.275,11	6.163.805.436,11	3.893.839,00	0,06
Alat Processing	211.235.000,00	211.235.000,00	-	0,00
Alat Pasca Panen	38.100.000,00	38.100.000,00	-	0,00
Alat Produksi Perikanan	164.789.854,00	125.100.000,00	39.689.854,00	31,73
Alat-Alat Peternakan	1.245.853.000,00	1.091.215.000,00	154.638.000,00	14,17
Alat Pengolahan Lainnya	152.500.000,00	333.945.500,00	(181.445.500,00)	(54,33)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	145.591.536.427,96	143.231.674.590,03	2.359.861.837,93	1,65
Mesin Ketik	960.201.481,00	968.158.531,34	(7.957.050,34)	(0,82)
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	37.649.771,00	38.654.771,00	(1.005.000,00)	(2,60)
Alat Reproduksi (Penggandaan)	190.889.640,00	187.389.640,00	3.500.000,00	1,87
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.800.446.063,95	16.397.749.587,45	402.696.476,50	2,46
Alat Kantor Lainnya	14.794.239.557,27	12.425.834.339,67	2.368.405.217,60	19,06
Mebel	67.926.655.426,29	70.865.494.543,17	(2.938.839.116,88)	(4,15)
Alat Pengukur Waktu	34.836.050,00	40.949.050,00	(6.113.000,00)	(14,93)
Alat Pembersih	1.033.604.700,00	1.027.539.200,00	6.065.500,00	0,59
Alat Pendingin	11.795.479.796,10	11.105.979.165,10	689.500.631,00	6,21
Alat Dapur	834.419.265,00	785.540.504,00	48.878.761,00	6,22
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.774.084.342,72	15.238.605.777,45	1.535.478.565,27	10,08
Alat Pemadam Kebakaran	5.527.389.862,00	5.518.315.472,00	9.074.390,00	0,16
Meja Kerja Pejabat	2.881.676.381,25	3.029.647.502,97	(147.971.121,72)	(4,88)
Meja Rapat Pejabat	915.538.991,34	864.866.580,34	50.672.411,00	5,86
Kursi Kerja Pejabat	2.417.365.137,74	2.313.086.399,24	104.278.738,50	4,51
Kursi Rapat Pejabat	254.768.910,31	254.768.910,31	-	0,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	51.437.900,00	51.437.900,00	-	0,00
Kursi Tamu di Ruang Pejabat	405.841.949,00	257.212.949,00	148.629.000,00	57,78
Lemari dan Arsip Pejabat	1.955.011.202,99	1.860.443.766,99	94.567.436,00	5,08
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.761.512.159,44	14.944.883.957,44	816.628.202,00	5,46
Peralatan Studio Audio	2.403.897.796,00	2.110.875.380,00	293.022.416,00	13,88
Peralatan Studio Video dan Film	4.996.915.309,40	4.651.190.644,40	345.724.665,00	7,43





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Peralatan Studio Gambar	2.450.000,00	2.450.000,00	-	0,00
Peralatan Cetak	1.200.881.125,00	1.199.631.125,00	1.250.000,00	0,10
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	402.764.643,04	399.289.643,04	3.475.000,00	0,87
Alat Studio Lainnya	316.810.456,00	287.717.000,00	29.093.456,00	10,11
Alat Komunikasi Telephone	1.430.921.720,00	1.388.137.775,00	42.783.945,00	3,08
Alat Komunikasi Radio SSB	23.170.000,00	23.170.000,00	-	0,00
Alat Komunikasi Radio HF/FM	250.097.500,00	250.097.500,00	-	0,00
Alat Komunikasi Radio VHF	17.500.000,00	17.500.000,00	-	0,00
Alat Komunikasi Radio UHF	56.810.000,00	56.810.000,00	-	0,00
Alat Komunikasi Sosial	906.107.301,00	906.818.581,00	(711.280,00)	(0,08)
Alat-Alat Sandi	225.250.000,00	125.250.000,00	100.000.000,00	79,84
Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	14.000.000,00	14.000.000,00	-	0,00
Alat Komunikasi Satelit	2.900.000,00	2.900.000,00	-	0,00
Peralatan Pemancar MF/MW	145.171.000,00	145.171.000,00	-	0,00
Peralatan Pemancar HF/SW	72.674.000,00	72.674.000,00	-	0,00
Peralatan Pemancar UHF	212.830.000,00	212.830.000,00	-	0,00
Peralatan Antena MF/MW	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00
Peralatan Antena HF/SW	3.951.250,00	3.951.250,00	-	0,00
Peralatan Antena VHF/FM	600.000,00	600.000,00	-	0,00
Peralatan Antena UHF	325.876.003,00	325.876.003,00	-	0,00
Peralatan Antena SHF/Parabola	133.235.560,00	133.635.560,00	(400.000,00)	(0,30)
Switcher Antena	600.000,00	600.000,00	-	0,00
Switcher/Menara Antena	151.000.000,00	151.000.000,00	-	0,00
Humidity Control	20.754.000,00	20.754.000,00	-	0,00
Program Input Equipment	22.167.570,00	22.542.570,00	(375.000,00)	(1,66)
Peralatan Antena Penerima VHF	4.725.000,00	4.725.000,00	-	0,00
Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	565.000,00	-	565.000,00	100,00
Sumber Tenaga	2.410.786.926,00	2.408.586.926,00	2.200.000,00	0,09
Very High Frequence Omni Range (VOR)	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	211.661.044.014,99	210.060.741.673,97	1.600.302.341,02	0,76
Alat Kedokteran Umum	76.702.996.116,02	75.873.186.142,00	829.809.974,02	1,09
Alat Kedokteran Gigi	4.635.207.357,76	4.629.714.807,76	5.492.550,00	0,12
Alat Kedokteran Keluarga Berencana	855.639.241,00	855.639.241,00	-	0,00
Alat Kedokteran Bedah	17.471.163.368,00	17.316.289.669,00	154.873.699,00	0,89
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	16.049.831.459,04	15.889.934.721,04	159.896.738,00	1,01
Alat Kedokteran THT	2.530.230.862,00	2.521.888.480,00	8.342.382,00	0,33
Alat Kedokteran Mata	669.035.750,00	657.085.750,00	11.950.000,00	1,82





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	24.377.493.009,00	24.205.096.509,00	172.396.500,00	0,71
Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	22.073.800,00	22.073.800,00	-	0,00
Alat Kedokteran Anak	13.044.495.252,00	12.866.295.252,00	178.200.000,00	1,39
Alat Kedokteran Poliklinik	4.751.238.397,50	4.751.271.997,50	(33.600,00)	0,00
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.481.256.949,00	1.474.893.949,00	6.363.000,00	0,43
Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	5.797.037.037,00	5.797.037.037,00	-	0,00
Alat Kedokteran Jantung	6.839.781.994,00	6.835.318.720,00	4.463.274,00	0,07
Alat Kedokteran Radiodiagnostic	9.010.671.549,00	9.010.671.549,00	-	0,00
Alat Kedokteran Patologi Anatomy	258.750.000,00	258.750.000,00	-	0,00
Alat Kedokteran Radioterapi	1.110.506.000,00	1.110.506.000,00	-	0,00
Alat Kedokteran Nuklir	3.886.441.023,00	3.880.631.226,00	5.809.797,00	0,15
Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	141.063.110,00	141.063.110,00	-	0,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat	7.091.080.990,67	7.076.210.990,67	14.870.000,00	0,21
Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	28.500.000,00	28.500.000,00	-	0,00
Alat Kedokteran ICU	2.995.552.500,00	2.995.552.500,00	-	0,00
Alat Kedokteran ICCU	336.783.065,00	336.783.065,00	-	0,00
Alat Kedokteran Bedah Jantung	69.644.568,00	61.068.568,00	8.576.000,00	14,04
Alat Kedokteran Traditional Medicine	1.014.000,00	-	1.014.000,00	100,00
Alat Kedokteran Anestesi	2.233.920.078,00	2.233.920.078,00	-	0,00
Alat Kedokteran Lainnya	2.064.163.798,00	2.064.163.798,00	-	0,00
Alat Kesehatan Matra Laut	5.759.911,00	825.000,00	4.934.911,00	598,17
Alat Kesehatan Matra Udara	70.831.400,00	68.032.400,00	2.799.000,00	4,11
Alat Kesehatan Kepolisian	30.793.750,00	38.713.750,00	(7.920.000,00)	(20,46)
Alat Kesehatan Olahraga	294.848.995,00	269.607.995,00	25.241.000,00	9,36
Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.803.238.685,00	6.790.015.569,00	13.223.116,00	0,19
Alat Laboratorium	43.881.012.810,23	43.771.812.826,96	109.199.983,27	0,25
Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	127.653.965,00	127.653.965,00	-	0,00
Alat Laboratorium Hidrokimia	3.305.000,00	3.305.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Batuan/Geologi	58.850.000,00	59.000.000,00	(150.000,00)	(0,25)
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	136.396.000,00	138.671.900,00	(2.275.900,00)	(1,64)
Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	136.534.564,00	136.534.564,00	-	0,00
Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	141.906.000,00	142.081.000,00	(175.000,00)	(0,12)
Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	383.233.000,00	388.828.000,00	(5.595.000,00)	(1,44)
Alat Laboratorium Umum	4.804.887.397,00	4.805.098.937,00	(211.540,00)	0,00
Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.103.253.835,00	1.102.806.618,00	447.217,00	0,04
Alat Laboratorium Kimia	455.482.422,00	458.485.231,00	(3.002.809,00)	(0,65)





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Alat Laboratorium Patologi	6.187.466.506,96	6.185.069.006,96	2.397.500,00	0,04
Alat Laboratorium Immunologi	131.758.508,00	109.758.508,00	22.000.000,00	20,04
Alat Laboratorium Hematologi	346.487.340,00	346.487.340,00	-	0,00
Alat Laboratorium Film	110.624.110,00	98.308.200,00	12.315.910,00	12,53
Alat Laboratorium Makanan	189.717.505,00	191.777.505,00	(2.060.000,00)	(1,07)
Alat Laboratorium Farmasi	7.530.200,00	7.530.200,00	-	0,00
Alat Laboratorium Fisika	94.320.023,60	99.653.313,60	(5.333.290,00)	(5,35)
Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	1.750.000,00	950.000,00	800.000,00	84,21
Alat Laboratorium Pembuatan Pola	40.448.000,00	40.448.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Metalografi	2.250.000,00	2.250.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	434.730,00	434.730,00	-	0,00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	12.395.720,00	12.395.720,00	-	0,00
Alat Laboratorium Uji Tekstil	9.312.052,00	9.312.052,00	-	0,00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	47.374.000,00	47.374.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	12.484.251,00	14.658.751,00	(2.174.500,00)	(14,83)
Alat Laboratorium Uji Keramik	1.000.000,00	80.150,00	919.850,00	1.147,66
Alat Laboratorium Pertanian	89.559.000,00	-	89.559.000,00	100,00
Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	-	52.000,00	(52.000,00)	(100,00)
Alat Laboratorium Energi Surya	4.397.400,00	4.397.400,00	-	0,00
Alat Laboratorium Oseanografi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	-	35.000,00	(35.000,00)	(100,00)
Alat Laboratorium Biologi Perairan	445.206.149,00	160.706.150,00	284.499.999,00	177,03
Alat Laboratorium Biologi	5.988.897,72	6.939.567,72	(950.670,00)	(13,70)
Alat Laboratorium Geofisika	17.317.600,00	17.317.600,00	-	0,00
Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	21.200.000,00	21.260.000,00	(60.000,00)	(0,28)
Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	58.470.000,00	58.470.000,00	-	0,00
Laboratorium Kearsipan	8.384.800,00	8.384.800,00	-	0,00
Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	2.261.176.702,00	2.261.197.702,00	(21.000,00)	0,00
Alat Laboratorium Lain	1.077.558.759,60	1.084.923.759,60	(7.365.000,00)	(0,68)
Analytical Instrument	10.841.000,00	10.841.000,00	-	0,00
Instrument Probe/Sensor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00
General Laboratory Tool	184.854.150,00	184.854.150,00	-	0,00
Laboratory Safety Equipment	221.481.600,00	221.481.600,00	-	0,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	1.896.863.561,29	1.911.436.388,73	(14.572.827,44)	(0,76)





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	2.354.651.829,36	2.452.676.824,45	(98.024.995,09)	(4,00)
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.120.707.317,04	1.177.163.232,55	(56.455.915,51)	(4,80)
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.811.594.458,13	1.849.546.718,13	(37.952.260,00)	(2,05)
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	376.556.196,83	381.569.836,83	(5.013.640,00)	(1,31)
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	247.312.556,53	244.373.636,53	2.938.920,00	1,20
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	332.036.160,38	357.614.170,58	(25.578.010,20)	(7,15)
Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama	693.599.850,37	695.317.850,37	(1.718.000,00)	(0,25)
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	534.566.733,74	527.131.733,74	7.435.000,00	1,41
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	351.046.630,38	166.926.630,38	184.120.000,00	110,30
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.326.099.701,72	1.339.070.520,16	(12.970.818,44)	(0,97)
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	58.698.000,00	59.637.380,00	(939.380,00)	(1,58)
Alat Peraga Kejuruan	7.063.741.544,58	7.279.893.921,63	(216.152.377,05)	(2,97)
Alat Peraga PAUD/TK	610.080.000,00	610.080.000,00	-	0,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	24.808.500,00	-	24.808.500,00	100,00
Modular Counting and Scientific Electronic	227.969.648,00	227.969.648,00	-	0,00
Assembly/Counting System	900.000,00	900.000,00	-	0,00
Recorder Display	87.089.361,00	88.029.361,00	(940.000,00)	(1,07)
System/Power Supply	419.460.000,00	418.710.000,00	750.000,00	0,18
Measuring/Testing Device	47.790.000,00	47.790.000,00	-	0,00
Opto Electronics	433.100.008,00	433.100.008,00	-	0,00
Alat Kesehatan Kerja	3.495.000,00	3.495.000,00	-	0,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	41.077.500,00	41.077.500,00	-	0,00
Non Destructive Test (NDT) Device	43.243.200,00	43.243.200,00	-	0,00
Peralatan Hidrologi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.240.740.000,00	1.240.740.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Kualitas Udara	933.842.000,00	908.597.000,00	25.245.000,00	2,78
Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	25.515.000,00	49.847.000,00	(24.332.000,00)	(48,81)
Laboratorium Lingkungan	28.600.000,00	28.600.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Penunjang	994.574.689,00	1.005.574.689,00	(11.000.000,00)	(1,09)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	3.996.000,00	-	3.996.000,00	100,00
Data Acquisition and Analyzing System	842.564.080,00	857.773.780,00	(15.209.700,00)	(1,77)
Cavitation Tunnel	209.937.996,00	209.937.996,00	-	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Peralatan Umum	10.378.960,00	12.928.960,00	(2.550.000,00)	(19,72)
MOB	-	161.280,00	(161.280,00)	(100,00)
Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	487.905.140,00	487.905.140,00	-	0,00
Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	800.000,00	800.000,00	-	0,00
Alat Laboratorium Uji Perangkat	2.880.000,00	2.880.000,00	-	0,00
Alat Persenjataan	1.353.810.872,00	1.331.622.100,00	22.188.772,00	1,67
Senjata Lain-Lain	23.570.800,00	23.570.800,00	-	0,00
Alat Keamanan	155.147.300,00	155.147.300,00	-	0,00
Non Senjata Api	49.280.000,00	49.280.000,00	-	0,00
Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	1.091.856.000,00	1.091.856.000,00	-	0,00
Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	1.850.000,00	-	1.850.000,00	100,00
Laser	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
Alat Dalmas/Alat Dakhura	11.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33
Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	3.831.472,00	-	3.831.472,00	100,00
Alsus Lantas	3.770.000,00	3.770.000,00	-	0,00
Alsus Fotografi Kepolisian	5.950.000,00	1.998.000,00	3.952.000,00	197,80
Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	4.555.300,00	-	4.555.300,00	100,00
Komputer	108.389.096.164,06	101.922.794.758,99	6.466.301.405,07	6,34
Komputer Jaringan	1.445.305.058,00	1.209.624.358,00	235.680.700,00	19,48
Personal Computer	85.198.629.934,64	80.506.883.881,55	4.691.746.053,09	5,83
Komputer Unit Lainnya	229.270.561,00	95.210.000,00	134.060.561,00	140,81
Peralatan Mainframe	1.044.769.820,11	1.022.217.345,11	22.552.475,00	2,21
Peralatan Mini Computer	1.252.775.588,00	1.008.523.098,00	244.252.490,00	24,22
Peralatan Personal Computer	10.647.322.801,96	10.098.149.394,97	549.173.406,99	5,44
Peralatan Jaringan	8.506.863.240,35	7.953.126.681,36	553.736.558,99	6,96
Peralatan Komputer Lainnya	64.159.160,00	29.060.000,00	35.099.160,00	120,78
Alat Pengeboran	29.000.000,00	29.000.000,00	-	0,00
Peralatan Bantu	29.000.000,00	29.000.000,00	-	0,00
Alat Keselamatan Kerja	779.754.838,00	537.254.000,00	242.500.838,00	45,14
Suara	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00
Baju Pengaman	30.700.000,00	2.100.000,00	28.600.000,00	1.361,90
Alat Pelindung Lainnya	59.940.000,00	-	59.940.000,00	100,00
Alat Penolong	3.642.500,00	3.642.500,00	-	0,00
Alat Pendukung Pencarian	252.519.845,00	209.496.000,00	43.023.845,00	20,54
Alat Kerja Bawah Air	53.200.213,00	48.295.500,00	4.904.713,00	10,16
Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	247.407.280,00	141.375.000,00	106.032.280,00	75,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Alat Ukur Peralatan Fasklektrik	130.945.000,00	130.945.000,00	-	0,00
Alat Peraga	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00
Alat Peraga Pelatihan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00
Peralatan Proses/Produksi	750.000,00	750.000,00	-	0,00
Solid Material Handling Equipment	750.000,00	750.000,00	-	0,00
Rambu-rambu	6.921.130.525,00	6.465.558.025,00	455.572.500,00	7,05
Rambu Bersuar	643.630.025,00	643.630.025,00	-	0,00
Rambu Tidak Bersuar	6.004.480.500,00	5.722.328.000,00	282.152.500,00	4,93
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	273.020.000,00	99.600.000,00	173.420.000,00	174,12
Peralatan Olahraga	6.792.551.328,42	6.736.179.310,67	56.372.017,75	0,84
Peralatan Olahraga Atletik	13.660.000,00	10.710.000,00	2.950.000,00	27,54
Peralatan Permainan	1.725.043.005,90	1.680.150.456,30	44.892.549,60	2,67
Peralatan Senam	1.555.490.038,00	1.463.305.910,00	92.184.128,00	6,30
Peralatan Olahraga Air	58.469.000,00	58.469.000,00	-	0,00
Peralatan Olahraga Lainnya	3.439.889.284,52	3.523.543.944,37	(83.654.659,85)	(2,37)
Jumlah	760.440.812.936,51	735.190.183.804,68	25.250.629.131,83	3,43

Tabel 5.126
Rincian Mutasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
Saldo 31 Desember 2024	735.190.183.804,68	
Penambahan	38.207.493.509,00	
Pengadaan APBD	36.383.268.312,00	
Hibah Masuk	1.299.530.667,00	
Hasil Inventarisasi	447.000.000,00	
Reklasifikasi	77.694.530,00	
Pengurangan		12.956.864.377,17
Reklasifikasi (Rusak Berat)		2.065.334.897,29
Ekstrakom		10.795.517.345,52
Koreksi temuan Kurvol BPK TA 2025		32.012.134,36
Reklasifikasi (Persediaan)		64.000.000,00
Jumlah Mutasi		
Saldo 31 Desember 2025		760.440.812.936,51

Berdasarkan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp760.440.812.936,51 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp38.207.493.509,00 disebabkan oleh:**
 - a. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp36.383.268.312,00 diperoleh dari rekening Belanja Modal pada 45 (empat puluh lima) perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 5.127
Rincian Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Sekretariat DPRD	1.052.560.830,00
Sekretariat Daerah	2.727.454.200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.980.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.424.000,00
Kecamatan Ambalawi	13.300.000,00
Kecamatan Donggo	9.956.700,00
Kecamatan Lambu	14.818.500,00
Kecamatan Langgudu	10.000.000,00
Kecamatan Madapangga	18.000.000,00
Kecamatan Monta	19.400.000,00
Kecamatan Palibelo	13.741.250,00
Kecamatan Parado	10.000.000,00
Kecamatan Sape	8.848.250,00
Kecamatan Tambora	19.900.000,00
Kecamatan Wawo	11.850.000,00
Kecamatan Wera	30.000.000,00
Kecamatan Woha	12.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.252.247.314,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.330.000,00
Dinas Perhubungan	203.890.000,00
Dinas Kesehatan	6.114.271.775,00
Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	1.227.190.942,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	468.068.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	9.760.462.287,00
Dinas Sosial	10.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	295.456.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	221.448.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	476.894.449,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	42.429.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	159.456.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	149.200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	191.036.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	86.980.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	539.428.700,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.424.000,00
Inspektorat	747.212.040,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	169.735.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Dinas Lingkungan Hidup	1.279.192.491,00
Dinas Pariwisata	238.419.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	59.940.000,00
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	9.777.990,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	79.961.650,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000,00
RUMAH SAKIT UMUM SONDOSIA	1.492.593.444,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	40.690.000,00
Jumlah	36.383.268.312,00

- c. Hasil Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD dengan nilai total Rp447.000.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan atas 2 unit Mobil Kendaraan Dinas
- d. Penerimaan Hibah senilai Rp1.299.530.667,00 yang terdiri dari :
- ♦ Penerimaan hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp760.732.667,00 dari Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Alam sesuai Berita acara serah terima nomor BAST-268.BA/BN.09/SBG/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.128
Rincian Penambahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah
per 31 Desember 2025

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
CCTV - Camera Control Television System	1	37.274.688,00
Panel Pameran	1	18.442.650,00
LCD Projector/Infocus	10	382.950.000,00
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	10.350.750,00
Meja Resepsionis	1	13.163.490,00
Kursi Tamu	2	14.358.960,00
Kursi Putar	2	9.246.616,00
Meja Komputer	2	14.430.000,00
A.C. Sentral	5	86.020.914,00
Exhaust Fan	4	2.220.000,00
Treng Air/Tandon Air	1	1.110.000,00
Televisi	1	14.350.393,00
Sound System	1	25.274.700,00
Lampu	4	3.057.116,00
Tabung Apar Pemadam Kebakaran	5	6.382.390,00
P.C Unit	4	122.100.000,00
Jumlah		760.732.667,00

- ♦ Penerimaan hibah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan senilai Rp538.789.000,00 atas 2 unit Tractor sesuai Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian nomor 2934/KPTS/SR.430/B.2/PPK/09/2025 tanggal 16 September 2025
- c. Penambahan reklasifikasi (kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan Kodefikasi) senilai Rp77.694.530,00 pada Dinas Lingkungan Hidup yang dianggarkan tahun 2025 pada belanja modal Jalan, Jaringan dan irigasi atas pengadaan alat laboratorium senilai





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Rp9,990,000,00 dan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp2.692.000,00 atas Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran yang dianggarkan tahun 2025 pada belanja barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi serta senilai atas Rp65.012.530,00 atas 5 unit Laptop yang dibelanjakan pada belanja hibah tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp12.956.864.377,17 disebabkan oleh:

- Pengurangan karena reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain yang disebabkan karena barang dengan kondisi rusak berat atau tidak diketahui keberadaannya senilai Rp2.065.334.897,29 yang terdapat pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rincian Reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya
per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Kecamatan Monta	19.591.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.666.228.615,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	379.515.282,29
Jumlah	2.065.334.897,29

- Pengurangan reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp10.795.517.345,52 karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi pada 31 (tiga puluh satu) OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130
Rincian Reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang Jasa
per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Sekretariat DPRD	72.760.500,00
Sekretariat Daerah	273.148.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	675.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	13.553.433,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.320.930,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	10.091.015.475,52
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.800.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	20.479.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	318.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.415.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.660.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.995.000,00
Puskesmas Ambalawi	7.850.000,00
Puskesmas Belo	4.465.600,00
Puskesmas Bolo	9.840.000,00
Puskesmas Donggo	16.250.000,00
Puskesmas Lambu	1.770.100,00
Puskesmas Langgudu	12.630.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Puskesmas Madapangga	33.438.750,00
Puskesmas Monta	29.312.302,00
Puskesmas Ngali	7.351.000,00
Puskesmas Pai	2.035.000,00
Puskesmas Palibelo	120.000,00
Puskesmas Sape	56.431.236,00
Puskesmas Soromandi	2.300.000,00
Puskesmas Wawo	4.460.000,00
Puskesmas Wera	13.950.000,00
Puskesmas Woha	900.000,00
Puskesmas Langgudu Timur	1.937.195,00
Rumah Sakit Umum Sondosia	15.785.324,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.550.000,00
Jumlah	10.795.517.345,52

- c. Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp64.000.000,00 ke Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup atas pengadaan Pakaian Perlengkapan Dinas.
- d. Pengurangan temuan kekurangan volume senilai Rp32.012.134,36 pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp 26.515.569,36 dan pada Dinas Kesehatan

Pada tahun 2025 pemerintah menerima hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah namun belum dilakukan serah terima paket digitalisasi senilai Rp17.823.240.000,00 atas 536 unit smartboard dan 536 unit Laptop Merah Putih yang terdiri dari 16 TK Negeri senilai Rp531.840.000, 407 Sekolah Dasar senilai Rp13.535.280.000,00, 113 Sekolah Menengah Pertama senilai Rp3.756.120.000,00 sedangkan untuk dana Revitalisasi senilai Rp2.591.195.530,00 yang terdiri dari TK Negeri senilai Rp287.221.260,00, SDN senilai Rp848.595.000,00 dan SMPN senilai Rp1.455.379.270,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.676.434.067.802,69 mengalami peningkatan Rp73.065.804.870,00 atau 4,56% dibandingkan dengan nilai Gedung dan Bangunan tahun 2024.

Tabel 5.131
Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bangunan Gedung	1.621.501.822.662,69	1.559.392.428.655,69	62.109.394.007,00	3,98
Bangunan Gedung Kantor	280.795.745.628,90	274.828.057.810,90	5.967.687.818,00	2,17
Bangunan Gudang	6.304.141.660,00	6.308.751.660,00	(4.610.000,00)	(0,07)





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	5.057.128.679,00	5.063.048.679,00	(5.920.000,00)	(0,12)
Bangunan Gedung Instalasi	9.285.989.500,00	9.086.589.500,00	199.400.000,00	2,19
Bangunan Gedung Laboratorium	36.980.377.820,00	36.984.987.820,00	(4.610.000,00)	(0,01)
Bangunan Kesehatan	355.719.075.044,88	343.362.783.963,88	12.356.291.081,00	3,60
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	86.859.973.942,00	86.710.173.942,00	149.800.000,00	0,17
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.084.979.693,59	17.003.141.693,59	81.838.000,00	0,48
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	585.074.809.640,42	569.730.930.265,42	15.343.879.375,00	2,69
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	25.601.421.350,00	24.110.357.950,00	1.491.063.400,00	6,18
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	8.200.761.693,00	5.169.068.093,00	3.031.693.600,00	58,65
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	5.458.723.150,00	5.418.956.150,00	39.767.000,00	0,73
Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.211.002.878,00	2.213.902.778,00	(2.899.900,00)	(0,13)
Bangunan Gedung Pemotong Hewan	2.041.920.110,00	2.041.920.110,00	-	0,00
Bangunan Gedung Perpustakaan	38.798.732.288,90	35.235.493.255,90	3.563.239.033,00	10,11
Bangunan Gedung Museum	3.168.417.000,00	3.168.417.000,00	-	0,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	10.722.747.268,00	10.672.870.268,00	49.877.000,00	0,47
Bangunan Pengujian Kelaikan	1.495.000.101,00	1.495.000.101,00	-	0,00
Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	31.181.921,00	31.181.921,00	-	0,00
Bangunan Terbuka	1.816.739.800,00	1.647.109.800,00	169.630.000,00	10,30
Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	99.600.000,00	-	99.600.000,00	100,00
Bangunan Peternakan/Perikanan	967.067.240,00	852.160.240,00	114.907.000,00	13,48
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.151.777.918,00	20.778.625.318,00	19.373.152.600,00	93,24
Bangunan Fasilitas Umum	2.189.628.344,00	2.342.109.344,00	(152.481.000,00)	(6,51)
Bangunan Parkir	522.693.000,00	422.843.000,00	99.850.000,00	23,61
Bangunan Gedung Pabrik	8.335.468.000,00	8.335.468.000,00	-	0,00
Taman	20.475.860.725,70	20.480.860.725,70	(5.000.000,00)	(0,02)
Rumah Negara Golongan I	8.288.698.544,80	8.089.498.544,80	199.200.000,00	2,46
Rumah Negara Golongan Ii	1.146.874.000,00	1.150.961.000,00	(4.087.000,00)	(0,36)
Rumah Negara Golongan Iii	44.105.167.441,50	44.118.441.441,50	(13.274.000,00)	(0,03)
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.951.575.280,00	2.980.175.280,00	(28.600.000,00)	(0,96)
Asrama	798.957.000,00	798.957.000,00	-	0,00
Hotel	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Rumah Tidak Bersusun	743.206.000,00	743.206.000,00	-	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	16.380.000,00	16.380.000,00	-	0,00
Monumen	4.087.009.100,00	4.087.009.100,00	-	0,00
Tugu	1.311.300.000,00	1.311.300.000,00	-	0,00
Bangunan Peninggalan	2.508.964.600,00	2.508.964.600,00	-	0,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	266.744.500,00	266.744.500,00	-	0,00
Bangunan Menara	258.930.000,00	258.930.000,00	-	0,00
Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	59.930.000,00	59.930.000,00	-	0,00
Bangunan Menara Perambuan Lainnya	199.000.000,00	199.000.000,00	-	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.586.306.040,00	39.629.895.177,00	10.956.410.863,00	27,65
Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.218.442.000,00	1.233.192.000,00	(14.750.000,00)	(1,20)
Pagar	49.367.864.040,00	38.396.703.177,00	10.971.160.863,00	2.932,00
Jumlah	1.676.434.067.802,69	1.603.368.262.932,69	73.065.804.870,00	4,56

Tabel 5.132
Rincian Mutasi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
Saldo 31 Desember 2024	1.603.368.262.932,69	
Penambahan	86.592.771.912,00	
Pengadaan APBD	70.165.358.002,00	
Reklasifikasi	10.726.876.277,00	
Hibah	5.215.337.633,00	
Hutang Fisik	485.200.000,00	
Pengurangan		13.526.967.042,00
Pelunasan Hutang Fisik TA 2024		2.659.200.000,00
Reklasifikasi		9.224.458.818,00
Koreksi temuan Kekurangan Volume		607.457.000,00
Ekstrakom		1.035.851.224,00
Jumlah Mutasi		
Saldo 31 Desember 2025		1.676.434.067.802,69

Berdasarkan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.676.434.067.802,69 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mutasi bertambah atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp86.592.771.912,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp70.165.358.002,00 pada 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah yang penganggarnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

(APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 5.133
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai
Sekretariat Daerah	944.909.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.239.689.540,00
Dinas Perhubungan	181.592.000,00
Dinas Kesehatan	10.115.319.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	2.659.200.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.043.500.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	42.645.195.700,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	249.230.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	474.414.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	206.370.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	199.700.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	159.887.000,00
Puskesmas Wera	121.294.000,00
Rumah Sakit Umum Sondosia	8.825.057.762,00
Puskesmas Madapangga	25.000.000,00
Puskesmas Monta	25.000.000,00
Puskesmas Palibelo	50.000.000,00
Jumlah	70.165.358.002,00

2. Penambahan reklasifikasi kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi senilai Rp10.726.876.277,00 rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan senilai Rp1.536.535.017,00 yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp39.900.000,00 atas Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp1.496.635.017,00 atas Pekerjaan Rumah Perlindungan sementara;
 - b. Reklasifikasi dari belanja barang yang diserahkan kemasyarakat senilai Rp248.100.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp98.300.000,00 atas pekerjaan paving block SDN 1 Dena dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp149.800.000,00 atas Pekerjaan Pemeliharaan Masjid Agung Bima;
 - c. Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan senilai Rp8.942.241.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rincian Reklasifikasi Dari KDP Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai Persediaan	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.403.101.800,00	
Pembangunan Sarana Olahraga Jogging Track	1.338.082.600,00	Reklasifikasi Dari KDP
Pembangunan Gor Mini Kabupaten Bima	1.065.019.200,00	Reklasifikasi Dari KDP





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.539.139.460,00	
Pembangunan Kantor DPMPTSP	2.928.395.820,00	Reklasifikasi Dari KDP
Pembangunan Taman Masjid Agung	3.610.743.640,00	Reklasifikasi Dari KDP
Jumlah	8.942.241.260,00	

3. Hibah dari Pemerintahan Pusat Senilai Rp5.215.337.633,00 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan senilai Rp2.825.323.600 atas Hibah dari kementerian Perdagangan RI atas Bangunan Pasar Oi Maci Kecamatan Sape sesuai BAST nomor 09/M-DAG/BAST/01/2025 tanggal 21 Januari 2025; dan
 - b. Penambahan senilai Rp2.390.014.033,00 atas Hibah dari kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI atas Bangunan Geopark Tambora sesuai BAST nomor 268.BA/BN.09/SBG/2024 tanggal 8 Juli 2024.
4. Penambahan dengan mekanisme utang atas kondisi fisik pekerjaan sudah 100% namun realisasi keuangannya belum 100% senilai Rp485.200.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.135
Rincian Hutang Fisik Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	% Keu	LRA	% Fisik	Fisik	Nilai (Rp)
Rehab Berat Ruang Kelas Mts Ihy'ulumudin Ujung Kalate Nipa	148.900.000,00	0,00	0,00	100,00	148.900.000,00	148.900.000,00
Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Wawo	98.900.000,00	50,00	49.450.000,00	100,00	98.900.000,00	49.450.000,00
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SDN Karumbu	188.400.000,00	78,34	147.600.000,00	100,00	188.400.000,00	40.800.000,00
Pemagaran SDN Inpres Bala Desa Bala Kec Wera	196.850.000,00	50,00%	98.425.000,00	100,00	196.850.000,00	98.425.000,00
Penataan Halaman Sekolah SDN Runggu Kec Palibelo	196.850.000,00	50,00%	98.425.000,00	100,00	196.850.000,00	98.425.000,00
Paving SDN Monta Kec Monta	98.400.000,00	50,00%	49.200.000,00	100,00	98.400.000,00	49.200.000,00
Jumlah						485.200.000,00

b) Mutasi berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp13.526.967.042,00 yang terdiri dari :

1. Pelunasan Hutang Fisik Tahun 2024 Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp2.659.200.000,00 pada RSUD Bima atas Pembangunan Gedung NICU
2. Reklasifikasi kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi senilai Rp9.224.458.818,00 yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi ke asset tetap tanah senilai Rp1.482.150.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp49.180.000,00 atas Penimbunan Halaman Sekolah SDN Inpres Bugis Kec Sape dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.432.970.000,00 atas Pekerjaan Pematangan Lahan Rumah Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Reklasifikasi ke asset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp1.264.081.137,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pekerjaan Penataan Jalan Masjid Agung Kabupaten Bima; dan
 - c. Reklasifikasi ke asset tetap KDP senilai Rp6.083.314.681,00 atas pekerjaan fisik yang





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

belum selesai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136
Rincian Reklasifikasi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	371.325.000,00	
Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 2 Sape Sari	99.900.000,00	Reklasifikasi ke KDP
Lanjutan Pagar SMPN 2 Sanggar	49.175.000,00	Reklasifikasi ke KDP
Rehab SDN Inpres Sorobali Desa Karampi Kec Langgudu	73.825.000,00	Reklasifikasi ke KDP
Paving Blok SDN 02 Ntonggu Kec Palibelo	148.425.000,00	Reklasifikasi ke KDP
Rumah Sakit Umum Sondosia	5.711.989.681,00	
Pembangunan NICU/PICU	5.711.989.681,00	Reklasifikasi Ke KDP
Jumlah	6.083.314.681,00	

- d. Reklasifikasi ke asset lain - lain senilai Rp394.913.000,00 pada RSUD Sondosia sesuai surat usulan penghapusan nomor 445/800/013/RSUDS/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
3. Pengurangan koreksi Temuan Kekurangan Volume pekerjaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp607.457.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Koreksi temuan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 senilai Rp309.976.000,00 atas pekerjaan yang masih KDP sehingga belum dilakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137
Rincian Temuan Kekurangan Volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Pekerjaan	Nilai Kurvol	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	288.660.000,00	
Pembangunan Kantor DPMPSTP	96.024.000,00	KDP Tahun 2024
Pembangunan Taman Masjid Agung	192.636.000,00	KDP Tahun 2024
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	21.316.000,00	
Pembangunan Sarana Olahraga Jogging Track	13.471.000,00	KDP Tahun 2024
Pembangunan Gor Mini Kabupaten Bima	7.845.000,00	KDP Tahun 2024
Jumlah	309.976.000,00	

- b. Koreksi temuan kekurangan volume pekerjaan tahun 2025 senilai Rp297.481.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138
Rincian Temuan Kekurangan Volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Pekerjaan	Nilai Kurvol	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	167.651.000,00	
Pekerjaan Paving SMP Negeri 1 Belo Ngali	28.807.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Belo	3.345.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Paving Blok SDN Inpres Kambilo	3.142.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehab Perpustakaan SDN Inpres Kambilo	625.000,00	Temuan Tahun 2025





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pekerjaan	Nilai Kurvol	Keterangan
Pekerjaan Rehap Atap dan pemasangan plafon SDN Inpres Kambilo	2.129.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas - SMPN 2 Lambu	4.615.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Paving SMPN 2 Lambu	3.092.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Penataan Lapangan Volly SMP 2 Lambu	1.605.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pembangunan Pagar SDIT Al Farih	30.565.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDIT Al Farih	15.243.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Padolo	3.608.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pembangunan Toilet SD Inpres Padolo	2.427.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pagar SDN Padolo	2.207.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehab Perpustakaan dan Pembangunan Toilet SMPN 6 Donggo	19.072.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 6 Donggo	6.228.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Paving Blok SDN 1 Karumbu Kec Langgudu	14.419.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN Karumbu - Langgudu	20.085.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pagar SDN Sambori	5.785.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pagar SDN Inpres Sambori	652.000,00	Temuan Tahun 2025
Dinas Kesehatan	93.409.000,00	
Pekerjaan Pembangunan Baru Pustu Samili	19.094.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Ngali	39.434.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pembangunan Baru Pustu Dore	17.354.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pembangunan Baru Pustu Maria Utara	4.039.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Pembangunan Baru Pustu Padolo	13.488.000,00	Temuan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.421.000,00	
Pekerjaan Pemasangan Paving Blok dan Penataan Taman Kantor UPT DP3AP2KB	2.148.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kec. Sape	4.945.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kec. Donggo	7.175.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kec. Langgudu	3.008.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kec. Lambitu	4.242.000,00	Temuan Tahun 2025
Pekerjaan Renovasi Rumah Perlindungan Sementara (RPS)	14.903.000,00	Temuan Tahun 2025
Jumlah	297.481.000,00	

3. Pengurangan reklasifikasi nilai Aset Tetap gedung dan bangunan senilai Rp1.035.851.224,00 karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi pada 15 (lima belas) OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139
Rincian Temuan Kekurangan Volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Jumlah	Nilai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	5.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	15.942.000,00
Dinas Pariwisata	60	450.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1	5.000.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Junlah	Nilai
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2	10.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	4	38.185.540,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	34.398.059,00
Puskesmas Sanggar	1	5.000.000,00
Kecamatan Belo	1	5.760.000,00
Kecamatan Donggo	1	2.240.000,00
Kecamatan Langgudu	1	5.120.000,00
Kecamatan Palibelo	1	6.240.000,00
Kecamatan Wera	1	5.120.000,00
Sekretariat Daerah	8	47.388.500,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	49	399.957.125,00
Jumlah	140	1.035.851.224,00

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bima Mendapat bantuan revitalisasi bangunan sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah namun belum dilakukan serah terima yang terdiri dari 50 Sekolah Dasar Negeri senilai Rp42.309.105.326,00; 20 Sekolah Menengah Pertama Rp20.932.601.640,00; dan 6 Taman Kanak-kanak Negeri senilai Rp2.926.338.428.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 senilai Rp1.774.592.097.457,14 mengalami peningkatan Rp65.356.836.219,40 atau 3,82% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024.

Tabel 5.140
Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Jalan dan Jembatan	1.046.763.410.642,98	1.009.056.649.022,98	37.706.761.620,00	3,74
Jalan Kabupaten	778.884.574.812,32	759.091.164.812,32	19.793.410.000,00	2,61
Jalan Desa	27.890.916.087,00	27.550.676.087,00	340.240.000,00	1,23
Jalan Khusus	76.012.727.027,00	75.075.695.144,00	937.031.883,00	1,25
Jalan Lainnya	3.159.681.137,00	1.895.600.000,00	1.264.081.137,00	66,69
Jembatan Pada Jalan Nasional	-	5.939.400,00	(5.939.400,00)	(100,00)
Jembatan Pada Jalan Kabupaten	139.176.128.960,66	133.421.119.960,66	5.755.009.000,00	4,31
Jembatan Pada Jalan Desa	17.789.170.750,00	8.405.691.750,00	9.383.479.000,00	111,63
Jembatan Pada Jalan Khusus	678.479.000,00	439.029.000,00	239.450.000,00	54,54
Jembatan Penyeberangan	2.971.875.869,00	2.971.875.869,00	-	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	199.857.000,00	199.857.000,00	-	0,00
Bangunan Air	514.484.584.100,74	506.470.726.811,54	8.013.857.289,20	1,58
Bangunan Waduk Irigasi	11.821.504.328,00	11.821.504.328,00	-	0,00
Bangunan Pengambilan Irigasi	50.321.966.375,00	47.511.128.395,00	2.810.837.980,00	5,92
Bangunan Pembawa Irigasi	253.255.291.151,34	250.009.916.542,14	3.245.374.609,20	1,30
Bangunan Pembuang Irigasi	427.400.000,00	406.879.000,00	20.521.000,00	5,04
Bangunan Pengaman Irigasi	10.454.697.000,00	10.248.697.000,00	206.000.000,00	2,01
Bangunan Pelengkap Irigasi	16.185.975.940,00	15.986.075.940,00	199.900.000,00	1,25
Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.419.400.000,00	2.189.400.000,00	230.000.000,00	10,51
Bangunan Pembawa Pasang Surut	5.860.346.213,00	5.860.346.213,00	-	0,00
Bangunan Pengaman Pasang Surut	1.257.796.000,00	1.257.796.000,00	-	0,00
Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	788.638.603,00	788.638.603,00	-	0,00
Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	1.662.490.000,00	1.662.490.000,00	-	0,00
Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	2.305.312.000,00	2.305.312.000,00	-	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	718.757.953,00	718.757.953,00	-	0,00
Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	828.618.700,00	-	828.618.700,00	(100,00)
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	17.545.009.250,00	17.545.009.250,00	-	0,00
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	64.829.626.215,00	64.629.726.215,00	199.900.000,00	0,31
Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	3.007.180.116,00	2.718.080.116,00	289.100.000,00	10,64
Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	409.302.000,00	409.302.000,00	-	0,00
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	578.000.000,00	578.000.000,00	-	0,00
Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	626.350.000,40	626.350.000,40	-	0,00
Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00
Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	945.771.000,00	945.771.000,00	-	0,00
Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	278.100.000,00	278.100.000,00	-	0,00
Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.125.615.000,00	2.137.110.000,00	11.495.000,00	(0,54)
Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	39.915.799.302,00	39.915.799.302,00	-	0,00
Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	750.000.000,00	750.000.000,00	-	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	16.421.794.875,00	16.426.694.875,00	4.900.000,00	(0,03)
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.011.937.829,00	6.011.937.829,00	-	0,00
Bangunan Pembawa Air Kotor	1.375.431.250,00	1.375.431.250,00	-	0,00
Bangunan Pembuang Air Kotor	1.025.148.000,00	1.025.148.000,00	-	0,00
Bangunan Pengaman Air Kotor	311.325.000,00	311.325.000,00	-	0,00
Instalasi	110.109.425.608,00	103.152.146.732,80	6.957.278.875,20	6,74
Instalasi Air Permukaan	10.961.290.624,00	10.961.290.624,00	-	0,00
Instalasi Air Sumber/Mata Air	4.368.472.000,00	4.371.472.000,00	3.000.000,00	(0,07)
Instalasi Air Tanah Dalam	1.303.132.000,00	1.304.132.000,00	1.000.000,00	(0,08)
Instalasi Air Tanah Dangkal	1.827.385.578,00	1.860.395.878,00	33.010.300,00	(1,77)
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	46.577.318.345,00	45.027.205.345,00	1.550.113.000,00	3,44
Instalasi Air Kotor Lainnya	217.852.449,00	217.852.449,00	-	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah Organik	1.284.793.000,00	1.114.793.000,00	170.000.000,00	15,25
Bangunan Penampung Sampah	964.372.200,00	964.372.200,00	-	0,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta)	34.715.000,00	38.215.000,00	3.500.000,00	(9,16)
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd)	309.547.791,00	317.047.791,00	7.500.000,00	(2,37)
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm)	5.684.496.000,00	5.689.496.000,00	5.000.000,00	(0,09)
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	25.657.934.746,00	25.657.934.746,00	-	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb)	83.000.000,00	83.000.000,00	-	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	895.575.000,00	897.030.000,00	1.455.000,00	(0,16)
Instalasi Gardu Listrik Induk	-	3.000.000,00	3.000.000,00	(100,00)
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	3.725.840.900,00	3.734.520.700,00	8.679.800,00	(0,23)
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	321.000.000,00	365.788.999,80	44.788.999,80	(12,24)
Instalasi Jaringan Pipa Gas	514.600.000,00	514.600.000,00	-	0,00
Instalasi Lain	5.348.099.975,00	-	5.348.099.975,00	100,00
Jaringan	103.234.677.105,42	90.555.738.670,42	12.678.938.435,00	14,00
Jaringan Pembawa	76.593.031.848,00	63.800.139.373,00	12.792.892.475,00	20,05
Jaringan Induk Distribusi	4.592.495.963,00	4.592.495.963,00	-	0,00
Jaringan Cabang Distribusi	2.571.125.000,00	2.571.125.000,00	-	0,00
Jaringan Sambungan Ke Rumah	303.700.000,00	303.700.000,00	-	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Jaringan Air Minum Lainnya	684.000.000,00	691.824.000,00	- 7.824.000,00	(1,13)
Jaringan Transmisi	3.002.902.500,00	3.032.727.500,00	- 29.825.000,00	(0,98)
Jaringan Distribusi	10.567.191.522,15	10.818.464.682,15	- 251.273.160,00	(2,32)
Jaringan Listrik Lainnya	2.715.065.000,00	2.515.460.000,00	199.605.000,00	7,94
Jaringan Telepon di atas Tanah	-	20.390.000,00	- 20.390.000,00	(100,00)
Jaringan Telepon Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00
Jaringan Pipa Gas Transmisi	199.000.000,00	199.000.000,00	-	0,00
Jaringan Pipa Distribusi	956.980.000,00	956.980.000,00	-	0,00
Jaringan Pipa Dinas	899.185.272,27	903.432.152,27	- 4.246.880,00	(0,47)
Jumlah	1.774.592.097.457,14	1.709.235.261.237,74	65.356.836.219,40	3,82

Tabel 5.141
Rincian Mutasi atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
Saldo 31 Desember 2024	1.709.235.261.237,74	
Penambahan	75.841.819.620,00	
Pengadaan APBD	48.711.569.675,00	
Hibah	12.678.802.475,00	
Reklasifikasi dari KDP	14.149.032.470	
Hutang Fisik	302.415.000,00	
Pengurangan		10.484.983.400,60
Reklasifikasi		9.465.828.750,00
Koreksi temuan BPK TA 2024 atas Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		321.949.000,00
Ekstrakom		697.205.650,60
Jumlah Mutasi		
Saldo 31 Desember 2025		1.774.592.097.457,14

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 senilai Rp1.774.592.097.457,14 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp75.841.819.620,00 disebabkan oleh:

1. Penambahan nilai neraca Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp48.711.569.675,00 berasal dari Belanja Modal yaitu Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun pada 7 (tujuh) perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142
**Rincian Penambahan Nilai Neraca Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
per 31 Desember 2025**





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.252.349.700,00
Dinas Perhubungan	5.547.704.975,00
Dinas Kesehatan	1.203.240.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	148.185.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	375.100.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	179.990.000,00
Puskesmas Lenggudu Timur	5.000.000,00
Jumlah	48.711.569.675,00

2. Penerimaan Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai BAST Nomor 437.3/BA/DC/2020 tanggal 8 September 2020 senilai Rp12.678.802.475,00 dengan rincian sebagai berikut:





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 5.143
Rincian Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
per 31 Desember 2025

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
IKK Sanggar Kabupaten Bima	3.608.021.343,00
IKK Desa Keli Kec. Woha Kabupaten Bima	2.533.552.705,00
IKK Maria Kabupaten Bima	6.537.228.427,00
Jumlah	12.678.802.475,00

3. Penambahan akibat Reklasifikasi kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi senilai Rp14.149.032.470,00 yang terdiri dari:
- Reklasifikasi dari belanja barang yang diserahkan kemasyarakat senilai Rp1.209.144.883,00 yang terpadat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:
 - ♦ Pekerjaan Penataan akses jalan penghubung Kantor dan Masjid Agung senilai Rp239.450.000,00; dan
 - ♦ Pekerjaan Peningkatan Jalan Kompleks Kantor Bupati (Jalan Depan Kantor DPMPTSP) senilai Rp969.694.883,00.
 - Reklasifikasi dari Aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp1.264.081.137,00 yang terpadat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pekerjaan Penataan Jalan Masjid Agung Kabupaten Bima.
 - Reklasifikasi dari Belanja tidak Terduga senilai Rp1.672.050.000,00 yang terpadat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.144
Rincian Mutasi Reklasifikasi Dari Belanja Tidak Terduga
per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
Perbaikan Jalan Desa Wora	50.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Perbaikan Ruas Jalan Mawu Luar Mawu Dalam	80.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Perbaikan Jembatan Sapui Desa Nisa	100.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Perbaikan Jembatan Ujung Kalate	150.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Rekonstruksi Oprit Jembatan Talapiti dan Pembersihan Badan Jalan Desa Talapiti	190.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Pembuatan dan Pembongkaran Jembatan Jalan Desa Nggembe	300.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Perbaikan Tanggul Sungai Desa Nisa	115.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Perbaikan Bendung Sumi Desa Hidirasa	30.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Rehab D.I Ndolu Desa Rite	50.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Normalisasi Sungai Desa Mandala	40.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Normalisasi Sungai Desa Bajo dan Lewi Ndana	40.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Normalisasi Sungai Desa Kore, Boro dan Taloko	50.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Normalisasi Saluran Pembuangan Desa Maria dan Maria Utara	30.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Normalisasi Sungai Sumi Rato dan Saluran Pembuangan Diwu Moro Desa Sumi	100.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Perbaikan Gorong2 Jalan Kalampa Risa	60.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Penanganan Darurat Gorong2 Desa Teta	50.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Perbaikan Gorong2 Pucuke Keli	50.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
Normalisasi dan Perbaikan Tanggul Sungai Desa Belo	112.050.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Perbaikan Tebing Sungai Desa Nangawera	75.000.000,00	Reklasifikasi dari BTT
Jumlah	1.672.050.000,00	

- d. Reklasifikasi dari Aset tetap KDP senilai Rp10.003.756.450,00 yang terpadat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.145
Rincian Mutasi Reklasifikasi Dari KDP
per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
Pemeliharaan Berkala Jalan SP.JP - Lamere	398.400.000,00	Reklasifikasi dari KDP
Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Sp.Jp. Sondo - Pantai Rontu	6.377.734.100,00	Reklasifikasi dari KDP
Peningkatan Jalan Dea - Sumi	1.325.737.350,00	Reklasifikasi dari KDP
Keg.Peningkatan DI Ompu Sao (DAK) Kec.Langgudu	1.888.541.920,00	Reklasifikasi dari KDP
Keg.Peningkatan DI Ompu Sao (DAK) Kec.Langgudu	13.343.080,00	Kelebihan Realisasi Keuangan Tahun 2024
Jumlah	10.003.756.450,00	

- e. Penambahan senilai Rp13.343.080,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan DI Ompu Sao (DAK) Kecamatan Langgudu dari kelebihan realisasi keuangan dari pada fisik tahun 2024;
2. Penambahan Hutang Fisik atas Rekonstruksi Jembatan Leu Kecamatan Bolo pada Dinas PUPR Kabupaten Bima bersumber dari dan Hibah RR tahun 2024, yang dilaksanakan pada tahun 2025. Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat utang belanja modal sebesar Rp302.415.000 dengan realisasi fisik 100%.
2. **Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp10.484.983.400,60 disebabkan oleh:**
1. Pengurangan reklasifikasi ke KDP senilai Rp9.465.828.750,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.146
Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke KDP
per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
Nata - Cenggu (Hotmix)	5.028.048.205,72	Reklasifikasi Ke KDP
Sarita - SP.Oo (Hotmix)	597.489.799,92	Reklasifikasi Ke KDP
SP.JP Kore - TPI (Hotmix)	313.546.027,19	Reklasifikasi Ke KDP
Jalan Sarita - Wadukopa (Hotmix)	998.140.013,42	Reklasifikasi Ke KDP
Rasabou - Kananga (Hotmix)	598.085.186,00	Reklasifikasi Ke KDP
Tente - Godo (Jl. Jenderal Sudirman) (Hotmix)	1.609.699.517,75	Reklasifikasi Ke KDP
Pembangunan DI Embung Parangina	320.820.000,00	Reklasifikasi Ke KDP
Jumlah	9.465.828.750,00	





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

2. Pengurangan koreksi temuan BPK atas Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp321.949.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koreksi temuan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 senilai Rp124.252.000,00 atas pekerjaan yang masih KDP sehingga belum dilakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.147

Rincian Kekurangan Volume pekerjaan TA 2024 Aset Tetap Jalan, Jaringan per 31 Desember 2025

Pekerjaan	Nilai Kurvol
Peningkatan Jalan Dea – Sumi	40.533.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan SP.JP – Lamere	60.310.000,00
Keg.Peningkatan DI Ompu Sao (DAK) Kec.Langgudu	23.409.000,00
Jumlah	124.252.000,00

- b. Koreksi temuan kekurangan volume pekerjaan tahun 2025 senilai Rp197.697.000,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.148

Rincian Kekurangan Volume pekerjaan Aset Tetap Jalan, Jaringan TA 2025 per 31 Desember 2025

Nama Pekerjaan	Nilai
Paket I Rekonstruksi Ruas jalan : Nata - Cenggu (Hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan : Sarita - SP Oo (Hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan : SP JP Kore -TPI (Hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan : Sarita - Wadukopa (Hotmix), Rekonstruksi ruas Jalan: Rasabou - Kananga (Hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan : Tente - Godo (Jl. J. Sudirman) (Hotmix)	25.818.000,00
Paket II Rekonstruksi Ruas Jalan Sape - Riamau (Rai oi - Parangina) (hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan : Roka - Kuta Kec. Lambitu) (Hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan Dumu - Kangga Kec. Langgudu) (Hotmix)	95.081.000,00
Rekonstruksi Jembatan Leu Kec. Bolo	41.156.000,00
Rekonstruksi Jembatan Rade Kec. Madapangga	14.394.000,00
Rehabilitasi Bendung Dan Saluran Irigasi Sekunder Di Mpungga Tambe Desa Tambe Kec Bolo	585.000,00
Peningkatan Jalan Kompleks Kantor Bupati (Jalan Depan Kantor DPMPSTP)	20.663.000,00
Jumlah	197.697.000,00

3. Pengurangan reklasifikasi nilai Aset Tetap jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp697.205.650,60 karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi pada 21 (dua puluh satu) OPD dengan rincian sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.149
Rincian Ekstrakom Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Jumlah	Nilai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	6.000.000,00
Dinas Perhubungan	7	41.925.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	13.349.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	4	17.690.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2	4.500.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	27.072.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	22.640.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1	8.000.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2	12.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	11	52.268.800,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	21	111.720.299,60
RSUD Bima	1	4.246.880,00
Dinas Kesehatan	2	14.479.000,00
Kecamatan Belo	1	60.000,00
Kecamatan Tambora	1	3.500.000,00
Kecamatan Wera	2	3.000.000,00
Kecamatan Woha	1	3.500.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	7.824.000,00
Sekretariat Daerah	63	238.323.160,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27	104.837.111,00
Kecamatan Parado	1	270.000,00
Jumlah	169	697.205.650,60

Sesuai Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/833/069 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten tanggal 20 September 2024 jumlah Jalan kabupaten sebanyak 205 ruas, dari 205 ruas jalan yang sudah tercatat di Daftar Barang sejumlah 175 ruas senilai Rp680.356.652.966,35, sebanyak 30 ruas jalan yang belum tercatat dengan panjang ruas 90,455 km dan sebanyak 26 ruas jalan dengan nilai Rp64.015.917.595,97 turun status dari jalan kabupaten ke jalan desa.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Lainnya.

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp84.527.852.591,33 mengalami peningkatan senilai Rp7.672.986.061,09 atau 9,98% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 5.150
Perbandingan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bahan Perpustakaan	79.936.871.433,62	72.724.040.212,52	7.212.831.221,10	9,92%
Buku Umum	56.771.432.368,99	49.678.134.607,89	7.093.297.761,10	14,28%
Buku Filsafat	31.566.540,00	31.566.540,00	0,00	0,00%
Buku Agama	2.878.345.776,39	2.878.345.776,39	0,00	0,00%
Buku Ilmu Sosial	1.879.968.372,36	1.879.968.372,36	0,00	0,00%
Buku Ilmu Bahasa	2.642.729.134,31	2.642.729.134,31	0,00	0,00%
Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	5.102.797.475,48	5.102.797.475,48	0,00	0,00%
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.431.188.167,56	1.431.188.167,56	0,00	0,00%
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	2.517.274.719,83	2.517.274.719,83	0,00	0,00%
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	4.926.133.174,31	4.926.133.174,31	0,00	0,00%
Serial	37.265.578,00	37.265.578,00	0,00	0,00%
Buku Laporan	408.491.731,15	408.491.731,15	0,00	0,00%
Audio Visual	491.342.032,03	371.808.572,03	119.533.460,00	32,15%
Bahan Kartografi	133.249.492,20	133.249.492,20	0,00	0,00%
Karya Musik	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00%
Karya Grafika (Graphic Material)	44.957.112,54	44.957.112,54	0,00	0,00%
Three Dimensional Artifacts and Realita	516.834.758,47	516.834.758,47	0,00	0,00%
Tarscalt	106.595.000,00	106.595.000,00	0,00	0,00%
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.257.843.184,12	3.257.843.184,12	0	0,00%
Alat Musik	2.856.801.133,12	2.856.801.133,12	0,00	0,00%
Lukisan	71.650.000,00	71.650.000,00	0,00	0,00%
Alat Peraga Kesenian	94.145.500,00	94.145.500,00	0,00	0,00%
Barang Bercorak Kesenian Lainnya	49.115.000,00	49.115.000,00	0,00	0,00%
Pahatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00%
Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	89.126.128,00	89.126.128,00	0,00	0,00%
Barang Kerajinan	73.885.423,00	73.885.423,00	0,00	0,00%
Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00%
Hewan	101.500.000,00	101.500.000,00	0	0,00%
Hewan Pengaman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Ternak Potong	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	0,00%
Biota Perairan	13.800.000,00	13.800.000,00	0	0,00%
Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00%
Tanaman	423.095.000,00	423.095.000,00	0	0,00%
Tanaman	423.095.000,00	423.095.000,00	0,00	0,00%





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Barang Koleksi Non Budaya	189.586.840,00	177.550.000,00	12.036.840,00	6,78%
Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	189.586.840,00	177.550.000,00	12.036.840,00	6,78%
Aset Tetap Dalam Renovasi	605.156.133,59	157.038.133,60	448.117.999,99	285,36%
Aset Tetap Dalam Renovasi	605.156.133,59	157.038.133,60	448.117.999,99	285,36%
Jumlah	84.527.852.591,33	76.854.866.530,24	7.672.986.061,09	9,98%

Tabel 5.151
Rincian Mutasi atas Aset Tetap Lainnya

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
Saldo 31 Desember 2024	76.854.866.530,24	
Penambahan	7.724.347.041,00	
Pengadaan APBD	1.099.719.346,00	
Hibah	131.570.300,00	
Perolehan Dana BOS	6.493.057.395,00	
Pengurangan		51.360.979,91
Koreksi Temuan Kurvol		51.360.979,91
Jumlah Mutasi		
Saldo 31 Desember 2025		84.527.852.591,33

Berdasarkan tabel diatas saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp84.080.563.571,24 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp7.724.347.041,00 diperoleh dari:
 - a. Belanja modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.099.719.346,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.152
Rincian Belanja Modal TA 2025
per 31 Desember 2025

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Sekretariat Daerah	498.650.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	591.269.346,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.800.000,00
Jumlah	1.099.719.346,00

- b. Sekretariat Daerah pekerjaan timbunan tanah senilai Rp79.610.000,00, pekerjaan pembuatan garasi senilai Rp169.830.000,00 dan pembangunan pagar senilai Rp249.210.000,00 yang dibangun tanah yang bukan milik pemerintah Kabupaten Bima (Rumah Pribadi Bupati Bima) dan diakui sebagai aset tetap dalam renovasi. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan buku koleksi perpustakaan.
 - c. Penambahan nilai neraca Aset Tetap lainnya senilai Rp6.493.057.395,00 berasal dari Perolehan Dana BOS pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa Alat Musik Lain-lain senilai Rp249.752.000,00, alat musik tradisional/daerah senilai Rp5.185.000,00 dan buku senilai Rp6.238.120.395,00 ;





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- d. Penambahan Hibah senilai Rp131.570.300,00 dari Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Alam sesuai Berita acara serah terima nomor BAST-268.BA/BN.09/SBG/2024 tanggal 8 Juli 2024.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp51.360.979,91 disebabkan kekurangan volume pekerjaan pada Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153
Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

Nama Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
Sekretariat Daerah		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pagar dan Taman	28.281.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pembangunan Garasi	11.876.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengurugan Halaman	10.375.000,00	
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga		
Pengadaan BOS Buku	828.979,91	
Jumlah	51.360.979,91	

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 07 Tahun 2010 mengenai Aset Tetap. Pada SAP Nomor 07 Tahun 2010, dinyatakan bahwa pemerintah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di dalam neraca. Namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan). Beberapa aset bersejarah yang berupa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Aset bersejarah ini dapat diperoleh dengan cara yang beragam. Termasuk diantaranya adalah melalui pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan, jumlah aset bersejarah yang terdapat pada Museum ASI Mbojo sebanyak 399 unit yang merupakan barang peninggalan kerajaan Kesultanan Bima.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 senilai Rp20.228.678.461,00 mengalami penurunan senilai Rp3.888.094.027,00 atau 16,12% dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2024.

Tabel 5.154
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.295.197.062,81	9.141.347.620,00	(2.846.150.557,19)	(31,13)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	617.340.381,81	2.928.395.820,00	(2.846.150.557,19)	100,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	5.677.856.681,00	0	5.677.856.681,00	(100,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	1.065.019.200,00	(1.065.019.200,00)	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	1.338.082.600,00	(1.338.082.600,00)	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	3.809.850.000,00	(3.809.850.000,00)	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Jaringan dan Irigasi	13.933.481.398,19	14.975.424.868,00	(1.041.943.469,81)	(6,96)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	9.626.325.850,19	9.100.547.400,00	525.778.450,19	5,78
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	4.307.155.548,00	5.874.877.468,00	(1.567.721.920,00)	(26,69)
Jumlah	20.228.678.461,00	24.116.772.488,00	(3.888.094.027,00)	(16,12)

Tabel 5.155
Rincian Mutasi Atas Aset Tetap KDP

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
Saldo 31 Desember 2024	24.116.772.488,00	
Penambahan	16.276.475.913,00	
Reklasifikasi	15.549.143.431,00	
Hutang Fisik	727.332.482,00	
Pengurangan		20.164.569.940,00
Reklasifikasi		20.130.436.940,00
Koreksi Temuan Kurvol		34.133.000,00
Saldo 31 Desember 2025		20.228.678.461,00

Berdasarkan tabel diatas saldo KDP per 31 Desember 2025 senilai Rp20.228.678.461,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan KDP senilai Rp16.276.475.913,00 disebabkan oleh:

- Penambahan senilai Rp 15.549.143.431,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan RSUD Sondosia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.156
Rincian KDP Gedung dan Bangunan

Perangkat Daerah	Nilai Kontrak	Keuangan	Nilai (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			9.465.828.750,00
Nata - Cenggu (Hotmix)	5.985.771.590,38	84,00%	5.028.048.205,72
Sarita - SP.Oo (Hotmix)	597.489.799,92	100,00%	597.489.799,92





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Nilai Kontrak	Keuangan	Nilai (Rp)
SP.JP Kore - TPI (Hotmix)	1.493.076.319,94	21,00%	313.546.027,19
Jalan Sarita - Wadukopa (Hotmix)	998.140.013,43	100,00%	998.140.013,43
Rasabou - Kananga (Hotmix)	598.085.186,00	100,00%	598.085.186,00
Tente - Godo (Jl. Jenderal Sudirman) (Hotmix)	2.338.437.090,33	68,80%	1.609.699.517,74
Pembangunan DI Embung Parangina	641.640.000,00	50,00%	320.820.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas			371.325.000,00
REHAB RUANG KELAS SMP NEGERI 2 SAPE SARI	199.800.000,00	50,00%	99.900.000,00
Lanjutan Pagar SMPN 2 Sanggar	98.350.000,00	50,00%	49.175.000,00
Rehab SDN Inpres Sorobali Desa Karampi Kec Langgudu	147.650.000,00	50,00%	73.825.000,00
Paving Blok SDN 02 Ntonggu Kec Palibelo	296.850.000,00	50,00%	148.425.000,00
RSUD Sondosia			5.711.989.681,00
Pembangunan NICU/PICU	9.519.982.804,00	60,00%	5.711.989.681,00
Jumlah			15.549.143.431,00

- b. Penambahan KDP senilai Rp727.332.482,00 pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas kelebihan realisasi fisik pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157
Rincian KDP Jalan Jaringan dan Irigasi

Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	% Keu	LRA	% Fisik	Fisik	Nilai (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						481.317.237,00
Nata - Cenggu (Hotmix)	5.985.771.590,38	84,00%	5.028.048.205,72	88,69%	5.309.013.391,72	280.965.186,01
Sarita - SP.Oo (Hotmix)	597.489.799,92	100,00%	597.489.799,92	100,00%	597.489.799,92	0,00
SP.JP Kore - TPI (Hotmix)	1.493.076.319,94	21,00%	313.546.027,19	23,31%	348.038.127,45	34.492.100,26
Jalan Sarita - Wadukopa (Hotmix)	998.140.013,43	100,00%	998.140.013,43	100,00%	998.140.013,43	0,00
Rasabou - Kananga (Hotmix)	598.085.186,00	100,00%	598.085.186,00	100,00%	598.085.186,00	0,00
Tente - Godo (Jl. Jenderal Sudirman) (Hotmix)	2.338.437.090,33	68,84%	1.609.699.517,75	75,93%	1.775.559.331,67	165.859.950,73
Pembangunan DI Embung Parangina	641.640.000,00	50,00%	320.820.000,00	50,00%	320.820.000,00	0,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga						246.015.245,00
REHAB RUANG KELAS SMP NEGERI 2 SAPE SARI	199.800.000,00	50,00%	99.900.000,00	69,27%	138.401.460,00	38.501.460,00
Lanjutan Pagar SMPN 2 Sanggar	98.350.000,00	50,00%	49.175.000,00	78,28%	76.988.380,00	27.813.380,00
Rehab SDN Inpres Sorobali Desa Karampi Kec Langgudu	147.650.000,00	50,00%	73.825.000,00	56,71%	83.732.315,00	9.907.315,00
Paving Blok SDN 02 Ntonggu Kec Palibelo	296.850.000,00	50,00%	148.425.000,00	66,21%	196.544.385,00	48.119.385,00
Rehabilitasi SDN Kombo Wawo	199.850.000,00	0,00%	0,00	52,73%	105.380.905,00	105.380.905,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDIT AZ-ZAUTI	149.750.000,00	0,00%	0,00	10,88%	16.292.800,00	16.292.800,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	% Keu	LRA	% Fisik	Fisik	Nilai (Rp)
RSUD Sondosia						
Pembangunan NICU/PICU	9.519.982.804,00	60,00%	5.711.989.681,00	60,00%	5.711.989.681,00	0,00
Jumlah						727.332.482,00

Penjelasan :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pekerjaan 6 Jalan dengan nomor kontrak 602/37/06.9/2025 tanggal 12 September 2025 senilai Rp12.011.000.000,00 dari Sumber Dana DAU tahun 2025 dengan jaminan pelaksanaan nomor: 11614040426000399 tanggal 29 April 2026 uang muka senilai Rp600.550,00 terdapa 3 ruas jalan yang sudah 100% pengerjaannya dan 3 yang masih dalam pengerjaan biaya yang telah dibayarkan senilai Rp9.145.008.750,01 dan sisa yang harus dibayarkan senilai Rp2.865.991.249,99
 - b. Pembangunan di Embung Parangina merupakan KDP tahun 2024 dari Sumber Dana DAK Fisik dengan nilai kontrak Rp641.640.000,00 dan pembayaran telah dilakukan sebesar Rp320.820.000,00 dan sisa yang harus dibayarkan senilai Rp320.820.000,00.
2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 - c. Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 2 Sape Sari dengan nomor kontrak 01.1/SPK.3.11.SD/PPK/XII/2025.P senilai Rp199.800.000,00 dari Sumber Dana DAU Earmark tahun 2025 dengan jaminan pelaksanaan nomor: 14.0254.22.01.03.12.2025 tanggal 4 Desember 2025 uang muka senilai Rp99.900.000,00 dengan jumlah biaya yang telah dibayarkan senilai Rp99.900.000,00 dan sisa yang harus dibayarkan senilai Rp99.900.000,00.
 - d. Lanjutan pembangunan pagar SMPN 2 Sanggar dengan nomor kontrak 01.1/SPK.4.12.SMP/PPK/XI/2025.P senilai Rp98.350.000,00 dari Sumber Dana DAU Earmark tahun 2025 dengan jaminan pelaksanaan nomor: 14.0315.22.01.03.12.2025 tanggal 11 Desember 2025 uang muka senilai Rp49.175.000,00 dengan jumlah biaya yang sudah dibayarkan senilai Rp49.175.000,00 dan sisa yang harus dibayarkan senilai Rp49.175.000,00.
 - e. Rehab SDN Inpres Sorobali dengan nomor kontrak 01.1/SPK.1.10.SD/PPK/XII/2025.P senilai Rp147.650.000,00 dari Sumber Dana DAU Earmark tahun 2025 dengan jaminan pelaksanaan nomor: 07.0959.22.01.024.12.2025 tanggal 8 Desember 2025 uang muka senilai Rp73.825.000,00 dengan jumlah biaya yang sudah dibayarkan senilai Rp73.825.000,00 dan sisa yang harus dibayarkan senilai Rp73.825.000,00.
 - f. Pemasangan Paving Blok SDN 02 Ntonggu dengan nomor kontrak 01.1/SPK.4.15.SD/PPK/XII/2025.P senilai Rp296.850.000,00 dari Sumber Dana DAU Earmark tahun 2025 dengan jaminan pelaksanaan nomor: SBD 2025 14.01.00002691 tanggal 8 Desember 2025 uang muka senilai Rp148.425.000,00 dengan jumlah biaya yang sudah dibayarkan senilai Rp148.425.000,00 dan sisa yang harus dibayarkan senilai Rp148.425.000,00.
3. **Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia**
 Pembangunan Ruang NICU/PICU dengan nomor kontrak 8/KONTRAK-RSUS.DAK/06.2/2025 senilai Rp9.519.982.804,00 dari Sumber Dana DAK Fisik Tahun 2025 dengan jaminan pelaksanaan Nomor: 11614020725002483 tanggal 25 Juli 2025 uang muka senilai Rp475.999.140,20 dengan jumlah biaya yang telah dibayarkan senilai Rp5.711.989.681,00 dan sisa yang harus dibayarkan senilai Rp957.723.384,66.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

2. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp20.164.569.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengurangan senilai Rp20.130.436.940,00 diatribusikan ke aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp9.141.347.620,00 dan ke Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp10.989.089.320,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.158
Rincian Reklasifikasi KDP

Nama Perangkat Daerah	Nilai Persediaan	Keterangan
Atribusi Ke Gedung dan Bangunan	9.141.347.620,00	
Pembangunan Sarana Olahraga Jogging Track	1.338.082.600,00	Reklasifikasi Ke Gedung dan Bangunan
Pembangunan Gor Mini Kabupaten Bima	1.065.019.200,00	Reklasifikasi Ke Gedung dan Bangunan
Pembangunan Kantor DPMPSTP	2.928.395.820,00	Reklasifikasi Ke Gedung dan Bangunan
Pembangunan Taman Masjid Agung	3.809.850.000,00	Reklasifikasi Ke Gedung dan Bangunan
Atribusi Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.989.089.320,00	
Pemeliharaan Berkala Jalan SP.JP - Lamere	996.000.000,00	Reklasifikasi Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi
Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Sp.Jp. Sondo - Pantai Rontu	6.708.960.400,00	Reklasifikasi Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi
Peningkatan Jalan Dea - Sumi	1.395.587.000,00	Reklasifikasi Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi
Keg.Peningkatan DI Ompu Sao (DAK) Kec.Langgudu	1.888.541.920,00	Reklasifikasi Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi
Jumlah	20.130.436.940,00	

- b. Pengurangan senilai Rp34.133.000,00 akibat Kekurangan volume pada Pekerjaan Pembangunan NICU/PICU pada RSUD Sondosia

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada Tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Bima melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. Metode yang digunakan dalam penyusutan yaitu metode garis lurus (*straight line method*). Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 senilai Rp-2.164.615.153.402,21.

Tabel 5.159
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 (Rp)	Nilai Buku Tahun 2025 (Rp)
Aset Tetap	4.814.256.528.547,34	(2.164.615.153.402,21)	2.649.641.375.145,13
Tanah	498.033.019.298,67	0,00	498.033.019.298,67
Peralatan dan Mesin	760.440.812.936,51	(628.421.065.262,87)	132.019.747.673,64
Gedung dan Bangunan	1.676.434.067.802,69	(490.080.844.184,48)	1.186.353.223.618,21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.774.592.097.457,14	(1.046.113.243.954,86)	728.478.853.502,28
Aset Tetap Lainnya	84.527.852.591,33	0,00	84.527.852.591,33
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.228.678.461,00	0,00	20.228.678.461,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.160
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Aset Tetap	(1.948.538.833.844,32)	(226.327.416.854,84)	(10.251.097.296,95)	(2.164.615.153.402,21)
Peralatan dan Mesin	(569.223.395.588,05)	(68.827.692.847,31)	(9.630.023.172,49)	(628.421.065.262,87)
Gedung dan Bangunan	(457.681.548.466,27)	(32.706.494.597,07)	(307.198.878,86)	(490.080.844.184,48)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(921.633.889.790,00)	(124.793.229.410,46)	(313.875.245,60)	(1.046.113.243.954,86)

5.3.1.4 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi.

Tabel 5.161
Properti Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Properti Investasi:				
Tanah	35.629.954.629,50	35.629.954.629,50	-	-
Gedung dan Bangunan	57.056.158.629,77	57.056.158.629,77	-	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.520.545.977,00)	(11.383.093.183,00)	(1.137.452.794,00)	9,99
Jumlah	80.165.567.282,27	81.303.020.076,27	(1.137.452.794,00)	(1,40)

Nilai Properti investasi per 31 Desember 2025 senilai Rp80.165.567.282,27 sama dengan nilai Properti Investasi Tahun 2024.

5.3.1.4.1 Properti Investasi – Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi – Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi - Tanah.

Tabel 5.162
Properti Investasi – Tanah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Properti Investasi Tanah	35.629.954.629,50	35.629.954.629,50	0,00	0,00
Properti Investasi Tanah	35.629.954.629,50	35.629.954.629,50	0,00	0,00
Jumlah	35.629.954.629,50	35.629.954.629,50	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Bima memiliki Properti Investasi Tanah sebanyak 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) bidang dengan luas total 8.092.420 m² yang disewakan kepada masyarakat dengan metode lelang tertutup yang setiap tahunnya ditetapkan dengan SK Bupati Bima. Sesuai PSAP 17 tentang Properti Investasi dijelaskan bahwa properti tanah yang disewakan untuk menghasilkan rental dan untuk kenaikan nilai dikategorikan sebagai Properti Investasi karena tidak digunakan sendiri. Tanah yang dikategorikan sebagai Properti Investasi – Tanah tercatat pada Sekretariat Daerah dengan nilai perolehan Rp35.629.954.629,50. *(Lihat Lampiran IX)*





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.3.1.4.2 Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi – Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi – Gedung dan Bangunan.

Tabel 5.163
Properti Investasi – Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	57.056.158.629,77	57.056.158.629,77	0,00	0,00
Properti Investasi Bangunan Gedung	57.056.158.629,77	57.056.158.629,77	0,00	0,00
Jumlah	57.056.158.629,77	57.056.158.629,77	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Bima telah mereklasifikasi atas Aset Tetap yang disewakan untuk menghasilkan sewa dan untuk kenaikan nilai ke Properti Investasi – Gedung dan Bangunan sejumlah 261 kios pasar dan 5 gedung pertemuan yang menjadi sumber pendapatan atas pemanfaatan aset tersebut.

Rincian mutasi Properti Investasi – Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.164
Rincian Mutasi Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

Nama Satuan Kerja	Jumlah	Nilai (Rp)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	226	2.196.253.473,00
Sekretariat Daerah	2	3.456.127.209,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	4.047.132.430,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35	35.973.552.334,77
Jumlah	266	45.673.065.446,77

5.3.1.4.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi – Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi – Gedung dan Bangunan.

Tabel 5.165
Properti Invenstasi – Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(12.520.545.977,00)	(1.137.452.794,00)	0,00	(11.383.093.183,00)	1.137.452.794,00	(0,10)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(12.520.545.977,00)	(1.137.452.794,00)	0,00	(11.383.093.183,00)	1.137.452.794,00	(0,10)
Jumlah	(12.520.545.977,00)	(1.137.452.794,00)	0,00	(11.383.093.183,00)	1.137.452.794,00	(0,10)

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi senilai Rp12.520.545.977,00 merupakan nilai reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas 261 kios dan 5 gedung pertemuan.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.3.1.5 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya.

Tabel 5.166
Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Aset Lainnya:				
Tagihan Jangka Panjang	15.865.434.487,93	11.956.477.968,07	3.908.956.519,86	32,69
Aset Tidak Berwujud	1.088.585.000,00	1.088.585.000,00	0,00	0,00
Aset Lain – Lain	26.154.188.380,00	32.115.265.906,49	-5.961.077.526,49	-18,56
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	501.010.000,00	-501.010.000,00	-100,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-703.953.958,33	-650.419.257,01	-53.534.701,32	8,23
Jumlah	42.404.253.909,60	45.010.919.617,55	-2.606.665.707,95	-5,79

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2024 sebesar Rp501.010.000,00 telah terbayar berdasarkan Laporan Konfirmasi Transfer Daerah (LKT) dengan SP2D Nomor: 250191304003500 tanggal 11 April 2025, sehingga di tahun 2025 tercatat Rp0,00.

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Tagihan Jangka Panjang.

Tabel 5.167
Tagihan Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Tagihan Jangka Panjang:				
Tagihan Penjualan Angsuran	484.313.210,00	1.248.150.480,00	(763.837.270,00)	(61,20)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.381.121.277,93	10.708.327.488,07	10.708.327.488,07	100
Jumlah	15.865.434.487,93	11.956.477.968,07	3.908.956.519,86	32,69





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 5.168
Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

Akun	Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Penambahan	Keterangan	Reklasifikasi ke Bagian Lancar Tagihan Penjualan Untuk Yang Akan Jatuh Tempo Tahun 2026	Pelunasan 2025	Saldo 2025
Tagihan Penjualan Angsuran	1.248.150.480,00	0,00	Koreksi lebih catat Tagihan Penjualan Rumah Dinas atas nama Drs. H. Usman Umar karena kesalahan pencatatan harga lelang rumah dinas golongan III yang dicatat sebesar nilai wajar. Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD pasal 499 ayat 2 menyatakan bahwa harga rumah negara golongan III ditetapkan sebesar 50% dari nilai wajar. Nilai wajar sebesar Rp. 404.304.000	309.251.470,00	454.585.800,00	484.313.210,00
			Koreksi atas kurang catat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2023 karena tidak dilakukan reklasifikasi atas angsuran yang akan jatuh tempo tahun 2024	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	10.708.327.488,07	4.672.793.789,86	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00		15.381.121.277,93
Total				309.251.470,00	454.585.800,00	15.381.121.277,93

Rincian Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5.169
Rincian Tagihan Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Tagihan Penjualan Angsuran	484.313.210,00	1.248.150.480,00	(763.837.270,00)	-61,20
Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	484.313.210,00	1.248.150.480,00	(763.837.270,00)	-61,20
Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	484.313.210,00	1.248.150.480,00	(763.837.270,00)	-61,20
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.381.121.277,93	10.708.327.488,07	4.672.793.789,86	43,64
Penetapan terkait PN bukan Bend/Pejabat lain	446.311.183,00	446.311.183,00	0,00	0,00
Dalam Proses Penetapan terkait PN bukan Bend/Pejabat lain	115.673.600,00	115.673.600,00	0,00	0,00
Penetapan terkait Pihak Ketiga	9.941.034,00	9.941.034,00	0,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Dalam Proses Penetapan Pihak Ketiga	182.614.964,43	182.614.964,43	0,00	0,00
Info BPK terkait PN bukan Bend/Pejabat lain	4.388.788.669,04	283.444.364,00	4.105.344.305,04	1448,38
Info BPK terkait Pihak Ketiga	5.385.588.272,00	4.432.724.853,00	952.863.419,00	21,50
LHP APIP terkait Bendahara	1.707.711.594,72	2.090.125.528,90	(382.413.934,18)	(18,30)
LHP APIP terkait PN bukan Bend/Pejabat lain	53.992.191,00	53.992.191,00	0,00	0,00
LHP APIP terkait Pihak Ketiga	2.953.332.730,13	2.956.332.730,13	(3.000.000,00)	(0,10)
Penetapan terkait Bendahara	137.167.039,61	137.167.039,61	0,00	0,00
Jumlah	15.865.434.487,93	11.956.477.968,07	3.908.956.519,86	32,69

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan penjualan atas rumah negara Golongan III. Adapun Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 sebesar Rp484.313.210,00 mengalami penurunan sebesar Rp763.837.270,00 atau 61,20% dari nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.248.150.480,00.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan jumlah tagihan atas kerugian keuangan daerah dan kerugian keuangan negara yang telah diterbitkan dengan SKTJM. Dimana saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.381.121.277,93 mengalami kenaikan sebesar Rp4.672.793.789,86 atau 43,64% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.708.327.488,07 (Rp9.455.052.266,89 sesuai matriks semester II tahun 2024 dan penambahan dari Jurnal Koreksi senilai Rp1.253.275.221,18), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.170
Rincian Tuntutan Ganti Rugi

Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)	Angsuran s.d 2025 (Rp)	Pelunasan s.d 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
Penetapan	711.032.531,09	92.200.000,00	320.543.966,66	298.288.564,43
Dalam Proses Penetapan	716.711.565,00	7.897.500,00	252.561.848,00	456.252.217,00
Informasi BPK	21.250.373.634,64	5.114.849.595,82	4.653.435.503,06	11.482.088.535,76
Informasi APIP	5.041.193.716,74	395.897.602,00	1.500.804.154,00	3.144.491.960,74
Jumlah	27.719.311.447,47	5.610.844.697,82	6.727.345.471,72	15.381.121.277,93

Penjelasan:

Posisi kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Bima sampai dengan Semester II Tahun 2025 terdapat sebanyak 2.59 kasus dengan nilai Rp23.613.967.142,43 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan SK Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebanyak 64 kasus senilai Rp711.032.531,09. Dari kasus tersebut telah dilakukan pelunasan sebanyak 34 kasus senilai Rp320.543.966,66, pembayaran dengan mekanisme angsuran sebanyak 29 kasus senilai Rp92.200.000,00, sehingga sisa kasus yang telah mendapatkan penetapan sampai Semester II Tahun 2025 sebanyak 30 kasus senilai Rp298.288.564,43.
2. Kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses pembebanan sebanyak 26 kasus senilai Rp716.711.565,00. Dari kasus tersebut telah dilakukan pelunasan sebanyak delapan kasus senilai Rp252.561.848,00 dan pembayaran dengan mekanisme angsuran sebanyak delapan kasus senilai Rp7.897.500,00. Namun karena belum terdapat penetapan pembebanan, sehingga sisa kasus yang





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

belum selesai diangsur/dilunasi sebanyak 26 kasus senilai Rp456.252.217,00 belum berubah statusnya menjadi penetapan.

3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebanyak 2.504 kasus senilai Rp22.186.223.046,34 yang belum diproses melalui tuntutan ganti kerugian daerah. Dari kasus tersebut sebanyak 648 kasus telah dibayar dengan metode lunas senilai Rp6.154.239.657,06 dan sebanyak 313 kasus dilakukan pembayaran dengan mekanisme angsuran senilai Rp5.510.747.197,82 dan sisa nilai kerugian daerah sebanyak 2.504 kasus senilai Rp10.521.236.191,46.
4. Kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 sebanyak 1.145 kasus senilai Rp2.149.735.076,00.
5. Dari jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp15.381.121.277,93, terdapat penambahan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain senilai Rp4.105.344.305,04 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK Nomor: 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud.

Tabel 5.171
Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Aset Tidak Berwujud:				
Aset Tidak Berwujud	1.088.585.000,00	1.088.585.000,00	0	0
Software	1.088.585.000,00	1.088.585.000,00	0	0
Jumlah	1.088.585.000,00	1.088.585.000,00	0	0

Total Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2025 Rp1.088.585.000,00 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2024. Adapun Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.172
Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

Nama Aplikasi	Nilai (Rp)	Satuan Kerja
Aplikasi Trafficlight ASN	37.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
Aplikasi E Apesnsi, E, Kinerja dan E. Disiplin	193.695.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
Aplikasi Si Mawar	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sistem aplikasi penyimpanan dokumen	44.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SIRUP	190.000.000,00	Sekretariat Daerah
SMEP Kab Bima	29.700.000,00	Sekretariat Daerah
SIMRANDIS	49.950.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
SIA (Sistim Informasi Akutansi)	198.500.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
SISMIOP	127.820.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
E TUPA (Eklatronikfikasi Transaksi Tunai Pajak Daerah)	117.920.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Total	1.088.585.000,00	





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.3.1.5.3 Aset Lain Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat, hilang dan/aset yang dihibahkan ke pihak lain dan direncanakan akan dilakukan penghapusan dari daftar inventaris.

Nilai Aset lain – lain per 31 Desember 2025 senilai Rp26.154.188.380,00 mengalami penurunan senilai Rp5.961.077.526,49 atau 18,56% dibandingkan dengan nilai Aset lain - lain Tahun 2024.

Tabel 5.173
Aset Lain-Lain Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Aset Lain-Lain:				
Aset Rusak Berat/Usang	2.330.334.259,00	2.631.346.480,99	(301.012.221,99)	11,44
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	23.823.854.121,00	29.483.919.425,50	(5.660.065.304,50)	19,20
Jumlah	26.154.188.380,00	32.115.265.906,49	(5.961.077.526,49)	18,56

Dari daftar aset Rusak berat/usang senilai Rp2.330.334.259,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 434 unit aset Rusak berat, Tidak diketahui Keberadaannya, Aset hilang senilai Rp941.288.938,00;
2. Sebanyak 6 unit dalam proses sewa beli senilai Rp 715.790.417,00;
3. Sebanyak 3 kasus Tuntutan ganti rugi senilai Rp 678.254.904,00 yang terdiri dari :
 - a. Pengalihan atas Pajak yang belum disetor Bendahara Pengeluaran Dikpora senilai Rp145.606.322,00;
 - b. TGR atas Kapitasi Puskesmas Lambu dan Donggo senilai Rp465.574.757,00; dan
 - c. TGR Pajak yang dipungut tahun 2013 Bendahara Setda senilai Rp67.073.825,00

Tabel 5.174
Mutasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
Saldo 31 Desember 2024	32.115.265.906,49	
Penambahan	390.161.282,00	
Reklasifikasi	390.161.282,00	
Pengurangan		6.351.238.808,49
Penghapusan		6.346.238.808,49
Penyetoran		5.000.000,00
Saldo 31 Desember 2025		26.154.188.380,00

Dari saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 senilai Rp26.154.188.380,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rincian atas Aset Lain-lain yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp275.964.951,00, rusak berat senilai Rp665.323.987,00, TGR senilai Rp673.254.904,00, Aset P3D yang belum diserahkan (Provinsi) senilai Rp1.524.141.666,00, dalam proses Sewa Beli senilai Rp715.790.417,00 dan aset yang diserahkan ke BUMD (PDAM) senilai Rp22.299.712.455,00.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

2. Penambahan Aset Lain-Lain senilai Rp390.161.282,00 Reklasifikasi nilai aset yang semula tercatat sebagai peralatan dan mesin karena kondisi barang yang rusak berat maupun tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan penggolongan aset tetap dalam Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.175
Penambahan Aset Lain-Lain Dari Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

Satuan Kerja	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	NILAI Buku (Rp)
Kecamatan Monta	19.591.000,00	19.591.000,00	0
Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.666.228.615,00	1.640.655.148,00	25.573.467,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	379.515.282,29	328.917.271,29	50.598.011,00
Rumah Sakit Umum Sondosia	394.913.000,00	80.923.196,00	313.989.804,00
Jumlah	2.460.247.897,29	2.070.086.615,29	390.161.282,00

3. Pengurangan Aset Lain-Lain senilai Rp6.346.238.808,49 dirinci sebagai berikut:
Pengurangan nilai Aset Lain-Lain karena adanya penghapusan sesuai Keputusan Bupati No. 188.45/438/07.3 Tahun 2025 Tanggal 6 Desember 2025 atas aset yang telah rusak berat senilai Rp6.346.238.808,49 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.176
Pengurangan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

Satuan Kerja	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	NILAI Buku (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.499.361.650,00	831.856.418,00	4.667.505.232,00
Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	342.629.572,00	295.071.502,00	47.558.070,00
Dinas Pariwisata	323.916.000,00	166.746.539,00	157.169.461,00
Dinas Sosial	6.000.000,00	5.124.999,00	875.001,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	190.000.000,00	108.571.429,00	81.428.571,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.000.000,00	6.916.668,00	5.083.332,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.150.386.500,00	1.149.902.749,00	483.751,00
Dinas Perhubungan	485.323.783,00	360.978.392,50	124.345.390,50
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.250.000.000,00		1.250.000.000,00
Jumlah	9.271.407.505,00	2.925.168.696,50	6.346.238.808,50

3. Pengurangan senilai Rp5.000.000,00 atas TGR Pajak yang dipungut tahun 2013 Bendahara Setda yang terdiri dari :
- SSP dengan NTPN E41C06DFDSPHB01K senilai Rp3.000.000,00 tanggal 4 Ferbuari 2025; dan
 - SSP dengan NTPN 4AB223IRNEV9BPGH senilai Rp2.000.000,00 tanggal 10 Desember 2025

Aset Lain-Lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat, hilang atau aset yang dihibahkan ke pihak lain dan direncanakan akan dilakukan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Lain-Lain, maka nilai akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain disajikan senilai nilai akumulasi penyusutan sebelum aset tersebut direklasifikasi dalam pencatatan Aset Lain-Lain masing-masing senilai Rp5.028.247.306,29. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.177
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2025

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
SEKRETARIAT DPRD	10.709.940,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.249.167,00
KECAMATAN BOLO	3.428.572,00
KECAMATAN LAMBU	5.483.571,00
KECAMATAN WAWO	10.714.286,00
KECAMATAN MONTA	19.591.000,00
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1.670.183.482,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	328.917.271,29
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.029.626.714,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	154.439.999,00
DINAS PARIWISATA	0,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.805.714,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	747.143,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.579.166,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.277.143,00
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	24.525.194,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIMA	90.207.645,00
DINAS KESEHATAN	20.209.227,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA	80.923.196,00
SEKRETARIAT DAERAH	308.664.915,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.216.683.545,00
DINAS PERHUBUNGAN	0,00
DINAS SOSIAL	31.280.416,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00
Jumlah	5.028.247.306,29

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Metode yang digunakan dalam penyusutan yaitu metode garis lurus (*straight line method*) Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp703.953.958,33 dan Rp650.419.257,01 mengalami peningkatan senilai Rp 53.534.701,32 atau 8,23%.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.178
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(703.953.958,33)	(650.419.257,01)	53.534.701,32	8,23%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(703.953.958,33)	(650.419.257,01)	53.534.701,32	8,23%

Tabel 5.179
Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

Aset Tak Berwujud	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Amortisasi s/d 31 Des 2024 (Rp)	Amortisasi 2025 (Rp)	Koreksi Amortisasi 2024 (Rp)	Amortisasi s/d 31 Des 2025 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Aplikasi Traffilight ASN	BKD	37.000.000,00	11.408.333,33	3.700.000,00		15.108.333,33	21.891.666,67
Aplikasi E Apseansi, E, Kinerja dan E. Disiplin	BKD	193.695.000,00	43.581.375,00	19.369.500,00		62.950.875,00	130.744.125,00
Aplikasi Si Mawar	DP3AP2KB	100.000.000,00	54.000.966,67	10.000.000,00	9.000.966,67	55.000.000,00	45.000.000,00
Sistem aplikasi penyimpanan dokumen	Capil	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00		44.000.000,00	0,00
SIRUP	Setda	190.000.000,00	202.666.666,34	0,00	12.666.666,34	190.000.000,00	0,00
SMEP Kab Bima	Setda	29.700.000,00	26.977.500,00	2.722.500,00		29.700.000,00	0,00
SIA (Sistim Informasi Akutansi)	BPKAD	198.500.000,00	198.500.000,00	0,00		198.500.000,00	0,00
SIMRANDIS	RSUD	49.950.000,00	9.573.750,00	4.995.000,00	4.995.000,00	9.573.750,00	40.376.250,00
SISMIOP	BAPENDA	127.820.000,00	34.161.332,34	12.782.000,00		46.943.332,34	80.876.667,66
E TUPA (Eklatronifikasi Transaksi Tunai Pajak Daerah)	BAPENDA	117.920.000,00	25.549.333,33	11.792.000,00	(14.836.334,33)	52.177.667,66	65.742.332,34
Jumlah		1.088.585.000,00	650.419.257,01	65.361.000,00	11.826.298,68	703.953.958,33	384.631.041,67

5.3.1.5.5 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Tabel 5.180
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF):				
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	501.010.000,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	501.010.000,00	0,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Jumlah	0,00	501.010.000,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil melalui mekanisme *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp501.010.000,00. TDF tersebut telah terbayar (di transfer) dengan SP2D Nomor: 250191304003500 tanggal 11 April 2025.

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Tabel 5.181
Kewajiban Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	29.849.586.502,06	31.132.811.732,34	(1.283.225.230,28)	(4,12)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	29.849.586.502,06	31.132.811.732,34	(1.283.225.230,28)	(4,12)

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 5.182
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	188.309.313,39	295.360.940,41	(107.051.627,02)	(36,24)
Pendapatan Diterima Dimuka	8.940.216.141,67	7.282.774.922,08	1.657.441.219,59	22,76
Utang Belanja Pegawai	4.489.607.826,00	1.528.062.958,00	2.961.544.868,00	193,81
Utang Belanja Barang dan Jasa	11.708.146.116,00	15.161.270.978,85	(3.453.124.862,85)	(22,78)
Utang Belanja Modal	1.682.980.105,00	4.025.014.933,00	(2.342.034.828,00)	(58,19)
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.840.327.000,00	2.840.327.000,00	0,00	0,00
Jumlah	29.849.586.502,06	31.132.811.732,34	(1.283.225.230,28)	(4,12)

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp29.849.586.502,06, digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp188.309.313,39 mengalami penurunan sebesar Rp66.025.997,00 atau 25,96% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp295.360.940,41. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tersebut terdiri dari:

Tabel 5.183
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 dan 2024

Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
DIKBUDPORA	Utang PFK Dana BOS	3.703.494,00	146.298.102,00	0,00	150.001.596,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
	Utang PFK yang telah direklasifikasi ke TPTGR	145.606.322,00	145.606.322,00	0,00	(145.606.322,00)
SETDA	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	67.073.525,00	67.073.525,00	5.000.000,00	(62.073.525,00)
RSUD Bima dan Dinkes (BLUD)	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima (BLUD Puskesmas dan RSUD Sondosia)	78.977.599,41	44.932.492,39	78.977.599,41	38.307.717,39
Jumlah		295.360.940,41	254.335.310,39	83.977.599,41	188.309.313,39

Penjelasan:

- Utang PFK Dana BOS pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima sebesar Rp150.001.596,00 yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara per 22 Mei 2026, terdiri dari:
 - Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.822.550,00
 - Pajak Penghasilan 23 Rp12.417.365
 - Pajak Pertambahan Nilai Rp135.761.681
- Terdapat koreksi untuk mengurangi nilai Utang PFK yang sudah kadaluarsa (sejak tahun 2014) ke Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp207.679.847,00, dengan rincian:
 - Utang PFK pada Dikbudpora yang telah direklasifikasi ke TPTGR sebesar Rp145.606.322,00.
 - Utang PFK pada Sekretariat Daerah yang telah direklasifikasi ke TPGR sebesar Rp62.073.525,00.
- Utang PFK Dinas Kesehatan Kabupaten Bima (BLUD Puskesmas dan RSUD Sondosia) dan RSUD Bima TA 2024 sebesar Rp78.977.599,41 telah disetor ke Kas Negara dengan rincian pada **Lampiran X**.
 - Utang PFK pada RSUD Bima dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima (BLUD Puskesmas dan RSUD Sondosia) tahun 2025 sebesar Rp38.307.717,39 yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara per 22 Mei 2026, dirincikan sebagai berikut:
 - Iuran Wajib Pegawai 1% sebesar Rp1.486.194,00.
 - Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.796.403,00.
 - Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp2.891.770,00.
 - Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp198.090,00.
 - Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.663.513,00.
 - Iuran Jaminan Kesehatan 4% sebesar Rp26.271.747,39.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp8.940.216.141,67. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 dan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.184
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%	Keterangan
RSUD BIMA	5.375.000,00	16.875.000,00	(11.500.000,00)	(68,15)	
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (sewa bangunan ATM)	5.375.000,00	16.875.000,00	(11.500.000,00)	(68,15)	Sewa tanah untuk ATM BRI dan BNI
Dinas Kesehatan	16.250.000,00	23.250.000,00	(7.000.000,00)	(30,11)	





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%	Keterangan
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (sewa bangunan ATM)	16.250.000,00	23.250.000,00	(7.000.000,00)	(30,11)	Sewa tanah untuk ATM Bank NTB Syariah pada PKM sanggar dan ATN BSI pada PKM Woha
BPKAD	8.918.591.141,67	7.242.649.922,08	1.675.941.219,59	23,14	
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (penempatan menara telekomunikasi PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI)	69.416.666,67	97.416.666,67	(28.000.000,00)	(28,74)	
Sewa lelang tanah tahunan pada BPKAD Kabupaten Bima	8.780.132.808,33	7.145.233.255,42	1.634.899.552,91	22,88	Objek tanah sawah yang disewakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebanyak 1.876 petak sawah dengan luas 8.041.720 m2
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (sewa bangunan ATM)	69.041.666,67	0,00	69.041.666,67	0,00	Sewa tanah untuk ATM Bank NTB Syariah pada Kantor Bupati Bima, Kantor Desa Teke, Paruga Nae Wawo, PKM Belo, PKM Langgudu, PKM Monta dan RSUD Bima
Jumlah	8.940.216.141,67	7.282.774.922,08	1.657.441.219,59	22,76	

Tabel 5.185
Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 dan 2024

SKPD	Uraian	Saldo 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2025
Dinas Kesehatan	Sewa Tanah Untuk ATM Bank NTB di PKM Sanggar	21.250.000,00	0,00	5.000.000,00	16.250.000,00
	Sewa Tanah Untuk ATM BSI Syariah PKM Woha	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
RSUD Bima	Sewa Tanah Untuk ATM Bank BRI	1.875.000,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00
	Sewa Tanah Untuk ATM Bank BNI	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00
BPKAD	Sewa penempatan TELEKOMUNIKASI PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tahun 2022	33.250.000,00	0,00	14.000.000,00	19.250.000,00
	Sewa Penempatan MENARA TELEKOMUNIKASI PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tahun 2024	64.166.666,67	0,00	14.000.000,00	50.166.666,67
	Pendapatan Diterima Dimuka atas Lelang Tanah (Jangka Waktu 1 tahun dari bulan Desember 2024)	7.145.233.255,42	8.780.132.808,33	7.145.233.255,42	8.780.132.808,34
	Perjanjian Sewa ATM PT Bank Syariah - Kantor Bupati Bima	0,00	16.333.333,33	0,00	16.333.333,33
	Perjanjian Sewa ATM PT Bank Syariah - Kantor Desa Teke	0,00	12.083.333,33	0,00	12.083.333,33
	Perjanjian Sewa ATM PT Bank Syariah - Paruga Nae Wawo	0,00	10.625.000,00	0,00	10.625.000,00
	Perjanjian Sewa ATM PT Bank Syariah - Puskesmas Belo	0,00	2.083.333,33	0,00	2.083.333,33
	Perjanjian Sewa ATM PT Bank Syariah - Puskesmas Langgudu	0,00	5.208.333,33	0,00	5.208.333,33
	Perjanjian Sewa ATM PT Bank Syariah - Puskesmas Monta	0,00	12.083.333,33	0,00	12.083.333,33
	Perjanjian Sewa ATM PT Bank Syariah - RSUD Bima	0,00	10.625.000,00	0,00	10.625.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Total	7.282.774.922,09	8.849.174.475,00	7.191.733.255,42	8.940.216.141,67
-------	------------------	------------------	------------------	------------------

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari Utang Belanja tahun 2025 dan 2024, dengan uraian sebagai berikut:

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

Nilai Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.489.607.826,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.961.544.868,00 atau 193,81% dari nilai Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.528.062.958,00. Utang Belanja Pegawai untuk mencatat kekurangan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.186
Rincian atas Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	266.812.128,00	284.392.236,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	9.777.600,00	0,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	25.947.435,00	24.443.572,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	616.896,00	0,00
Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	9.510.000,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	87.693.355,00	105.149.664,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	920.000,00	0,00
Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	506.940,00	0,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	19.765,00	17.339,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	8.220,00	11,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.298.355,00	3.312.061,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	415.780,00	0,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	26.964,00	0,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	80.895,00	0,00
Utang Belanja Tunjangan Khusus*)	190.753,00	190.753,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	4.091.292.740,00	1.101.047.322,00
Jumlah	4.489.607.826,00	1.528.062.958,00

Penjelasan:

Rincian atas Utang Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.187
Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Utang Belanja Pegawai 2025 (Rp)	Pembayaran Utang Pegawai 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	66.905.435,00	96.879.698,00	66.905.435,00	96.879.698,00
Dinas Kesehatan	1.230.690.589,00	1.599.779.939,00	1.230.690.589,00	1.599.779.939,00
Rumah Sakit Umum Daerah	159.706.253,00	2.645.303.740,00	82.910.560,00	2.722.099.433,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.645.615,00	4.172.017,00	0,00	9.817.632,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.125.187,00	0,00	5.125.187,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Utang Belanja Pegawai 2025 (Rp)	Pembayaran Utang Pegawai 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
Dinas Ketahanan Pangan	522.389,00	718.468,00	522.389,00	718.468,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.002.699,00	3.776.929,00	3.002.699,00	3.776.929,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.597.404,00	0,00	4.597.404,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.046.102,00	0,00	2.046.102,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	9.484.610,00	0,00	9.484.610,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.724.460,00		2.724.460,00	0,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.760.000,00	16.382.344,00	11.760.000,00	16.382.344,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	7.231.746,00	0,00	7.231.746,00
Dinas Pariwisata	5.924.426,00	0,00	5.924.426,00	0,00
Sekretariat Daerah	18.392.941,00	15.522.241,00	18.392.941,00	15.522.241,00
Kecamatan Langgudu	1.664.308,00	0,00	1.664.308,00	0,00
Kecamatan Wera	2.659.130,00	0,00	0,00	2.659.130,00
Kecamatan Woja	6.355.860,00	0,00	6.355.860,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	1.611.651,00	0,00	1.611.651,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00	2.074.860,00	0,00	2.074.860,00
Dinas Pemadam Kebakaran	340.160,00	1.569.145,00	340.160,00	1.569.145,00
Jumlah	1.528.062.958,00	4.404.507.388,00	1.442.962.520,00	4.489.607.826,00

Tabel 5.188
Mutasi Utang Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Utang Belanja Pegawai 2025	Pembayaran Utang Pegawai 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	66.905.435,00	96.879.698,00	66.905.435,00	96.879.698,00
Dinas Kesehatan	129.643.267,00	86.135.884,00	129.643.267,00	1.599.779.939,00
	1.101.047.322,00	1.513.644.055,00	1.101.047.322,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	159.706.253,00	67.655.055,00	82.910.560,00	2.722.099.433,00
	0,00	2.577.648.685,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.645.615,00	4.172.017,00	0,00	9.817.632,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.125.187,00	0,00	5.125.187,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	522.389,00	718.468,00	522.389,00	718.468,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.002.699,00	3.776.929,00	3.002.699,00	3.776.929,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.597.404,00	0,00	4.597.404,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.046.102,00	0,00	2.046.102,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	9.484.610,00	0,00	9.484.610,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Utang Belanja Pegawai 2025	Pembayaran Utang Pegawai 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.724.460,00	0,00	2.724.460,00	0,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.760.000,00	16.382.344,00	11.760.000,00	16.382.344,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	7.231.746,00		7.231.746,00
Dinas Pariwisata	5.924.426,00		5.924.426,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	18.392.941,00	15.522.241,00	18.392.941,00	15.522.241,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Lambu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sape	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Wawo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Langgudu	1.664.308,00	0,00	1.664.308,00	0,00
Kecamatan Wera	2.659.130,00	0,00	0,00	2.659.130,00
Kecamatan Ambalawi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Belo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Monta	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Donggo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sanggar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tambora	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Madapangga	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Woha	6.355.860,00	0,00	6.355.860,00	0,00
Kecamatan Parado	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Lambitu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Palibelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	1.611.651,00	0,00	1.611.651,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00	2.074.860,00	0,00	2.074.860,00
Dinas Pemadam Kebakaran	340.160,00	1.569.145,00	340.160,00	1.569.145,00
Total	1.528.062.958,00	4.404.507.388,00	1.442.962.520,00	4.489.607.826,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.189
Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2025
1.528.062.958,00	4.404.507.388,00	1.442.962.520,00	4.489.607.826,00

Penjelasan mutasi:

1. Penambahan senilai Rp4.404.507.388,00 merupakan Belanja Pegawai tahun 2025 yang belum dibayarkan
2. Pengurangan senilai Rp1.442.962.520,00 merupakan pembayaran utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya.
3. Utang Belanja Pegawai tahun 2024 senilai Rp85.100.438,00 belum terbayarkan pada tahun 2025.

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Nilai Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.708.146.116,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas dan RSUD Bima serta Dikpora Kabupaten Bima. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.453.124.862,85 atau 29,49% dari nilai Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.161.270.978,85. Rincian atas Utang Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.190
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	134.818.810,00	45.000.000,00	89.818.810,00	199,60
Rumah Sakit Umum Daerah	9.942.327.233,00	14.772.520.152,00	(4.830.192.919,00)	(32,70)
Dinas Kesehatan (RSUD Spondosia)	1.631.000.073,00	343.750.826,85	1.287.249.246,15	374,47
Jumlah	11.708.146.116,00	15.161.270.978,85	(3.453.124.862,85)	(22,78)

Tabel 5.191
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Dikpora Kabupaten Bima Tahun 2025

Uraian	Pihak Ketiga/ Pelaksana	Tahun 2025 (Rp)
Rehabilitasi Pagar Pongpes AL Muzaddit	CV. Delisha Berkarya	38.211.320,00
Lanjutan Pembangunan Gedung Seni Budaya Desa Runggu	CV. Pejuang	51.607.490,00
Jasa Konsultansi Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan) – DAK SMP – Paket 4 (2024)	CV. RAZZAAQ KONSULTAN	7.500.000,00
Jasa Konsultansi Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan) – DAK SD – Paket 3 (2024)	CV. RAZZAAQ KONSULTAN	7.500.000,00
Jasa Konsultansi Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan) – DAK SD – Paket 5 (2024)	CV. WAZU UTAMA KONSULTAN	7.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur – DAU– Paket 4 (2024)	NURDIANZAH, ST	22.500.000,00
Jumlah		134.818.810,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 5.192
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa RSUD Bima Tahun 2025

Uraian	Pihak Ketiga/ Pelaksana	Tahun 2025 (Rp)
Obat dan Alkes	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	830.991.082,00
	PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI	31.777.544,00
	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	5.394.600,00
	PT. ADYA ARTHA ABADI	260.300.523,00
	PT. TAWADHA HEALTH CARE (THC)	37.500.000,00
	PT. BINA SAN PRIMA	139.751.195,00
	PT. KIMIA FARMA	458.091.175,00
	PT. MENSA BINA SUKSES	1.918.080,00
	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	352.819.292,00
	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK	60.549.390,00
	PT. PENTA VALENT	200.441.522,00
	PT. PARIT PADANG GLOBAL	372.798.406,00
	PT.RIDHO ILAHI FARMA	18.499.412,00
	PT. SAPTA SARI TAMA	98.440.600,00
	PT. TRI SAPTA JAYA	409.040.593,00
BMHP	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	32.442.784,00
	PT. ENDO INDONESIA	13.644.964,00
	PT. KIMIA FARMA	188.297.420,00
	PT. KARYA PUTRA ANDALAN	7.800.000,00
	PT. MENSA BINA SUKSES	149.644.538,00
	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK	604.362.837,00
	PT. PARIT PADANG GLOBAL	43.694.323,00
	PT.RIDHO ILAHI FARMA	504.957.014,00
	PT.RIZKI EDUCALAB	297.883.150,00
	PT. SURYA BALI MAKMUR	9.594.453,00
	PT. TRINUSA DARMA SATHA	356.368.023,00
	PT. YASIDA PADMA	36.142.000,00
	PT. TRIPUTRA AMAN MAKMUR	395.990.000,00
	PT. SINAR RAYA NUGRAHA (SNA MEDIKA)	22.679.943,00
	PT. SUMBER CAHAYKU PUTRI GRISELDA	315.506.500,00
BMHP LAB & UTD	PT. CAHAYA INTAN MEDICA	3.052.500,00
	PT. DEXA ARFINDO PRATAM	52.347.600,00
	PT. MENSA BINA SUKSES	71.666.886,00
	PT. MITRA BAHAGIA CITRA MEDIKA	285.558.610,00
	PT. NUSA TRI UTAMA	507.227.246,00
	PT.RIZKI EDUCALAB	228.957.169,00
	PT. SUMBER MITRA AGUNG JAYA	219.853.752,00
	PT. SABA INDOMEDIKA	238.346.007,00
	PT. SETIA ANUGRAH MEDICA	27.389.975,00
	PT. TRANSMEDIK INDONESIA	52.403.100,00
Oksigen	PT. BAYU BANGUN SAKTI	733.732.925,00
Pemeliharaan & Kalibrasi Alat Lab	PT. SUMBER CAHAYKU PUTRI GRISELDA	6.000.000,00
	PT. NUSA TRI UTAMA	62.700.570,00
Cleaning Servis	PT. KAMYA	439.500.000,00
Pengangkutan Limbah	PT. UNIVERSAL ECHO PASIFIK	605.523.101,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PT. CITAS OTIS ELEVATOR	91.694.429,00
	PT. SIEMENS	59.052.000,00
Jumlah		9.942.327.233,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.193

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tahun 2025

Uraian	Pihak Ketiga/ Pelaksana	Tahun 2025 (Rp)
RSUD Sondosia		1.621.948.332,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	418.287.513,00
Belanja Jasa Sewa Alat Kesehatan	CV. Netra Medika Adikarya, Nurrahman	98.815.635,00
Tagihan BDRS RSUD BIMA tahun 2025	RSUD Bima	41.050.000,00
Tagihan UTD PMI Kota Bima	UTD. PMI Kota Bima	10.900.000,00
Tagihan Pemeriksaan Sampel PA RSUD Sumbawa	BLUD RSUD Sumbawa	8.800.000,00
Belanja Pengisian Ulang Oksigen Medis	PT. Multi Gas Medika	38.999.628,00
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Kebersihan	Toko Tri Naufal, R6 Printing	129.562.471,00
Obat-obatan dan BMHP Farmasi	PT. Ridho Ilahi Farma	64.607.268,00
	PT. Tri Sapta Jaya	1.627.575,00
	PT. Kimia Farma Trading	63.505.121,00
	PT. Millenium Pharmachon International	230.624.201,00
	PT. Alexa Medica	59.523.718,00
	PT. Merapi Utama	37.588.343,00
	PT. Anugrah Argon Medika	96.882.461,00
	PT. Bina San Prima	36.968.555,00
	PT. Dua Farma Medika	44.780.591,00
	PT. Khasanah Alkesindo	119.751.509,00
	PT. Trisa Likuid Farma	1.853.100,00
	PT. Inti Kirana Medika	8.362.892,00
	PT. Mimar Citra Abadi	4.075.920,00
	Apotek Chiara	9.669.959,00
	PT. Sumber Cahayaku Putri Griselda	195.461.500,00
BMHP LAB		195.461.500,00
Puskesmas Ngali		2.050.000,00
Alat laboratorium	PT. Sumber Cahaya Putri Griselda	2.050.000,00
Puskesmas Lambitu		7.001.741,00
Pengolahan Limbah Medis	PT. Universal Eco Pasific	7.001.741,00
Jumlah		1.631.000.073,00

Tabel 5.194

Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tahun 2025

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah - Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2025	Mutasi Kurang - Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2024	Saldo Per 31 Desember 2025
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	45.000.000,00	89.818.810,00	0,00	134.818.810,00
Dinas Kesehatan	343.750.826,85	1.631.000.073,00	343.750.826,85	1.631.000.073,00
Rumah Sakit Umum Daerah	14.772.520.152,00	9.942.327.233,00	14.772.520.152,00	9.942.327.233,00
Total	15.161.270.978,85	11.663.146.116,00	15.116.270.978,85	11.708.146.116,00

Tabel 5.195

Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2025	Selisih
15.161.270.978,85	11.663.146.116,00	15.116.270.978,85	11.708.146.116,00	(2.923.702.866,83)

Penjelasan mutasi:

1. Penambahan senilai Rp11.663.146.116,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang belum



Pemerintah Kabupaten Bima

190



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

terbayarkan.

2. Pengurangan senilai Rp15.116.270.978,85 merupakan pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa tahun sebelumnya.
3. Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp45.000.000,00 belum terbayarkan pada tahun 2025.

5.3.2.1.3.3. Utang Belanja Modal

Nilai Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.682.980.105,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.342.034.828,00 atau 58,19% dari nilai Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.025.014.933,00. Utang Belanja Modal untuk mencatat transaksi belanja yang belum terbayar atas kegiatan fisik oleh Perangkat Daerah kepada Pihak Ketiga/Rekanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.196
Rincian Utang Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Pihak Ketiga/ Pelaksana	Tahun 2025 (Rp)
Dikpora Kabupaten Bima		778.677.320,00
Rehab Ruang Kelas SMPN 2 Sape Sari	CV. Keluarga	38.501.460,00
Lanjutan Pagar SMPN 2 Sanggar	CV. Putra Sejati	27.813.380,00
Rehab SDN Inpres Sorobali Desa Karampi Kec Langgudu	CV. Putra Sejati	9.907.315,00
Paving Blok SDN 02 Ntonggu Kec Palibelo	CV. Akifah	48.119.385,00
Rehabilitasi SDN Kombo Wawo	CV. Bintang Sila	105.380.905,00
Pembangunan Ruang Kelas SDIT AZ-ZAUTI	CV. Anna Bima	16.292.800,00
Rehab Berat Ruang Kelas MTS IHYA'ULUMUDIN Ujung Kalate Nipa	CV. Sumber Rejeki	148.900.000,00
Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Wawo	CV. Ncuhi Wawo	49.450.000,00
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SDN Karumbu	CV. Putra Sejati	40.800.000,00
Pemagaran SDN Inpres Bala Desa Bala Kec Wera	CV. Pasir Putih	98.425.000,00
Penataan Halaman Sekolah SDN Runggu Kec Palibelo	CV. Akifah	98.425.000,00
Paving SDN Monta Kecamatan Monta	CV. Rayyan	49.200.000,00
Rehabilitasi RKB SDN Natu Desa Poja (2024)	CV. Perkasa Mandiri	2.195.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB (2024)	CV. Bimantara Konsultan	3.488.000,00
Konsultan Pengawas DAU (2024)	CV. Karya Jasa	34.900.000,00
Rehab Tata usaha SMPN 2 Wera (2024)	CV. Puncak Bersaudara	6.879.075,00
PUPR Kabupaten Bima		904.302.785,00
Rekonstruksi Ruas Jalan : Nata - Cenggu (Hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan : Sarita - SP.Oo (Hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan : SP.JP Kore - TPI (Hotmix), Rekonstruksi Ruas Jalan : Rekonstruksi Jalan Sarita - Wadukopa (Hotmix) , Rekonstruksi Ruas Jalan : Rasabou - Kananga (Hotmix) , Rekonstruksi Ruas Jalan : Tente - Godo (Jl. Jenderal Sudirman) (Hotmix)	PT. Citra Harapan Persada	481.317.237,00
Rekonstruksi Jembatan Leu	CV. Kukuh Harapan	302.415.000,00
Pembangunan DI Embung Parangina (2024)	CV. Cahaya	120.570.548,00
Jumlah		1.682.980.105,00

Tabel 5.197
Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Per 31 Desember 2025
		Utang Belanja Modal 2025	Utang Belanja Modal atas Kelebihan Realisasi Fisik Pekerjaan (Utang KDP) TA 2025	Utang Belanja Modal 2024	Pembayaran Utang Belanja Modal atas Kelebihan Realisasi Fisik Pekerjaan (Utang KDP) TA 2024	
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	47.462.075,00	0,00	485.200.000,00	0,00	0,00	778.677.320,00
		0,00	246.015.245,00			





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Per 31 Desember 2025
		Utang Belanja Modal 2025	Utang Belanja Modal atas Kelebihan Realisasi Fisik Pekerjaan (Utang KDP) TA 2025	Utang Belanja Modal 2024	Pembayaran Utang Belanja Modal atas Kelebihan Realisasi Fisik Pekerjaan (Utang KDP) TA 2024	
Dinas Kesehatan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	2.659.200.000,00		0,00	2.659.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.318.352.858,00	302.415.000,00	481.317.237,00		199.106.360,00	904.302.785,00
					998.675.950,00	
Total	4.025.014.933,00	302.415.000,00	1.212.532.482,00	2.659.200.000,00	1.197.782.310,00	1.682.980.105,00

Tabel 5.198
Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2025	Selisih
4.025.014.933,00	1.514.947.482,00	3.856.982.310,00	1.682.980.105,00	(2.342.304.828,00)

Penjelasan mutasi:

1. Penambahan senilai Rp302.415.000,00 merupakan penyelesaian Aset Gedung dan Bangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan.
2. Penambahan senilai Rp481.317.237,00 merupakan penyelesaian Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 yang belum terbayarkan.
3. Pengurangan senilai Rp2.659.200.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk pembayaran utang tahun 2024.
4. Pengurangan senilai Rp199.106.360,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk pembayaran utang tahun 2024.
5. Pengurangan senilai Rp998.675.950,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk pembayaran utang tahun 2024.
6. Utang Belanja Modal tahun 2024 senilai Rp120.570.548,00 belum terbayarkan per 31 Desember 2025.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.840.327.000,00 merupakan Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH), dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.199
Rincian atas Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Perangkat Daerah	Jenis Utang	Saldo Utang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah 2025 (Rp)	Mutasi Kurang 2025 (Rp)	Nilai Utang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Keterangan
Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	Kehutanan (PSDH)	11.993.000,00	0,00	0,00	11.993.000,00	KMK Nomor 44/KM.7/2024
	Perikanan	2.828.334.000,00	0,00	0,00	2.828.334.000,00	Tahun 2024
Jumlah		2.840.327.000,00	0,00	0,00	2.840.327.000,00	

Penjelasan:

Utang transfer DBH sebesar Rp2.840.327.000,00 merupakan akumulasi jumlah Utang transfer DBH dari tahun 2024 dan 2025 yang lebih salur oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Bima, sehingga dicatat sebagai kewajiban dan penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengurangi





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

transfer dana ke Pemerintah Kabupaten Bima. Namun per 31 Desember 2025 belum ada pengurangan transfer dana oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Bima yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 5.200
Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.3 Ekuitas

5.3.3.1 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.201
Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
EKUITAS				
Ekuitas	3.001.634.289.217,69	2.956.074.627.448,94	45.559.661.768,75	1,54
Ekuitas	3.001.634.289.217,69	2.956.074.627.448,94	45.559.661.768,75	1,54
Ekuitas	3.001.634.289.217,69	2.956.074.627.448,94	45.559.661.768,75	1,54
Jumlah	3.001.634.289.217,69	2.956.074.627.448,94	45.559.661.768,75	1,54

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.001.634.289.217,69 mengalami kenaikan sebesar Rp45.559.661.768,75 atau 1,54% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.956.074.627.448,94.

Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin 5.6.4.

5.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Jumlah Kewajiban dan Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.202
Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
Kewajiban dan Ekuitas	3.031.483.875.719,75	2.987.207.439.181,28	44.276.436.538,47	1,48
Kewajiban dan Ekuitas	3.031.483.875.719,75	2.987.207.439.181,28	44.197.435.631,67	1,48
Kewajiban dan Ekuitas	3.031.483.875.719,75	2.987.207.439.181,28	44.197.435.631,67	1,48
Jumlah	3.031.483.875.719,75	2.987.207.439.181,28	44.197.435.631,67	1,48

Kewajiban dan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan jumlah antara kewajiban





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

dan ekuitas pemerintah pada tanggal laporan. Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.031.483.875.719,75 mengalami kenaikan sebesar Rp44.197.435.631,67 atau 1,48% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.987.207.439.181,28.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 dan 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.203
Pendapatan Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LO	207.720.054.980,47	163.262.466.983,10
Pendapatan Transfer – LO	1.730.928.364.903,00	1.624.323.750.481,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	55.309.191.811,28	48.962.732.865,67
Jumlah	1.993.957.611.694,75	1.836.548.950.329,77

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 204
Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Daerah – LO	37.819.774.853,91	17.698.662.350,55
Retribusi Daerah – LO	20.831.870.098,32	16.620.395.583,91
Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	4.571.178.075,11	231.253.151,76
Lain - Lain PAD yang Sah – LO	144.497.231.953,13	128.712.155.896,88
Jumlah	207.720.054.980,47	163.262.466.983,10

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 205
Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Hotel – LO	0,00	1.025.924.341,55
Pajak Hotel-LO	0,00	1.025.924.341,55
Pajak Hotel-LO	0,00	1.025.924.341,55
Pajak Restoran – LO	0,00	200.338.943,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	23.247.762,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	23.247.762,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	130.241.581,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	130.241.581,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	46.849.600,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	46.849.600,00
Pajak Hiburan – LO	1.000.000,00	3.350.000,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	0,00	3.350.000,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	0,00	3.350.000,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO	1.000.000,00	0,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO	1.000.000,00	0,00
Pajak Reklame – LO	169.468.000,00	213.384.600,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	169.468.000,00	100.986.600,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	169.468.000,00	100.986.600,00
Pajak Reklame Kain-LO	0,00	112.398.000,00
Pajak Reklame Kain-LO	0,00	112.398.000,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	10.488.589.253,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	10.488.589.253,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	10.488.589.253,00
Pajak Parkir – LO	0,00	43.049.600,00
Pajak Parkir – LO	0,00	43.049.600,00
Pajak Parkir – LO	0,00	43.049.600,00
Pajak Air Tanah – LO	59.980.000,00	59.580.000,00
Pajak Air Tanah – LO	59.980.000,00	59.580.000,00
Pajak Air Tanah – LO	59.980.000,00	59.580.000,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	6.590.000,00	3.524.000,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	6.590.000,00	3.524.000,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	6.590.000,00	3.524.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	291.405.070,14	267.723.000,00
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	137.875.209,50	94.443.000,00
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	137.875.209,50	94.443.000,00
Pajak Tanah Liat-LO	69.655.288,64	50.639.000,00
Pajak Tanah Liat-LO	69.655.288,64	50.639.000,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	83.874.572,00	122.641.000,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	83.874.572,00	122.641.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.413.768.123,00	4.405.310.063,00
PBBP2-LO	4.413.768.123,00	4.405.310.063,00
PBBP2-LO	4.413.768.123,00	4.405.310.063,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	1.666.548.400,00	987.888.550,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1.666.548.400,00	987.888.550,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1.666.548.400,00	987.888.550,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	14.440.059.561,77	0,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	308.089.757,00	0,00
PBJT-Restoran-LO	288.028.017,00	0,00
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	20.061.740,00	0,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	12.909.014.222,00	0,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	12.909.014.222,00	0,00
PBJT-Hotel-LO	1.169.697.182,77	0,00
PBJT-Hotel-LO	1.169.597.182,77	0,00
PBJT-Vila-LO	100.000,00	0,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	49.808.400,00	0,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	49.808.400,00	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	3.450.000,00	0,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO	3.450.000,00	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	10.546.582.807,00	0,00
Opsen PKB-LO	10.546.582.807,00	0,00
Opsen PKB-LO	10.546.582.807,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Opser Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	6.224.372.892,00	0,00
Opser BBNKB-LO	6.224.372.892,00	0,00
Opser BBNKB-LO	6.224.372.892,00	0,00
Jumlah	37.819.774.853,91	17.698.662.350,55

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2025 sebesar Rp20.121.112.503,36 disebabkan hal-hal berikut:
Adanya penambahan nilai realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025, disebabkan karena diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah – LO antara lain:
 - Meningkatnya realisasi PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO sebesar Rp2.420.014.222,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 32, PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31.
 - Meningkatnya realisasi Opser PKB - LO sebesar Rp10.546.582.807,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 88, Opser PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.
 - Meningkatnya realisasi Opser BBNKB- LO sebesar Rp6.224.372.892,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 93, Opser BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.
 - Meningkatnya realisasi BPHTB-Pemindahan Hak-LO sebesar Rp678.659.850,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 12, BPHTB-Pemindahan Hak ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dihitung dari besaran Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, bahwa kewajiban pembayaran dan pelunasan BPHTB oleh wajib pajak harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses penandatanganan akta pemindahan hak atau peralihan tanah dan bangunan dilakukan.
- Pengakuan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pajak Daerah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp2.033.407.389,00 (Rp37.819.774.853,91 - Rp35.786.367.464,91). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 206
Penambahan dan Pengurangan Pajak Daerah Dalam LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	2.033.407.389,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2025	0,00
✓ Penambahan nilai Piutang Pajak Daerah Tahun 2025	3.466.196.743,40
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan nilai realisasi Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tahun 2025	83.939.885,40
✓ Pengurangan nilai realisasi Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2025	18.300.760,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Nilai (Rp)
✓ Pengurangan nilai realisasi Piutang PBJT-Tenaga Listrik Tahun 2025	1.330.548.709
Jumlah Penjelasan Selisih	2.033.407.389,00

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 207
Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum – LO	10.312.861.930,90	8.077.757.035,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	8.583.014.930,90	6.411.719.535,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	2.542.064.423,01	2.318.207.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	6.040.950.507,89	4.093.512.535,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	191.100.000,00	181.000.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	191.100.000,00	181.000.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	37.300.000,00	30.653.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	37.300.000,00	30.653.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.501.447.000,00	1.454.384.500,00
Retribusi Kios-LO	1.501.447.000,00	1.454.384.500,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	9.956.755.480,42	7.960.548.493,91
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	9.214.455.480,42	7.688.513.493,91
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	6.532.408.493,91
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	7.982.385.480,42	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	697.700.000,00	634.680.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	503.000.000,00	491.825.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	9.520.000,00	9.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	21.850.000,00	20.100.000,00
• Retribusi Terminal – LO	0,00	5.570.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	5.570.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	35.030.000,00	24.420.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	35.030.000,00	24.420.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	84.660.000,00	105.460.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	84.660.000,00	105.460.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	7.210.000,00	2.730.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	7.210.000,00	2.730.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	22.400.000,00	19.355.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	22.400.000,00	19.355.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	93.000.000,00	114.500.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	93.000.000,00	114.500.000,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	500.000.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	500.000.000,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	562.252.687,00	582.090.055,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	0,00	2.700.000,00
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO	0,00	2.700.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	542.290.687,00	579.390.055,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	542.290.687,00	579.390.055,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	19.962.000,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	19.962.000,00	0,00
Jumlah	20.831.870.098,32	16.620.395.583,91

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya penambahan nilai realisasi Retribusi Daerah - LO Tahun 2025, antara lain:
 - Meningkatnya realisasi Retribusi Jasa Umum yang disebabkan oleh:
 - Meningkatnya realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp19.962.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 144, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa, tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud diukur sesuai jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten Bima.
 - Meningkatnya realisasi Retribusi Penyewaan Tanah pada BPKAD sebesar Rp1.449.976.986,51 karena nilai penawaran atas sewa tanah yang tinggi yang disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat dalam mengikuti lelang sewa tanah,
 - b. Adanya penambahan nilai Penetapan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 yaitu penetapan Piutang Retribusi Kios.
2. Pengakuan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp135.605.035.867,58 (Rp156.436.905.965,90 – Rp20.831.870.098,32). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 208
Penambahan dan Pengurangan Retribusi Daerah Dalam LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	135.605.035.867,58
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LO terhadap LRA:	
✓ Penambahan nilai karena Kenaikan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.034.408.550,00
✓ Penambahan nilai karena Kenaikan Piutang Retribusi Kios berdasarkan penetapan piutang retribusi kios tahun 2025	633.947.000,00
✓ Penambahan nilai karena Kenaikan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Darah berdasarkan Penetapan Piutang Tahun 2025	450.000.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan nilai karena Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	417.639.707,00
✓ Pengurangan nilai karena reklasifikasi pendapatan retribusi ke Lain-Lain PAD Yang Sah	135.629.810.491,00
✓ Pengurangan nilai karena Pembayaran Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa atas lelang tanah/ properti investasi	1.675.941.219,58
Jumlah Penjelasan Selisih	135.605.035.867,58

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5. 209

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO		
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	8.441.338.073,10	86.979.561,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	8.441.338.073,10	86.979.561,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	265.391.028,02	144.273.590,76
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	265.391.028,02	144.273.590,76
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	(691.233.079,09)	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	(691.233.079,09)	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	(3.444.317.946,92)	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	(3.444.317.946,92)	0,00
Jumlah	4.571.178.075,11	231.253.151,76

Penjelasan:

- Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 disebabkan hal-hal berikut:
 - Untuk penerimaan deviden tahun 2024 sebesar Rp8.152.466.371,00 sudah tercatat semua di piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023. Deviden yang sudah diterima tahun 2024 yang tidak tercatat sebagai piutang Tahun 2023 sebesar Rp0,00.
 - Pengumuman Deviden Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera sebesar 50% dari laba bersih tahun 2025 Rp13.622.365,10
 - Penurunan nilai investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bima Sebesar Rp5.687.602.578,51 yang terdiri dari koreksi atas lebih catat catat nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp2.243.284.631,59 dan penurunan karena rugi tahun berjalan sebesar Rp3.444.317.946,92.
 - Pengakuan Laba/Rugi BUMD dengan metode ekuitas senilai Rp3.687.153.187,07 dengan rincian sebagai berikut:
 - Laba pada Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera sebesar Rp27.244.730,19;
 - Laba pada PT. Dana Surya Mandiri sebesar Rp455.229.000,00;
 - Rugi pada PT Bank Pesisir sebesar Rp725.308.970,34;
 - Rugi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bima Sebesar Rp3.444.317.946,92.
- Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp2.298.900.651,95 (Rp8.443.342.308,00 - Rp6.144.441.656,05). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.210

Penambahan dan Pengurangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	2.298.900.651,95
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Kenaikan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD	265.391.028,02





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Nilai (Rp)
✓ Penetapan Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	13.622.365,10
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Realisasi Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	15.626.600,00
✓ Penurunan nilai investasi pada BUMD PDAM	2.562.287.445,07
Jumlah Penjelasan Selisih	2.298.900.651,95

5.4.1.1.4 Lain - Lain PAD yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain PAD yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.211
Lain - Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	1.084.956.984,82	16.400.000,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	512.507.500,00	0,00
Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	512.507.500,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	572.449.484,82	16.400.000,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	0,00	0,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	572.449.484,82	16.400.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	500.000.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	0,00	500.000.000,00
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	0,00	500.000.000,00
Jasa Giro – LO	2.219.360.170,82	2.308.728.676,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.216.059.559,91	2.308.397.645,35
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.216.059.559,91	2.308.397.645,35
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	3.300.610,91	331.030,65
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	3.300.610,91	331.030,65
Pendapatan Bunga-LO	40.558.908,00	358.358.851,00
Pendapatan Bunga-LO	40.558.908,00	358.358.851,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	40.558.908,00	358.358.851,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	1.681.412.431,18	1.521.631.251,10
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.681.412.431,18	1.521.631.251,10
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.681.412.431,18	1.521.631.251,10
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	2.521.950.914,53	541.163.211,20
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.521.950.914,53	541.163.211,20
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.521.950.914,53	541.163.211,20
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	4.069.826.337,00
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	4.069.826.337,00
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	4.069.826.337,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	1.263.306.652,78	56.374.292,71
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.263.306.652,78	56.374.292,71
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.263.306.652,78	56.374.292,71





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	55.875.400,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-LO	55.875.400,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-LO	55.875.400,00	0,00
Pendapatan BLUD – LO	135.629.810.491,00	93.683.746.267,87
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	0,00
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	135.629.810.491,00	93.625.220.969,84
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	135.629.810.491,00	93.625.220.969,84
Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	0,00	2.378.577,05
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO	0,00	15.000,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat-LO	0,00	2.363.577,05
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	0,00	36.268.000,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	0,00	36.268.000,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	0,00	19.878.720,98
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	0,00	19.478.720,98
Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha-LO	0,00	400.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	0,00	25.655.927.010,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	25.655.927.010,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	25.655.927.010,00
Jumlah	144.497.231.953,13	128.712.155.896,88

Penjelasan:

1. Peningkatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO disebabkan karena pada Tahun 2025 terdapat proses lelang kendaraan operasional dinas Kabupaten Bima yang dilaksanakan oleh KPKNL dengan nilai penjualan sebesar Rp.512.507.500,00
2. Peningkatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO disebabkan karena adanya pengembalian atas belanja Hibah pemilihan Kepala Daerah/PILKADA TA. 2024 dari BAWASLU Kabupaten Bima sebesar Rp.1.004.681.403,00 dan KPU Kabupaten Bima sebesar Rp.888.569.933,00.
3. Peningkatan pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan disebabkan karena adanya setoran Dinas Perkim Atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung TA 2021 An. PT. Brahmakerta Adiwira KSO PT. Budi Mas (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB Nomor : 147.B/LHP/XIX.MTR/04/2022 Tanggal 27 April 2022) sebesar Rp. 784.355.837,95
4. Pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Lain-Lain PAD yang Sah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp135.604.767.975,82 (Rp144.497.231.953,13 – Rp 8.892.463.977,31). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain PAD yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.212
Penambahan dan Pengurangan Lain - Lain PAD
yang Sah-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	135.604.767.975,82
Penjelasan Selisih:	





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Nilai (Rp)
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penerimaan atas pengembalian yang telah diakui sebagai Tuntutan Ganti Kerugian pada tahun sebelumnya	572.449.484,82
✓ Pengurangan nilai karena reklasifikasi pendapatan retribusi ke Lain-lain PAD yang Sah	135.629.810.491,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Realisasi Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	592.492.000,00
✓ Adanya penyesuaian atas penyetoran PFK ke kas negara yang diakui sebagai pendapatan sebelumnya	5.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	135.604.767.975,82

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 213
Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.673.506.140.700,00	1.544.758.034.899,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	57.422.224.203,00	79.565.715.582,00
Jumlah	1.730.928.364.903,00	1.624.323.750.481,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini diuraikan landasan hukum atas Pendapatan Transfer Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025:

Tabel 5.214
Landasan Hukum Pendapatan Transfer Pusat Tahun 2025

Uraian	Dasar Ketetapan
DAU	PERPRES 76 TAHUN 2024
TAMBAHAN DAU	KMK NO. 416 TAHUN 2025
DAK FISIK	PERPRES 76 TAHUN 2024
DAK NON FISIK	PERPRES 76 TAHUN 2024
PERUBAHAN DAK NON FISIK KHUSUS GURU	KMK NO. 423 TAHUN 2025
DANA BAGI HASIL (DBH)	PERPRES 76 TAHUN 2024
DBH KURANGF BAYAR 2025	PMK 89 TAHUN 2025
DBH CHT	KEPUTUSAN GUBERNUR NTB NO. 976-697 TAHUN 2024
DBH CHT KURANGF BAYAR 2025	PMK 89 TAHUN 2025
DID	PERPRES 76 TAHUN 2024
HIBAH SANITASI	PERPRES 76 TAHUN 2024
DANA DESA	PERPRES 76 TAHUN 2024
INSENTIF DANA DESA	KMK NO. 352 TAHUN 2025
HIBAH RR	SURAT PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN 2025 NOMOR S-35/MK.7/2025

Penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.215
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Perimbangan – LO	1.673.506.140.700,00	1.537.926.359.899,00
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	169.172.380.300,00	48.937.222.000,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.160.437.521.669,00	1.069.970.219.836,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	38.820.786.519,00	160.918.308.551,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	305.075.452.212,00	258.100.609.512,00
Insentif Fiskal – LO	0,00	6.831.675.000,00
Jumlah	1.673.506.140.700,00	1.544.758.034.899,00

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

Penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Perimbangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.216
Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
• Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	169.172.380.300,00	48.937.222.000,00
DBH PBB-LO	9.307.790.500,00	4.003.892.000,00
DBH Pasal 21-LO	8.464.574.700,00	4.927.876.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	519.941.300,00	0,00
DBH CHT-LO	28.542.647.000,00	19.914.474.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent - LO	119.476.692.000,00	30.771.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	0,00	16.348.684.000,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	40.070.800,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	2.820.664.000,00	3.711.525.000,00
Jumlah	169.172.380.300,00	48.937.222.000,00

Penjelasan:

Perubahan nilai Dana Bagi Hasil (DBH) – LO Tahun 2025 disebabkan hal-hal berikut:

- Berdasarkan KMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2025, jumlah Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp3.689.964.000,00;
 - Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB sebesar Rp3.931.801.000,00;
 - Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp5.173.413.000,00;
 - Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Mineral dan Batuan (Minerba) - Landrent sebesar Rp63.034.000,00;
 - Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Mineral dan Batuan (Minerba) - Royalti sebesar Rp60.808.553.000,00;
 - Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp778.135.000,00
- Pengakuan Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Dana Bagi Hasil (DBH) dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp72.888.630.000,00 (Rp169.172.380.300,00 – Rp 96.283.750.300,00), yang dijelaskan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.217
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	72.888.630.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LO terhadap LRA:	
✓ Penambahan nilai Piutang atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) – LO Tahun 2025 berdasarkan KMK Nomor 120 Tahun 2025	72.888.630.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	72.888.630.000,00

5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Alokasi Umum - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.218
Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
• DAU-LO – LO	1.160.437.521.669,00	1.069.970.219.836,00
DAU-LO	1.160.437.521.669,00	1.069.970.219.836,00
Jumlah	1.160.437.521.669,00	1.069.970.219.836,00

Penjelasan:

Pengakuan Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2025 ini *sama dengan* saldo Dana Alokasi Umum (DAU) dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.160.437.521.000,00.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.219
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
• Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	343.896.238.731,00	419.018.918.063,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	38.820.786.519,00	160.918.308.551,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	3.148.176.626,00	2.347.347.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.302.654.637,00	28.114.129.400,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	601.319.213,00	16.991.369.507,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	118.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	2.302.533.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	24.877.729.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	10.045.864.500,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	0,00	4.026.071.844,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	24.687.308.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	10.246.210.800,00	13.369.758.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	8.944.708.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	11.831.210.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	1.738.418.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	1.213.413.000,00	9.628.451.300,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	0,00	1.895.411.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	20.553.589.226,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	1.755.423.017,00	0,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	305.075.452.212,00	258.100.609.512,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	64.560.515.296,00	67.248.099.927,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	169.105.638.900,00	115.201.405.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	631.500.000,00	2.095.750.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	7.165.154.700,00	6.012.065.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	0,00	677.230.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	10.364.523.676,00	8.338.766.470,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	422.194.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	8.588.206.000,00	6.611.193.000,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	379.118.430,00	529.255.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	0,00	934.970.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	325.366.500,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	482.486.170,00
DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.290.024.000,00	4.303.767.000,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	0,00	1.457.415.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	2.528.750.000,00	2.825.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	15.691.684.770,00	16.874.108.093,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	45.000.000,00	90.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.994.739.350,00	2.738.457.800,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	180.000.000,00	135.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	21.128.403.090,00	21.220.274.552,00
Jumlah	343.896.238.731,00	419.018.918.063,00

Penjelasan:

Pengakuan Dana Khusus (DAK) - LO Tahun 2025 ini *sama dengan* saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp343.896.238.731,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LO

Penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.220
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	0,00	6.831.675.000,00
• Insentif Fiskal – LO	0,00	6.831.675.000,00
Jumlah	0,00	6.831.675.000,00

5.4.1.2.2.1 Insentif Fiskal – LO

Penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Insentif Fiskal - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Insentif Fiskal - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.221
Insentif Fiskal - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Insentif Fiskal – LO	0,00	6.831.675.000,00
Insentif Fiskal – LO	0,00	6.831.675.000,00
Insentif Fiskal-LO	0,00	6.831.675.000,00
Jumlah	0,00	6.831.675.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Penjelasan:

Pendapatan Insentif Fiskal-LO Tahun 2025 dan Pendapatan Insentif Fiskal – LRA Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp. 6.831.675.000,00. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bima tidak mendapatkan alokasi Insentif Fiskal pada Tahun 2025.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah di dasari dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor: 100.3.3.1-60 Tahun 2026 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan IV dan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kabupaten/Kota SeNusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.222
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	57.231.224.203,00	79.565.715.582,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	1.195.994.778,00	13.002.613.582,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	888.429.518,00	8.710.649.879,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	24.598.566.592,00	28.062.474.537,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	38.690.056,00	38.581.131,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	30.509.543.259,00	29.751.396.453,00
Bantuan Keuangan – LO	191.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	191.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	191.000.000,00	0,00
Jumlah	57.422.224.203,00	79.565.715.582,00

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Bagi Hasil - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.223
Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	57.231.224.203,00	79.565.715.582,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	1.195.994.778,00	13.002.613.582,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	888.429.518,00	8.710.649.879,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	24.598.566.592,00	28.062.474.537,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	38.690.056,00	38.581.131,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	30.509.543.259,00	29.751.396.453,00
Jumlah	57.231.224.203,00	79.565.715.582,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Bagi Hasil dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp6.913.556.548,00 (Rp57.231.224.203,00 – Rp64.144.780.751,00).





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.224
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	6.913.556.548,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LO terhadap LRA:	
✓ Penambahan nilai Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2025	6.606.926,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Realisasi Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2024	1.078.571.050,00
✓ Realisasi Piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2024	765.990.662,00
✓ Realisasi Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2024	5.075.601.762
Jumlah Penjelasan Selisih	6.913.556.548,00

5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.225
Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bantuan Keuangan	191.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	191.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	191.000.000,00	0,00
Jumlah	191.000.000,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dalam LO Tahun 2025 ini *sama dengan* saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp191.000.000,00.

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Biaya Notaris Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi NTB Tahun 2025.

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.226
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	28.984.670.518,28	32.818.843.345,67
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	26.324.521.293,00	16.143.889.520,00
Jumlah	55.309.191.811,28	48.962.732.865,67





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.227
Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	19.325.241.075,00	24.362.201.274,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	19.325.241.075,00	24.362.201.274,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	19.325.241.075,00	24.362.201.274,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	9.659.429.443,28	8.456.642.071,67
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	9.659.429.443,28	8.456.642.071,67
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	9.659.429.443,28	8.456.642.071,67
Jumlah	28.984.670.518,28	32.818.843.345,67

Penjelasan:

- Pendapatan Hibah dari pemerintah Pusat terdiri dari :
 - Pendapatan Hibah Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa IKK Sanggar Kabupaten Bima, IKK Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan IKK Maria Kabupaten Bima dari kementerian PUPR pada Dinas PUPR Kabupaten Bima.
 - Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan berupa Pasar Sape dari Kementerian Perdagangan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.
 - Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin berupa dua unit Traktor Roda Empat dari Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima.
 - Pendapatan Hibah Peratan dan Mesin berupa Alat Kantor, Meubeler dan Komputer dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima.
 - Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima.
 - Pendapatan Hibah Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima.
- Perubahan nilai Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya– LO Tahun 2025 disebabkan oleh adanya penambahan Hibah berupa Aset Lancar – Persediaan Pakai Habis dari Pemerintah Provinsi yaitu Obat Buffer kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
- Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp28.984.670.518,28 (Rp28.984.670.518,28 – Rp 0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.228
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Hibah Dalam LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	28.984.670.518,28
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Pendapatan Hibah persediaan dari Provinsi	9.659.429.443,28
✓ Penambahan Pendapatan hibah aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Kementrian PUPR	12.678.802.475,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Nilai (Rp)
✓ Penambahan Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Energi Sumberdaya dan Mineral	760.732.667,00
✓ Penambahan Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementerian Energi Sumberdaya dan Mineral	2.390.014.033,00
✓ Penambahan Pendapatan Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian Energi Sumberdaya dan Mineral	131.570.300,00
✓ Penambahan Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan di Pasar Sape dari Kementerian Perdagangan	2.825.323.600,00
✓ Penambahan Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pertanian	538.798.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	28.984.670.518,28

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.229
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	26.324.521.293,00	16.143.889.520,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO	26.324.521.293,00	16.143.889.520,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi - LO	26.324.521.293,00	16.143.889.520,00
Jumlah	26.324.521.293,00	16.143.889.520,00

Penjelasan:

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 ini **sama dengan** saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO dalam LRA Tahun 2025 yaitu sebesar Rp26.324.521.293,00 yang merupakan kontribusi dari pt amman mineral nusa tenggara atas laba bersih untuk tahun buku 2024.

5.4.2 Beban Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.230
Beban Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Operasional	1.818.584.336.797,68	1.825.859.684.513,54
Beban Transfer	131.944.207.374,00	110.150.004.555,00
Jumlah	1.950.528.544.171,68	1.936.009.689.068,54





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.231
Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pegawai	1.062.582.069.447,00	955.957.751.085,10
Beban Barang dan Jasa	494.255.716.638,64	598.861.003.141,15
Beban Hibah	34.845.228.077,50	63.197.226.557,00
Beban Bantuan Sosial	1.684.000.000,00	1.386.600.000,00
Beban Penyisihan Piutang	4.435.661.330,18	5.564.395.155,56
Beban Penyusutan dan Amortisasi	220.781.661.304,36	200.892.708.574,73
Jumlah	1.818.584.336.797,68	1.825.859.684.513,54

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bima digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.232
Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	726.487.717.742,00	644.239.279.889,00
Beban Gaji Pokok ASN	562.084.786.902,00	502.353.195.465,00
Beban Gaji Pokok PNS	351.081.395.839,00	366.518.895.640,00
Beban Gaji Pokok PPPK	211.003.391.063,00	135.834.299.825,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	49.127.634.447,00	43.547.582.254,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	32.909.715.841,00	34.543.076.642,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	16.217.918.606,00	9.004.505.612,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.439.035.000,00	7.258.295.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.439.035.000,00	7.258.295.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	27.141.088.336,00	27.712.448.091,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	27.141.088.336,00	27.712.448.091,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.725.967.915,00	11.649.951.568,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.347.850.000,00	3.721.161.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.378.117.915,00	7.928.790.568,00
Beban Tunjangan Beras ASN	29.935.762.285,00	26.070.530.944,00
Beban Tunjangan Beras PNS	17.756.231.870,00	18.872.130.784,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	12.179.530.415,00	7.198.400.160,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.266.214.333,00	933.223.356,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.266.214.333,00	933.223.356,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	8.583.314,00	7.758.188,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.260.230,00	4.754.085,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.323.084,00	3.004.103,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.083.875.968,00	20.705.789.371,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.031.757.839,00	15.105.754.593,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.052.118.129,00	5.600.034.778,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.168.563.719,00	1.032.767.474,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	720.791.595,00	765.753.722,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	447.772.124,00	267.013.752,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.506.205.523,00	2.967.547.425,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.162.938.876,00	2.254.610.079,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.343.266.647,00	712.937.346,00
Beban Tunjangan Khusus*)	0,00	190.753,00
Beban Tunjangan Khusus*)	0,00	190.753,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	245.978.936.554,20	55.183.987.177,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	24.682.688.881,00	24.870.277.500,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	24.682.688.881,00	24.870.277.500,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.470.000,00	35.855.848,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	21.470.000,00	35.855.848,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	215.032.925,00	45.087.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	215.032.925,00	45.087.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	29.808.242.143,00	30.232.766.829,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	29.808.242.143,00	30.232.766.829,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.251.502.605,20	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	169.336.265.900,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	8.687.932.700,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.002.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.225.304.005,20	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.642.909.388,80	176.207.163.686,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	106.709.400,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	106.709.400,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	141.280.556.800,00
Beban TPG PNSD	0,00	141.280.556.800,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	4.497.526.800,00
Beban TKG PNSD	0,00	4.497.526.800,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	2.049.000.000,00
Beban Tamsil Guru PNSD	0,00	2.049.000.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	67.642.909.388,80	11.915.110.286,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	67.642.909.388,80	11.915.110.286,00
Beban Honorarium	0,00	5.950.312.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	5.710.100.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	217.112.000,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	23.100.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	17.820.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	17.820.000,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	10.068.878.400,00
Beban TPG PPPK	0,00	10.068.878.400,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	321.250.000,00
Beban Tamsil Guru PPPK	0,00	321.250.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.546.930.724,00	20.764.023.279,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.002.330.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.002.330.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	96.579.000,00	102.220.020,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	96.579.000,00	102.220.020,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	79.626.960,00	76.882.680,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	79.626.960,00	76.882.680,00
Beban Uang Paket DPRD	100.401.000,00	100.264.500,00
Beban Uang Paket DPRD	100.401.000,00	100.264.500,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.453.378.500,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.453.378.500,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	136.294.200,00	113.989.575,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	136.294.200,00	113.989.575,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.433.750.000,00	5.103.000.000,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.433.750.000,00	5.103.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.275.750.000,00	1.275.750.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.275.750.000,00	1.275.750.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	135.131.976,00	174.685.978,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	135.131.976,00	174.685.978,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.941.573.088,00	6.048.557.026,00
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	78.311.520,00	75.319.650,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.059.344,00
Beban Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	6.178.032,00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	5.855.000.000,00	5.965.000.000,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.888.000.000,00	4.900.000.000,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.888.000.000,00	4.900.000.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	412.965.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	412.965.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.575.038,00	163.186.170,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.780.000,00	3.612.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.780.000,00	3.612.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.459.260,00	5.069.400,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.459.260,00	5.069.400,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	524.678,00	654.010,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	524.678,00	654.010,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.180,00	1.640,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.180,00	1.640,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.480.640,00	894.240,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.480.640,00	894.240,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	18.720,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	18.720,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	56.160,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	56.160,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	752.000.000,00	710.000.000,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	210.000.000,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	210.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	500.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	500.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	0,00	58.871.257.150,10
Beban Pegawai BLUD	0,00	58.871.257.150,10
Beban Pegawai BLUD	0,00	58.871.257.150,10
Jumlah	1.062.582.069.447,00	955.957.751.085,10

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai beban dari belanja pegawai Tahun 2025 disebabkan oleh meningkatnya alokasi DAU *Earmark* untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
 - Penambahan nilai utang belanja pegawai Tahun 2025; dan
 - Pengurangan nilai pembayaran utang belanja pegawai;
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp2.848.289.472,00 (Rp1.062.582.069.447,00–Rp1.059.733.779.975,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.233
Penambahan dan Pengurangan Beban Pegawai Dalam LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	2.848.289.472,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai utang Belanja Pegawai Tahun 2025	4.404.507.388,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	1.313.319.253,00
✓ Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	129.643.267,00
✓ Pengembalian atas belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan tahun 2025	113.255.396,00
Jumlah Penjelasan Selisih	2.848.289.472,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.234
Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang	260.660.523.480,38	226.283.919.825,80
Beban Barang Pakai Habis	257.670.252.551,39	226.283.919.825,80
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	273.987.350,00	295.087.184,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bahan-Bahan Kimia	9.897.352.067,54	396.055.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.770.360.091,00	5.019.448.287,00
Beban Bahan-Bahan Baku	193.162.275,00	7.810.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.919.221.402,83	1.128.090.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	447.862.875,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	72.228.150,00	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.220.000,00	199.700.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	206.601.085,00	183.348.300,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.487.980.215,00	2.551.654.343,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	33.360.000,00	10.055.060,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	96.170.700,00	28.856.350,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.323.672.937,66	2.184.935.906,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.744.420.447,48	3.345.044.192,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.538.420.206,72	7.857.841.065,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.065.872.669,27	474.367.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	41.759.450,00	167.945.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.562.863.284,00	1.427.437.727,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.744.109.778,79	604.494.483,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	889.583.753,00	686.730.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	369.190.160,00	538.340.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	64.824.000,00	80.971.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.114.588.923,81	238.158.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	889.597.254,00	317.937.269,00
Beban Obat-Obatan-Obat	30.923.967.479,00	3.567.564.564,98
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.229.914.054,77	2.628.916.931,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	101.503.892.321,00	158.086.652.495,82
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	247.670.000,00	1.221.618.000,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	7.159.538.406,00	4.337.620.499,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya		97.635.000,00
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	94.002.000,00	7.700.000,00
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	24.223.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.980.558.095,00	17.065.367.564,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.264.936.513,52	6.551.827.520,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	975.943.340,00	31.400.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.962.162.602,00	1.746.468.180,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	646.389.900,00	328.550.000,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	152.547.000,00	152.147.000,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	156.942.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.203.320,00	23.979.000,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	206.379.000,00	195.667.310,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.187.000,00	89.335.000,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.379.000,00	19.485.000,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	3.108.000,00	79.360.000,00
Beban Pakaian Adat Daerah	287.115.500,00	374.476.250,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	1.883.373.794,00	444.372.315,00
Beban Pakaian Olahraga	246.588.150,00	510.495.800,00
Beban Pakaian Paskibraka	24.988.000,00	23.754.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang Tak Habis Pakai	336.000,00	0,00
Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	336.000,00	0,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.989.934.928,99	774.054.230,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	350.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	600.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.417.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	0,00	2.000.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	675.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.507.148.565,99	12.694.800,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	381.700.000,00	2.730.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.546.000,00	19.999.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.060.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2.400.930,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.974.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.850.000,00	1.700.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	22.000.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	13.553.433,00	22.330.430,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	6.660.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.000.000,00	4.900.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	0,00
Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	99.700.000,00
Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	398.500.000,00
Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	199.500.000,00
Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	0,00	10.000.000,00
Beban Jasa	189.488.863.155,75	156.161.509.731,00
Beban Jasa Kantor	104.150.517.031,80	84.901.534.553,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	144.758.500,00	103.630.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.511.193.650,00	2.223.256.400,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.783.430.960,00	5.029.216.500,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	156.690.000,00	210.600.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	242.500.000,00	405.750.000,00
Beban Honorarium Rohaniwan	0,00	400.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.200.000,00	12.370.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	267.150.000,00	237.950.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	336.200.000,00	303.100.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	25.222.841.259,52	10.720.400.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	19.376.558.763,86	18.356.961.995,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	16.800.000,00	138.280.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	309.160.729,00	536.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.138.700.000,00	7.443.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.316.200.000,00	1.355.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.101.349.000,00	1.005.850.000,00
Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	22.800.000,00	14.999.900,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	90.000.000,00	34.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.565.350.000,00	595.880.000,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	27.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	239.100.000,00	390.700.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.434.980.000,00	10.782.090.000,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	265.100.000,00	2.413.384.000,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	761.920.000,00	824.700.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	887.800.000,00	1.464.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.039.576.000,00	1.897.350.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.192.100.000,00	741.275.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	714.250.000,00	448.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	218.800.000,00	110.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	18.280.000,00	500.000,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	540.750.000,00	491.000.000,00
Beban Jasa Tata Rias	7.492.500,00	7.492.500,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	170.841.000,00	10.000.000,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	220.554.408,00	51.338.416,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	105.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	219.265.491,00	222.629.214,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	631.900.000,00	698.135.000,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	43.300.000,00	131.040.000,00
Beban Jasa Kalibrasi	105.448.000,00	90.792.000,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	457.488.620,42	137.715.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	669.144.200,00	701.850.000,00
Beban Tagihan Telepon	291.029.326,00	293.446.138,00
Beban Tagihan Air	22.594.105,00	10.797.000,00
Beban Tagihan Listrik	6.704.065.766,00	5.071.823.989,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	243.098.000,00	385.345.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.697.694.802,00	2.291.686.255,00
Beban Paket/Pengiriman	541.975.288,00	573.851.970,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	360.793.413,00	273.276.476,00
Beban Lembur	5.292.238.350,00	5.298.871.800,00
Beban Medical Check Up	301.350.000,00	330.000.000,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	4.936.233.500,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	210.471.400,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	53.993.759.763,00	44.897.490.102,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	525.445.735,00	198.418.477,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	48.932.867.700,00	44.342.153.308,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.005.486.800,00	140.540.500,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	170.369.118,00	102.753.957,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.598.410,00	113.623.860,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	99.400.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	67.592.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.910.675.900,62	3.227.410.100,00
Beban Sewa Excavator	0,00	493.700.000,00
Beban Sewa Electric Generating Set	45.000.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	693.821.635,62	565.123.500,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	95.974.000,00	36.300.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	29.600.000,00	2.500.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	34.200.000,00
Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	1.000.000,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.002.601.685,00	1.166.366.600,00
Beban Sewa Mebel	443.324.580,00	420.280.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	4.800.000,00	8.400.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	78.990.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	571.956.000,00	419.375.000,00
Beban Sewa Alat Komunikasi Satelit	1.500.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM	1.198.000,00	1.175.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	20.900.000,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	587.050.133,33	864.852.549,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	20.750.000,00
Beban Sewa Bangunan Kesehatan	61.000.000,00	76.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.540.800,00	155.047.549,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	0,00	10.000.000,00
Beban Sewa Taman	41.400.000,00	9.075.000,00
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	193.333.333,33	0,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	151.546.000,00	0,00
Beban Sewa Asrama	0,00	50.000.000,00
Beban Sewa Hotel	104.230.000,00	418.980.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	125.000.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	30.000.000,00
Beban Sewa Audio Visual	0,00	30.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.870.371.397,00	6.945.074.200,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	49.900.050,00	164.812.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.157.310.200,00	1.469.074.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	761.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	271.672.000,00	201.260.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	74.800.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	751.883.000,00	1.507.630.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	192.240.000,00	329.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	248.643.000,00	199.589.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	130.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.710.669.267,00	1.343.986.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	14.972.000,00	660.983.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	212.212.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	251.991.000,00	88.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	8.878.880,00	13.740.200,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	253.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	253.000.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	374.600.000,00	334.600.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	374.600.000,00	324.650.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	0,00	9.950.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	533.158.221,00	1.630.608.400,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	510.658.221,00	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	7.500.000,00	1.630.608.400,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	15.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.956.418.446,00	12.891.468.827,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	6.842.994.320,00	6.471.180.707,00
Beban Sosialisasi	2.577.283.080,00	2.820.966.120,00
Beban Bimbingan Teknis	11.536.141.046,00	3.599.322.000,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	112.312.263,00	185.471.000,00
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	112.312.263,00	185.471.000,00
Beban Pemeliharaan	7.862.074.220,99	3.293.867.774,00
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	154.500.000,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	154.500.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.018.244.920,13	1.291.970.764,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	0,00	35.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	111.573.977,00	231.961.750,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	270.957.551,00	156.277.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	410.000,00	3.785.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	199.337.000,00	165.927.270,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	15.757.599,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	91.569.500,00	29.981.100,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	156.457.519,13	27.742.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	82.657.000,00	73.458.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	125.502.980,00	10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	395.751.674,00	142.400.196,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49.774.590,00	2.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	25.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	6.360.000,00	10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	278.955.600,00	164.380.750,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	55.476.675,00	4.500.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	34.955.750,00	45.236.250,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	67.886.505,00	136.386.000,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	49.861.000,00	19.976.448,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	22.960.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	9.999.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.642.415.300,86	1.485.279.010,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.023.628.955,86	1.109.819.010,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	20.000.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	100.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	49.200.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0,00	68.500.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	79.574.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	347.790.000,00	148.030.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	54.800.000,00	79.630.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	10.993.345,00	10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	125.629.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	201.414.000,00	198.368.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	201.414.000,00	198.368.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	159.750.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak		
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket,	0,00	159.750.000,00
Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah		
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	4.000.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	4.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	28.228.766.463,52	43.981.294.905,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.228.766.463,52	43.981.294.905,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.560.013.600,00	15.875.345.348,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55.980.000,00	662.710.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.612.772.863,52	27.443.239.557,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	8.015.489.318,00	27.036.668.332,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.248.745.264,00	22.080.677.500,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.924.198.264,00	714.314.500,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	118.447.000,00	935.913.000,00
Beban Beasiswa	200.000.000,00	133.000.000,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	6.100.000,00	157.450.000,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	20.140.000.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.766.744.054,00	4.955.990.832,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.361.987.554,00	4.684.108.332,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	404.756.500,00	271.882.500,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	58.506.661.122,42
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	58.506.661.122,42
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	58.506.661.122,42
Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	800.472.738,85
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	0,00	687.142.738,85
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	687.142.738,85
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	113.330.000,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	113.330.000,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	82.796.608.712,08
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	82.796.608.712,08
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	82.796.608.712,08
Jumlah	494.255.716.638,64	598.861.003.141,15

Penjelasan:

1. Penurunan Beban Barang dan Jasa disebabkan oleh pengurangan Transfer Ke Daerah yang berakibat efisiensi terhadap Belanja Daerah, adapun penurunan Beban tersebut antara lain :
 - Penurunan Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.56.582.760.174,82 dari tahun sebelumnya.
 - Penurunan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp.15.752.528.441,48 dari tahun sebelumnya.
 - Penurunan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebesar Rp.19.021.179.014,00 dari tahun sebelumnya.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp. 5.459.139.351,70 (Rp. 494.255.716.638,64 – Rp. 488.796.577.286,94), yang dijelaskan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.235
Penambahan dan Pengurangan Beban Barang dan Jasa Dalam LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	5.459.139.351,70
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai beban barang dan jasa dari ekstrakom atas Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi	682.468.748,00
✓ Penambahan nilai beban barang dan jasa dari pemakaian saldo persediaan	23.820.443.030,27
✓ Penambahan nilai beban barang dan jasa dari pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme utang	89.818.810,00
✓ Penambahan nilai beban barang dan jasa dari reklasifikasi Belanja Tak Terduga	2.347.180.910,71
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan nilai beban barang dan jasa karena reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan	7.510.027,72
✓ Pengurangan nilai beban barang dan jasa untuk mencatat sisa saldo persediaan akhir tahun	21.473.262.119,56
Jumlah Penjelasan Selisih	5.459.139.351,70

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.236
Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.767.505.232,00	23.346.748.764,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	23.346.748.764,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	23.346.748.764,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.667.505.232,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.667.505.232,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.615.695.035,00	17.314.500.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	790.000.000,00	11.552.500.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	790.000.000,00	11.552.500.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.005.695.035,00	5.022.300.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.440.000.000,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.565.695.035,00	5.022.300.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	720.000.000,00	550.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	720.000.000,00	550.000.000,00
Beban Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	877.637.000,00	794.052.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	877.637.000,00	794.052.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	877.637.000,00	794.052.000,00
Beban Hibah Dana BOSP	20.460.045.420,00	21.831.625.793,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	2.374.751.300,00	2.902.666.650,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	2.374.751.300,00	2.902.666.650,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	15.046.384.770,00	16.180.211.343,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	15.046.384.770,00	16.180.211.343,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.038.909.350,00	2.748.747.800,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.038.909.350,00	2.748.747.800,00
Beban Hibah Barang kepada BUMDesa	124.345.390,50	0,00
Beban Hibah Barang kepada BUMDesa	124.345.390,50	0,00
Beban Hibah Barang kepada BUMDesa	124.345.390,50	0,00
Jumlah	34.845.228.077,50	63.197.226.557,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penurunan nilai Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dari tahun sebelumnya sebesar Rp.23.246.748.764,00, karena pada Tahun 2024 terdapat hibah uang ke KPU dan BAWASLU Kabupaten Bima untuk membiayai kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah
- Pengakuan Beban Hibah - LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp. 4.679.906.092,50 (Rp. 34.845.228.077,50 – Rp. 30.165.321.985,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.237
Penambahan dan Pengurangan Beban Hibah Dalam LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	4.679.906.092,50
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai Beban Hibah atas Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Kementerian Agama dari BAPPEDA Kabupaten Bima	4.667.505.232,00
✓ Penambahan nilai Beban Hibah atas Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Desa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bima	124.345.390,50
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan nilai Beban Hibah karena belanja tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada YPIP Dinas Dikbudpora	46.420.000,00
✓ Pengurangan nilai Beban Hibah karena belanja tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Berita Kabar NTB Dinas Diskominfo	512.000,00
✓ Pengurangan nilai Beban Hibah atas Aset Tetap Berupa Laptop yang dikeluarkan dari Belanja Hibah, karena perbedaan jumlah realisasi dan perencanaan untuk mencatat sisa saldo persediaan akhir tahun	65.012.530,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.679.906.092,50

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.238
Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	1.233.000.000,00	1.176.600.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.233.000.000,00	1.176.600.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.233.000.000,00	1.176.600.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	396.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	396.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	396.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000,00	210.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000,00	210.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000,00	210.000.000,00
Jumlah	1.684.000.000,00	1.386.600.000,00

Penjelasan:

1. Peningkatan Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena pada Tahun 2025 terdapat alokasi anggaran bantuan Pendidikan bagi pelajar/mahasiswa Kabupaten Bima.
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp. 1.233.000.000,00 (Rp. 1.684.000.000,00 – Rp. 451.000.000,00), yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.239
Penambahan dan Pengurangan Beban Bantuan Sosial Dalam LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	1.233.000.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai Beban Bantuan Sosial dari Beban Luar Biasa berupa Bantuan Uang untuk masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Bima	1.233.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.233.000.000,00

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dihitung Sendiri oleh wajib Pajak (*self assessment*) dan piutang pajak yang penghitungan/penetapan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun dihitung sebesar 0,5%;
- (b) Kualitas Kurang lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun dihitung sebesar 10%;
- (c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun dihitung sebesar 50%;
- (d) Kualitas Macet dihitung sebesar 100%, dengan kriteria:
 - Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib Pajak meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Sementara Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- (a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan dihitung 0,05%;
- (b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dihitung sebesar 10%;
- (c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dihitung sebesar 50%;
- (d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan dihitung sebesar 100%.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.240
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.846.190.071,68	5.213.892.488,06
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	538.211,18
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	538.211,18
Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	5.051.115,14
Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	0,00	5.051.115,14
Beban Penyisihan Pajak Hiburan	0,00	50.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	50.000,00
Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	7.143.933,79
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	0,00	4.802.618,21
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Kain	0,00	2.341.315,58
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	1.470.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	1.470.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	12.190,01
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Liat	0,00	12.190,01
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.846.190.071,68	5.199.627.037,94
Beban Penyisihan Piutang PBBP2	3.846.190.071,68	5.199.627.037,94
Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	589.471.258,50	277.648.122,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	296.971.258,50	277.648.122,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.208.846,00	277.648.122,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	293.762.412,50	277.648.122,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	292.500.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah	292.500.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	0,00	72.854.545,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	67.500.000,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	67.500.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	5.354.545,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	5.354.545,00
Jumlah	4.435.661.330,18	5.564.395.155,56

Penjelasan:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penerimaan atas piutang Retribusi Daerah yang telah disisihkan (RSUD Bima);
 - b. Penerimaan atas piutang Retribusi Daerah yang telah disisihkan (Bappenda);
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2025 ke Tahun 2024 dalam LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.438.187,97 (4.435.661.330,18 - (Rp31.354.951.984,23 - Rp26.845.727.935,22)). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.241
Penambahan dan Pengurangan Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	5.438.187,97
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Penyisihan Piutang:	
Penerimaan atas piutang Retribusi Daerah yang telah disisihkan (RSUD)	5.354.545,00
Penerimaan atas piutang Retribusi Daerah yang telah disisihkan (Bappenda)	83.642,97
Jumlah Penjelasan Selisih	5.438.187,97

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya:

- 1) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- 2) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun Akumulasi Amortisasi yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai Beban Amortisasi.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.242
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.426.376.629,56	72.882.964.186,73
Beban Penyusutan Alat Besar	1.256.048.223,91	814.523.994,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	35.188.858,66	16.895.592,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	288.419.415,42	288.418.392,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	186.269.700,00	153.832.200,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	337.332,00	337.332,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	82.691.280,00	82.691.280,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	136.272,00	136.272,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	25.763.856,00	25.763.856,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	1.351.692,00	1.262.892,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Feeder	126.000.000,00	126.000.000,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Compressor	2.083.425,00	2.744.784,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	132.548.395,49	110.008.663,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	2.003.640,00	2.091.575,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	66.960.666,67	384.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	295.408.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	1.939.200,00	1.939.200,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	5.094.592,00	194.592,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	325.166,67	0,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	3.526.732,00	1.823.364,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	8.431.138.889,78	7.620.965.467,99
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.163.666.755,14	843.203.518,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	594.124.936,06	842.153.337,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	314.027.399,10	276.289.412,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	836.034.588,30	1.320.762.104,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.896.893,14	3.504.036,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.303.663.558,38	4.080.248.086,99
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	33.351.460,63	33.258.591,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	31.345.510,86	51.050.696,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	18.655.732,17	15.958.896,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	126.372.056,00	154.536.791,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	343.391.986,01	536.187.231,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	45.779.879,10	14.514.115,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	3.760.410,00	3.928.140,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	24.831.262,38	25.176.780,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	4.596.227,86	5.548.944,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	9.376.776,00	11.110.608,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	-	4.122.720,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	335.066,00	804.144,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	15.491.628,86	17.182.387,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	550.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	2.904.200,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	668.304,00	22.290.894,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	970.584,00	668.304,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja		2.616.625,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	0,00	3.292.073,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	384.000,00	384.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	3.702.108,00	5.165.484,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	33.072.789,67	40.109.016,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	101.778.781,80	125.543.301,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	600.000,00	600.000,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	1.218.211,18	594.192,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	183.333,33	2.028.581,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	15.808.980,00	45.082.851,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	54.847.208,50	106.641.420,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	15.297.103,33	31.023.120,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	0,00	61.417.000,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	5.792.532,00	5.792.532,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	1.992.600,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	981.613.106,90	1.139.131.175,02
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.786.696,00	6.992.520,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	116.398.534,83	277.963.313,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	627.697.910,40	705.931.063,02
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	39.672.492,00	27.732.916,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	1.583.592,00	5.212.287,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	34.710.819,67	5.200.000,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	117.449.242,00	72.785.256,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	37.313.820,00	37.313.820,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.478.976.912,74	11.375.450.345,93
Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	481.476,00	481.476,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	15.696.868,44	3.885.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	17.741.595,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.547.726.964,32	1.669.889.341,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.559.734.922,37	1.537.435.274,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	4.480.181.969,74	4.405.310.928,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	484.368,00	1.553.818,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	128.905.273,14	146.224.256,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.360.473.100,75	1.526.907.175,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	32.053.853,03	30.471.016,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.294.420.365,14	1.317.697.747,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.663.262.588,44	229.780.313,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	71.543.322,12	79.409.608,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	51.886.932,85	65.507.109,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	151.045.675,40	172.126.021,93
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	1.690.260,00	1.690.260,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	75.565,00	4.322.152,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	24.733.218,00	34.372.528,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	94.580.190,00	130.644.728,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.141.310.190,35	1.126.012.552,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	130.072.885,10	162.751.945,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	431.279.055,36	578.541.457,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	490.000,00	122.499,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	152.438.917,33	9.144.687,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	30.998.381,67	22.069.395,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	27.142.855,60	25.456.548,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	38.904.291,28	14.185.005,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	5.091.548,00	11.199.271,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	6.048.511,68	20.002.342,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	4.577.786,67	3.600.008,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	7.232.316,00	7.232.316,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	48.157.608,00	20.431.157,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	389.640,00	389.640,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	0,00	32.223.460,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	997.716,00	997.716,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Tinggi	4.708,33	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	4.101.384,00	4.101.384,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	1.050.500,00	1.564.874,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	252.122.085,33	211.788.848,00
Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequency Omni Range (VOR)	210.000,00	210.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.090.272.332,95	31.255.951.529,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	10.976.559.645,93	11.679.800.659,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	223.673.928,23	278.733.274,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	13.871.471,00	113.998.059,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	3.203.872.414,38	3.172.149.424,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.769.285.310,70	2.139.712.440,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	361.539.633,20	337.791.191,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	74.051.937,67	71.221.839,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.150.456.956,07	3.054.662.370,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	4.224.864,00	4.224.864,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	2.463.284.574,20	2.449.448.138,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	134.140.036,00	258.519.086,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	138.015.814,00	201.468.788,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	920.172.732,00	871.426.594,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	1.000.229.625,73	1.080.792.473,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	540.875.524,00	851.122.508,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	51.750.000,00	50.825.880,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	217.467.384,00	217.467.384,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	546.848.928,00	738.555.610,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	80.269.021,68	27.336.608,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	474.934.272,00	1.118.304.241,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	30.095.837,67	5.603.388,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	595.753.752,00	595.753.752,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	65.835.576,00	65.835.576,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	12.088.882,00	12.192.660,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	16.900,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	430.459.604,83	435.635.004,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	485.413.850,00	405.292.761,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	368.491,10	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara	46.650,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	0,00	4.936.554,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	8.402.246,67	13.497.686,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.116.266.469,89	999.642.718,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.526.459.868,38	2.771.543.404,68
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	3.831.745,63	3.790.128,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	308.220,00	308.220,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	7.356.250,00	7.185.168,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	9.685.848,00	9.871.796,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	16.898.158,25	16.719.984,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	19.220.338,00	17.025.324,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	16.706.209,33	26.223.924,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	212.575.308,67	197.333.506,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	139.775.002,91	132.841.068,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	37.510.847,41	33.298.332,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	448.936.772,52	680.813.526,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	15.024.616,00	13.506.300,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	43.271.892,00	42.028.290,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	3.016.449,49	1.810.356,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	22.914.028,13	23.280.000,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	5.365.194,00	5.729.016,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	133.762,67	117.096,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	4.995.816,00	4.995.816,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	276.780,00	276.780,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	1.302.904,00	8.821.675,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	416.640,00	416.640,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	1.577.166,00	8.887.071,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	872.160,00	1.044.054,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	10.416,67	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	2.495.273,60	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	417.708,00	417.708,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	1.229.160,00	1.229.160,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	14.940.660,28	8.841.702,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	0,00	9.115,72
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	123.288,00	123.288,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	7.308.750,00	1.827.186,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	278.506.898,75	278.854.092,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	98.994.776,33	65.422.600,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument	718.440,00	718.440,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Instrument Probe/Sensor	300.000,00	300.000,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool	13.239.700,00	12.313.332,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Laboratory Safety Equipment	14.672.358,67	14.641.620,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	692.046,14	775.368,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	15.878.848,00	16.418.280,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	2.895.869,52	2.794.560,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	193.599.751,52	131.230.698,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	6.314.625,71	6.306.012,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	19.703.370,67	19.411.704,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	1.943.204,00	2.605.749,46
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah - Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	182.388,00	182.388,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	655.710,86	548.568,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	4.568.047,34	1.438.464,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	5.749.688,13	7.350.044,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	155.040,00	155.040,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	40.796.317,00	244.036.541,50
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	86.771.221,71	44.579.691,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.181.357,14	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting And Scientific Electronic	15.105.192,00	15.105.192,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	60.000,00	60.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	5.458.680,00	5.485.548,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	27.761.788,00	27.736.788,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	3.166.677,33	3.111.959,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	31.220.760,00	28.852.776,00
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	4.399.848,00	294.240,00
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	0,00	4.105.608,00
Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device	4.324.320,00	4.324.320,00
Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi	1.944.444,00	1.944.444,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	175.086.996,00	175.086.996,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	127.914.623,53	127.691.280,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	1.454.862,00	5.897.592,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	133.328.020,86	140.478.036,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	428.142,86	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	55.629.624,00	56.668.788,00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	50.501.416,00	13.878.216,00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	3.228.422,00	846.576,00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	10.752,00	10.752,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	58.571.470,75	60.262.068,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	491.808,00	491.808,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	354.996,00	354.996,00
Beban Penyusutan Senjata Api	270.688.878,82	277.597.684,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alsus Lantas	741.216,00	0,00
Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	2.354.988,00	2.354.988,00
Beban Penyusutan Senjata Sinar-Laser	400.000,00	0,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	265.246.118,00	273.801.680,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	51.388,89	0,00
Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	583.333,33	500.000,00
Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	510.862,93	0,00
Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Lantas	0,00	741.216,00
Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian	99.166,67	199.800,00
Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	701.805,00	0,00
Beban Penyusutan Komputer	10.254.161.108,69	15.274.359.351,11
Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	51.841.779,16	8.026.241,00
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	7.548.959.931,22	12.364.455.687,64
Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	9.769.854,57	8.318.184,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	24.889.684,34	92.743.562,47
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	32.098.945,39	34.242.157,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.200.728.458,45	1.425.852.723,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.381.900.279,91	1.340.720.796,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.972.175,65	0,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	104.454.620,24	47.261.909,00
Beban Penyusutan Alat Deteksi-Suara	268.800,00	268.800,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	4.233.333,33	420.000,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.800.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	1.261.658,00	982.817,00
Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	38.433.090,25	17.951.216,00
Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	373.409,22	500.008,00
Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	32.077.746,11	14.055.972,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik	26.006.583,33	13.083.096,00
Beban Penyusutan Alat Peraga	810.927,73	811.476,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	810.927,73	811.476,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	92.208,00	92.208,00
Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	92.208,00	92.208,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	436.137.678,22	521.633.202,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	104.320.452,00	95.995.452,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	294.017.159,55	405.717.750,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	37.800.066,67	19.920.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	110.819.696,84	121.442.657,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	122.916,67	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	23.152.149,65	24.885.407,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	73.105.281,83	73.043.442,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	0,00	1.666.676,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	14.439.348,69	21.847.132,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.332.050.744,19	29.278.430.717,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.330.630.794,78	28.649.610.993,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.433.982.833,44	5.449.459.379,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	126.004.584,00	125.507.178,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	100.895.424,00	100.895.424,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	182.881.065,33	181.551.732,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	745.269.003,67	571.642.452,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	7.131.367.157,76	6.266.962.809,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.731.933.942,49	1.731.363.132,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	342.506.844,67	512.514.004,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.514.236.546,17	10.197.404.734,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	481.913.004,00	481.913.004,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	103.279.980,00	86.587.096,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	108.848.232,00	107.656.530,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	44.622.978,00	43.932.408,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	40.779.840,00	40.779.840,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	743.002.274,71	673.138.722,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	63.069.600,00	63.069.600,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	213.299.411,83	211.826.878,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	29.899.992,00	29.899.992,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	622.596,00	622.596,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	33.925.134,66	29.237.032,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	332.000,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	20.434.185,00	11.776.548,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	493.602.615,00	420.261.072,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	81.434.581,98	35.691.493,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	11.591.628,67	7.710.369,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	166.426.368,00	166.426.368,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	414.379.908,00	196.191.011,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	83.986.352,00	64.805.004,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	19.220.724,00	19.220.724,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	626.736.749,40	581.369.150,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	49.630.742,00	49.680.216,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama	15.973.812,00	15.973.812,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Hotel	159.360.600,00	159.360.600,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	14.852.592,00	14.852.592,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	327.492,00	327.492,00
Beban Penyusutan Monumen	81.633.012,00	81.633.012,00
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Tugu	26.178.480,00	26.178.480,00
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan	50.123.352,00	50.123.352,00
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	5.331.180,00	5.331.180,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara	6.461.076,00	6.461.076,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	1.497.288,00	1.497.288,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	4.963.788,00	4.963.788,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	913.325.861,41	540.725.636,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	24.630.660,00	24.630.660,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	888.695.201,41	516.094.976,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	120.834.677.386,60	97.734.215.860,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	71.373.685.149,95	77.392.319.578,00
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	58.309.914.660,09	67.329.162.438,00
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa	3.597.607.489,33	1.690.455.287,00
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	5.488.690.899,41	5.361.667.027,00
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	273.071.327,80	188.799.252,00
Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	1.425.456,00	118.788,00
Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.930.013.372,66	2.595.166.238,00
Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	691.881.349,33	158.760.489,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	9.163.751,33	8.764.668,00
Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	67.919.704,00	59.331.696,00
Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	3.997.140,00	93.695,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	28.082.199.577,73	14.526.219.609,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	2.187.497.328,00	236.197.380,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	1.187.039.851,23	990.942.192,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	11.310.328.603,00	4.806.251.578,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	10.214.700,00	8.133.324,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	217.027.092,00	204.677.100,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	319.385.769,33	302.232.933,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	44.611.956,00	43.711.956,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	135.565.308,00	117.016.272,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	25.139.616,00	25.139.616,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	15.398.796,00	15.398.796,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	149.870.556,00	62.706.822,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	91.946.004,00	91.946.004,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	89.929.206,00	67.858.543,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	31.610.464,17	2.267.447.706,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.748.862.116,00	3.261.303.308,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	4.051.875.699,00	263.928.336,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1.143.385.229,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	13.612.944,00	11.141.552,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	19.200.192,00	19.200.192,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	279.232.524,00	20.790.720,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	0,00	664.800,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	27.814.176,00	31.396.932,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	83.242.224,00	6.936.852,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	146.080.836,00	53.315.460,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.049.364.972,00	995.229.792,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	18.750.000,00	1.562.500,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.312.075.148,00	403.467.767,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	991.477.440,00	149.979.636,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	94.248.900,00	34.299.252,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	279.641.880,00	25.572.240,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	7.770.048,00	7.770.048,00
Beban Penyusutan Instalasi	16.068.279.717,10	3.101.633.666,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	2.504.230.908,00	364.160.184,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	1.741.483.656,00	145.227.300,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	158.784.072,00	43.242.972,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	591.552.785,45	61.828.786,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.171.775.581,22	1.496.204.112,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	86.898.240,00	7.241.520,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	568.192.351,33	61.860.220,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	483.431.566,00	49.731.382,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	10.384.848,00	952.596,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	76.568.889,60	7.908.000,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	142.112.400,00	142.237.056,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	3.346.890.110,40	592.742.375,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	2.068.344,00	2.068.344,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	26.821.627,20	22.351.356,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	0,00	75.000,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.024.211.364,00	93.249.684,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	9.610.908,00	9.123.336,00
Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	17.153.316,00	1.429.443,00
Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	106.108.749,90	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	5.310.512.941,82	2.714.043.007,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	2.866.119.148,57	1.964.526.480,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	330.658.764,00	152.524.368,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	128.143.620,00	85.429.080,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	15.140.268,00	10.093.512,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	204.483.204,00	17.040.267,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	337.065.013,00	75.638.184,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	278.190.775,00	269.535.808,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	311.139.031,25	62.799.216,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	0,00	564.252,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	89.583.264,00	7.465.272,00
Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	9.919.278,00	6.612.852,00
Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	740.070.576,00	31.782.984,00
Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	0,00	30.030.732,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	51.103.750,00	67.217.250,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	51.103.750,00	67.217.250,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	51.103.750,00	67.217.250,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Properti Investasi	1.137.452.794,00	929.880.561,00
Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	1.137.452.794,00	929.880.561,00
Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	1.137.452.794,00	929.880.561,00
Jumlah	220.781.661.304,36	200.892.708.574,73

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan Aset yang bersumber dari pembelian dan hibah masuk;
- Pengurangan Aset yang bersumber dari hibah keluar dan masa manfaat yang telah habis
- Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2025 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.3.1.5.6**

Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing Perangkat Daerah telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.3.1.5.6**.

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.243
Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bagi Hasil	4.252.200.290,00	3.318.345.692,00
Beban Bantuan Keuangan	127.692.007.084,00	106.831.658.863,00
Jumlah	131.944.207.374,00	110.150.004.555,00

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.244
Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.983.619.018,00	0,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.983.619.018,00	0,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.983.619.018,00	0,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.268.581.272,00	3.318.345.692,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.268.581.272,00	3.318.345.692,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.268.581.272,00	3.318.345.692,00
Jumlah	4.252.200.290,00	3.318.345.692,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Penurunan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena Alokasi Beban Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Tahun 2024 tidak terbagi pada masing-masing kode rekening Beban Bagi Hasil Pajak Daerah maupun Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah, namun disatukan pengakuannya pada Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2025 ini *sama* dari saldo Belanja Bagi Hasil dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp0,00 (Rp4.252.200.290,00,00 - Rp Rp4.252.200.290,00,00).

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.245
Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	127,692.007.084,00	106.831.658.863,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	127,692.007.084,00	106.831.658.863,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	127,692.007.084,00	106.831.658.863,00
Jumlah	127,692.007.084,00	106.831.658.863,00

Penjelasan:

- Nilai Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.154.098.266.180,00
- Nilai Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127,692.007.084,00
- Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp 154.098.266.180,00 (Rp281.790.273.264,00 – Rp127.692.007.084,00), yang dijelaskan sebagai berikut

Tabel 5.246
**Penambahan dan Pengurangan Beban Transfer
Bantuan Keuangan Tahun 2025**

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	154.098.266.180,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuiinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	154.098.266.180,00
Jumlah Penjelasan Selisih	154.291.659.083,00

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.247
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus Non-Operasional – LO	0,00	10.360.930,00
Defisit Non Operasional - LO	1.554.388.186,00	2.637.947.789,25
Jumlah	(1.554.388.186,00)	(2.627.586.859,25)

5.4.3.1 Surplus Non Operasional - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non Operasional – LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional – LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non Operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.248
Surplus Non Operasional – LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	10.360.930,00
Jumlah	0,00	10.360.930,00

5.4.3.2 Defisit Non Operasional – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional – LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non Operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.249
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.554.388.186,00	2.637.947.789,25
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.554.388.186,00	1.560.514.561,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.554.388.186,00	1.560.514.561,00
Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	0,00	1.077.433.228,25
Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	0,00	1.077.433.228,25
Jumlah	1.554.388.186,00	2.637.947.789,25

Penjelasan:

Penambahan Nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO karena adanya penghapusan aset sesuai Surat Keputusan Bupati No. 188.45/438/07.3 Tahun 2025 Tanggal 6 Desember 2025 atas aset yang telah rusak berat senilai Rp6.346.238.808,49.

Rincian Jenis Aset yang dihapus sesuai Surat Keputusan Bupati No. 188.45/438/07.3 Tahun 2025 pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana pada **Lampiran XII**

Aset Tanah Padang Rumput yang terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati No. 188.45/438/07.3 Tahun 2025 Tanggal 6 Desember 2025 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicatat berdasarkan Inventarisasi Aset dan dihapus berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23.06.03.08.4.00002.

Aset Tanah Padang Rumput yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati No. 188.45/438/07.3 Tahun 2025 belum memiliki Berita Acara Hibah sebagai dasar dalam pencatatan awal pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan sampai dengan dihapuskannya Aset Tanah Padang Rumput, belum dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu pelepasan aset ini belum dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset dengan pihak Pemerintah Provinsi NTB.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.250
Penambahan Nilai Defisit Kegiatan Non Operasional - LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
➤ Penambahan nilai Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya LO:	1.554.388.186,00
✓ Penambahan nilai karena penghapusan aset lain-lain	1.554.388.186,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.554.388.186,00

5.4.4 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luar Biasa – LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Luar Biasa – LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non Operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.251
Pos Luar Biasa – LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
• Pos Luar Biasa – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.5 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.252
Surplus/(Defisit) – LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	207.720.054.980,47	163.262.466.983,10
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.730.928.364.903,00	1.624.323.750.481,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	55.309.191.811,28	48.962.732.865,67
➤ Beban Operasi		
✓ Beban Operasi	1.818.584.336.797,68	1.825.859.684.513,54
Beban Transfer		
✓ Beban Transfer	131.944.207.374,00	110.150.004.555,00
✓ Beban Tak Terduga		
✓ Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Kegiatan Non Operasional		
➤ Surplus Non Operasional		
✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
➤ Defisit Non Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(1.554.388.186,00)	2.637.947.789,25
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	41.874.679.337,07	(102.088.325.598,02)

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.6.2**.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bima untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bima selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.253
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.059.835.145.140,12	2.090.708.430.810,43
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.869.127.302.800,94	1.866.888.829.482,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	190.707.842.339,18	223.819.601.327,51

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.254
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
➤ Penerimaan Pajak Daerah	35.786.367.464,91	16.684.150.219,55
✓ PBJT Jasa Perhotelan	1.177.202.745,77	1.027.282.105,55
✓ PBJT Makanan dan atau minuman	317.312.784,00	191.115.916,00
✓ PBJT jasa Kesenian dan Hiburan.	3.450.000,00	3.350.000,00
✓ Pajak Reklame	169.468.000,00	213.384.600,00
✓ PBJT Tenaga Listrik	12.909.014.222,00	11.578.186.895,00
✓ PBJT Jasa Parkir	49.808.400,00	46.815.200,00
✓ Pajak Air Tanah	59.980.000,00	59.580.000,00
✓ Pajak Sarang Burung Walet	6.590.000,00	3.524.000,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	291.413.070,14	271.985.000,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.194.349.205,00	2.301.037.953,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.835.823.339,00	987.888.550,00
✓ Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.000.000,00	0,00
✓ Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.528.738.682,00	0,00
✓ Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.242.217.017,00	0,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah	156.436.905.965,90	17.699.305.005,00
✓ Retribusi Jasa Umum	144.691.956.578,90	7.754.275.035,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	143.596.056.578,90	6.411.719.535,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	191.100.000,00	181.000.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	37.300.000,00	30.653.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	867.500.000,00	1.130.902.500,00
✓ Retribusi Jasa Usaha	11.182.696.700,00	9.377.639.915,00
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.890.396.700,00	9.327.939.915,00
• Retribusi Terminal	0,00	5.570.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.030.000,00	24.420.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	105.460.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	2.730.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	22.400.000,00	19.355.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	93.000.000,00	114.500.000,00
• Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	84.660.000,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	7.210.000,00	0,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	50.000.000,00	0,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu	562.252.687,00	567.390.055,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	2.700.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	542.290.687,00	564.690.055,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	19.962.000,00	0,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.443.342.308,00	8.152.466.371,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.443.342.308,00	8.152.466.371,00
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	7.787.464.477,31	127.373.601.344,88
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	200.000.000,00
✓ Jasa Giro	2.219.360.170,82	2.308.728.676,30
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
✓ Pendapatan Bunga	0,00	358.358.851,00
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.763.386.831,18	1.018.570.851,10
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.541.410.822,53	1.462.910.751,20
✓ Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	4.069.826.337,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.263.306.652,78	56.374.292,71
✓ Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00
✓ Pendapatan BLUD	0,00	92.242.904.575,57
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	25.655.927.010,00
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	1.760.720.762.880,00	1.753.884.676.899,00
✓ Dana Perimbangan	1.606.622.496.700,00	1.559.907.817.899,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
✓ Dana Desa	154.098.266.180,00	187.145.184.000,00
✓ Insentif Fiskal	0,00	6.831.675.000,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	64.335.780.751,00	78.121.624.847,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil	64.144.780.751,00	78.121.624.847,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.195.994.778,00	14.808.410.518,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	888.429.518,00	9.257.687.654,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.512.123.140,00	24.265.723.027,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	38.690.056,00	38.407.195,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	30.509.543.259,00	29.751.396.453,00
✓ Bantuan Keuangan	191.000.000,00	0,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	191.000.000,00	0,00
➤ Penerimaan Hibah	0,00	18.572.830.000,00
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	18.572.830.000,00
➤ Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	26.324.521.293,00	70.219.776.124,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	26.324.521.293,00	70.219.776.124,00
Jumlah	2.059.835.145.140,12	2.090.708.430.810,43

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.255
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
➤ Pembayaran Belanja Pegawai	1.059.733.779.975,00	959.315.205.223,10
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	726.695.534.210,60	644.656.673.166,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	245.913.076.031,60	55.183.987.177,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	176.256.163.486,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.546.930.724,00	20.764.023.279,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.575.038,00	163.186.170,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	752.000.000,00	710.000.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	64.652.663.970,80	61.581.171.945,10
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	488.796.577.286,94	543.166.017.911,82
✓ Belanja Barang	171.920.873.375,00	198.139.586.710,00
✓ Belanja Jasa	153.647.517.860,80	154.644.296.182,00
✓ Belanja Pemeliharaan	4.559.855.537,00	3.021.807.774,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	27.068.004.776,00	44.078.602.535,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.048.041.325,00	27.036.668.332,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	52.643.065.969,08	59.429.655.061,27
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.909.218.444,06	56.815.401.317,55
➤ Pembayaran Belanja Hibah	30.165.321.985,00	65.180.177.793,00
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	25.240.000.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.727.639.565,00	17.314.500.000,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	877.637.000,00	794.052.000,00
✓ Belanja Hibah Dana BOSP	20.460.045.420,00	21.831.625.793,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	451.000.000,00	310.600.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	100.600.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	396.000.000,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000,00	210.000.000,00
➤ Pembayaran Belanja Tidak Terduga	3.938.150.000,00	1.621.640.000,00
✓ Belanja Tidak Terduga	3.938.150.000,00	1.621.640.000,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	4.252.200.290,00	3.318.345.692,00
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.983.619.018,00	0,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.268.581.272,00	3.318.345.692,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	281.790.273.264,00	293.976.842.863,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	281.790.273.264,00	293.976.842.863,00
Jumlah	1.869.127.302.800,94	1.866.888.829.482,92





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bima selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.256
Arus Kas Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	1.104.999.500,00	16.400.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	163.326.710.730,00	213.987.711.149,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(162.221.711.230,00)	(213.971.311.149,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.257
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
➤ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
✓ Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.104.999.500,00	16.400.000,00
Jumlah	1.104.999.500,00	16.400.000,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.258
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
➤ Perolehan Tanah	273.738.000,00	241.362.000,00
✓ Belanja Modal Tanah Persil	243.738.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Tanah Non Persil	30.000.000,00	108.915.000,00
✓ Belanja Modal Lapangan	0,00	132.447.000,00
➤ Perolehan Peralatan dan Mesin	36.383.268.312,00	45.626.675.608,00
✓ Belanja Modal Alat Besar	6.111.809.580,00	1.869.977.660,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	5.942.552.001,00	11.138.380.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	252.831.000,00	9.897.430,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	157.597.260,00	124.800.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.704.375.158,00	8.858.217.200,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	562.513.340,00	558.945.038,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.028.263.000,00	6.012.252.964,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	1.819.305.687,00	3.455.698.500,00
✓ Belanja Modal Komputer	3.397.467.508,00	4.311.154.698,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	154.143.490,00	209.836.085,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	123.940.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	455.572.500,00	188.597.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	93.403.000,00	25.000.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.292.183.624,00	5.420.205.813,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP (kinerja)	0,00	896.861.100,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.287.311.164,00	2.546.852.120,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan	70.165.358.002,00	111.617.512.105,00
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	60.229.507.002,00	98.667.139.805,00
✓ Belanja Modal Monumen	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.055.357.000,00	6.553.578.650,00
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.880.494.000,00	6.396.793.650,00
➤ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.711.569.675,00	52.778.791.401,00
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	35.640.907.100,00	35.974.403.150,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	6.962.867.600,00	13.667.034.351,00
✓ Belanja Modal Instalasi	555.090.000,00	543.817.000,00
✓ Belanja Modal Jaringan	5.547.704.975,00	1.637.316.000,00
✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.000.000,00	956.220.900,00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.592.776.741,00	2.667.420.035,00
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	601.069.346,00	343.927.600,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	79.438.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	498.650.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.493.057.395,00	2.218.154.435,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP (kinerja)	0,00	16.400.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	9.500.000,00
➤ Perolehan Aset Lainnya	0,00	55.950.000,00
✓ Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	49.950.000,00
✓ Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	6.000.000,00
➤ Penyertaan Modal Daerah	200.000.000,00	1.000.000.000,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah	163.326.710.730,00	213.987.711.149,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bima selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.259
Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	3.478.464,00	6.880.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	3.478.464,00	6.880.000,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.238

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman (dana bergulir)	3.478.464,00	6.880.000,00
Jumlah	3.478.464,00	6.880.000,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.260

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
➤ Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan		
✓ Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bima untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bima selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.261

Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	134.471.737.221,30	128.253.794.423,25
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	134.290.216.917,32	128.349.778.556,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	181.520.303,98	(95.984.132,93)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.262
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	120.436.338.084,30	110.865.880.009,55
✓ Iuran Wajib Pegawai	27.757.207.513,92	20.852.705.262,00
✓ Pajak Penghasilan	16.750.270.065,77	34.682.534.189,94
✓ Pajak Pertambahan Nilai	29.415.748.693,58	34.986.288.261,76
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	11.064.454.593,00	15.970.942.336,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.168.968.439,00	183.194.795,00
✓ Iuran Jaminan Kematian	3.506.862.837,00	552.840.455,00
✓ Iuran Jaminan Kesehatan 4%	30.768.694.713,20	3.637.374.709,85
✓ Iuran Jaminan Kesehatan 1%	4.131.228,83	0,00
➤ Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	13.954.299.137,00	17.387.885.163,35
✓ Penerimaan UP	1.455.000.000,00	1.730.000.000,00
✓ Penerimaan GU	12.504.507.053,00	15.266.439.605,00
✓ Penerimaan TU	0,00	381.293.000,00
✓ Ditambah Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu Yang sudah disetor tahun berjalan	0,00	10.152.558,35
- Setoran Dinas Peternakan Kabupaten Bima Atas Saldo Kas Tahun Anggaran 2023	0,00	774.000,00
- Setoran DKP Kab. Bima Atas Saldo Kas TA 2023 (TPP Pegawai)	0,00	30.000,00
- Setoran Dinas Koperasi Kab. Bima Atas Saldo Kas TA 2023	0,00	0,10
- Setoran Dinas PMDes Kab. Bima Atas Saldo Kas TA 2023	0,00	1,00
- Setoran Sat Pol PP Kab. Bima Atas Saldo Kas TA 2023	0,00	27.000,65
- Setoran Dinas Kesehatan Kab. Bima Atas Kas Bendahara Pengeluaran/Rek BOK PKM 2022 (Temuan)	0,00	9.276.556,59
- Setoran RSUD Bima Atas Pengembalian Kelebihan Honorarium PPK (Panitia Pelaksana Keg./Anggota Dan Staf Pendukung Tim Teknis Pembantu PPK) Sub Keg. Pembangunan Rumah Sakit Di RSUD Bima Bulan Desember 2023	0,00	25.000,00
- Setoran Dinas Kesehatan Kab. Bima Atas Kekurangan Pembayaran Wifi Bulan November Tahun 2023 Yg Tidak Sesuai Antara BKU Dengan SPJ (Temuan BPK)	0,00	20.000,00
✓ Dikurangi Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu Yang sudah disetor tahun berjalan (BAPPEDA Kabupaten Bima)	(5.207.916,00)	0,00
➤ Kiriman Uang Masuk	81.100.000,00	29.250,35
✓ Bendahara Penerimaan	81.100.000,00	29.250,35
- Setoran Dinas Perindag Kab. Bima atas Jasa Giro Dari Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	29.250,35
Jumlah	134.471.737.221,30	128.253.794.423,25

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang bersumber dari dana BLUD, BOK, dan BOSP yang merupakan bagian dari fungsi perbendaharaan.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.263
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
➤ Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	120.330.709.864,32	110.890.945.951,18
✓ Iuran Wajib Pegawai	27.756.330.346,92	20.852.096.235,00
✓ Pajak Penghasilan	16.772.453.958,77	34.691.838.855,93
✓ Pajak Pertambahan Nilai	29.313.261.362,99	35.004.482.696,40
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen)	11.064.454.593,00	15.970.942.336,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.168.968.439,00	183.194.795,00
✓ Iuran Jaminan Kematian	3.506.862.837,00	552.840.455,00
✓ Iuran Jaminan Kesehatan 4%	30.744.247.097,81	3.635.550.577,85
✓ Iuran Jaminan Kesehatan 1%	4.131.228,83	0,00
➤ Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	13.959.507.053,00	17.377.732.605,00
✓ Penerimaan UP	1.455.000.000,00	1.730.000.000,00
✓ Penerimaan GU	12.504.507.053,00	15.266.439.605,00
✓ Penerimaan TU	0,00	381.293.000,00
➤ Kiriman Uang Keluar	0,00	81.100.000,00
✓ Penyetoran sewa gedung paruga nae pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	0,00	49.700.000,00
✓ Penyetoran penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0,00	31.400.000,00
Jumlah	134.290.216.917,32	128.349.778.556,18

Untuk Tahun 2025, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang bersumber dari dana BLUD, BOK, dan BOSP yang merupakan bagian dari fungsi perbendaharaan.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Laporan Arus Kas untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.264
Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	190.707.842.339,18	223.819.601.327,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(162.221.711.230,00)	(213.971.311.149,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	3.478.464,00	6.880.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	181.520.303,98	(95.984.132,93)
Jumlah	28.671.129.877,16	9.759.186.045,58

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.265
Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	29.939.689.016,70	16.951.914.630,60
Kas di Bendahara Penerimaan	81.100.000,00	29.250,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	10.152.558,34





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di BLUD	8.696.807.068,95	12.707.548.818,84
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	146.743,00
Kas Dana BOSP	59.683.634,72	66.473.143,75
Kas Dana BOK Puskesmas	1.231.894.910,00	0,00
Jumlah	40.009.174.630,37	29.736.265.144,88

5.5.7 Saldo Awal Kas di Fungsi Perbendaharaan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas di Fungsi Perbendaharaan pada Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.266

Saldo Awal Kas di Fungsi Perbendaharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	29.939.689.016,70	16.951.914.630,60
Kas di BLUD	8.696.807.068,95	12.707.548.818,84
Kas Dana BOSP	59.683.634,72	66.473.143,75
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	146.743,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.231.894.910,00	0,00
Jumlah	39.928.074.630,37	29.726.083.336,19

5.5.8 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.267

Koreksi SiLPA Tahun Lalu Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	0,00
Koreksi Silpa atas lebih catat Dana BOS tahun 2023	0,00	(24.033.410,22)
Koreksi Silpa atas kurang catat kas pada PKM Pai tahun 2023	0,00	17.046,82
Koreksi Silpa atas lebih catat kas pada BLUD PKM Sape tahun 2023	0,00	(483.136,00)
Koreksi Silpa atas kurang catat kas pada RSUD Bima tahun 2023	0,00	396.300,00
Koreksi Silpa atas saldo BOK Puskesmas tahun 2023	0,00	466.908.448,00
Koreksi atas Kurang Catat Pendapatan Jasa Giro pada PAUD Negeri Tahun 2024 (TKN Pembina Kec. Ambalawi dan TKN Kuta)	89.362,56	0,00
Koreksi Kas di Bendahara BOSP Tahun 2024 pada TK Insan Kamil yang merupakan sekolah swasta	(310.000,00)	0,00
Jumlah	(220.637,44)	442.805.248,60

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada **Poin 5.2.4** di atas.

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.268

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	57.768.870.005,42	29.939.689.016,70
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	81.100.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.207.916,00	0,00
Kas di BLUD	9.517.506.186,97	8.696.807.068,95
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas Dana BOSP	364.491.045,70	59.683.634,72
Kas Dana BOK Puskesmas	948.116.632,00	1.231.894.910,00
Jumlah	68.604.191.786,09	40.009.174.630,37





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.269
Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	2.956.074.627.448,94	3.046.908.306.073,64

Pemerintah Kabupaten Bima menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2025 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bima yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.270
Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit) - LO	41.874.679.337,07	(102.088.325.598,02)

Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Bima masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.5*.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.271
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	(434.373.449,48)	577.339.061,31
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	(2.243.284.631,59)	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	8.470.632.389,07	14.410.754.912,01
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(204.582.951,32)	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	207.679.847,00	(2.840.327.000,00)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Panjang	(2.111.088.772,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	(893.120.000,00)
Jumlah Dampak Kumulatif	3.684.982.431,68	11.254.646.973,32

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi, baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bima melakukan penyesuaian.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya di uraikan sebagai berikut:

Tabel 5.272

kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
ASET LANCAR				
Kas				
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Koreksi Kas di Bendahara BOSP saldo Tahun 2024 pada TK Insan Kamil Senilai Rp310.000,00 Yang merupakan sekolah swasta. Sehingga dikeluarkan dari Kas di Bendahara BOSP		310.000,00	(310.000,00)
	Koreksi atas Kurang Catat Jasa Giro pada PAUD Negeri di Tahun 2024	89.362,56		89.362,56
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Untuk Mencatat Pengembalian atas Temuan Kekurangan Volume dan/atau Mutu Pekerjaan Belanja Modal TA 2023, antara lain: 1. Paket pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan SP Belo-Nata a/n PT CHP sebesar Rp41.801.000 2. Paket pemeliharaan Berkala Jalan Tente-Godo, Bolo-Dena, Pucuke-Keli, Timu-Kananga a/n PT CHP sebesar Rp39.437.000,- 3. Paket Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Ruas SP3 Sondo Pantai Rontu a/n CV BPT sebesar Rp48.993.000,- 4. Paket pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan SP.JP Papa-Baku a/n CV TS sebesar Rp198.283.000,- 5. Paket pekerjaan Pembangunan D.I Kompon Desa Kore a/n CV NK Utama sebesar Rp111.227.000,-		439.591.000,00	(439.591.000,00)
Jumlah		89.362,56	439.901.000,00	(439.811.637,44)
Piutang				
Rumah Sakit Umum Daerah	Penghapusan penyisihan piutang karena adanya realisasi penerimaan piutang klaim JKN yang telah disisihkan	5.354.545,00		5.354.545,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penghapusan penyisihan piutang karena adanya realisasi penerimaan piutang pajak hotel yang telah disisihkan	83.642,96		83.642,96
Jumlah		5.438.187,96		5.438.187,96
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koreksi Investasi Jangka Panjang Permanen, atas Penurunan Nilai Investasi terhadap penyertaan modal Pemerintah pada BUMD (PDAM) berdasarkan Reviu oleh BPKP		2.243.284.631,59	(2.243.284.631,59)
Jumlah			2.243.284.631,59	(2.243.284.631,59)
ASET TETAP				
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Inventarisasi tanah SDN 2 Ntonggu sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 23.06.04.11.4.0003	150.337.500,00		150.337.500,00
	Koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat		175.095.671,69	(175.095.671,69)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena kekeliruan masa manfaat		1.544.579,67	(1.544.579,67)
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap JJI karena pembulatan angka		21.733,00	(21.733,00)
Dinas Kesehatan	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat		236.730.198,63	(236.730.198,63)
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin BLUD tetap karena kekeliruan penetapan masa manfaat		187.570.675,73	(187.570.675,73)
	koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan aset tetap BLUD peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat	3.162.500,00		3.162.500,00
	koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan Bangunan Kesehatan karena kesalahan perhitungan kapitalisasi aset tetap PKM Wera	7.171.996,53		7.171.996,53
	mutasi masuk aset tetap Gedung dan Bangunan dari RSUD Bima ke RSUD Sondosia	3.475.497.250,00		3.475.497.250,00
Rumah Sakit Umum Daerah	mutasi keluar aset tetap Gedung dan Bangunan ke RSUD Sondosia		3.475.497.250,00	(3.475.497.250,00)
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat		61.330.231,89	(61.330.231,89)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	mutasi masuk Tanah dari Setda Rp. 257.442.000 dan Perkim Rp. 400.470.000	657.912.000,00		657.912.000,00
	mutasi masuk aset tetap tenda dari Dinas Koperasi dan UMKM	14.920.000,00		14.920.000,00
	koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024		288.660.000,00	(288.660.000,00)
	koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024		124.252.000,00	(124.252.000,00)
	mutasi masuk akumulasi penyusutan JJI atas pendapatan hibah aset JJI dari kementerian PUPR		3.958.530.290,86	(3.958.530.290,86)
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat		42.286.295,49	(42.286.295,49)
	koreksi lebih catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena pembulatan angka	3.381.581,00		3.381.581,00
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan yang telah direklas ke aset lain2		980.499,40	(980.499,40)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	mutasi keluar aset tetap tanah ke Dinas PUPR		400.470.000,00	(400.470.000,00)
	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
	koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat		969.205,33	(969.205,33)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Pariwisata	14.984.615,00		14.984.615,00
	Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat		499.500,00	(499.500,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	Mutasi masuk peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Koperasi dan UMKM	14.920.000,00		14.920.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Mutasi masuk aset tetap tenda dari Dinas Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan Alat Pendingin karena kekeliruan penetapan mada manfaat		152.111,33	(152.111,33)
Dinas Sosial	Mutasi masuk aset tetap tenda dari Dinas Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
	Koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat aset		1.402.785,33	(1.402.785,33)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan Bangunan Tempat Kerja karena kesalahan perhitungan kapitalisasi aset		66.133.025,00	(66.133.025,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Koperasi dan UMKM	14.920.000,00		14.920.000,00
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap karena kekeliruan masa manfaat		9.570.077,43	(9.570.077,43)
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap Bangunan Tempat Kerja karena kesalahan perhitungan kapitalisasi		146.658.368,33	(146.658.368,33)
Dinas Ketahanan Pangan	kurang saji AT-Peralatan dan Mesin (Tenda sarnafil) atas mutasi masuk aset dari Dinas Koperasi Kabupaten Bima	14.920.000,00		14.920.000,00
	koreksi lebih catat akumulasi penyusutan karena kekeliruan penetapan masa manfaat aset tetap	695.096,00		695.096,00
Dinas Lingkungan Hidup	mutasi masuk tenda dari Dinas Koperasi dan UMKM	14.920.000,00		14.920.000,00
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat		1.934.826,10	(1.934.826,10)
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan bangunan tempat kerja lainnya Rp.56.783.266,67 dan Bangunan gedung laboratorium Rp. 3.922.264,67 karena kapitalisasi aset tetap		60.705.531,33	(60.705.531,33)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas pariwisata	14.984.615,00		14.984.615,00
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat		249.750,00	(249.750,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	kurang saji AT-Peralatan dan Mesin (Tenda sarnafil) atas mutasi masuk aset dari Dinas Koperasi Kabupaten Bima	14.920.000,00		14.920.000,00
	koreksi lebih catat akumulasi penyusutan akibat kekeliruan penetapan masa manfaat		1.069.586,00	(1.069.586,00)
Dinas Perhubungan	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Koperasi dan UMKM	14.920.000,00		14.920.000,00
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat aset		1.722.089,11	(1.722.089,11)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	lebih saji AT-Peralatan dan Mesin (Tenda Sarnafil) pada Dinas Koperasi senilai Rp29.840.000 yang telah diserahkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan DPMD		29.840.000,00	(29.840.000,00)
	mutasi keluar aset tetap peralatan dan mesin/tenda ke 9 SKPD		104.440.000,00	(104.440.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Pariwisata	14.984.615,00		14.984.615,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	mutasi masuk aset tetap peralatan mesin / tenda dari Dinas Pariwisata	14.984.620,00		14.984.620,00
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan peralatan mesin personal komputer Rp. 361.111,44 dan mebel Rp. 222.222,67 karena kesalahan penetapan masa manfaat		583.334,11	(583.334,11)
	kurang saji akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengisian Pusat Informasi Geologi Kawasan Geopark Tambora pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar - hibah dari pusat		42.262.925,94	(42.262.925,94)
	inventarisasi/kurang catat aset tetap peralatan dan mesin/ 2 unit mobil	5.321.428,78		5.321.428,78
Dinas Kelautan dan Perikanan	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas pariwisata	14.984.615,00		14.984.615,00
	koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena kesalahan penetapan masa manfaat aset		2.600.000,00	(2.600.000,00)
	mutasi keluar Peralatan dan Mesin/ tenda ke beberapa SKPD		179.815.385,00	(179.815.385,00)
Dinas Pariwisata	koreksi atas kurang catat nilai penyusutan karena kekeliruan penetapan masa manfaat aset		133.200,00	(133.200,00)
Dinas Pertanian dan Perkebunan	mutasi tambah peralatan dan mesin/tenda dari Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	mutasi masuk peralatan dan mesin dari Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan karena kekeliruan penetapan masa manfaat		47.616.269,69	(47.616.269,69)
	koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan karena kekeliruan penetapan masa manfaat	2.756.856,67		2.756.856,67
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	mutasi keluar Peralatan dan Mesin/ tenda ke 11 SKPD		164.822.163,00	(164.822.163,00)
	akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan atas pendapatan hibah di pasar Sape dari Kementerian Perdagangan		47.088.726,67	(47.088.726,67)
	koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin karena kesalahan penetapan masa manfaat aset		85.312.307,72	(85.312.307,72)
	koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan yang telah direklas ke aset lain-lain tahun 2024	980.500,00		980.500,00
	mutasi masuk aset tetap/ tenda 3 unit dari Dinas Pariwisata	44.953.845,00		44.953.845,00
Sekretariat Daerah	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan Perlengkapan Kantor Rp. 833.333,31 dan Mebel Rp. 2.775.000 karena kekeliruan penetapn masa manfaat		3.608.333,31	(3.608.333,31)
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan Bangunan Tempat Kerja karena kekeliruan perhitungan kapitalisasi aset		659.621.840,67	(659.621.840,67)
	inventarisasi aset tanah pertanian (eks jaminan) yang belum tercatat	16.216.465.300,00		16.216.465.300,00
	mutasi keluar aset tanah kabupaten ke PUPR		257.442.000,00	(257.442.000,00)
	mutasi masuk aset tetap tenda dari Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan masa manfaat		4.297.828,45	(4.297.828,45)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	mutasi masuk Peralatan dan Mesin/ tenda dari Dinas Pariwisata	14.984.615,00		14.984.615,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	koreksi lebih catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat		850.004,55	(850.004,55)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	mutasi masuk Peralatan dan Mesin/ tenda dari Dinas Koperasi dan UMKM	14.920.000,00		14.920.000,00
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat aset		10.974.255,34	(10.974.255,34)
	Koreksi atas Ekstrakom sebelum Tahun 2025 yang dimasukkan sebagai Nilai Perolehan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		7.628.986.290,54	(7.628.986.290,54)
	Untuk Mengeluarkan Akumulasi Penyusutan aset tetap - Peralatan dan Mesin yang telah tercatat pada Neraca tahun-tahun sebelumnya	7.628.669.751,54		7.628.669.751,54
	Untuk Mengeluarkan Akumulasi Penyusutan aset tetap - Gedung dan Bangunan yang telah tercatat pada Neraca tahun-tahun sebelumnya	175.610.771,00		175.610.771,00
	Koreksi atas Ekstrakom Tahun-tahun sebelum Tahun 2025 yang dimasukkan sebagai Nilai Perolehan Aset Tetap - Jalan Jaringan dan Irigasi		682.215.650,60	(682.215.650,60)
	Koreksi atas Ekstrakom sebelum Tahun 2025 yang dimasukkan sebagai Nilai Perolehan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		1.035.851.224,00	(1.035.851.224,00)
	Untuk Mengeluarkan Akumulasi Penyusutan aset tetap - Jalan Jaringan dan Irigasi yang telah tercatat pada Neraca tahun-tahun sebelumnya	313.875.245,60		313.875.245,60
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/tenda dari Dinas Pariwisata	14.984.615,00		14.984.615,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Pariwisata	14.984.615,00		14.984.615,00
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat		29.981.783,35	(29.981.783,35)
	koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena pembulatan		0,01	(0,01)
Inspektorat	mutasi masuk aset tetap tenda dari Dinas Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap karena kekeliruan penetapan masa manfaat		4.715.441,02	(4.715.441,02)
	koreksi lebih catat akumulasi penyusutan aset tetap karena kekeliruan penetapan masa manfaat	1.955.468,00		1.955.468,00
Kecamatan Woha	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena kesalahan penetapan masa manfaat aset tetap		7.587.716,67	(7.587.716,67)
Kecamatan Belo	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap karena kesalahan perhitungan kapitalisasi Bangunan Tempat Kerja		28.524.875,67	(28.524.875,67)
Kecamatan Wawo	koreksi lebih catat akumulasi penyusutan kekeliruan masa manfaat		321.975,89	(321.975,89)
Kecamatan Lambitu	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap Bangunan Tempat Kerja akibat kapitalisasi aset tetap		29.388.792,67	(29.388.792,67)
Kecamatan Sape	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat		261.307,78	(261.307,78)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
	koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena kesalahan perhitungan kapitalisasi	22.055.532,00		22.055.532,00
Kecamatan Wera	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan personal komputer karena kekeliruan penetapan masa manfaat		293.170,00	(293.170,00)
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan Bangunan Tempat Kerja Rp. 67.683.718 dan Rumah Negara Gol III Rp. 17.916,33 karena kekeliruan penetapan masa manfaat		67.701.634,33	(67.701.634,33)
Kecamatan Donggo	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap personal komputer karena kekeliruan masa manfaat		2.369.810,22	(2.369.810,22)
Kecamatan Sanggar	koreksi lebih catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat		277.777,78	(277.777,78)
Kecamatan Langgudu	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan personal komputer karena kekeliruan penetapan masa manfaat		293.168,00	(293.168,00)
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan Bangunan Tempat Kerja karena kesalahan perhitungan kapitalisasi aset		57.205.502,17	(57.205.502,17)
Kecamatan Lambu	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan personal komputer Rp. 316.669,33 dan Peralatan Personal Komputer Rp. 125.000 karena kekeliruan penetapan masa manfaat		441.669,33	(441.669,33)
	koreksi kurang catat akumulasi Bangunan Tempat Kerja karena kekeliruan perhitungan kapitalisasi aset tetap		97.688.487,33	(97.688.487,33)
Kecamatan Madapangga	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap karena kekeliruan masa manfaat pada personal komputer		600.005,00	(600.005,00)
Kecamatan Tambora	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin karena kekeliruan penetapan masa manfaat personal komputer		515.906,00	(515.906,00)
	koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena kesalahan perhitungan kapitalisasi aset Bangunan Tempat Kerja		56.300.444,00	(56.300.444,00)
Kecamatan Parado	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan/ bangunan rumah negara karena kesalahan perhitungan kapitalisasi aset tetap		4.801.413,93	(4.801.413,93)
Kecamatan Palibelo	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan personal komputer karena kekeliruan masa manfaat		505.668,66	(505.668,66)
	koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan Bangunan Tempat Kerja karena kapitalisasi aset tetap		22.055.532,00	(22.055.532,00)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	masuk aset tetap peralatan dan mesin/ tenda dari Dinas Perindag	14.983.833,00		14.983.833,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	mutasi masuk Peralatan dan Mesin/tenda dari Dinas Pariwisata	14.984.615,00		14.984.615,00
Jumlah		29.114.862.492,12	20.644.230.103,05	8.470.632.389,07
ASET LAINNYA				
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Koreksi lebih catat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud karena kesalahan penetapan masa manfaat	9.000.966,67		9.000.966,67
Sekretariat Daerah	Koreksi lebih catat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud karena kesalahan penetapan masa manfaat	9.944.166,34		9.944.166,34





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	koreksi atas lebih catat amortisasi aset tak berwujud karena kekeliruan penetapan masa manfaat	4.995.000,00		4.995.000,00
	koreksi lebih catat Tagihan Penjualan Rumah Dinas atas nama Drs. H. Usman Umar karena kesalahan penetapan harga lelang rumah dinas golongan III		202.152.000,00	(202.152.000,00)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	koreksi atas kurang catat amortisasi aset tak berwujud karena kekeliruan penetapan masa manfaat		14.836.334,33	(14.836.334,33)
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	koreksi atas kurang catat karena kekeliruan penetapan masa manfaat		11.534.750,00	(11.534.750,00)
Jumlah		23.940.133,01	228.523.084,33	(204.582.951,32)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Sekretariat Daerah	Koreksi untuk mengurangi nilai Utang PFK yang sudah kadaluarsa (sejak tahun 2014)	62.073.525,00		62.073.525,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koreksi untuk mengurangi nilai Utang PFK yang sudah kadaluarsa (sejak tahun 2014)	145.606.322,00		145.606.322,00
Jumlah		207.679.847,00		207.679.847,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	747.738.222.570,33		747.946.742.592,00
	Mutasi tambah saldo kas/ silpa BOS (akun RK PPKD)	229.836.021,67		
	Koreksi kurang catat temuan BPK atas kekurangan volume pekerjaan		21.316.000,00	
Dinas Kesehatan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	238.610.590.996,77		237.683.385.990,00
	Mutasi tambah saldo kas/ silpa BLUD dari saldo kas/silpa tahun sebelumnya (akun RK PPKD)	693.689.891,20		
	Mutasi kurang saldo kas/ silpa BLUD dari saldo kas/silpa tahun sebelumnya (akun RK PPKD)		1.337.116.619,97	
	Mutasi tambah saldo Kas BOK dari tahun sebelumnya (akun RK PPKD)		283.778.278,00	
Rumah Sakit Umum Daerah	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	36.563.178.414,19		38.018.812.143,00
	Mutasi tambah kas/ silpa BLUD dari tahun sebelumnya (akun RK PPKD)	1.455.633.728,81		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	117.337.581.295,00		117.337.581.295,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	18.194.821.336,00		18.194.821.336,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	6.083.815.712,00		6.083.815.712,00
Dinas Pemadam Kebakaran	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.996.729.989,00		5.996.729.989,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	16.785.355.275,00		16.785.355.275,00
Dinas Sosial	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	6.197.169.462,00		6.197.169.462,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	8.640.860.197,00		8.640.860.197,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	21.135.518.463,00		21.135.518.463,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
Dinas Ketahanan Pangan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	4.678.002.543,00		4.678.002.543,00
Dinas Lingkungan Hidup	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	10.555.510.767,00		10.555.510.767,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	6.118.223.477,00		6.118.223.477,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	6.172.209.157,00		6.172.209.157,00
Dinas Perhubungan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	16.772.248.035,00		16.772.248.035,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.804.366.049,00		5.804.366.049,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	4.021.616.546,00		4.021.616.546,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	3.979.620.939,00		3.979.620.939,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	3.909.301.041,00		3.909.301.041,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	10.504.113.621,00		10.504.113.621,00
Dinas Pariwisata	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.101.785.268,00		7.101.785.268,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	68.613.601.749,00		68.613.601.749,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	17.720.713.740,00		17.690.188.740,00
	Penyetoran kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 (Jurnal menggunakan akun RK PPKD)		31.400.000,00	
	Koreksi atas Pendapatan tahun 2025 yang disetor 5 Januari 2026 (akun RK PPKD)	875.000,00		
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	6.923.109.075,00		6.923.109.075,00
Sekretariat Daerah	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	45.846.072.754,00		45.801.372.754,00
	Penyetoran kas di Bendahara Penerimaan atas pendapatan tahun 2024 yang disetor tahun 2025		49.700.000,00	
	Setoran atas utang PFK a.n. Kamaluddin yang dicatat juga sebagai TGR di PPKD)	5.000.000,00		
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	47.064.218.457,00		47.064.218.457,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	9.834.320.672,00		9.839.528.588,00
	Saldo kas atas belanja pegawai yang double SP2D (akun RK PPKD)	5.207.916,00		
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		1.558.444.738.260,81	(1.530.620.557.272,09)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mutasi tambah saldo kas/ silpa BUD dari saldo kas/silpa tahun sebelumnya (akun RK PPKD)	27.829.180.988,72		
	Setoran atas utang PFK a.n. Kamaluddin/ Setda yang dicatat juga sebagai TGR, utang PFK tercatat di Setda		5.000.000,00	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		29.848.969.894,91	(29.848.969.894,91)
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	6.057.324.652,00		6.057.324.652,00
Inspektorat	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	16.691.526.283,00		16.691.526.283,00
Kecamatan Monta	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.834.806.190,00		1.834.806.190,00
Kecamatan Bolo	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2.388.997.381,00		2.388.997.381,00
Kecamatan Woha	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2.341.886.619,00		2.341.886.619,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah	Keterangan	Tambah	Kurang	Jumlah
Kecamatan Belo	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.430.659.782,00		1.430.659.782,00
Kecamatan Wawo	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.573.998.921,00		1.573.998.921,00
Kecamatan Lambitu	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.246.629.259,00		1.246.629.259,00
Kecamatan Sape	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.697.510.136,00		1.697.510.136,00
Kecamatan Wera	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.709.700.353,00		1.709.700.353,00
Kecamatan Donggo	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.586.488.564,00		1.586.488.564,00
Kecamatan Sanggar	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2.203.882.111,00		2.203.882.111,00
Kecamatan Ambalawi	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.772.413.832,00		1.772.413.832,00
Kecamatan Langgudu	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.841.540.310,00		1.841.540.310,00
Kecamatan Lambu	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2.022.643.245,00		2.022.643.245,00
Kecamatan Madapangga	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2.503.629.013,00		2.503.629.013,00
Kecamatan Tambora	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.958.777.202,00		1.958.777.202,00
Kecamatan Soromandi	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.645.436.857,00		1.645.436.857,00
Kecamatan Parado	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.525.889.009,00		1.525.889.009,00
Kecamatan Palibelo	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	1.657.692.511,00		1.657.692.511,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	4.620.600.541,00		2.727.349.305,00
	Penyetoran ke Kasda atas saldo dana hibah Kegiatan Pemilihan di KPU senilai Rp888.569.833,00 pada tanggal 9 April 2025 no STS 160/KU.03.2-SD/520611/2025 (akun RK PPKD)		888.569.833,00	
	Penyetoran ke Kasda atas Sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan di Bawaslu senilai Rp1.004.681.403,00 pada tanggal 27 Maret 2025 (akun RK PPKD)		1.004.681.403,00	
Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	369.847.600,00		369.847.600,00
Jumlah		1.589.804.181.517,69	1.591.915.270.289,69	(2.111.088.772,00)
		Total		3.684.982.431,68

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kewajiban Jangka Panjang terjadi karena :

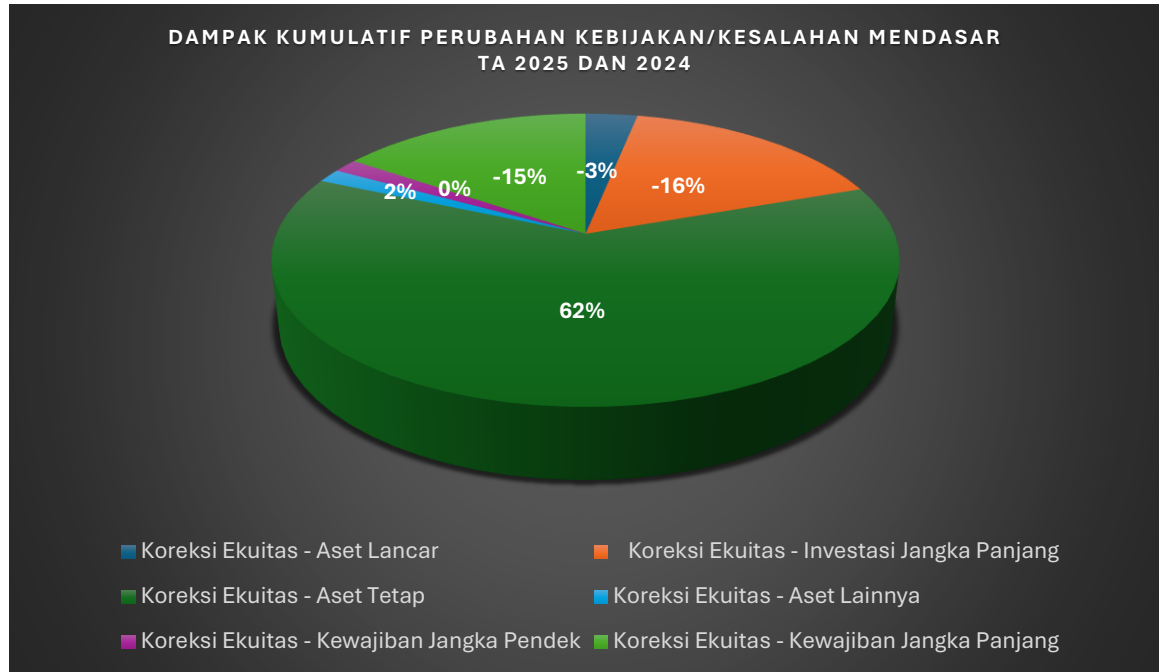
- adanya akun respirocal yang hanya dicatat di SKPD (RK PPKD), sedangkan di SKPKD tidak dilakukan pencatatan sehingga timbul selisih;
- Pemerintah Kabupaten Bima belum menggunakan SIPD secara keseluruhan dalam menyusun laporan keuangan, tapi masih dibantu kertas kerja manual. Pencatatan dengan kertas kerja manual tidak terbentuk secara otomatis seperti halnya di SIPD, tapi membutuhkan penyesuaian yang memungkinkan timbulnya selisih.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.273
Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Ekuitas Akhir	3.001.555.288.310,89	2.956.074.627.448,94

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *poin 5.3.3*.



**BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Berikut ini merupakan penjelasan dari peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memberikan informasi tambahan atas kondisi yang sudah ada pada akhir periode Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Informasi BLUD yang telah di audit dan yang belum di audit diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 6.1
Informasi BLUD Yang Telah Di Audit dan Yang Belum Di Audit**

BLUD	Tahun 2025
RSUD Bima	Telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan. Laporan Hasil Audit Nomor: 00062/2.0938/AU.5/11/0789-6/1/IV/2026 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Sementara Laporan Keuangan RSUD Sondosia dan 21 (dua puluh satu) Puskesmas belum di audit oleh Kantor Akuntan Publik.
RSUD Sondosia	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Belo	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Bolo	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Langgudu	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Langgudu Timur	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Madapangga	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Monta	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Ngali	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Pai	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Palibelo	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Sanggar	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Sape	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Wawo	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Wera	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Woha	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Tambora	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Ambalawi	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Parado	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Donggo	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Lambu	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Soromandi	Belum di audit oleh KAP
Puskesmas Lambitu	Belum di audit oleh KAP



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- 2) Informasi BUMD yang telah di audit dan yang belum di audit diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.2
Informasi BLUD Yang Telah Di Audit dan Yang Belum Di Audit

BUMD	Tahun 2025
PT. Bank NTB Syariah	Telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadi Winata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. Laporan Hasil Audit Nomor: 00214/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
PT. Jamkrida	Telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadi Winata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. Laporan Hasil Audit Nomor: 00214/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
PD. BPR NTB	telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Razikun Tarkosunaryo. Laporan Hasil Audit Nomor: 00013/3.0499/AU.88/07/1198-1/1/IV/2026 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian.
PT. DSM	Belum di audit oleh KAP
PT. DUM	Belum di audit oleh KAP
PT. Bank Pesisir Akbar	Belum di audit oleh KAP
Perumda BKS	Belum di audit oleh KAP
PDAM	Belum di audit oleh KAP

- 3) Audit Investigasi terhadap PT. DUM dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bima berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor: 700/10/05/2026 dan informasi mengenai PT. DUM tidak beroperasi sejak bulan Januari 2024.
- 4) Pendapatan BLUD yang diperoleh dari klaim BPJS Kesehatan pada bulan pelayanan 2025 yang diterbitkan Berita Acara pada tahun 2026, antara lain sebagai berikut:

Tabel 6.3
Nama-Nama BLUD

OPD	Bulan Pelayanan Tahun 2025	Penetapan Tahun 2026	Jatuh Tempo Tahun 2026
RSUD Bima	Desember	06/04/2026	20/04/2026
Puskesmas Sape	Oktober	10/04/2026	22/04/2026
Puskesmas Sape	Oktober	10/04/2026	22/04/2026
Puskesmas Sape	Oktober	10/04/2026	22/04/2026
Puskesmas Sape	Oktober	10/04/2026	22/04/2026
Puskesmas Sape	Oktober	10/04/2026	22/04/2026
Puskesmas Sape	Oktober	10/04/2026	22/04/2026
Puskesmas Sape	Desember	02/04/2026	21/04/2026
Puskesmas Sape	Desember	02/04/2026	21/04/2026
Puskesmas Sape	Desember	02/04/2026	21/04/2026
Puskesmas Sape	Desember	02/04/2026	21/04/2026





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

5) Gugatan sengketa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.4
Daftar Gugatan Sengketa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima

OPD	Uraian	Luas(m2)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
Puskesmas Madapangga	Tanah Bangunan Puskesmas	4.787,00	31/12/1990	1.311.000.000,00
Puskesmas Ambalawi	Tanah Bangunan Puskesmas	8.000,00	31/12/1990	336.000.000,00
Eks Puskesmas Pembantu Rite	Tanah Bangunan Puskesmas	475,00	13/10/2010	2.375.000,00
Puskesmas Pembantu Belo	Tanah Bangunan Puskesmas	467,00	09/11/2010	16.812.000,00
Sekolah Dasar Negeri O'o	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	6.830,00	31/12/1976	47.500.000,00
Sekolah Dasar Negeri 2 Ntoggu	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2.280,00	05/09/1996	16.302.000,00
Sekolah Dasar Negeri Stampa Lawa	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2.971,36	31/12/1980	410.714.286,00
Sekolah Dasar Negeri Taloko	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	5.675,00	31/12/1962	56.750.000,00
Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Renda	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	8.000,00	31/12/1983	327.645.500,00
Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Ngali	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4.300,00	31/12/1982	379.379.000,00
Sekolah Dasar Negeri Inpres Nggembe	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	5.777,00	31/12/1977	155.979.000,00
Sekolah Dasar Negeri Inpres Ncera	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.014,00	31/12/1980	317.298.800,00
Sekolah Dasar Negeri Sondosia	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	3.249,00	31/12/1923	1.947.456.000,00
SMP Negeri 5 Palibelo	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	7.083,00	31/12/2011	141.660.000,00
SMP NEGERI 5 Wera	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	5.015,00	21/12/2022	218.000.000,00
SMP NEGERI 2 Lambu	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	17.673,00	31/12/2000	731.445.000,00
UPT Dikpora Woha	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	665,00	31/12/1998	500.000.000,00
Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Wera	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4.632,00	31/12/2016	11.100.000,00
Jalan Naik BBA Doro Belo	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	23.100,00	31/12/2015	571.024.500,00
Losmen Komodo	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	2.411,00	31/12/1983	602.750.000,00
Total				8.101.191.086,00

6) Informasi saldo deposit pajak pada sistem coretax

Saldo Deposit Pajak senilai Rp8.226.557.124,00 per 31 Desember 2025 yang tersaji merupakan saldo deposit pajak pada sistem Coretax yang berasal dari mekanisme pungutan bendahara. Deposit tersebut timbul karena adanya setoran atau pembayaran pajak yang telah dilakukan dan tercatat dalam sistem perpajakan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum seluruhnya dilakukan pemindahbukuan maupun pengkreditan terhadap kewajiban pajak terkait. Saldo deposit pajak tersebut masih disajikan sebagai bagian dari Utang PFK karena secara substansi ekonomis masih merupakan kewajiban Bendahara untuk penyelesaian kewajiban perpajakan di periode berikutnya, karena secara administratif kewajiban





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

perpajakan tersebut belum dinyatakan selesai atau belum dilakukan kompensasi secara resmi pada sistem Coretax.

Penyajian tersebut dilakukan untuk mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dimana Bendahara Pengeluaran masih memiliki hak atas deposit pajak dimaksud sekaligus masih memiliki kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan secara formal. Rincian Saldo Deposit Pajak Per 31 Desember 2025 pada masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada *Lampiran XI*.

6.2 Hal-hal lainnya

1) *Mandatory Spending* Kabupaten Bima Tahun 2025

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 dalam rangka pemenuhan *Mandatory Spending* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5
Alokasi Anggaran *Mandatory Spending*
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2025

URAIAN	ABPDP TA 2025 APBD	
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
FUNGSI PENDIDIKAN		
Urusan Bidang Pendidikan	758.606.523.200,14	744.556.670.870,33
1) Belanja Operasi	694.830.932.807,14	685.775.434.342,33
2) Belanja Modal	63.775.590.393,00	58.781.236.528,00
Urusan Bidang Kebudayaan	1.686.101.000,00	2.529.956.500,00
1) Belanja Operasi	1.433.601.000,00	2.277.606.500,00
2) Belanja Modal	252.500.000,00	252.350.000,00
Urusan Bidang Perpustakaan	4.109.532.814,00	3.857.141.541,00
1) Belanja Operasi	3.924.532.814	3.672.454.541,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	ABPDP TA 2025 APBDP	
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
2) Belanja Modal	185.000.000	184.687.000,00
Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.621.554.200,00	1.760.095.200,00
1) Belanja Operasi	2.172.656.000,00	1.311.197.000,00
2) Belanja Modal	448.898.200,00	448.898.200,00
Jumlah Fungsi Pendidikan	767.023.711.214,14	752.703.864.111,33
Total Belanja Daerah	2.120.341.439.656,96	2.032.136.514.517,19
Rasio Anggaran Pendidikan	36,17%	37,04%
FUNGSI KESEHATAN		
Urusan Bidang Kesehatan	434.380.001.694,02	418.720.663.989,86
1) Belanja Operasi	394.599.289.423,02	386.866.271.152,86
2) Belanja Modal	39.780.712.271,00	31.854.392.837,00
Urusan pada Sub Kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan	0,00	0,00
1) Belanja Transfer	0,00	0,00
a. Belanja Pegawai	0,00	0,00
b. Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
c. Belanja Hibah	0,00	0,00
d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
2) Sub kegiatan Pada Perangkat Daerah	0,00	0,00
Jumlah Fungsi Kesehatan	434.380.001.694,02	418.720.663.989,86
Total Belanja Daerah	2.120.341.439.656,96	2.032.136.514.517,19
Gaji ASN	736.390.572.231,30	726.694.134.210,60
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	1.383.950.867.425,66	1.305.442.380.306,59
Rasio Anggaran Kesehatan	31,39%	32,08%
BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK		
1. Total Belanja Daerah	2.120.341.439.656,96	2.032.136.514.517,19
2. Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa		
a. Belanja Bagi Hasil	5.750.828.136,30	4.461.882.960,00
b. Bantuan Keuangan	307.866.618.820,00	127.482.324.414,00
Jumlah (a+b)	313.617.446.956,30	131.944.207.374,00
Selisih (1-2)	1.806.723.992.700,66	1.900.192.307.143,19
Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	722.689.597.080,26	760.076.922.857,28
1. Belanja Modal	181.580.744.245,80	163.400.626.644,00
1) Tanah	276.500.000,00	273.738.000,00
2) Peralatan dan Mesin	39.525.733.415,80	36.409.075.917,00
3) Gedung dan Bangunan	80.385.336.167,00	69.983.660.311,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.730.804.468,00	49.141.375.675,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	ABPDP TA 2025 APBDP	
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
5) Aset Tetap Lainnya	7.662.370.195,00	7.592.776.741,00
6) Aset Lainnya	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	4.961.546.800,00	4.563.355.537,00
2. *Belanja Hibah	31.499.210.000,00	30.118.644.715,00
*Belanja Bantuan Sosial	451.000.000,00	451.000.000,00
*Belanja Bantuan Keuangan	307.866.618.820,00	127.482.324.414,00
3. Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	526.359.119.865,80	326.015.951.310,00
Rasio Anggaran Infrastruktur	29,13%	17,16

2) Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.6
Rincian PPPK Paruh Waktu Pada Masing-Masing Instansi

INSTANSI	JUMLAH PPPK PW (Orang)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KAB. BIMA	6
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	59
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	15
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	706
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	71
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	62
DINAS KESEHATAN	229
DINAS KETAHANAN PANGAN	17
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	11
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	14
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	94
DINAS PARIWISATA	26
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	129
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	402
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16
DINAS PERHUBUNGAN	163
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	106
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	55
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	476





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

INSTANSI	JUMLAH PPPK PW (Orang)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	43
DINAS SOSIAL	63
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	39
INSPEKTORAT	9
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	588
SEKRETARIAT DAERAH	69
SEKRETARIAT DPRD	38
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	84
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	122
RSUD BIMA	223
RSUD SONDOSIA	122
KORWIL DIKPORA	296
TEKNIS SEKOLAH	1012
GURU	6.995
KANTOR CAMAT	409
PUSKESMAS	1118
Total	13.968

- 3) Aset Pemerintah Kabupaten Bima berupa pasar yang berlokasi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, pada tahun 2025 belum bisa dikenakan tarif retribusi karena belum adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Kabupaten Bima.
- 4) Beberapa hal yang perlu kami informasikan terkait kegiatan pada beberapa SKPD yang sempat menjadi perhatian APH (Aparat Penegak Hukum), dimana permasalahan tersebut diperoleh dari media massa. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut.
 - a. Kejaksaan Negeri Bima saat ini sedang menelusuri penyalahgunaan Belanja untuk kegiatan pikir pada DPRD. Saat ini prosesnya masih dalam tahap pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan;
 - b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB menetapkan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Disdikbudpora Kabupaten Bima atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan pungli terhadap guru SD penerima tunjangan khusus daerah terpencil di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima;
 - c. Kejaksaan Negeri Bima saat ini sedang menindaklanjuti penyelidikan awal terkait dugaan penggelapan puluhan unit alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor tangan bantuan Kementerian Pertanian RI tahun 2025. Saat ini prosesnya masih dalam tahap pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan; dan
 - d. Kejaksanaan Negeri Bima saat ini sedang menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan proyek timbunan rumah dinas Bupati (Bima). Saat ini masih dalam tahap pengusutan.





BAB VII
P E N U T U P

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima TA 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima TA 2025 secara keseluruhan.

